WALI KOTA MADIUN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Tahun 2025-2029



PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025

SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 130);

Dengan Persetujuan
Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistemik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dasar hukum perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
14. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keuutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat:
    a. tujuan;
    b. sasaran;
    c. strategi;
    d. arah kebijakan;
    e. pembangunan Daerah dan keuangan Daerah; dan
    f. program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada:
        1. RPJPD;
        2. RTRW; dan
        3. RPJMN.
(2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan secara:
    a. transparan;
    b. responsif;
    c. efisien;
    d. efektif;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

e. akuntabel;
f. partisipatif;
g. terukur;
h. berkeadilan;
i. berwawasan lingkungan; dan
j. berkelanjutan.

(3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendekatan:
a. teknokratik;
b. partisipatif;
c. politis;
d. atas-bawah dan bawah-atas;
e. holistik-tematik;
f. integratif; dan
g. spasial.

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD meliputi:
a. Bab I berisi tentang Pendahuluan;
b. Bab II berisi tentang Gambaran Umum Daerah;
c. Bab III berisi tentang Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. Bab IV berisi tentang Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e. Bab V berisi tentang Penutup.

(2) Penjabaran dan uraian lebih lanjut terkait Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) RPJMD disusun sebagai pedoman dalam:
a. penyusunan Renstra PD;
b. penyusunan RKPD; dan
c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Selain sebagai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPJMD sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.
(3) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD bersifat indikatif.
(4) Perubahan atas target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD dituangkan dalam RKPD.

Pasal 5

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.
(2) RPJMD berlaku sampai dengan Tahun 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 9/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 174-9/2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil Pembangunan Daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Sebagai salah satu instrumen manajemen Pembangunan Daerah, keberadaan RPJMD merupakan arahan umum pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Daerah yang lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep Pembangunan Daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk Pemerintah Daerah dan perangkat Daerah. Dokumen RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD, selanjutnya dioperasionalkan dalam RKPD dan Renja PD.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Daerah berkewajiban untuk segera menyusun RPJMD, mulai dari Rancangan Teknokratik RPJMD, di mana sebagian substansinya menjadi masukan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan menjamin kesinambungan Pembangunan Daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Mengingat perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan antara RPJMD Kota Madiun, Provinsi, dan Nasional Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah Daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategi*, logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Ayat (3)

Huruf a

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Huruf b

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Huruf c

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Huruf d

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan Daerah.

Huruf e

Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf f

Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Huruf g

Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

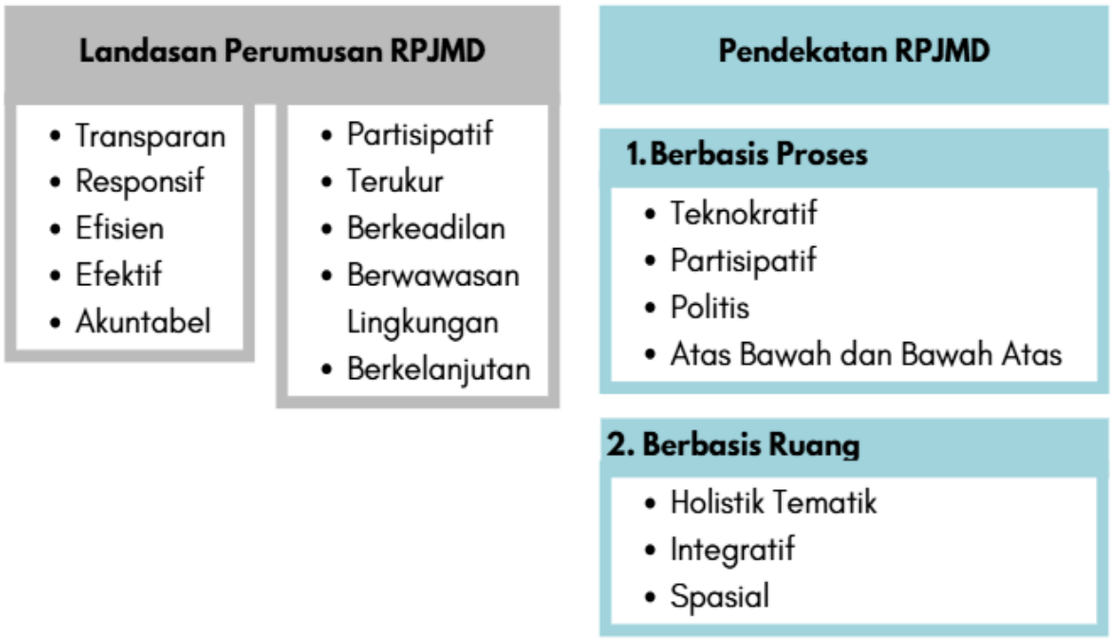
1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah terpilih diwajibkan untuk menyusun dokumen RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan arah kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun tahun 2025-2029, Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd. dan F. Bagus Panuntun yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2025-2030, setelah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 20 Februari 2025 sebagai tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen RPJMD juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berperan penting dalam merumuskan arah kebijakan yang terukur dan berorientasi pada kebutuhan daerah. Dalam konteks Kota Madiun, RPJMD menjadi salah satu dokumen utama yang disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD berbasis proses dan berbasis ruang. Berbasis proses mencakup teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, dan holistik. Berbasis ruang meliputi holistik tematik, integratif, dan spasial. Masing-masing landasan dan pendekatan dalam penyusunan RPJMD lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 1. 1 Landasan Perumusan dan Pendekatan RPJMD
Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Landasan perumusan RPJMD terdiri dari 10 landasan yaitu:

1. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
2. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah;
3. Efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan (*input*) terendah untuk mencapai keluaran (*output*) maksimal;
4. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal;
5. Akuntabel menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
6. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan terpinggirkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
7. Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia;
9. Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan;
10. Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Sedangkan pendekatan penyusunan RPJMD meliputi basis proses dan basis ruang yang akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Berbasis Proses

1. Pendekatan Teknokratik

   Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

2. Pendekatan Partisipatif

   Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

3. Pendekatan Politis

   Pendekatan Politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD

4. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas

   Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, Kecamatan, dan daerah Kota Madiun.

B. Berbasis Ruang

1. Pendekatan Holistik-Tematik

   Pendekatan Holistik-Tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Pendekatan Integratif

   Pendekatan Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3. Pendekatan Spasial

   Pendekatan Spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sesuai dengan landasan penyusunan dan pendekatan RPJMD di atas, RPJMD Kota Madiun 2025-2029 merupakan implementasi dari sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045. Dokumen ini dirancang untuk menjembatani visi jangka panjang dengan kebutuhan pembangunan jangka menengah, sambil memastikan kesinambungan dengan kebijakan nasional. Penyusunan dokumen ini mengacu pada ketentuan Pasal 27 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, dan penyusunan perubahan dokumen perencanaan.



Gambar 1. 2 Nilai Strategis RPJMD
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dokumen RPJMD memiliki enam nilai strategis yang menjelaskan berbagai fungsi utama dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah selama lima tahun. Pertama, dokumen ini menjadi media untuk merealisasikan janji-janji Kepala Daerah yang telah disampaikan kepada masyarakat saat kampanye. Kedua, dokumen ini berfungsi sebagai pedoman strategis dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD). Ketiga, perencanaan ini juga memiliki dimensi politis, mengingat keberhasilan atau kegagalannya akan berdampak pada kredibilitas Kepala Daerah dan DPRD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selanjutnya, dokumen ini bertindak sebagai alat pengendalian dan pengawasan yang digunakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda. Kelima, dokumen ini menjadi pedoman evaluasi keberhasilan pemerintahan daerah sesuai amanat PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Terakhir, dokumen ini juga digunakan sebagai instrumen untuk mengukur capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama lima tahun. Keseluruhan fungsi ini menunjukkan betapa pentingnya dokumen perencanaan pembangunan dalam menjamin akuntabilitas dan keberhasilan pemerintahan daerah.

RPJMD Kota Madiun merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045. Berdasarkan hal tersebut, target dan tujuan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada target RPJPD Kota Madiun. Terdapat 12 sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Madiun sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas, pelayanan, dan jaminan kesehatan secara merata berstandar internasional;
2. Terwujudnya kualitas dan pemerataan pendidikan berstandar global ;
3. Terwujudnya ketahanan lingkungan, sosial, masyarakat yang berbudaya dan maju;
4. Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana yang berkelanjutan dalam mendorong pembangunan dan transformasi secara berkelanjutan;
5. Terwujudnya produktivitas daerah melalui kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berkelanjutan;
6. Terciptanya perekonomian hijau yang merata ;
7. Terwujudnya transformasi digital di berbagai bidang kehidupan ;
8. Terwujudnya integrasi ekonomi antar wilayah/kecamatan dengan regional dan nasional;
9. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan wilayah (UMKM, ekonomi kreatif dan digital, wisata perkotaan);
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang integratif, efisien, dan responsif berbasis *Smart-city;*
11. Terciptanya stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan Trantibumlinmas masyarakat; dan
12. Terciptanya stabilitas ekonomi makro daerah secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sejalan dengan sasaran pokok diatas, maka pembangunan selama 20 tahun kedepan harus fokus. Seluruh daerah otonom diharapkan dapat memfokuskan pada upaya pembangunan sesuai prioritas pemerintah pusat. Melalui konsep ini, pemerintah pusat memberikan arahan yang mengakomodasi keberagaman setiap daerah dan memastikan fokus pembangunan tersebut. Pemetaan sasaran pokok tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kota Madiun 2025-2029.

Dokumen RPJMD akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah diatur oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RPJMD menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target tahunan dalam RKPD, dan target Renstra diturunkan menjadi target tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk memastikan tercapainya target pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2029 dilandasi oleh berbagai peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127).
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123).

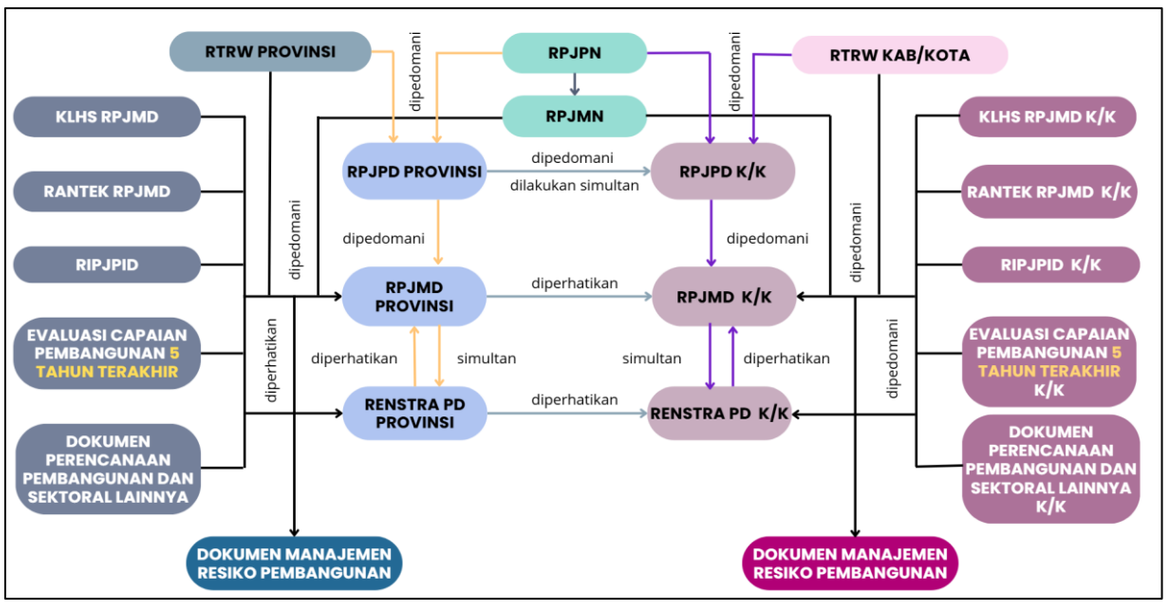
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 117);
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 130);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Madiun tahun 2025-2029 merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur. Penyusunannya mengacu pada RPJPD Kota Madiun 2025-2045, serta mempertimbangkan RPJP Nasional 2025-2045, RPJM Nasional 2025-2029, RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029. Secara keseluruhan, hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 1. 3 Keterkaitan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lain
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dokumen RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi dasar dan acuan dalam pembangunan agar bisa selaras dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. RPJMD Kota Madiun 2025-2029 memperhatikan pencapaian target nasional khususnya isu prioritas seperti Ekonomi, Peningkatan SDM, Penurunan Kemisikinan. Selain itu juga mendukung arah pembangunan regional dengan meningkatkan peran Kota Madiun sebagai simpul pertumbuhan di wilayah Jawa Timur bagian barat.

Selain berkaitan dengan dokumen perencaan RPJMD Kota Madiun 2025-2029 juga memperhatikan dokumen spasial nasional (RTRW Nasional dan provinsi (RTRW Provinsi Jawa Timur) mengenai pemanfaatan ruang jangka panjang. Beberapa Proyek Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Timur berada di Kota Madiun. Untuk itu RPJMD Kota Madiun 2025-2029 dalam pembangunannya perlu memperhatikan seperti penguatan ekonomi dan jaringan transportasi daerah guna mendukung Kota Madiun sebagai pusat pengembangan Kawasan Madiun Raya, selain itu juga mempersiapkan dukungan Transportasi terintegrasi guna mendukung rencana revitalisasi dan modernisasi Stasiun Madiun dengan pembangunan kereta cepat agar bisa diakses oleh masyarakat luas.

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dan Spasial sangat diperlukan agar perencanaan pembangunan bisa selaras dan serasi sehingga pembangunan bisa bermanfaat secara maksimal dan berkelanjutan. Hal ini juga akan membantu dalam pencapaian tujuan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2025–2029 sebagai :

1. Pedoman bagi penyusunan dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dokumen RKPD selama 5 Tahun.
2. Menyelaraskan dokumen RPJMD Kota Madiun dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mewujudkan visi Kota Madiun yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Maju Bersih Berwibawa Bersama Masyarakat Membangun Kota Mendunia” dengan mendukung pembangunan yang inklusif dan mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat juga memastikan keberlanjutan dari program yang dilaksanakan secara bertahap;
2. Menyediakan kerangka kerja strategis sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah;
3. Memastikan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan tingkat nasional dan provinsi guna menciptakan sinergitas dalam mendukung pembangunan jangka menengah provinsi maupun nasional;
4. Menggabungkan analisis data dan kajian ilmiah dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak lintas sektor, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang dapat dilaksanakan secara efisien, berfokus pada hasil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan gambaran keuangan daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

BAB III VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisikan uraian mengenai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bab ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen RPJMD Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

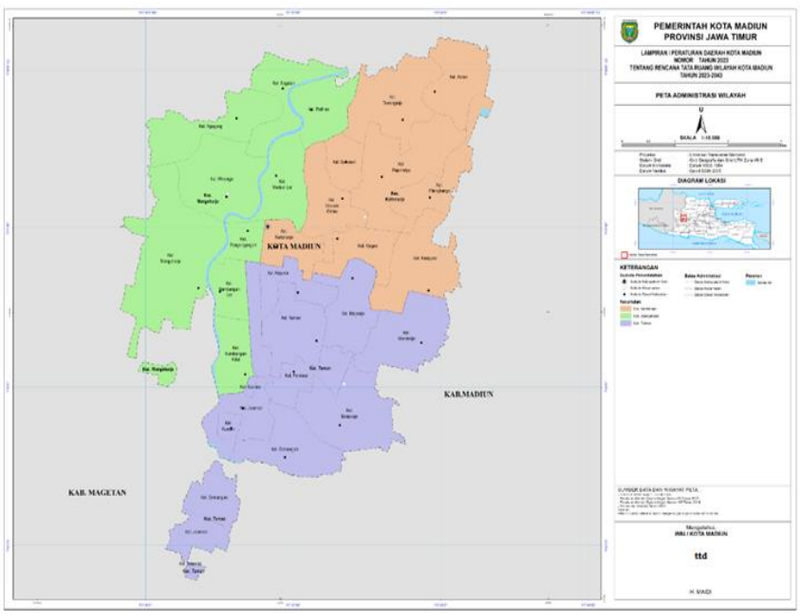
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa, Pemerintah Kota Madiun ditetapkan sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur.

Kota Madiun merupakan kota yang sangat penting di wilayah Jawa Timur bagian barat. Posisi Kota Madiun menjadikan kota tersebut sebagai pusat berbagai kepentingan seperti layanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Letak Kota Madiun sebagai kota transit yang cukup strategis karena kondisi topografi tanah yang datar, menjadikan Kota Madiun sebagai pilihan jalur transportasi yang mudah dilalui oleh bus maupun kereta api. Selain itu, Kota Madiun juga mendukung sebagai daerah *hinterland* karena memiliki potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.



Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kota Madiun
Sumber: RTRW Kota Madiun, 2023-2043

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Wilayah Kota Madiun berada di daerah dataran dengan bagian tengah terletak di ketinggian 63 meter dari permukaan laut, bagian selatan terletak di ketinggian 67 meter dari permukaan laut. Kota Madiun secara astronomis berada pada titik koordinat 7° 35' 43.690" LS - 7° 40' 49.826" LS dan 111° 29' 46.553" BT -111° 33'5.272" BT. Kota Madiun memiliki rentang temperatur udara di antara 20℃ hingga 35℃, dengan curah hujan di Kota Madiun rata-rata mencapai 320 mm per tahun. Kota Madiun memiliki luas wilayah 36,1 km^2. Berdasarkan luas tersebut, Kota Madiun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase (%)	Jarak ke Pusat Kota (Km)
1.	Manguharjo	12,48	34,57	2,9
2.	Taman	12,2	33,8	4,6
3.	Kartoharjo	11,42	31,36	3

Sumber : RTRW Kota Madiun, 2023-2043

Kota Madiun terdiri atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo, dengan total luas wilayah sekitar 36,1 km^2. Kecamatan Manguharjo memiliki luas wilayah terbesar yaitu 12,48 km^2 atau 34,57 persen dari total luas Kota Madiun, dengan jarak sekitar 2,9 km dari pusat kota. Selanjutnya, Kecamatan Taman memiliki luas wilayah 12,2 km^2 atau 33,8 persen dari total luas wilayah, dengan jarak 4,6 km dari pusat kota. Adapun Kecamatan Kartoharjo memiliki luas 11,42 km^2 atau 31,36 persen dari total luas Kota Madiun, dengan jarak sekitar 3 km dari pusat kota. Distribusi luas wilayah ini menunjukkan bahwa ketiga kecamatan relatif seimbang dalam proporsi, dengan posisi geografis yang berdekatan dengan pusat kota, sehingga mendukung keterpaduan dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Tabel 2. 2 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Kelurahan
1	2	3
1.	Taman	Banjarejo
		Demangan
		Josenan
		Kejuron
		Kuncen
		Manisrejo
		Mojorejo
		Pandean
		Taman
2.	Kartoharjo	Kanigoro
		Kartoharjo
		Kelun
		Klegen
		Oro-Oro Ombo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
		Pilangbango
		Rejomulyo
		Sukosari
		Tawangrejo
3.	Manguharjo	Madiun Lor
		Manguharjo
		Nambangan Kidul
		Nambangan Lor
		Ngengong
		Pangonganan
		Patihan
		Sogaten
		Winongo

Sumber: RTRW Kota Madiun, 2023-2043

Kota Madiun memiliki 3 kecamatan dengan masing-masing kecamatan terbagi ke dalam sembilan (9) kelurahan. Oleh karena itu, Kota Madiun secara keseluruhan memiliki 27 kelurahan di Kota Madiun. Wilayah Kota Madiun secara administratif hampir keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Madiun dan sebagian kecil oleh Kabupaten Magetan. Kota Madiun memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

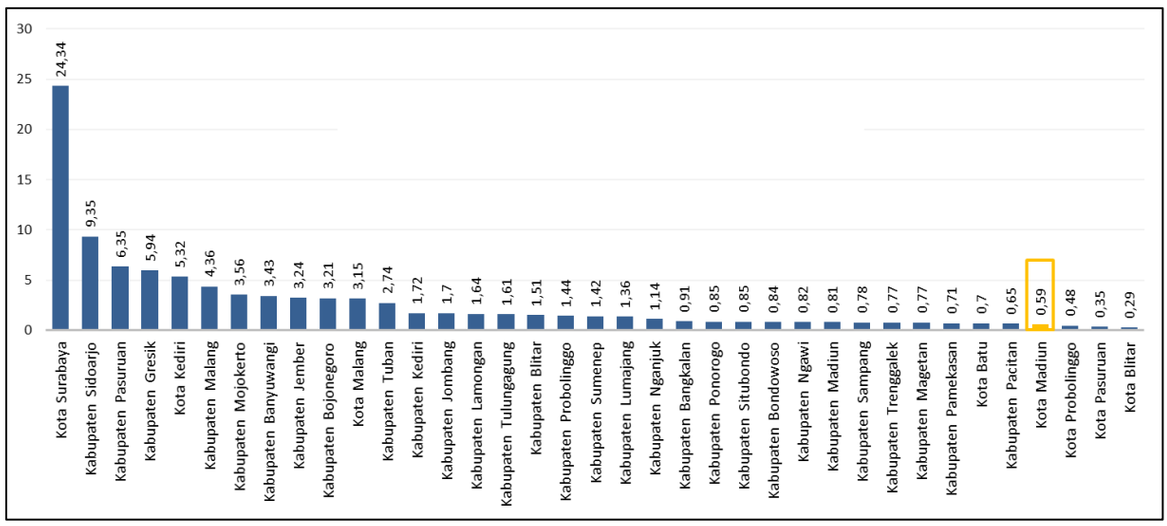
a. Sebelah utara: Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun
b. Sebelah selatan: Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
c. Sebelah timur: Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
d. Sebelah barat: Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

B. Kontribusi Ekonomi

Salah satu indikator kontribusi ekonomi dapat dilihat melalui distribusi persentase PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Kota Surabaya memegang peran dominan dengan persentase mencapai 24,34%, diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo yang menyumbang 9,35%, dan Kabupaten Pasuruan dengan 6,35%.

Distribusi PDRB Kota Madiun menunjukkan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur. Kota Madiun memiliki persentase sebesar 0,59%, yang terletak di antara kabupaten/kota dengan kontribusi lebih rendah. Meskipun kontribusinya kecil, Kota Madiun tetap berperan dalam perekonomian Jawa Timur, dengan sektor-sektor seperti industri kecil dan perdagangan menjadi penyumbang utama. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Madiun memiliki potensi untuk meningkatkan kontribusinya melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang ada, seiring dengan peningkatan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Kota Lainnya Tahun 2024
Sumber: BPS Jawa Timur, 2025

C. Kontribusi Infrastruktur

Potensi infrastruktur Kota Madiun dapat dilihat dari berbagai aspek penting, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu indikator yang penting adalah kondisi jalan, yang mencakup berbagai kategori seperti jalan dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Berdasarkan data yang ada, kondisi jalan di Kota Madiun mengalami peningkatan secara bertahap sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, kondisi jalan baik meningkat sedikit menjadi 413,1 km, sedangkan jalan dalam kondisi sedang juga sedikit meningkat menjadi 31,6 km. Tidak ada jalan yang tercatat rusak pada kategori rusak ringan, namun jalan rusak berat tercatat sebanyak 1,305 km. Total panjang jalan pada tahun 2020 tercatat 450,885 km.

Selama periode 2021 hingga 2024, terjadi peningkatan kondisi jalan baik, dengan angka yang tertinggi pada tahun 2021, yaitu 448,82 km. Namun, pada tahun 2022, panjang jalan rusak ringan meningkat menjadi 1,751 km, dan jalan rusak berat meningkat tajam pada tahun 2023 dengan 5,187 km. Pada tahun 2024, panjang jalan dalam kondisi baik sedikit menurun menjadi 409,945 km, dengan jalan rusak ringan mencapai 6,499 km, tetapi jalan rusak berat tidak tercatat. Total panjang jalan pada tahun 2024 tercatat 433,485 km, setara dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi, data ini menunjukkan bahwa kualitas jalan di Kota Madiun secara keseluruhan mengalami peningkatan, meskipun masih ada tantangan dalam mengurangi jalan yang rusak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain itu, Kota Madiun memiliki sejumlah potensi terkait dengan penyediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja infrastruktur adalah Indeks Infrastruktur, yang mencakup kualitas infrastruktur jalan beraspal, cakupan layanan air bersih perpipaan, dan cakupan layanan sanitasi aman bagi masyarakat.

Indeks Infrastruktur Kota Madiun terus mengalami peningkatan, dari 96,15 pada tahun 2020 menjadi 98,62 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Madiun semakin membaik, meliputi pengembangan jaringan listrik, penyediaan akses air minum yang layak, serta peningkatan fasilitas transportasi publik yang menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu target strategis adalah meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak. Meskipun masih terdapat tantangan berupa ketidakmerataan kualitas infrastruktur di beberapa wilayah, pemerintah Kota Madiun terus melakukan berbagai kebijakan dan program yang berfokus pada perluasan dan pemerataan layanan infrastruktur. Kontribusi infrastruktur strategis tersebut semakin memperkuat peran Kota Madiun sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), antara lain melalui keberadaan pusat depo perkeretaapian regional DAOP 7 yang menjadi simpul utama pelayanan transportasi kereta api di wilayah barat Jawa Timur dan sekitarnya, serta Terminal Tipe A Purboyo yang berfungsi sebagai simpul penting perlintasan transportasi darat Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Keberadaan infrastruktur strategis ini juga selaras dengan penetapan kebijakan kawasan strategis provinsi di Kota Madiun, sehingga memperkuat fungsi Kota Madiun sebagai pusat mobilitas regional, pusat pelayanan kegiatan sosial-ekonomi, serta motor penggerak pertumbuhan wilayah dalam sistem permukiman Provinsi Jawa Timur bagian barat.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Kota Madiun terutama berkaitan dengan sektor air, pertanian, dan keanekaragaman hayati. Kota Madiun memiliki sumber daya air terbatas, dengan tiga sungai utama: Sungai Catur, Sungai Semawur, dan Sungai Madiun, serta satu embung, yaitu Embung Pilangbango. Sungai Madiun menjadi yang terpenting dengan panjang 68,228 km dan debit 98,16 m3/detik. Keberadaan sumber daya air yang terbatas ini memerlukan pengelolaan yang efisien agar kualitas dan kuantitasnya tetap terjaga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam hal pertanian, Kota Madiun memiliki daya dukung yang cukup besar, meskipun hasil perhitungan daya dukung lahan pertanian menunjukkan bahwa Kota Madiun masih belum mampu melakukan swasembada pangan. Sebagian besar lahan pertanian digunakan untuk menanam padi dan komoditas lainnya, dengan jumlah yang masih terbilang cukup luas meskipun terjadi sedikit penurunan luas lahan pertanian dari tahun ke tahun.

Kota Madiun merupakan wilayah perkotaan dengan ciri penutup lahan berbasis kehidupan flora dan fauna yang tidak setinggi wilayah hutan. Hal ini mendukung analisis indikasi luasan terluas jasa ekosistem pendukung biodiversitas di Kota Madiun ada pada kelas rendah yaitu seluas 1.724,19 Ha atau 45,2 % dari luas Kota Madiun. Selain itu, jasa ekosistem ini pada kelas tinggi memiliki luas 1.408,45 Ha (36,9%). Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Madiun masih memiliki wilayah dengan tutupan lahan seperti kebun campuran dan sawah yang cukup luas sebagai tempat kehidupan bagi flora dan fauna. Sedangkan secara administratif, Kecamatan Kartoharjo mempunyai indikasi kinerja jasa ekosistem yang baik dengan adalah luasan wilayah pada kelas tinggi yang seluas 625,996 Ha atau 48,6% dari luas kecamatannya. Selain itu Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman, masing-masing memiliki luas wilayah pada kelas sedang yang cukup besar dimana berturut-turut adalah seluas 494,076 Ha (39,26%) dan 377,79 Ha (30,89%).

Keanekaragaman hayati juga menjadi salah satu potensi sumber daya alam Kota Madiun, meskipun secara keseluruhan daya dukung biodiversitas berada pada tingkat sedang. Sebagian besar potensi biodiversitas tersebar di wilayah yang memiliki tutupan lahan yang cukup baik, seperti di daerah pertanian yang subur. Pada tahun 2021, Kota Madiun memiliki nilai indeks 3,45 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 3,46.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Bersih

Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan tidak tergantikan dalam mendukung keberlangsungan kehidupan manusia serta pembangunan daerah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan sektor pertanian serta industri. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, kebutuhan terhadap air juga terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap daya dukung dan daya tampung air sebagai bahan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Analisis daya dukung dan daya tampung air dilakukan dengan pendekatan spasial dan kuantitatif, yaitu membandingkan antara ketersediaan air (*supply*) dan kebutuhan air (*demand*) di wilayah Kabupaten/Kota. Ketersediaan air dihitung berdasarkan limpasan permukaan yang dimodifikasi dengan koefisien limpasan dari berbagai jenis tata guna lahan, sedangkan kebutuhan air mencakup kebutuhan domestik (penduduk), pertanian, industri, dan peternakan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ketersediaan air di wilayah studi (dalam hal ini mengacu pada Kota Madiun sebagai representasi metode) pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 81,14 juta m^3/tahun, sedangkan total kebutuhan air diproyeksikan sebesar 16,50 juta m^3/tahun. Dengan demikian, status daya dukung air masih berada pada kategori “Belum Melampaui”, yang artinya kemampuan lingkungan dalam menyediakan air masih mencukupi untuk mendukung kebutuhan hidup dan kegiatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, kondisi ini tidak serta merta menjamin keberlanjutan jangka panjang. Ketersediaan air yang tinggi belum tentu seluruhnya dapat dimanfaatkan secara optimal karena dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik seperti jenis tanah, kemiringan lahan, dan kapasitas infiltrasi. Di sisi lain, tekanan terhadap sumber daya air dari sisi kebutuhan juga terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan konversi lahan resapan menjadi kawasan terbangun. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka dalam jangka panjang kondisi daya dukung air berpotensi mengalami penurunan.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia air bersih (P2) berkaitan dengan potensi penyedian sumber daya air bersih baik yang berasal dari air permukaan, air tanah maupun air hujan yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Potensi jasa ekosistem penyedia air bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah curah hujam, jenis tanah yang mampu menyimpan air, jenis tutupan lahan dan kerapatan vegetasi. Tutupan lahan berupa vegetasi memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyimpan air yang mana semakin rapat tutupan vegetasi, maka potensi jasa ekosistem penyedia air bersih menjadi semakin tinggi karena memungkinkan ekosistem untuk menyimpan cadangan air bersih dalam jumlah yang besar. Berikut adalah tabel yang menguraikan luasan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih per kecamatan di Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 3 Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Madiun

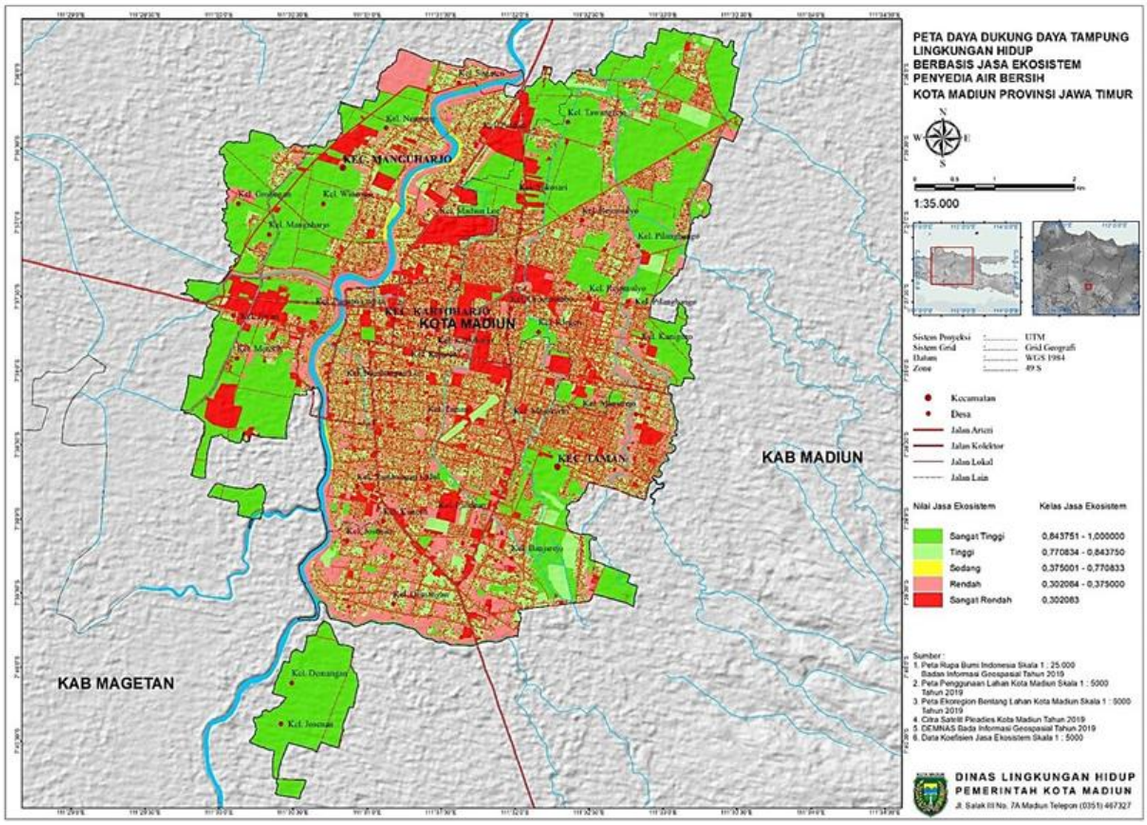
Kecamatan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (Ha)				
	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Total
Kartoharjo	18,536	877,096	392,182	0,002	1.287,82
Manguharjo	52,679	708.959	496,439	0,084	1.258,16
Taman	157,875	543,017	519,625	2,596	1.223,21
Total	229,09	2.129,07	1.408,25	2,782	3.613

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2025

Berdsarakan tabel diatas, Distribusi daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia air bersih di Kota Madiun menunjukkan bahwa ketersediaan ekosistem dengan kategori tinggi mendominasi di seluruh kecamatan, dengan luas total mencapai 2.129,07 Ha atau lebih dari separuh total wilayah terukur. Kondisi dengan kategori rendah juga cukup signifikan yaitu 1.408,25 Ha, sedangkan kategori sangat tinggi hanya 229,09 Ha dan kategori sangat rendah relatif kecil yakni 2,782 Ha. Jika dilihat per kecamatan, Kartoharjo memiliki luasan terbesar dalam kategori tinggi (877,096 Ha), Manguharjo menonjol dalam kategori rendah (496,439 Ha), sementara Taman mendominasi kategori sangat tinggi (157,875 Ha). Total keseluruhan luasan ekosistem penyedia air bersih yang teridentifikasi mencapai 3.613 Ha. Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa daya dukung lingkungan berbasis penyediaan air bersih di Kota Madiun masih relatif baik dengan dominasi kategori tinggi, meskipun masih terdapat area signifikan dalam kategori rendah yang perlu mendapat perhatian melalui upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan lingkungan yang lebih optimal agar ketersediaan air bersih dapat terjamin secara berkelanjutan.

Persebaran kelas jasa ekosistem penyedia air bersih di Kota Madiun apabila ditinjau berdasarkan spasial, dapat diidentifikasi bahwa secara umum pada bagian pusat memiliki kelas jasa ekosistem tinggi dan rendah yang tersebar merata di seluruh kecamatan. Sementara itu, kelas sangat tinggi tersebar di bagian selatan kota yang meliputi Kelurahan Demangan dan Kelurahan Josenan. Kelas sangat rendah memiliki sebaran yang sangat kecil dan tidak tampak secara kasat mata apabila ditinjau berdasarkan peta, sementara di Kota Madiun tidak terdapat kinerja jasa ekosistem penyedia air bersih kelas sedang. Berikut adalah peta yang menggambarkan persebaran kelas jasa ekosistem penyedia air bersih di Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 3 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Madiun

Sumber : KLHS RPJMD Kota Madiun, 2025-2029

Hasil Analisa KLHS RPJMD menunjukkan bahwa daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia air bersih di Kota Madiun menunjukkan bahwa ketersediaan ekosistem dengan kategori tinggi.

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Peningkatan jumlah penduduk Kota Madiun dari tahun ke tahun berdampak langsung terhadap kebutuhan pangan, terutama bahan pangan pokok seperti beras. Kondisi ini menuntut kemampuan wilayah dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian agar tetap mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu, analisis daya dukung dan daya tampung pangan menjadi sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Daya dukung pangan mengacu pada kemampuan wilayah dalam menyediakan bahan pangan (khususnya beras) bagi seluruh penduduknya melalui produksi lokal. Perhitungan daya dukung pangan dilakukan berdasarkan rasio antara kebutuhan fisik minimum masyarakat (480 kg/kapita/tahun) dengan luas panen dan produktivitas lahan per hektar. Indikator utamanya adalah nilai daya dukung lingkungan (τ), dengan kategori:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- τ < 1 menunjukkan status “Terlampaui”, artinya wilayah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri (belum swasembada).
- τ = 1 berarti daya dukung optimal.
- τ > 1 berarti wilayah mampu swasembada pangan (belum melampaui daya dukung).

Tabel 2. 4 Proyeksi Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun Tahun 2024-2029

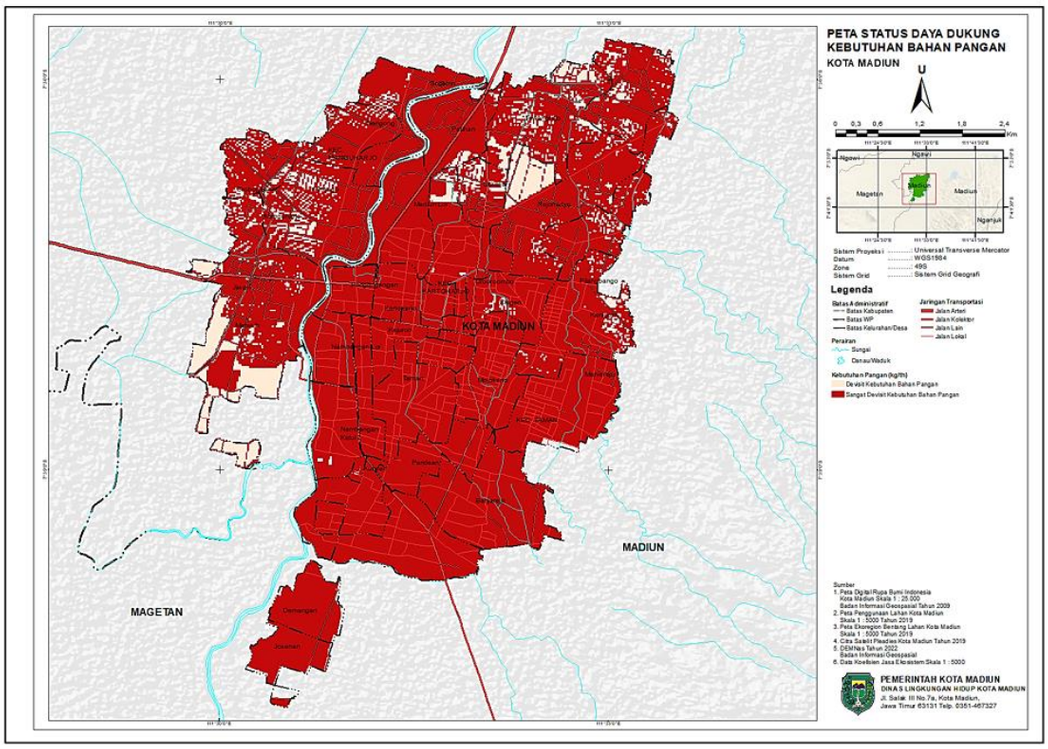
Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita/th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	Total Kebutuhan Lahan Pertanian (ha)	DDL Pertanian	STATUS
2024	203.328	2.174	480	5.331	0,09	0,12	Terlampaui
2025	204.115	2.174	480	5.331	0,09	0,12	Terlampaui
2026	204.906	2.174	480	5.331	0,09	0,12	Terlampaui
2027	205.699	2.174	480	5.331	0,09	0,12	Terlampaui
2028	206.496	2.174	480	5.331	0,09	0,12	Terlampaui
2029	207.296	2.174	480	5.331	0,09	0,12	Terlampaui

Sumber : KLHS RPJMD Kota Madiun, 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung pangan Kota Madiun, diketahui bahwa pada tahun 2024 hingga 2029, status daya dukung pangan berada dalam kategori “Terlampaui”, dengan nilai τ secara konsisten berada di bawah 1. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi beras di wilayah ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk secara mandiri. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketergantungan pasokan pangan dari wilayah lain. Di sisi lain, jumlah penduduk yang terus meningkat serta keterbatasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dapat memperburuk kondisi daya dukung pangan di masa mendatang. Jika tidak diantisipasi melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), peningkatan produktivitas pertanian, dan penguatan sistem distribusi pangan, maka ketahanan pangan daerah dapat semakin terancam.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan kebijakan pembangunan pertanian yang adaptif dan berkelanjutan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, melindungi lahan sawah dari konversi, serta memperkuat integrasi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan lokal. Upaya-upaya ini penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, merata, dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 4 Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Madiun
Sumber : KLHS RPJMD Kota Madiun, 2025-2029

Hasil Analisa KLHS RPJMD menunjukkan bahwa kapasitas produksi beras di wilayah ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk secara mandiri.

C. Daya Dukung Lahan Terbangun

Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan kawasan permukiman di Kota Madiun mendorong peningkatan kebutuhan akan ruang terbangun. Hal ini perlu diimbangi dengan perhitungan dan pengendalian terhadap daya dukung lahan terbangun agar pembangunan tetap berkelanjutan dan tidak berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan serta keseimbangan tata ruang wilayah. Daya dukung lahan terbangun (DDLB) mengukur kemampuan wilayah dalam menampung permukiman dan infrastruktur pendukungnya secara layak. DDLB dihitung berdasarkan rasio antara luas lahan bangunan terhadap kapasitas maksimum penggunaan lahan (dengan asumsi 70% lahan dapat dimanfaatkan untuk bangunan, sisanya wajib untuk ruang terbuka hijau sesuai UU No. 26 Tahun 2007).

Tabel 2. 5 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Madiun

KECAMATAN	KELURAHAN	Luas Wilayah (Ha)	Luas Bangunan (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	DDLB
1	2	3	4	5	6
Kartoharjo	Kanigoro	164,09	91,12	99,88	1,15
	Kartoharjo	76,56	59,72	67,57	0,79

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

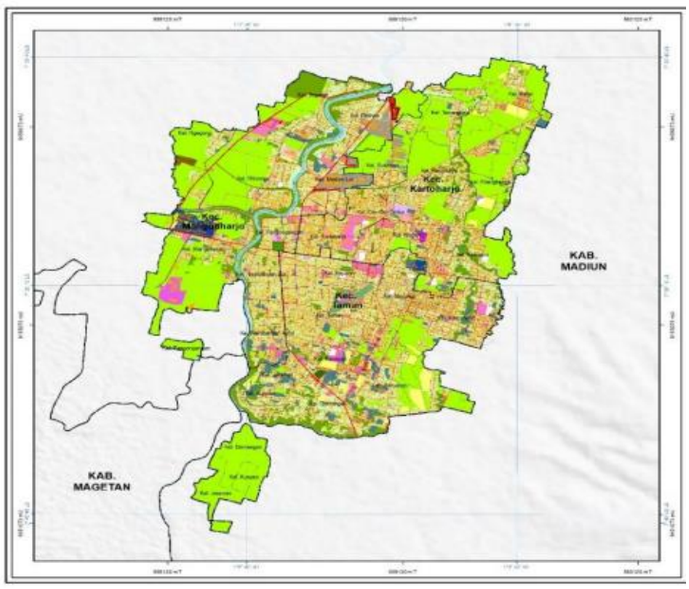
1	2	3	4	5	6
	Kelun	125,83	31,79	39,00	2,26
	Klegen	89,08	62,01	69,93	0,89
	Oro-oro Ombo	117,74	76,94	88,81	0,93
	Pilangbango	115,45	49,36	56,22	1,44
	Rejomulyo	216,19	84,44	98,76	1,53
	Sukosari	57,65	27,42	32,47	1,24
	Tawangrejo	179,96	55,59	63,99	1,97
Total		1143,54	538,39	616,63	1,30
	Madiun Lor	124,02	89,53	109,76	0,79
	Manguharjo	337,79	116,39	140,99	1,68
	Nambangan Kidul	84,99	62,61	74,21	0,80
	Nambangan Lor	67,05	56,28	62,09	0,76
Manguharjo	Ngegong	156,33	67,96	81,21	1,35
	Pangongangan	66,67	34,15	45,30	1,03
	Patihan	107,23	69,30	80,65	0,93
	Sogaten	119,26	43,12	59,41	1,41
	Winongo	184,35	58,96	77,71	1,66
Total		1247,69	598,29	731,33	1,19
	Banjarejo	189,98	101,49	112,76	1,18
	Demangan	216,79	101,52	113,77	1,33
	Josenan	160,87	66,82	75,32	1,50
	Kejuron	72,09	56,52	64,81	0,78
Taman	Kuncen	23,73	14,55	15,85	1,05
	Manisrejo	162,52	121,61	132,36	0,86
	Mojorejo	125,17	102,46	114,00	0,77
	Pandean	141,22	99,26	114,63	0,86
	Taman	127,39	102,34	120,17	0,74
Total		1219,79	766,58	863,67	0,99
Kota Madiun		36126	1903,26	2211,63	1,14

Sumber : KLHS RPJMD Kota Madiun, 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis daya dukung lahan permukiman di wilayah studi (mengacu pada metode Kota Madiun sebagai pendekatan teknis), diketahui bahwa sebagian besar wilayah berada dalam kategori bersyarat (DDLB antara 1–3). Namun, terdapat beberapa wilayah dengan DDLB < 1 yang mengindikasikan telah melampaui daya dukung lingkungan, terutama di kawasan yang padat penduduk dan terbangun tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengendalian pembangunan di zona-zona kritis tersebut untuk menghindari tekanan terhadap infrastruktur, utilitas kota, dan lingkungan hidup.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Salah satu faktor pemicu rendahnya daya dukung adalah konsentrasi pembangunan yang terfokus di pusat kota atau pusat aktivitas masyarakat. Apabila tidak diimbangi dengan penyediaan utilitas dan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, maka akan memperburuk ketimpangan ruang dan menciptakan kawasan yang tidak tertata. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, Pemerintah Kota Madiun perlu menerapkan strategi pengendalian pemanfaatan ruang, di antaranya penataan ulang rencana tata ruang dan zonasi, optimalisasi pemanfaatan ruang vertikal, penetapan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau secara proporsional, serta pengembangan infrastruktur dasar yang terintegrasi. Dengan strategi tersebut, diharapkan keseimbangan antara daya dukung lahan dan aktivitas pembangunan dapat terjaga, sehingga kualitas lingkungan dan kelayakan permukiman tetap terjamin dalam jangka panjang.



Gambar 2. 5 Peta Penggunaan Lahan Kota Madiun
Sumber : KLHS RPJMD Kota Madiun, 2025-2029

Hasil Analisa KLHS RPJMD menunjukkan bahwa daya dukung daya tampung lahan permukiman mengindikasikan telah melampaui daya dukung lingkungan, terutama di kawasan yang padat penduduk dan terbangun tinggi

D. Daya Dukung Fungsi Lindung

Fungsi lindung lingkungan hidup merupakan aspek krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama di tengah meningkatnya alih fungsi lahan dan tekanan pembangunan. Kawasan lindung berperan dalam menjaga sumber daya alam, keanekaragaman hayati, keseimbangan hidrologi, serta perlindungan terhadap kawasan rawan bencana. Oleh karena itu, daya dukung fungsi lindung perlu dianalisis secara berkala dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam RPJMD Kota Madiun 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Daya dukung fungsi lindung diukur melalui proporsi luasan lahan yang memiliki fungsi lindung terhadap total wilayah, dikalibrasi dengan koefisien lindung untuk masing-masing jenis tata guna lahan. Berdasarkan hasil analisis (mengacu pada pendekatan Kota Madiun), nilai daya dukung fungsi lindung sebesar 0,28, yang berada pada kategori rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan lindung di wilayah tersebut masih belum optimal dalam menjalankan fungsi ekologisnya, dan sebagian besar wilayah lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya. Luas lahan dengan nilai koefisien lindung tinggi (seperti hutan, ruang terbuka hijau, badan air, dan kawasan perlindungan setempat) masih terbatas jika dibandingkan dengan luas permukiman, pertanian intensif, kawasan industri, dan penggunaan lainnya yang berkoefisien lindung rendah. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan lindung melalui kebijakan perlindungan, restorasi lahan kritis, dan optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau.

Selain itu, daya tampung wilayah berdasarkan rasio luas wilayah terhadap jumlah penduduk menunjukkan nilai 0,0174 ha/jiwa pada tahun 2029, yang masih berada di atas standar minimum konsumsi lahan per kapita untuk kota berpenduduk 200.000–250.000 jiwa (0,070 ha/jiwa menurut standar Yeates). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas wilayah Kota Madiun secara spasial masih mampu menampung penduduk hingga akhir periode perencanaan. Namun, rendahnya fungsi lindung tetap menjadi catatan penting karena berpengaruh terhadap kualitas lingkungan jangka panjang.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan daya dukung fungsi lindung, di antaranya melindungi kawasan hutan lindung dan sempadan sungai, meningkatkan luas ruang terbuka hijau publik dan privat, mendorong praktik pertanian berkelanjutan dan konservasi lahan, mengintegrasikan pendekatan ekologis dalam penyusunan RTRW dan RDTR. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Madiun tetap berada dalam koridor keberlanjutan dan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan. Hasil analisa KLHS RPJMD menunjukkan bahwa kapasitas wilayah Kota Madiun secara spasial masih mampu menampung penduduk hingga akhir periode perencanaan.

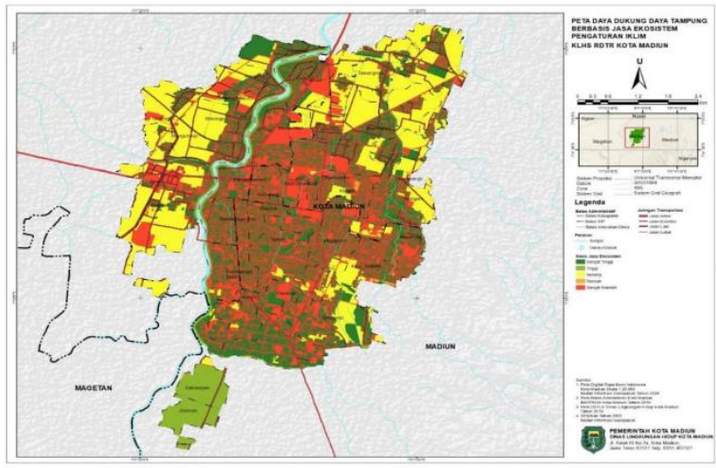
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

E. Kinerja Jasa Ekosistem

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 13 ayat (1) huruf c tentang kinerja layanan atau jasa ekosistem, pengertian jasa ekosistem adalah ukuran perubahan kemampuan dan kualitas layanan ekosistem dari kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat pemantauan. Jasa ekosistem terdiri dari dua puluh (20) jenis yang terbagi atas empat (4) kelompok utama, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa budaya (*cultural*), jasa pendukung (*supporting*) yang mewakili unsur daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan (*regulating*) yang mewakili unsur daya tampung lingkungan.

1. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Pengendalian suhu, kelembaban dan hujan, angin, gas rumah kaca, dan penyerapan karbon merupakan fungsi dari jasa ekosistem pengaturan iklim.



Gambar 2. 6 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kota Madiun
Sumber: KLHS RPJMD Kota Madiun, 2025-2029

Tabel 2. 6 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	278,04	15,30	503,65	-	276,00	0,00	1.073,00
Manguharjo	305,38	35,46	349,48	49,00	264,68	0,00	1.004,00
Taman	435,26	24,53	250,76	6,40	529,04	0,00	1.246,00
Kota Madiun	1.011,53	77,39	1.126,9	61,36	1.045,80	0,00	3.323,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Kelas jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Madiun mayoritas tergolong dalam kelas sedang seluas 1.126,92 Ha, yang kemudian diikuti dengan kelas sangat tinggi seluas 1.045,80 Ha. Kontribusi jasa ekosistem pengaturan iklim kelas sedang di Kota Madiun cenderung tinggi karena sebagian besar wilayah ini berada pada dataran yang relatif rendah dan penggunaan lahan didominasi dengan lahan sawah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir merupakan jasa ekosistem yang digunakan untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berhubungan langsung dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran *(flow).* Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi (bentang alam) suatu wilayah.

Tabel 2. 7 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	279,58	4,16	41,26	748,00	-	0,00	1.073,00
Manguharjo	306,23	6,23	51,04	561,19	79,30	0,00	1.004,00
Taman	435,11	19,41	74,86	700,14	16,48	0,00	1.246,00
Kota Madiun	1.013,90	28,38	165,66	2.010,35	104,70	0,00	3.323,00

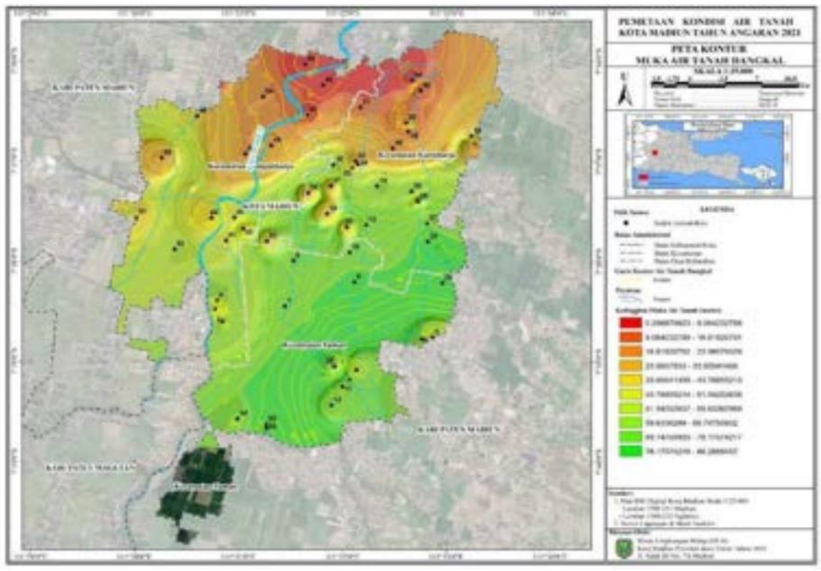
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Potensi air tanah dangkal di Kota Madiun dapat dianalisis berdasarkan kedalaman muka air tanah. Berdasarkan kajian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, hasil pemetaan menunjukkan bahwa muka air tanah di kota ini berada pada ketinggian antara 58,18 meter hingga 72,12 meter di atas permukaan laut, yang dapat dilihat dalam Peta Kontur Air Tanah Dangkal. Pola aliran air tanah dangkal di Kota Madiun bervariasi menurut wilayah kecamatan, antara lain:

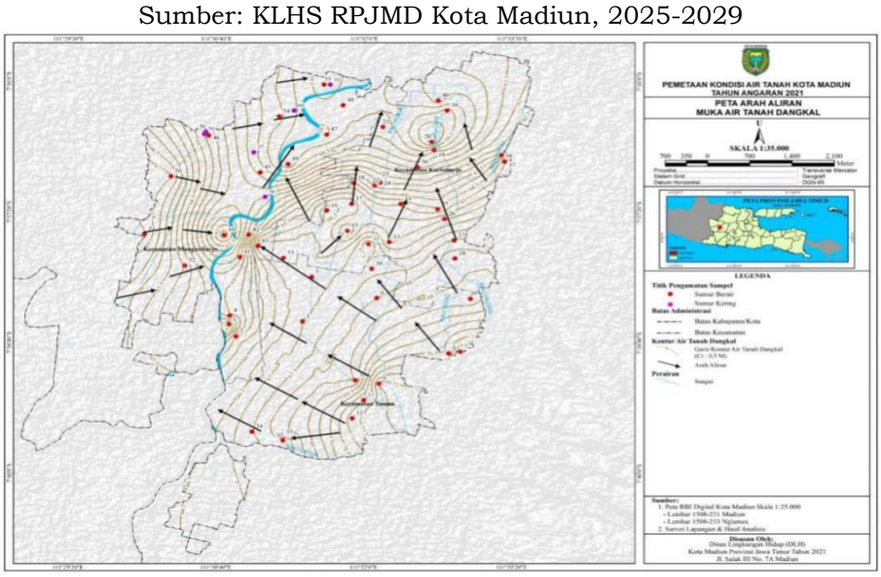
1. Kecamatan Taman: Aliran air tanah bergerak dari arah tenggara menuju barat laut, dimulai dari Kelurahan Demangan, Banjarejo, dan Manisrejo, mengalir ke Kelurahan Nambangan Kidul dan Nambangan Lor, berakhir di sungai Madiun. Pola aliran ini berubah arah dari selatan menuju utara di Kelurahan Kejuron, dengan gradien hidrolik yang homogen dan berlangsung secara bertahap.
2. Kecamatan Kartoharjo: Aliran air tanah bergerak dari selatan ke utara, dimulai dari Kelurahan Kartoharjo, Klegen, dan Kanigoro, berakhir di Kelurahan Tawangrejo dan Kelun. Gradien hidrolik di bagian selatan cukup tinggi, sementara di bagian utara gradien hidroliknya lebih rendah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Kecamatan Manguharjo: Terdapat dua pola aliran air tanah dangkal. Pertama, di sebelah barat sungai Madiun, aliran air tanah bergerak dari barat ke timur, dimulai dari Kelurahan Ngegong dan Manguharjo, menuju Kelurahan Winongo, dengan gradien hidrolik sedang. Kedua, di sebelah timur sungai Madiun, aliran air tanah bergerak dari tenggara menuju barat laut, serta dari selatan ke utara, dengan gradien hidrolik yang tinggi.



Gambar 2. 7 Peta Kontur Air Tanah Dangkal di Kota Madiun
Sumber: KLHS RPJMD Kota Madiun, 2025-2029



Gambar 2. 8 Peta Arah Aliran Air Tanah di Kota Madiun
Sumber: KLHS RPJMD Kota Madiun, 2025-2029

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir di Kota Madiun mayoritas tergolong dalam kelas tinggi seluas 2.010,35 Ha dan kelas sangat rendah seluas 1.013,90 Ha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pengaturan tata aliran air dan banjir didominasi dengan kelas tinggi karena memiliki tutupan lahan sawah yang cukup besar. Besarnya tutupan lahan tersebut menandakan bahwa ekosistem mampu melakukan penyimpanan air, pemeliharaan ketersediaan air, dan pengendalian air dengan baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

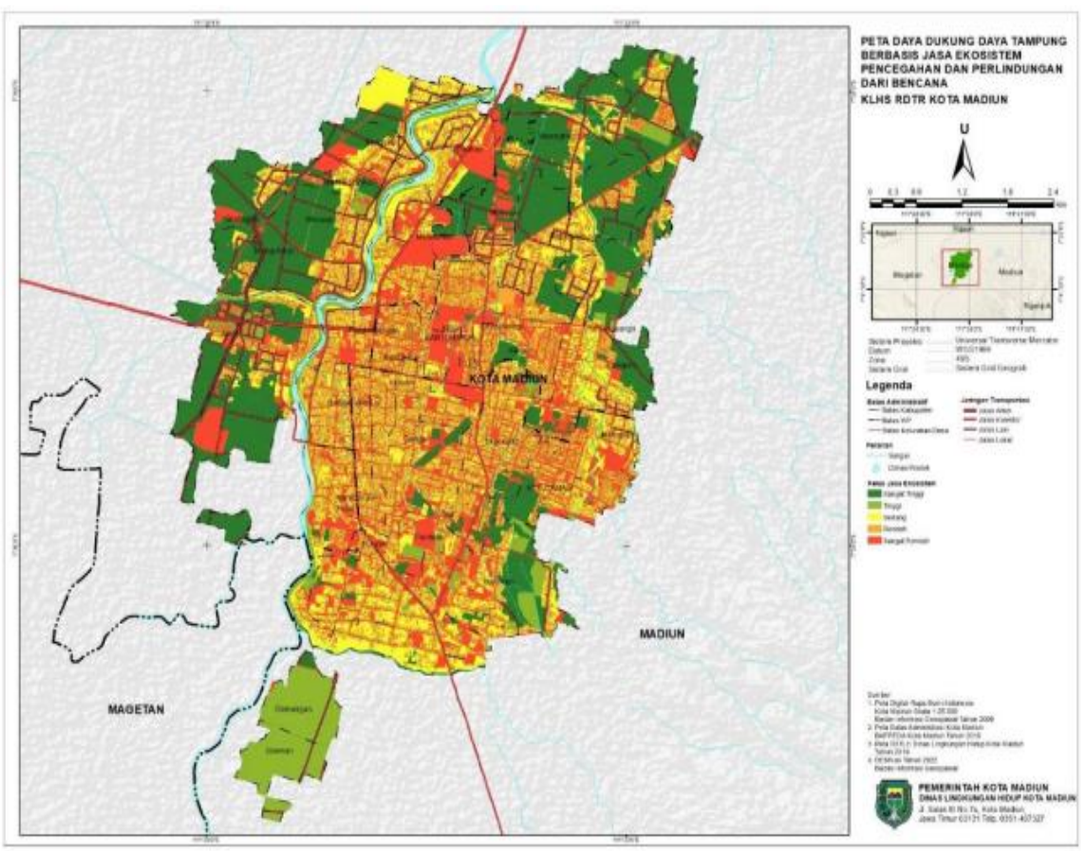
3. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Daya dukung lingkungan hidup untuk melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana khususnya bencana alam merupakan suatu kemampuan ekosistem berbasis pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana suatu wilayah adalah ekoregion bentang lahan dan tutupan vegetasi. Ekoregion bentanglahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan umumnya rawan terjadi bencana. Perbukitan memiliki kondisi topografi dengan kemiringan lereng yang curam hingga sangat curam sehingga berpotensi mengalami bencana. Keberadaan vegetasi dengan kerapatan tinggi mampu menahan laju air hujan agar dapat mengendalikan bencana, seperti longsor dan banjir.

Tabel 2. 8 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	266,66	11,34	256,40	18,64	519,97	0,00	1.073,00
Manguharjo	287,75	9,22	268,12	53,70	385,21	0,00	1.004,00
Taman	425,26	5,05	475,28	49,61	290,80	0,00	1.246,00
Kota Madiun	971,17	26,38	982,55	123,59	1.219,31	0,00	3.323,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020



Gambar 2. 9 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Kota Madiun

Sumber: KLHS RPJMD Kota Madiun, 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Luasan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kota Madiun mayoritas tergolong dalam kelas sangat tinggi seluas 1.219,31 Ha, kelas sedang seluas 982,55 Ha, dan kelas sangat rendah seluas 971,17 Ha. Tingginya jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kota Madiun dipengaruhi dengan kondisi morfologi wilayah yang berada pada dataran rendah sehingga secara faktor endogen Kota Madiun kecil kemungkinan terjadi bencana longsor. Namun, besarnya kelas sedang dan sangat rendah pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan perlindungan bencana ini mendapatkan tekanan dari aktivitas manusianya.

4. Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Jasa ekosistem yang berfungsi untuk tempat tinggal dilihat dari kelas kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi, sehingga mendukung kehidupan dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Kondisi bentang alam yang memiliki jasa untuk lokasi tempat tinggal pada umumnya berada pada topografi yang datar hingga landai, didukung oleh material tanah dan batuan dasar yang stabil, terdapat akuifer yang memiliki potensi tinggi dalam penyediaan sumber air bersih, mampu mendukung untuk pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas dengan mudah, serta tidak terdapat ancaman bencana alam, seperti: banjir, tanah longsor, dan berisiko terhadap gempa bumi tektonik maupun vulkanik yang rendah.

Tabel 2. 9 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	0,00	115,79	513,96	67,39	375,86	0,00	1.073,00
Manguharjo	71,91	123,27	378,19	90,05	340,59	0,00	1.004,00
Taman	16,55	179,71	264,44	154,3	630,99	0,00	1.246,00
Kota Madiun	96,36	415,44	1.182,3	306,4	1.322,78	0,00	3.323,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

5. Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Jasa ekosistem pendukung biodiversitas dipengaruhi oleh kondisi ekoregion dan penutup lahan di suatu wilayah. Ekoregion merupakan kondisi suatu wilayah berdasarkan pada kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Keberadaan ekoregion mengindikasikan tingkat endemisitas suatu spesies yang dimiliki suatu wilayah.

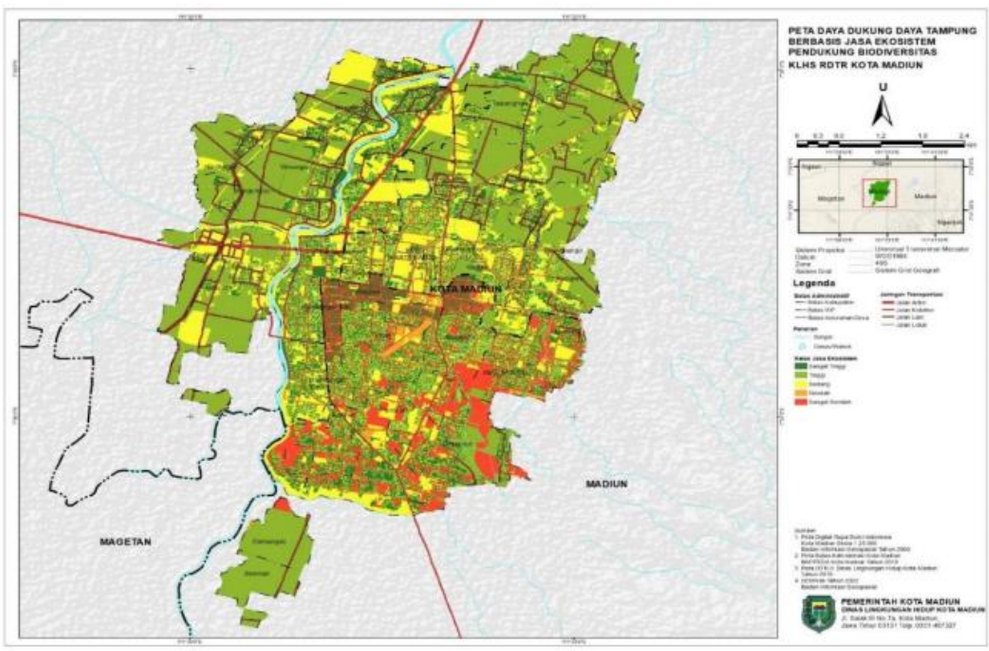
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Artinya, tingkat endemisitas yang tinggi akan mempengaruhi keanekaragaman hayati yang tinggi. Sementara itu, penutup lahan merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang akan mengandung biota, tanah, topografi, air, tanah, dan permukaan yang akan mempengaruhi keberlanjutan keanekaragaman hayati.

Tabel 2. 10 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	33,22	5,69	17,06	542,37	216,06	258,60	1.073,00
Manguharjo	61,28	6,48	37,73	400,52	218,43	279,56	1.004,00
Taman	91,54	8,55	44,70	320,93	412,02	368,26	1.246,00
Kota Madiun	183,88	20,65	99,52	1.285,88	829,58	903,49	3.323,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota madiun, 2020



Gambar 2. 10 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Madiun
Sumber: KLHS RPJMD Kota Madiun, 2025-2029

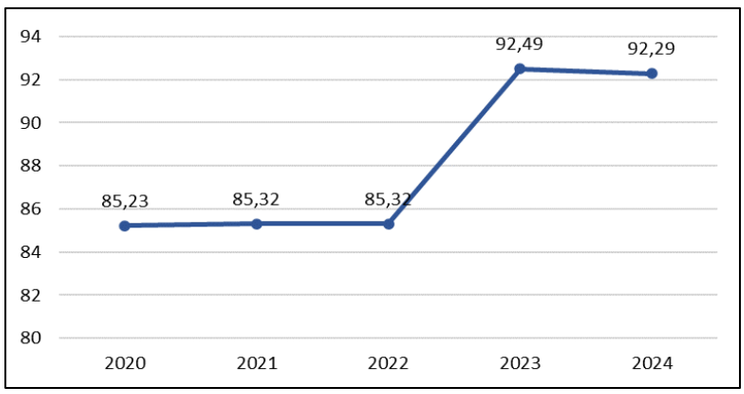
Jasa ekosistem pendukung biodiversitas kelas tinggi mendominasi di Kota Madiun seluas 1.285,88 Ha, kelas sangat tinggi seluas 829,58 Ha, dan kelas rendah seluas 20,65 Ha. Kelas jasa tinggi paling luas terdapat pada Kecamatan Kartoharjo yang menempati luasan 542,37 Ha, Kecamatan Taman memiliki luasan kelas jasa sangat tinggi yang tertinggi di Kota Madiun yang mencakup luasan 412,02 Ha.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

A. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (kab/kota). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

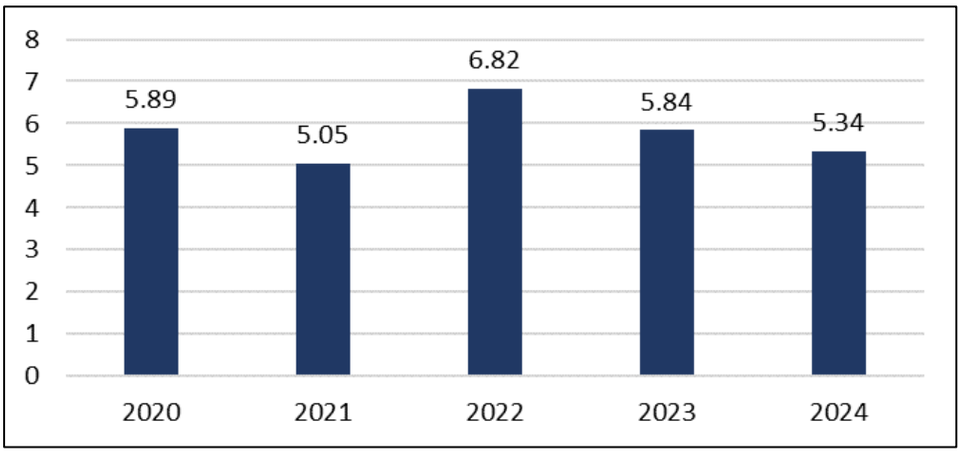


Gambar 2. 11 Indeks Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020 sebesar 85,23 kemudian meningkat drastis pada tahun 2023 menjadi 92,49 dan tahun 2024 sebesar 92,29. Kenaikan drastis pada tahun 2023 merupakan imbas dari kebijakan pasca pademi dimana Kota Madiun berusaha untuk secara mandiri memenuhi kebutuhannya. Pemerintah Kota Madiun menerapkan berbagai kebijakan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam peningkatan ketahanan pangan di Kota Madiun. Upaya yang dilakukan seperti memanfaatkan lahan tidur untuk dimanfaatkan menjadi area pertanian dan juga secara masif menghimbau masyarakat untuk bisa menanam bahan pangan di lahan pekarangan mereka.

B. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau (*Prevalence of Undernourishment*) adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu.



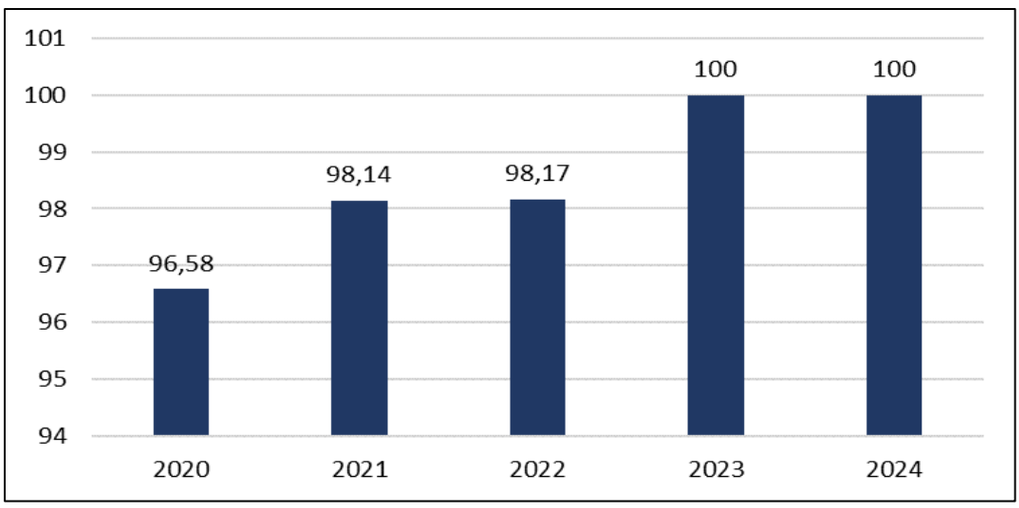
Gambar 2. 12 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Madiun dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang fluktuatif. Tahun 2021 (5,05), 2023 (5,84) dan 2024 (5,34) mengalami penurunan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi yang menandakan pada tahun ini ada perbaikan akses dan distribusi terhadap pangan sehingga mudah untuk diakses oleh masyarakat. Namun pada tahun 2022 (6,82) Kota Madiun mengalami peningkatan Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi yang menandakan ada kerentanan terhadap pangan pada tahun ini. Kerentanan ini terjadi dikarenakan adanya kelangkaan terhadap minyak goreng yang menjadikan harganya naik cukup tinggi. Pemerintah Kota Madiun dalam upaya menstabilkan kebutuhan pangan masyarakat Kota Madiun melakukan beberapa upaya seperti operasi pasar murah melalui Warung Stop Inflasi dan juga kerjasama dengan pihak swasta untuk mempermudah distribusi bahan makanan.

C. Penduduk Berakses Air Minum

Penduduk berakses air minum Kota Madiun dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan. Data menunjukan bahwa dari tahun 2020 persentase penduduk yang berakses air minum mencapai 96,58 persen. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2023 dan 2024, yang mana persentase penduduk berakses air minum mencapai 100 persen. Hal ini berarti bahwa seluruh penduduk Kota Madiun sudah memiliki akses air minum.



Gambar 2. 13 Penduduk Berakses Air Minum Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2025

Lebih lanjut, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kota Madiun berada pada angka yang stagnan, yaitu pada kisaran 99%. Di tahun 2020, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air siap minum Kota Madiun adalah 99,71%. Angka tersebut naik pada tahun berikutnya dan stagnan hingga tahun 2023 dan tahun 2024 pada angka 99,86%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

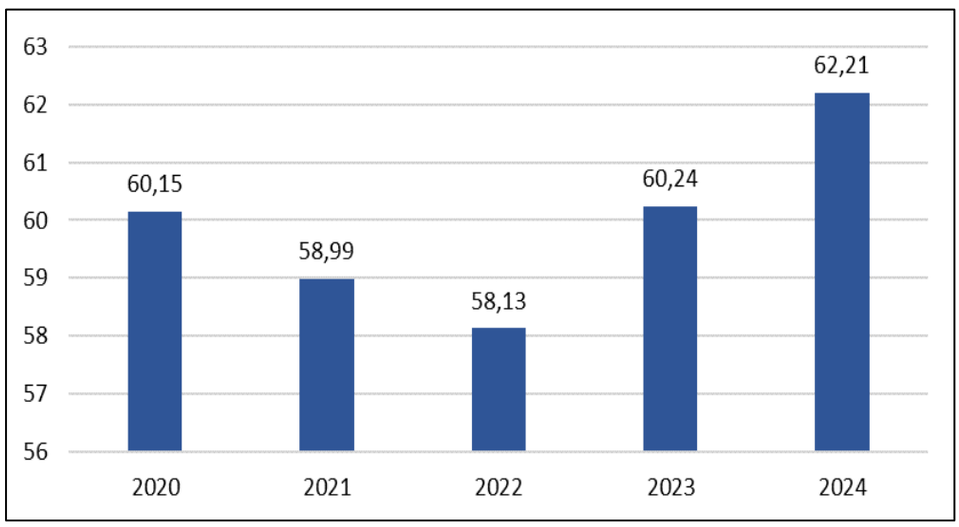
Pemerintah Kota Madiun berupaya dengan maksimal untuk bisa menyediakan akses air minum bersih kepada masyarakat dengan memberikan subsidi untuk pemasangan jaringan air PDAM baru secara gratis, selain itu juga memberikan beberapa titik untuk akses air siap minum agar masyarakat bisa mudah dalam mengakses air minum.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi untuk meningkatkan fungsi lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKLH Kota Madiun tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan penurunan setiap tahun, yaitu 60,15 pada tahun 2020 dan menurun hingga 58,13 pada tahun 2022. Namun demikian, pada tahun 2023-2024 skor IKLH mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 60,24-62,21. Tren yang fluktuatif ini terjadi akibat perhitungan komponen IKLH yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) mengalami perubahan metode perhitungan.



Gambar 2. 14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2025

Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Madiun didorong oleh beberapa faktor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap perbaikan kondisi lingkungan. Salah satu faktor utamanya adalah pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas air dan udara secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

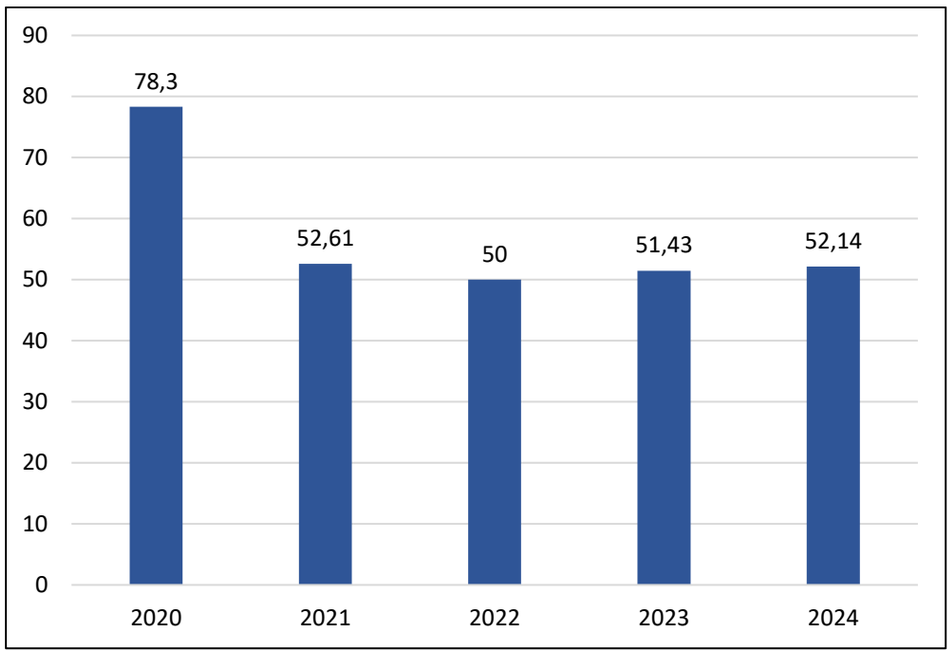
Selain itu, pemasangan sistem pemantauan kualitas air secara daring (*online* monitoring/ONLIMO) di wilayah Ngebrak turut memberikan dampak positif, di mana sistem ini bekerja secara otomatis, kontinu, dan terintegrasi dengan server Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga memungkinkan pemantauan yang akurat dan real-time. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan kampung iklim di berbagai wilayah Kota Madiun, yang bertujuan memperkuat langkah adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Beberapa faktor menjadi hambatan dalam upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Madiun. Seiring dengan pengembangan Kota Madiun sebagai Kota Wisata Ikonik, terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang berdampak pada penurunan kualitas udara. Selain itu, tahun 2024 menjadi momen pertumbuhan ekonomi dengan maraknya pembangunan tempat usaha di lahan terbuka, yang mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka privat dan menurunnya nilai indeks kualitas lahan. Peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan volume sampah meningkat, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo telah mendekati batas kapasitas. Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaku usaha yang berdampak pada lingkungan masih belum optimal, ditambah dengan rendahnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

B. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dapat diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sampel air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa pencemar. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Indeks Kualitas Air mengalami tren penurunan, yaitu dari 78,3 pada tahun 2020 menjadi 52,14 pada tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 15 Indeks Kualitas Air Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2025

Berdasarkan data tersebut di atas, secara keseluruhan meskipun IKA Kota Madiun Menunjukkan kecenderungan positif. Upaya pengendalian limbah sebenarnya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dengan melakukan himbauan dan tindakan kepada industri yang berada di dekat aliran air untuk tidak membuang limbah secara langsung namun diolah terlebih dahulu hingga aman sehingga tidak mencemari lingkungan. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala pada upaya penurunan pencemaran air ini salah satunya adalah ada beberapa lokasi industri yang terindikasi mencemari air namun diluar wilayah Kota Madiun. Sudah diupayakan untuk melakukan kerjasama dengan pemerintahan yang terkait namun tetap ada batasan terhadap monitoringnya,

Sumber daya air permukaan utama di Kota Madiun berasal dari Sungai Madiun, Sungai Catur dan Sungai Semawur dengan Embung Pilangbango. Kota Madiun terletak di bagian tengah Daerah Aliran Sungai (DAS) Madiun yang menjadi titik kumpul air dari kawasan hulunya di daerah sekitarnya. Sumber pencemar pada Sungai Madiun sendiri dapat berasal dari aktivitas pertanian, perkebunan atau domestik dari kawasan sekitarnya atau aktivitas perkotaan yang lebih intensif di Kota Madiun sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, menunjukkan bahwa kualitas air sungai yang relatif baik jika digunakan untuk kegiatan non domestik namun beberapa lokasi memiliki kualitas air yang kurang baik jika digunakan untuk air minum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Air sungai di Kota Madiun masih layak digunakan sebagai air bersih karena kadar pH air yang cukup baik, yaitu kisaran 6,5-8,5. Rata-rata pH sungai paling rendah di Kota Madiun terdapat di Sungai Catur sebesar pH 7,04 dan Saluran Setiabudi sebesar 7,24. Kondisi ini menunjukkan bahwa air sungai di Kota Madiun memiliki pH yang relatif normal dengan pH paling rendah umumnya terdapat pada bulan februari atau maret. Kandungan oksigen terlarut atau Dissolved Oxygen (DO) berkisar antara 2 sampai 5 yang menunjukkan kecukupan oksigen yang berperan dalam penyerapan makanan organisme perairan sungai di Kota Madiun.

Kualitas air di Kota Madiun dilihat dari parameter fisik, yaitu jumlah padatan terlarut (*Total Dissolved Solid*) menunjukkan nilai kurang dari 500 mg/L. Nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas kelayakan, yaitu 1000 mg/L. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah zat padat yang terlarut pada air sungai di Kota Madiun masih belum memberikan dampak pencemaran yang signifikan. Nilai rata-rata TDS paling tinggi terdapat pada Sungai Semawur yakni 295 mg/L dan paling rendah pada Saluran Slarangan sebesar 158 mg/L.

Kualitas air di Kota Madiun dilihat dari parameter mikrobiologi diukur melalui jumlah kandungan bakteri *coliform* sebagai salah satu indikator utama pencemaran akibat aktivitas domestik atau lainnya pada tubuh air. Sungai-sungai yang melewati kawasan permukiman atau perkotaan umumnya pasti memiliki kandungan bakteri *coliform* yang tinggi. Secara umum kandungan total *coliform* pada air sungai di Kota Madiun dibawah ambang batas untuk penggunaan non-domestik namun untuk keperluan domestik seperti air minum perlu adanya proses pengolahan air yang lebih lanjut. Rata-rata total *coliform* paling tinggi terdapat di Saluran Sono sebesar 3744 MPN/100 ml dan Saluran Diponegoro Timur sebesar 3752 MPN/100 ml.

Tabel 2. 11 Analisis Pencemaran Air Sungai di Kota Madiun

Lokasi Pengamatan	Peruntukan Air Minum		Peruntukan Budidaya Perairan		Peruntukan Lainnya	
	Indeks Pencemar	Kelas	Indeks Pencemar	Kelas	Indeks Pencemar	Kelas
1	2		3		4	
Sungai Madiun, Jembatan Ngebrak	3.3	Tercemar ringan	1.9	Tercemar ringan	0.7	Aman
Sungai Madiun, Jembatan Ringroad	3.8	Tercemar ringan	2.1	Tercemar ringan	0.8	Aman
Sungai Semawur	4.4	Tercemar ringan	2.4	Tercemar ringan	0.7	Aman
Sungai Catur	3.9	Tercemar ringan	2.0	Tercemar ringan	0.8	Aman
Saluran Sono	4.6	Tercemar ringan	2.5	Tercemar ringan	0.9	Aman
Saluran Slarangan	3.2	Tercemar ringan	2.0	Tercemar ringan	0.7	Aman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3		4	
Saluran Setiabudi	5.5	Tercemar sedang	2.9	Tercemar ringan	1.2	Tercemar ringan
Saluran Diponegoro Timur	5.5	Tercemar sedang	2.5	Tercemar ringan	0.9	Aman

Sumber: Analisis Indeks Pencemar Data IKPLHD, 2021

Kualitas air sungai juga dapat diukur melalui indeks pencemaran air. Berdasarkan hasil analisis indeks pencemaran air sungai, diperoleh bahwa secara umum kualitas air sungai di Kota Madiun yang diamati memiliki kelas tercemar ringan untuk pemanfaatan budidaya perairan maupun domestik kecuali di Saluran Setiabudi dan Saluran Diponegoro Timur.

Sementara itu, kualitas air sungai di Kota Madiun yang dimanfaatkan untuk pengairan tanaman secara umum masih cukup aman untuk digunakan. Lokasi kualitas air yang cukup rendah terdapat di Saluran Setiabudi dan Saluran Diponegoro Timur yang terletak di tengah kota. Kedua saluran tersebut melewati pusat-pusat perkotaan seperti pasar, pusat perdagangan, PKL, pertokoan, hotel dan kegiatan jasa lainnya. Sumber pencemar dapat berasal dari polutan yang berasal dari jalan, pusat-pusat kegiatan serta limbah rumah tangga yang terbuang ke dalam saluran tersebut.

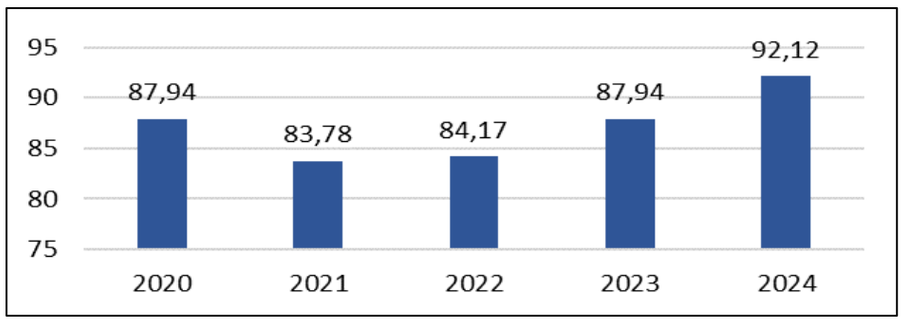
Indikator yang berpengaruh terhadap nilai indeks pencemar air sungai di Kota Madiun diantaranya *Total Suspended Solid* (TSS), DO, BOD, COD dan kandungan bakteri coli untuk penggunaan air domestik. Indeks pencemaran juga cenderung mengalami kenaikan pada bulan Januari Februari dan beberapa juga terdapat pada bulan agustus-september. Umumnya pada aliran sungai terjadi kenaikan kandungan bakteri coli, BO COD serta penurunan kandungan oksigen (DO) pada bulan-bulan tersebut, sedangkan pada saluran air drainase terjadi kenaikan TSS yang cukup signifikan disertai kandungan bakteri coli serta BOD dan COD pada bulan-bulan tersebut.

C. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung berdasarkan kadar kandungan Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2) di udara. Penghitungan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hasil dari perhitungan indeks ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat terkait kualitas udara dan dasar dalam penyusunan terkait kebijakan untuk memperbaiki maupun menjaga kualitas udara untuk manusia dan ekosistem.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam 5 (lima) tahun terakhir Indeks Kualitas Udara Kota Madiun mulai bertumbuh positif. Terjadi Penurunan pada tahun 2020 sebesar 87,94 menjadi 83,78 pada tahun 2021. Ini mengindikasikan kualitas udara di Kota Madiun mulai tercemar. Kenaikan aktivitas pasca pandemi disinyalir menjadi penyebab. Banyak destinasi wisata baru di Kota Madiun meningkatkan minat banyak masyarakat sekitar berkunjung setelah pembatasan aktivitas pada pandemi *Covid-19*. Selain itu kondisi musim kemarau kering yang terjadi memperparah pencemaran udara di Kota Madiun. Sebenarnya Pemerintah Kota Madiun sudah gencar dalam melakukan penanaman pohon dan bunga di berbagai wilayah. Penanaman Pohon Pule di tengah Kota, penanaman pohon tabebuya di banyak tempat dan menanambanyak bunga di berbagai lokasi. Upaya ini nyatanya berhasil menaikkan kualitas udara di Kota Madiun. Kenaikan pada tahun 2022 sebesar 84,17 dan mencapai 92,12 pada tahun 92,12 menjadi bukti upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun berhasil.



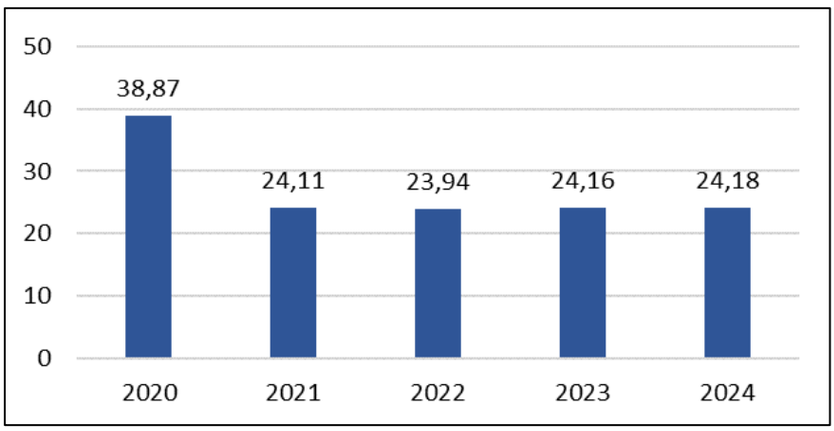
Gambar 2. 16 Indeks Kualitas Udara Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2025

D. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks tutupan lahan di Kota Madiun diperoleh berdasarkan perhitungan ruang terbuka hijau dan lahan perkebunan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kota, memperbaiki iklim mikro kota dan mempercantik keindahan kota (fungsi estetika). RTH di Kota Madiun terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Luas RTH publik tahun 2020 sebesar 256 Ha (7,69%) meningkat menjadi 289 Ha (8,69%) di tahun 2024

Hutan di wilayah Kota Madiun berupa hutan kota yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan dan lahan perkebunan merupakan kebun campuran yang sebagian besar milik masyarakat. Selain dari hutan kota dan perkebunan, tutupan lahan juga diperhitungkan dari taman pada jalur jalan kota, taman pada monumen dan gerbang kota, taman pada makam dan lapangan olahraga, taman lintasan kereta api, taman kantor, taman gedung komersial, daerah penyangga industri, sempadan SUTT, sempadan sungai dan sempadan mata air.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 17 Indeks Kualitas Tutupn Lahan Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2025

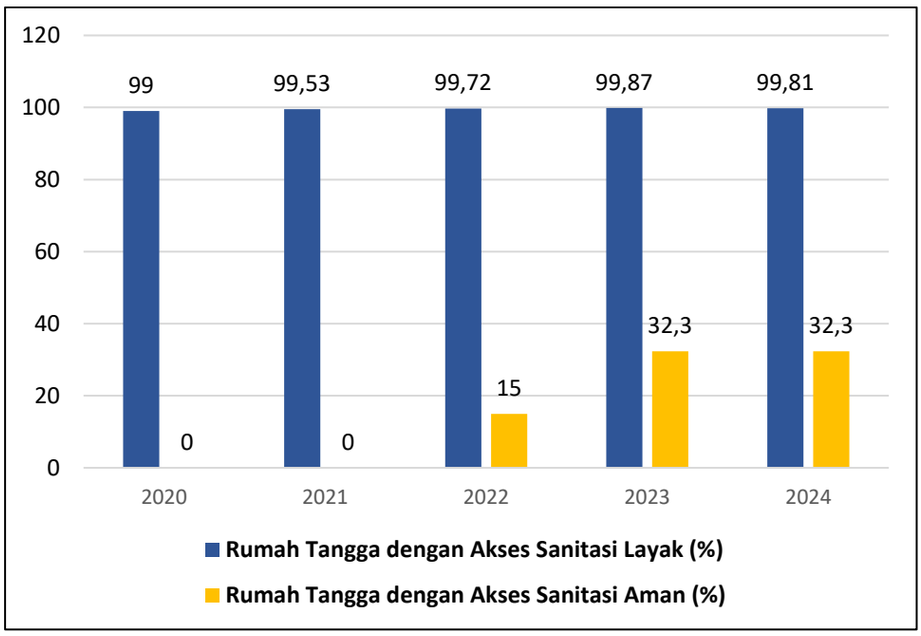
Indeks Kualitas Lahan Kota Madiun pada tahun 2020 mencapai 38,87. Angka ini menurun secara signifikan pada tahun 2021 yang mencapai 24,11 dan 23,94 pada tahun 2022. Tahun 2023 dan 2024 Indeks Kualitas Lahan sedikit meningkat menjadi 24,16 dan 24,18. Turunnya Indeks Kualitas Lahan secara signifikan dari tahun 2021 ini perlu mendapat perhatian serius, meskipun juga harus dipahami bahwa Kota Madiun merupakan sebuah kota dengan berarti besaran luasan yang sangat kecil dan merupakan Kawasan padat penduduk dan didominasi oleh area/kawasan terbangun.

E. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman

Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Kota Madiun berada pada tingkat yang sangat tinggi dan relatif stabil. Sejak tahun 2020 hingga 2024, capaian akses sanitasi layak konsisten di atas 99%, bahkan mencapai 99,87% pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kota Madiun sudah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar yang memadai, seperti jamban sehat dan fasilitas buang air yang higienis.

Namun, kondisi berbeda terlihat pada capaian sanitasi aman. Pada tahun 2020–2021, rumah tangga dengan akses sanitasi aman masih 0%, Hal ini dikarenakan data pada tahun ini masih belum dihitung. Pada tahun 2022 mulai terjadi peningkatan dengan capaian 15%, dan melonjak signifikan menjadi 32,3% pada tahun 2023, angka yang kemudian bertahan hingga 2024. Jika dibandingkan dengan sanitasi layak nampak perbedaan signifikan dengan capaian sanitasi aman. Ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki jamban layak, pengelolaan limbah tinja belum dilakukan dengan standar yang benar. Kota Madiun berupaya untuk meningkatkan sanitasi aman dengan membangun IPLT melalui dana DAK pada tahun 2024 sehingga bisa melakukan pengolahan terhadap tinja secara aman.

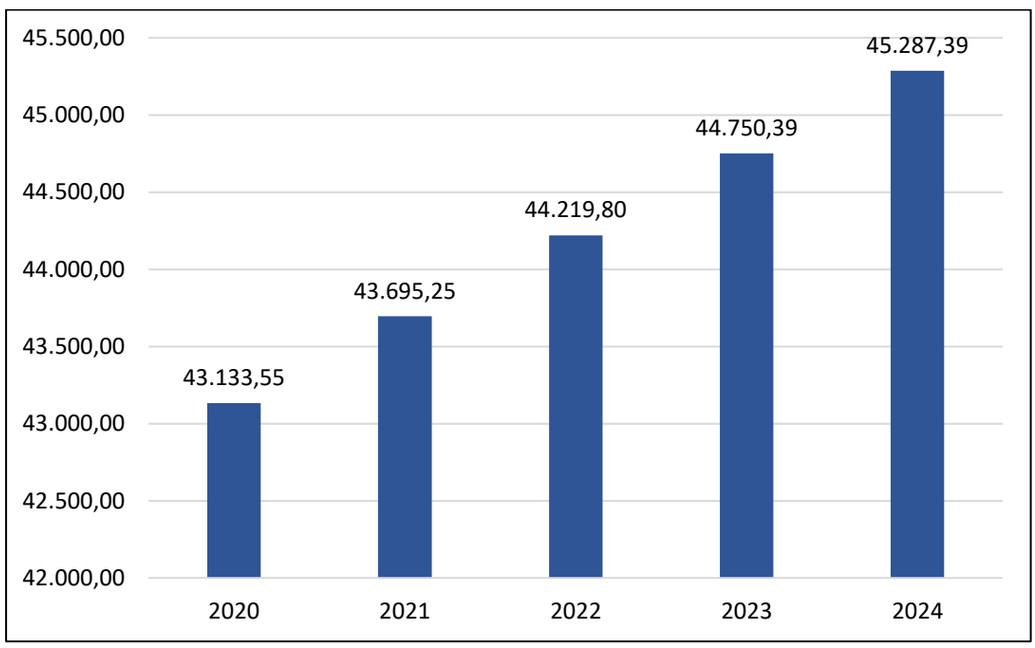
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 18 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2025

F. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

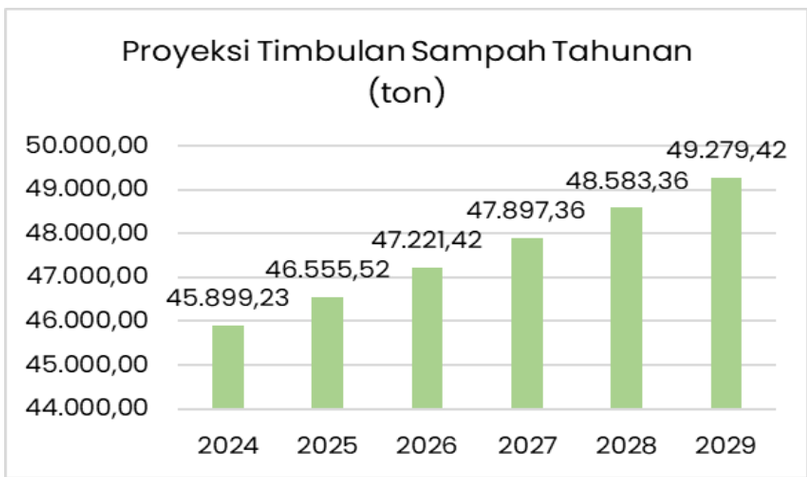
Sampah merupakan sisa bahan dari proses produksi yang sudah tidak dimanfaatkan. Bahan sisa tersebut memiliki berbagai wujud seperti padat, cair, dan gas. Pengelolaan sampah di Kota Madiun menghadapi tantangan semakin pesatnya aktivitas ekonomi, makin pesat aktivitas di suatu daerah maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Pertumbuhan penduduk secara umum menjadi faktor pemicu meningkatnya volume timbunan sampah yang dihasilkan di suatu daerah.



Gambar 2. 19 Timbulan sampah per tahun di Kota Madiun, Tahun 2020-2024
Sumber: KLHS RPJMD Kota Madiun, 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan Gambar 2.19 yang menunjukkan timbulan sampah per tahun di Kota Madiun dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan jumlah timbulan sampah setiap tahunnya. Pada tahun 2020, timbulan sampah tercatat sebesar 43.133,55 ton. Angka ini terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yakni 43.695,25 ton pada 2021, 44.219,80 ton pada 2022, dan 44.750,39 ton pada 2023. Puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah timbulan sampah mencapai 45.287,39 ton. Kenaikan yang konsisten ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas konsumsi dan produksi di Kota Madiun yang berdampak pada bertambahnya volume sampah. Data ini menjadi penting sebagai dasar perencanaan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang. Proyeksi jumlah timbulan sampah di Kota Madiun didasarkan pada data proyeksi jumlah penduduk yang telah dijabarkan sebelumnya. Perhitungan proyeksi ini juga memanfaatkan data timbulan sampah dari TPA Winongo (Lembaga Kerjasama FT UGM, 2022), yang mencatat produksi sampah sebesar 0,612 kg per orang per hari di Kota Madiun. Berdasarkan data tersebut, diperoleh estimasi timbulan sampah untuk periode tahun 2024 hingga 2029, yang disajikan secara lebih rinci dalam tabel berikut.



Gambar 2. 20 Proyeksi timbulan sampah per tahun di Kota Madiun, Tahun 2024-2029
Sumber: KLHS RPJMD Kota Madiun, 2025-2029

Pengelolaan sampah di lingkup masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan fisik oleh instansi dan pendirian bank-bank sampah. Bank sampah banyak didirikan oleh masyarakat, baik yang sudah berbadan hukum maupun belum berbadan hukum. Data tahun 2018 menunjukkan terdapat 10 bank sampah yang sudah berbadan hukum. Bank sampah yang ada saling bersinergi satu sama lain, terdapat bank sampah yang hanya terfokus pada pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang untuk kemudian dijual kepada bank sampah yang telah dapat mengolah sampah yang ada menjadi berbagai macam kerajinan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Namun, masih terdapat terdapat timbulan sampah yang belum dilakukan pengelolaan, sehingga terbuang secara bebas yang akhirnya masuk ke saluran drainase dan/atau sungai yang dapat meningkatkan risiko terhadap banjir. Lebih lanjut, berikut tabel capaian kinerja pengelolaan sampah Kota Madiun Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 12 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Madiun Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	43.135,55	43.695,25	44.219,80	44.750,39	45.287,39
Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)	9.750,36	11.017,88	11.499,80	12.069,48	10.288,64
% Pengurangan Sampah	22,61	25,22	26,01	26,97	22,72
Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)	32.088,98	31.815,15	32.321,74	32.234,76	34.545,43
% Penanganan Sampah	74,39	72,81	73,09	72,03	76,28
Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)	41.839,34	42.833,04	43.821,54	44.304,24	44.834,06
% Sampah Terkelola	97,00	98,03	99,10	99,00	99,00
Daur Ulang Sampah Tahunan (ton/tahun)	4.088,99	4.525,32	3.873,85	4.485,49	9.545,74
Bahan Baku Sampah Tahunan (ton/tahun)	299,30	315,65	349,56	425,01	490,93
Recycling Rate	10,17	11,08	9,55	10,97	22,16

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025

Penanganan sampah di Kota Madiun menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dari tahun ke tahun, dengan volume penanganan berkisar antara 31.800 hingga 34.600 ton per tahun. Meskipun demikian, terdapat penurunan dalam persentase penanganan sampah selama periode 2020 hingga 2024. Di sisi lain, aspek pengelolaan sampah menunjukkan tren positif, ditandai dengan peningkatan persentase sampah terkelola yang mencapai 99,00% pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi kegiatan daur ulang serta pemanfaatan bahan baku sampah. Data terkait pengelolaan daur ulang menunjukkan adanya upaya yang konsisten dari Pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan pemanfaatan sampah di wilayahnya. Hal ini tercermin dari peningkatan volume bahan baku sampah yang dapat dimanfaatkan sejak tahun 2021. Kendati demikian, rasio daur ulang selama periode 2020–2024 masih berfluktuasi pada kisaran 9-22%, sehingga diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah melalui pendekatan daur ulang. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah merupakan persentase layanan pengurangan dan penanganan sampah. Kinerja tahun 2020 sebesar 97%, tahun 2021 sebesar 97,03%, tahun 2022 sebesar 99,10%, tahun 2023 dan 2024 sebesar 93% dan 99%. Pelayanan pengumpulan sampah ditingkat rumah tangga dilakukan secara mandiri ataupun melalui tenaga pengumpul sampah di tingkat RT. Hal ini menunjukkan hampir seluruh rumah tangga di Kota Madiun terlayani pengumpulan sampah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

G. Kontribusi Lingkungan Hidup

Potensi lingkungan hidup Kota Madiun meliputi berbagai aspek yang mendukung kesejahteraan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Beberapa potensi utama yang dapat diidentifikasi antara lain adalah kualitas dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang mengalami peningkatan. Meskipun demikian, proporsi ini masih di bawah ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang yang mengharuskan minimal 30% dari luas wilayah kota sebagai RTH. Selain itu, Kota Madiun juga memiliki potensi pengelolaan ekosistem yang baik, dengan ekosistem pengaturan iklim dan pengolahan limbah yang memiliki kelas sangat tinggi di sebagian besar wilayah. Kota ini juga memiliki potensi untuk pengendalian bencana alam, seperti banjir dan kekeringan, berkat pengelolaan ekosistem yang mendukung mitigasi bencana. Selain itu, kualitas air dan udara di Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Madiun tercatat sebesar 60,15 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 62,21 pada tahun 2024, meskipun menunjukkan tren fluktuatif sepanjang periode tersebut. Indeks Kualitas Air, yang menunjukkan penurunan signifikan dari 78,3 pada tahun 2020 menjadi 21,14 pada tahun 2024, mencatatkan penurunan tajam sebesar 52,16 sejak tahun 2020. Di sisi lain, Indeks Kualitas Udara menunjukkan perbaikan yang konsisten setelah penurunan pada tahun 2021, mencapai angka tertinggi sepanjang periode ini yaitu 92,12 pada tahun 2024. Meskipun terdapat perbaikan dalam kualitas udara, kualitas tutupan lahan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021, dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan mencapai angka terendah di angka 24,11, dan hanya sedikit meningkat pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 24,16 dan 24,18.

Meskipun demikian, kualitas lahan masih membutuhkan perhatian lebih, mengingat pentingnya lahan untuk pertanian dan keberlanjutan ekosistem. Keanekaragaman hayati dan potensi cadangan sumber daya alam juga perlu dikelola dengan baik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kota Madiun memiliki tantangan dalam pengelolaan lahan, terutama dalam menjaga lahan pertanian yang masih tergolong luas namun terancam konversi menjadi lahan non-pertanian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Potensi rawan bencana alam di wilayah Kota Madiun berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Tahun 2020-2024, masuk kelas risiko bencana multi ancaman kategori sedang. Kawasan–kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana alam dan non alam di Kota Madiun adalah sebagai berikut.

A. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung

Wilayah di Kota Madiun sebagai kawasan rawan bencana alam angin puting beliung terdapat di wilayah dengan dataran landai, yaitu Kecamatan Taman (Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Banjarejo), Kecamatan Manguharjo (Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Ngegong), serta Kecamatan Kartoharjo (Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Kelun, Kelurahan Kanigoro).

B. Kawasan Rawan Banjir

Kota Madiun termasuk dalam wilayah rawan banjir yang disebabkan karena tingginya curah hujan, sehingga menyebabkan terjadinya banjir atau genangan di beberapa tempat. Kondisi ini juga disebabkan kondisi fisik wilayah Kota Madiun yang umumnya datar. Adanya Kali Madiun di tengah kota juga mempengaruhi terjadinya bencana banjir ini, karena adanya luapan air sungai di saat curah hujan yang tinggi.

Keberadaan anak sungai lainnya di Kota Madiun, serta kondisi sistem drainase kota yang kurang mendukung juga berpengaruh terhadap adanya kawasan-kawasan yang mengalami banjir atau genangan. Adapun genangan air kawasan di Kota Madiun terjadi di seluruh kecamatan di Kota Madiun dengan intensitas yang berbeda. Daerah rawan banjir di Kota Madiun meliputi Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Tawangrejo, dan Kelurahan Kelun. Banjir terjadi diakibatkan karena luapan Sungai Piring, Sungai Maling, dan Sungai Sono yang berhulu di wilayah Kabupaten Madiun.

C. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran

Kota Madiun yang memiliki kondisi alam yang cukup kering, menjadikan Kota Madiun menjadi wilayah rawan terjadinya kebakaran. Namun, bencana kebakaran sebagian besar ditimbulkan oleh akibat aktivitas manusia. Kejadian kebakaran tersebut sebagian besar terjadi pada lahan terbuka ataupun perumahan padat, apabila terjadi pada perumahan padat diperlukannya alat pemadam kebakaran yang mumpuni membelah kepadatan perumahan ataupun penyediaan alat pemadam kebakaran mandiri tiap kelurahan. Adapun lokasi yang memiliki rawan bencana kebakaran ialah hampir berada di seluruh kelurahan yang ada di Kota Madiun.

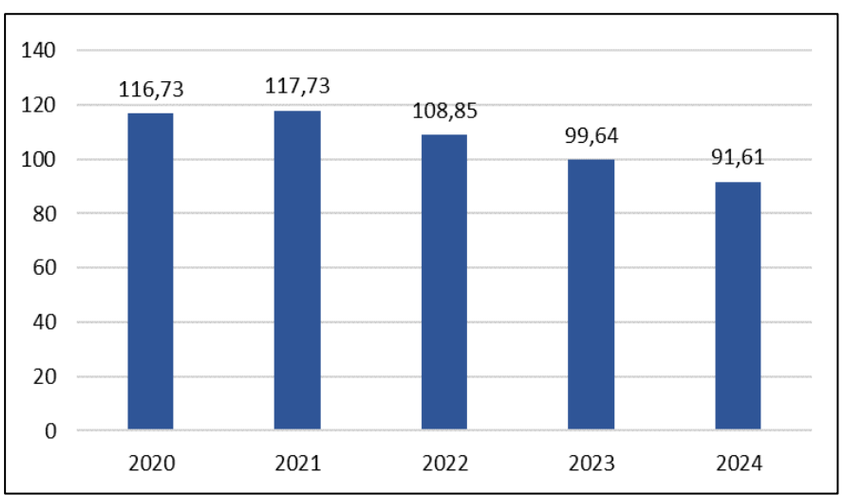
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2020-2024, Kota Madiun termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori sedang. Berdasarkan review IKPLHD Kota Madiun tahun 2021, dan publikasi BPBD Kota Madiun, dapat diidentifikasi bahwa potensi dan kerawanan bencana di Kota Madiun meliputi banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan. angin rebut, tanah longsor, dan gempa bumi tektonik. Sedangkan dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2019, juga disebutkan Kota Madiun termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori sedang. Menurut jenis bencana berdasarkan IRBI, kelas risiko bencana yang tinggi di Kota Madiun adalah untuk bencana banjir, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan.

Berdasarkan jenis bencana, kelas risiko bencana yang tinggi di Kota Madiun adalah untuk bencana banjir, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan. Sedang kelas risiko bencana pada kategori sedang adalah tanah longsor dan cuaca ekstrim. Terdapat beberapa kawasan masih mengalami bencana alam berskala kecil. Kawasan yang rawan terjadi bencana alam di Kota Madiun diantaranya adalah:

1. Banjir berupa genangan air di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun yang diakibatkan oleh luapan dari Sungai Piring, Maling, dan Sono yang berhulu di wilayah Kabupaten Madiun.
2. Angin puting beliung di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun.
3. Kebakaran di wilayah Kota Madiun



Gambar 2. 21 Indeks Risiko Bencana Kota Madiun 2020-2024
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun capaian Indeks Risiko Bencana Kota Madiun cenderung menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, Indeks Risiko Bencana mencapai 116,73 menjadi 91,61 pada tahun 2024.

Lebih jauh, adapun intensitas bencana di Kota Madiun dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa bencana banjir banyak terjadi pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 96 bencana banjir pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebanyak 13 bencana banjir yang melanda. Sedangkan bencana angin puting beliung hanya terjadi sekali pada tahun 2024. Bencana kebakaran menurun signifikan pada tahun 2024 sebanyak 40 bencana kebakaran dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 70 bencana kebakaran. Meskipun terjadi penurunan, namun ini masih perlu menjadi catatan agar intensitas bencana kebakaran terus menurun.

Tabel 2. 13 Intensitas Bencana Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	Jenis Bencana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Banjir	5	5	9	13	96
2.	Angin Puting Beliung	33	0	0	0	1
3.	Kebakaran	29	13	21	70	40

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, 2025

E. Indeks Ketahanan Daerah

Menurut Badan Penanggulangan Bencana, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah.

Nilai standar Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan ukuran kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang digunakan untuk menilai tingkat resiliensi daerah terhadap bencana. IKD awalnya terdiri dari 71 indikator yang mengukur berbagai aspek kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, dengan nilai maksimal 100 pada sistem lama. Sejak 2020, BNPB mengembangkan IKD baru yang lebih ringkas dan terstruktur, terdiri dari 24 indikator yang terbagi dalam 4 pilar utama:

1. Standar Tata Kelola, Kebijakan, dan Perencanaan
2. Standar Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penguatan Sosial Ekonomi
3. Standar Perlindungan dan Pemulihan Infrastruktur Kritis
4. Standar Pelayanan Kedaruratan Bencana

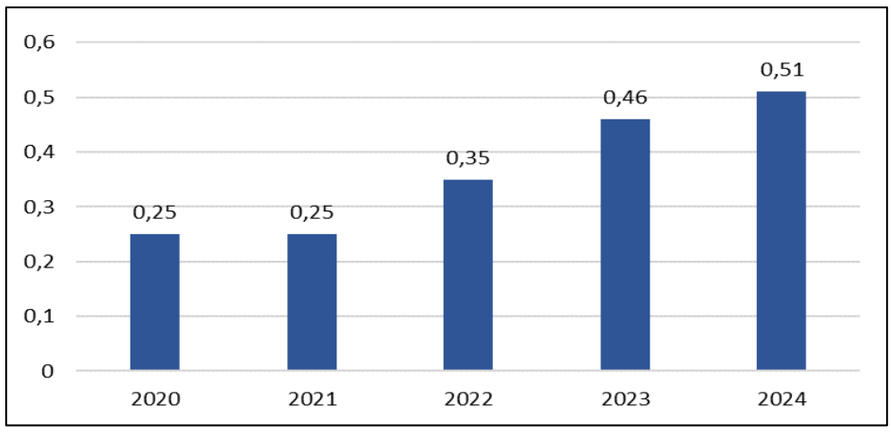
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Setiap indikator diukur dengan kriteria dan subkriteria yang bersifat biner (Ya/Tidak) dan diberi bobot untuk mencerminkan realitas resiliensi daerah secara lebih akurat. Nilai standar Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menggunakan skala antara 0 sampai 1, dengan klasifikasi tingkat ketahanan sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Nilai Standrat Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Rentang Nilai IKD	Kategori Ketahanan Daerah
0,0 – 0,4	Rendah
> 0,4 – 0,8	Sedang
> 0,8 – 1,0	Tinggi

Nilai IKD ini merepresentasikan tingkat ketahanan suatu wilayah kabupaten/kota atau provinsi dalam menghadapi risiko bencana, mulai dari kapasitas mitigasi, adaptasi, hingga pemulihan pascabencana. Penilaian dilakukan melalui indikator-indikator yang diukur secara biner (Ya/Tidak) dan diberi bobot, kemudian diolah menjadi skor komposit dalam rentang 0 sampai 1. Dengan demikian, semakin mendekati nilai 1, semakin tinggi ketahanan daerah tersebut terhadap bencana, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan ketahanan yang rendah dan perlunya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.



Gambar 2. 22 Indeks Ketahanan Daerah Kota Madiun 2020-2024
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, 2025

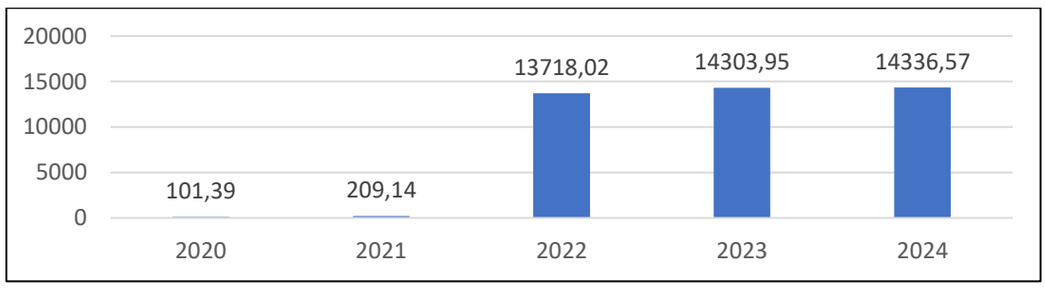
Secara umum, gambar 2.22 memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten pada Indeks Ketahanan Daerah selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai IKD Kota Madiun berada pada angka 0,25, yang termasuk dalam kategori ketahanan rendah. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan menjadi 0,35, meskipun masih dalam kategori rendah, namun menunjukkan adanya perbaikan kapasitas ketahanan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana nilai IKD naik menjadi 0,46. Dengan nilai ini, Kota Madiun mulai masuk ke kategori ketahanan sedang. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dengan nilai IKD mencapai 0,51, yang semakin memperkuat posisi Kota Madiun dalam kategori ketahanan sedang. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Kota Madiun selama lima tahun terakhir telah membuahkan hasil yang positif, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai kategori ketahanan tinggi.

F. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca (GRK) mengacu pada pelepasan gas-gas ke atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca, yaitu fenomena di mana panas dari matahari terperangkap di atmosfer bumi sehingga menyebabkan peningkatan suhu global atau perubahan iklim. Gas-gas yang memicu efek rumah kaca diantaranya seperti karbon dioksida, metana, gas-gas fluorinasi, dan lainnya. Emisi GRK ini sangat berdampak ke lingkungan seperti memicu pemanasan global, perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, hingga kerusakan ekosistem. Sumber-sumber emisi GRK ini berasal dari berbagai sektor termasuk transportasi, industri, pembangkit listrik menggunakan batubara dan gas alam, pertanian melalui penggunaan pupuk kimia, serta limbah.



Gambar 2. 23 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Madiun, Tahun 2020-2024
Sumber: Bappenas (Aksara), 2025

Data penurunan emisi GRK di Kota Madiun menunjukkan tren yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada awal periode, yakni tahun 2020 dan 2021, capaian penurunan emisi masih sangat kecil yaitu sebesar 101,39 tonCO_2eq dan 209,14 tonCO_2eq. Angka ini mencerminkan bahwa upaya mitigasi perubahan iklim pada periode awal masih terbatas dan belum memberikan dampak besar terhadap penurunan emisi. Perubahan signifikan terjadi mulai tahun 2022, di mana capaian penurunan emisi meningkat tajam menjadi 13.718,02 tonCO_2eq. Peningkatan ini menunjukkan adanya program dan kebijakan mitigasi yang lebih terarah, seperti efisiensi energi, pengelolaan sampah, transportasi ramah lingkungan, serta peningkatan ruang terbuka hijau. Pada tahun 2023, capaian kembali naik menjadi 14.303,95 tonCO_2eq dan sedikit meningkat pada 2024 menjadi 14.336,57 tonCO_2eq.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

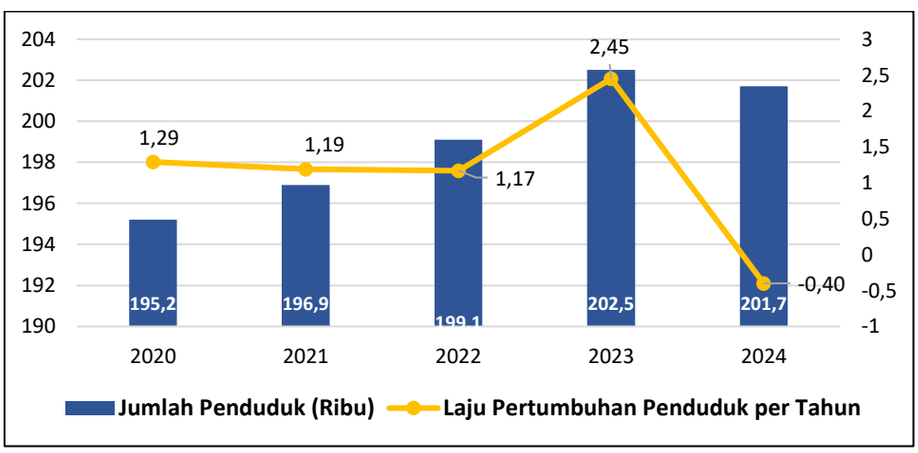
Kondisi ini menegaskan bahwa Kota Madiun telah mengalami lompatan besar dalam pengurangan emisi GRK setelah 2021, meskipun tren peningkatan setelah 2022 relatif melambat. Dengan capaian yang sudah berada di atas 14 ribu tonCO_2eq, tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan angka ini, tetapi juga memperluas program mitigasi untuk mendorong penurunan emisi secara lebih konsisten dan berkelanjutan. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa Kota Madiun telah berada pada jalur yang tepat dalam mendukung target nasional penurunan emisi GRK, namun tetap perlu inovasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang.

2.1.1.7 Kondisi Demografi

A. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun dari tahun 2020 hingga 2024 selalu mengalami tren yang meningkat. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Madiun mencapai 195,2 ribu. Jumlah ini meningkat menjadi 196,9 ribu jiwa di tahun 2021 dan 199,1 ribu jiwa di tahun 2022. Jumlah penduduk terus bertumbuh menjadi 202,5 ribu jiwa di tahun 2023. Adapun di tahun 2024, pertumbuhan penduduk ini mencapai 201,7 jiwa.

Sementara laju pertumbuhan penduduk mengalami perkembangan yang fluktuatif. Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2020 sebesar 1,29%. Angka ini terus menurun hingga 2021 dan 2022 sebesar 1,19% dan 1,17%. Sedangkan di tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk meningkat hingga 2,45%. Namun di tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk turun menjadi -0,40%.

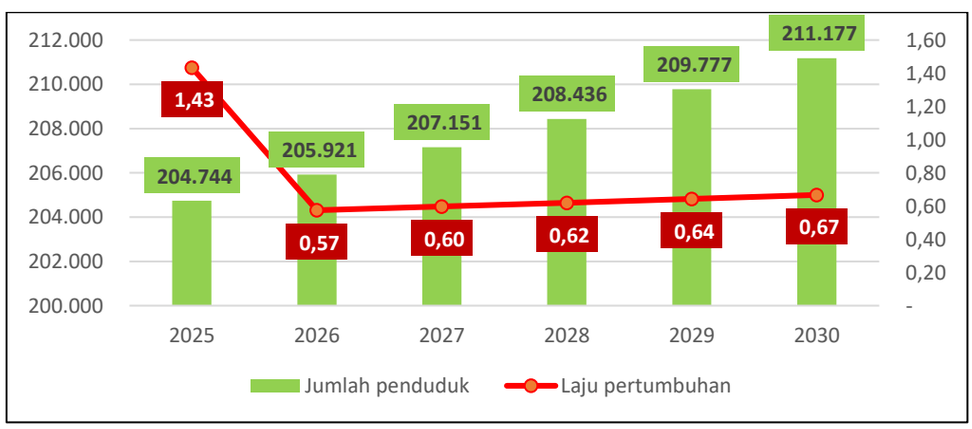


Gambar 2. 24 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan proyeksi dalam RPJPD Kota Madiun 2025–2045, jumlah penduduk Kota Madiun diperkirakan mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, jumlah penduduk diperkirakan sebesar 204.744 jiwa dan terus meningkat hingga mencapai 211.177 jiwa pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan adanya tren kenaikan jumlah penduduk meskipun dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah. Laju pertumbuhan penduduk pada awal periode, yaitu tahun 2025, tercatat cukup tinggi sebesar 1,43%. Namun, pada tahun 2026 terjadi penurunan signifikan menjadi 0,57%, yang menandai adanya perlambatan laju pertumbuhan. Setelah itu, laju pertumbuhan relatif stabil dengan kisaran antara 0,60% hingga 0,67% sepanjang tahun 2027–2030.

Fenomena ini menggambarkan bahwa meskipun jumlah penduduk terus meningkat, tren laju pertumbuhan menunjukkan pola menurun dan cenderung stabil pada angka di bawah 1%. Dengan kata lain, pertambahan penduduk Kota Madiun di masa depan lebih dipengaruhi oleh faktor alami (kelahiran dan kematian) serta kemungkinan migrasi yang relatif terkendali. Dari sudut pandang perencanaan pembangunan daerah, kondisi ini memberikan implikasi penting. Pertama, peningkatan jumlah penduduk meskipun dengan pertumbuhan yang moderat tetap menuntut adanya penguatan pada penyediaan infrastruktur dasar, seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Kedua, stabilitas laju pertumbuhan di bawah 1% dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus meningkatkan kualitas penduduk melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM), dibanding menghadapi tekanan kuantitas yang terlalu besar. Dengan demikian, proyeksi ini menegaskan bahwa Kota Madiun ke depan akan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan kualitas pelayanan publik, serta memanfaatkan peluang dari stabilitas pertumbuhan penduduk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

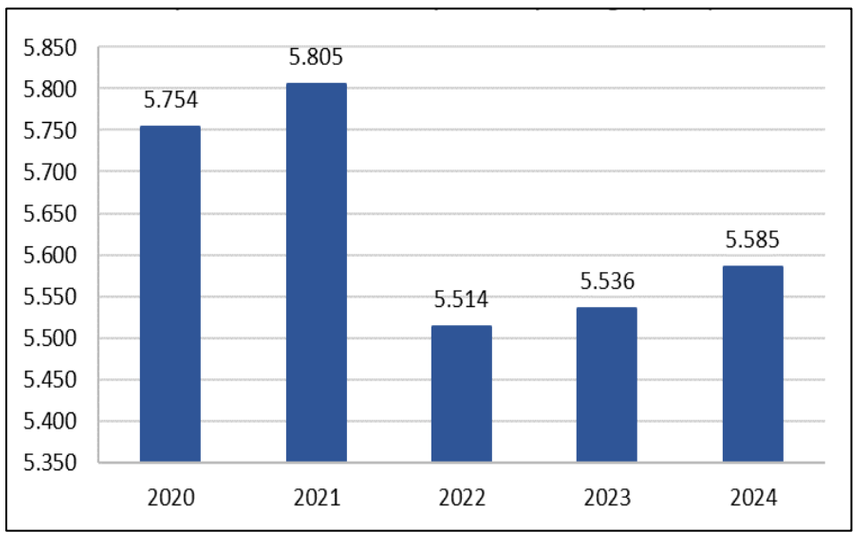


Gambar 2. 25 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun *Tahun 2025-2030*
Sumber: RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Kepadatan Penduduk

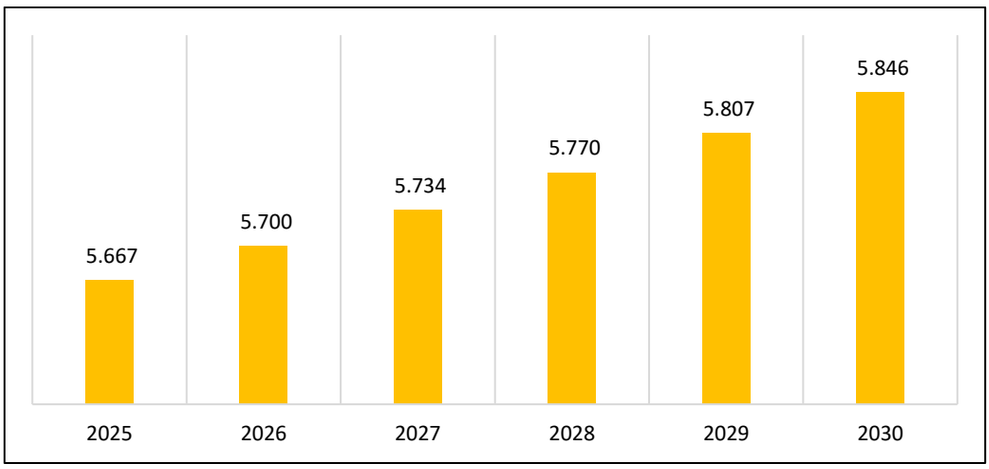
Kepadatan penduduk Kota Madiun selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup mencolok. Pada tahun 2020 hingga 2021, terjadi peningkatan kepadatan dari 5.754 jiwa/km² menjadi 5.805 jiwa/km², yang merupakan titik tertinggi dalam periode tersebut. Peningkatan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan populasi atau perubahan dalam penggunaan ruang/lahan yang lebih padat. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan menjadi 5.514 jiwa/km², yang kemungkinan dipengaruhi oleh perpindahan penduduk, perubahan administratif wilayah, atau faktor demografis lainnya. Meski demikian, tren kembali menunjukkan pemulihan bertahap di tahun-tahun berikutnya, yaitu menjadi 5.536 jiwa/km² pada 2023 dan naik lagi menjadi 5.585 jiwa/km² pada 2024.



Gambar 2. 26 Kepadatan Jumlah Penduduk Kota Madiun per Kilometer Persegi Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Berdasarkan parameter kepadatan penduduk yang ditetapkan oleh BPS di mana kepadatan penduduk di atas 5.000 jiwa/km² dikategorikan sebagai kepadatan tinggi maka dapat disimpulkan bahwa Kota Madiun tergolong sebagai daerah dengan kepadatan penduduk tinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini menjadi catatan penting bagi perencanaan tata ruang, penyediaan infrastruktur, dan pelayanan publik agar tetap seimbang dengan jumlah dan distribusi penduduk.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 27 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Madiun Tahun 2025-2030
Sumber: RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Berdasarkan data proyeksi dalam RPJPD Kota Madiun 2025–2045, kepadatan penduduk Kota Madiun diperkirakan terus mengalami peningkatan sepanjang periode 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, kepadatan penduduk tercatat sebesar 5.667 jiwa/km² dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 5.846 jiwa/km² pada tahun 2030. Kenaikan kepadatan ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat meskipun laju pertumbuhan relatif rendah. Tren pertumbuhan kepadatan penduduk bersifat konsisten dari tahun ke tahun, dengan kenaikan rata-rata sekitar 0,5–1,5% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertambahan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan, dampaknya terhadap peningkatan kepadatan tetap terasa mengingat luas wilayah Kota Madiun yang terbatas.

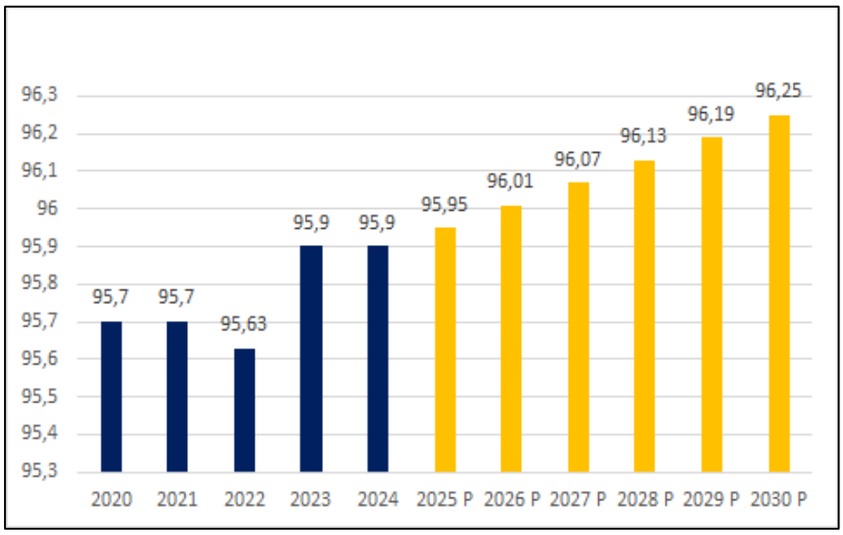
Peningkatan kepadatan penduduk memiliki implikasi penting bagi perencanaan pembangunan daerah. Pertama, peningkatan kepadatan berpotensi menambah beban pada infrastruktur perkotaan, seperti transportasi, perumahan, sanitasi, dan pelayanan publik lainnya. Kedua, kondisi ini juga mendorong perlunya strategi pengendalian tata ruang kota agar pertumbuhan penduduk tidak menimbulkan masalah kepadatan berlebih, seperti kemacetan, kawasan kumuh, dan tekanan pada lingkungan.

Dengan demikian, meskipun proyeksi kepadatan penduduk Kota Madiun meningkat secara moderat, pemerintah daerah perlu mengantisipasi kebutuhan ruang dan pelayanan publik. Fokus utama ke depan adalah memastikan keseimbangan antara pertambahan penduduk dengan kapasitas daya dukung wilayah sehingga kualitas hidup masyarakat tetap terjaga dan pembangunan kota dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

C. Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin penduduk menunjukkan jumlah laki-laki per 100 perempuan. Secara umum, rasio jenis kelamin penduduk Kota Madiun menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, tetapi selisihnya tidak terlalu signifikan. Hal ini ditandai dengan data pada 2020 dan 2021, rasio jenis kelamin penduduk stabil di 95,7, artinya terdapat sekitar 95-96 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Sedangkan pada 2022, rasio turun menjadi 95,63, yang menunjukkan sedikit peningkatan proporsi perempuan dibandingkan laki-laki.Adapun pada tahun 2023 dan 2024, rasio meningkat menjadi 95,9, yang bisa mengindikasikan pertumbuhan populasi laki-laki atau penurunan jumlah perempuan relatif terhadap laki-laki.



Gambar 2. 28 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Madiun, Capaian Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2030
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

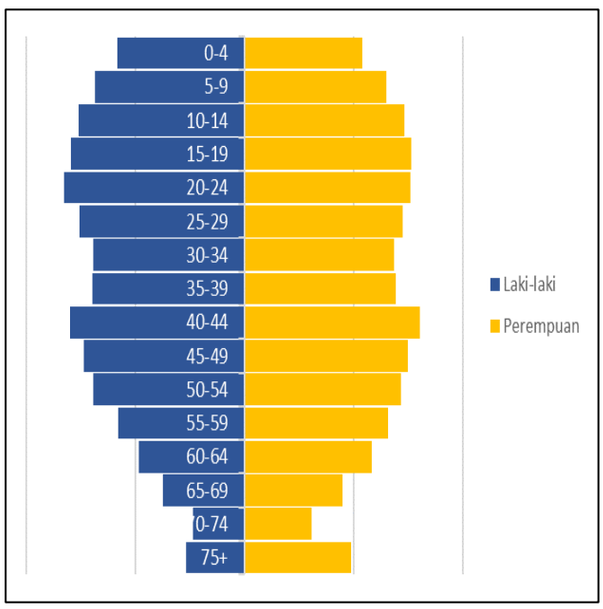
Berdasarkan data proyeksi dalam RPJPD Kota Madiun 2025–2045, Rasio penduduk berdasarkan gender Kota Madiun diperkirakan terus mengalami peningkatan sepanjang periode 2025 (95.95) hingga 2030 (96.25). Jumlah laki-laki per 100 perempuan meningkat perlahan, meskipun masih berada di bawah angka 100. Dengan rasio laki-laki yang sedikit meningkat, potensi ketersediaan tenaga kerja laki-laki juga bertambah. Namun dikarenakan dominasi perempuan masih ada, kebijakan di bidang kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan, dan kesetaraan gender tetap perlu diprioritaskan. Pola ini menunjukkan adanya keseimbangan demografi yang makin stabil, dengan selisih jumlah laki-laki dan perempuan yang cenderung mengecil sehingga hal ini akan mendukung kestabilan sosial pada masa mendatang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. Komposisi Penduduk

Grafik berbentuk piramida penduduk yang cenderung menyerupai bentuk granat atau berlian. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (15-64 tahun) memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan kelompok usia anak-anak dan lansia. Perbandingan laki-laki dan perempuan cukup seimbang di hampir semua kelompok usia, dengan sedikit perbedaan di kelompok usia tua (perempuan lebih banyak). Populasi lansia (65 tahun ke atas) didominasi oleh perempuan, yang sesuai dengan kecenderungan global bahwa perempuan memiliki usia harapan hidup lebih panjang daripada laki-laki.

Struktur penduduk ini mengindikasikan bahwa wilayah ini memiliki potensi tenaga kerja yang besar, karena kelompok usia produktif mendominasi. Perlu ada perhatian terhadap kesejahteraan lansia, karena jumlah mereka mulai meningkat, terutama perempuan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren demografi yang relatif stabil, dengan komposisi usia yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan gender yang cukup baik.



Gambar 2. 29 Komposisi Penduduk Kota Madiun Tahun 2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

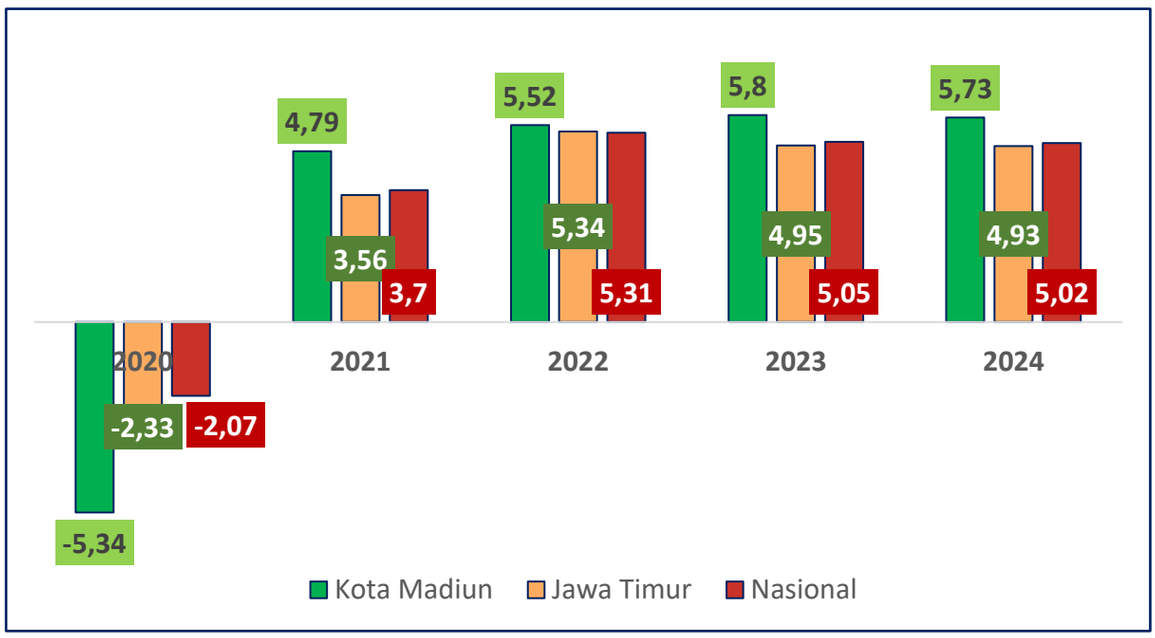
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang melihat kemampuan pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada suatu Daerah dapat diukur menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Daerah tersebut. PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDRB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga periode berjalan, sedangkan PDRB harga tetap dihitung dengan menggunakan harga Tahun tertentu pada Tahun dasar yakni menggunakan Tahun dasar 2010. Dengan mengetahui laju pertumbuhan ekonomi, dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang akan datang.



Gambar 2. 30 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Indonesia, 2025

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun menunjukkan performa yang cukup stabil dan konsisten positif pada tahun 2020, terjadi kontraksi tajam akibat dampak pandemi *Covid-19*, di mana pertumbuhan ekonomi Kota Madiun turun hingga -5,34%, jauh lebih rendah dibandingkan kontraksi pertumbuhan Provinsi Jawa Timur (-2,33%) dan Nasional (-2,07%). Ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kota Madiun cukup rentan terhadap guncangan eksternal, terutama karena kemungkinan tingginya proporsi sektor tersier (seperti perdagangan, pariwisata, dan jasa) yang terdampak signifikan selama pandemi. Setelah kontraksi pada 2020, pemulihan ekonomi berlangsung secara bertahap. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai rebound menjadi 4,79%, diikuti dengan peningkatan menjadi 5,52% pada 2022, 5,8% pada 2023, dan sedikit melambat menjadi 5,37% pada 2024. Meski pertumbuhannya belum setinggi sebelum pandemi, tren ini mengindikasikan arah pemulihan yang positif dan relatif stabil. Selama periode pemulihan tersebut, pertumbuhan Kota Madiun juga tetap bersaing dengan capaian Jawa Timur dan nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa ekonomi Kota Madiun memiliki daya tahan yang cukup baik dalam jangka panjang, meskipun sempat terdampak berat oleh krisis pandemi. Konsistensi pertumbuhan pasca-2020 menunjukkan adanya potensi dan respons kebijakan yang cukup adaptif untuk mendorong pemulihan dan menjaga momentum pembangunan ekonomi daerah. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi menurut Lapangan Usaha tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 15 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun					Rata - Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,57	-7,26	-5,67	4,79	5,04	1,69
Pertambangan dan Penggalian	-5,65	-4,12	-8,49	-5,53	-29,43	-10,64
Industri Pengolahan	-23,84	7,1	2,17	7,98	6,36	-0,05
Pengadaan Listrik dan Gas	1,98	2,95	7,95	5,38	6,39	4,93
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,86	6,28	3,5	4,21	4,81	4,73
Konstruksi	-4,71	-0,9	8,24	4,83	8,06	3,10
Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-11,18	10,16	7,98	5,6	4,59	3,43
Transportasi dan Pergudangan	-4,38	7,17	16,9	11,64	10,95	8,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,98	3,21	9,96	6,93	7,6	3,94
Informasi dan Komunikasi	16,12	4,75	5,94	6,17	4,93	7,58
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,66	0,47	0,32	2,82	3,87	1,36
Real Estate	0,33	1,19	5,09	4,35	3,91	2,97
Jasa Perusahaan	-3,18	0,77	5,26	6,12	8,37	3,47
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-2,23	-0,99	-0,43	0,51	7,1	0,79
Jasa Pendidikan	1,97	0,54	0,59	3,17	5,96	2,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,98	5,46	3,29	3,2	5,1	5,41
Jasa lainnya	-10,68	4,08	12,11	9,39	7,18	4,42
Produk Domestik Regional Bruto	-5,34	4,79	5,52	5,8	5,73	3,30

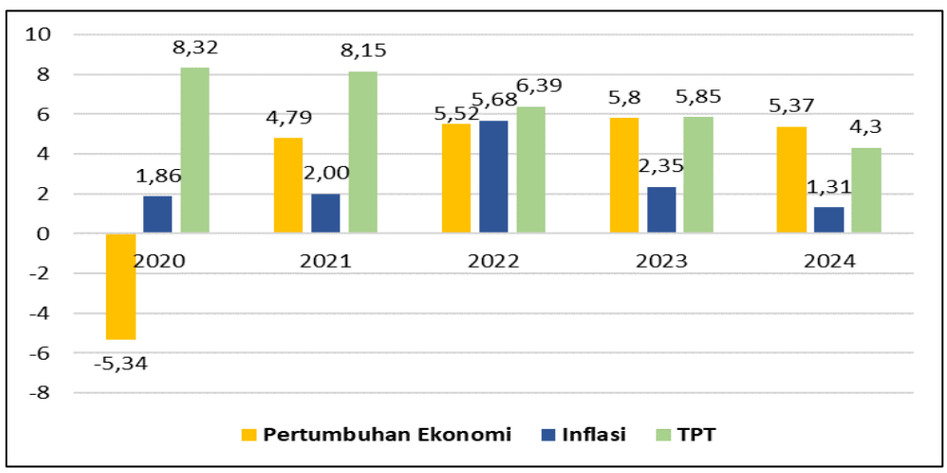
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun menurut lapangan usaha pada periode Tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Saat pandemi *Covid-19* Tahun 2020, banyak sektor yang mengalami kontraksi dan perlambatan pertumbuhan kecuali pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11,57%), sektor Informasi dan Komunikasi (16,12%), serta sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (4,86%). Secara keseluruhan terdapat tiga sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama tahun 2020-2024. Sektor tersebut berupa transportasi dan pergudangan dengan nilai sebesar 8,46% per Tahun, sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,58% per Tahun, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,41% per Tahun. Sementara itu, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah yakni sektor pertambangan dan penggalian yang terkontraksi sebesar -10,64% per tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Menghadapi kontraksi yang signifikan pada sektor Pertambangan dan Penggalian serta Perdagangan Besar dan Eceran, revitalisasi dan diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan dengan menitikberatkan pada penguatan sektor-sektor yang memiliki ketahanan dan menunjukkan pertumbuhan positif, seperti sektor Informasi dan Komunikasi serta Transportasi dan Pergudangan. Ini dapat dicapai melalui investasi pada infrastruktur digital, pelatihan keterampilan tenaga kerja di bidang logistik dan teknologi, serta memperlancar kemitraan antara UMKM lokal dengan *platform e-commerce* dan penyedia layanan logistik, untuk mempercepat adaptasi terhadap perubahan pola konsumsi dan dinamika rantai pasok global.

Lebih lanjut, strategi pembangunan ekonomi yang efektif sangat diperlukan untuk mendorong kembali sektor-sektor yang mengalami kontraksi dengan memperkuat sektor-sektor yang masih tumbuh dan berkembang, seperti informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan. Selain itu, investasi dalam infrastruktur digital dan pelatihan tenaga kerja di bidang logistik dan teknologi harus diperkuat, sementara fasilitasi kemitraan antara UMKM lokal dengan *platform e-commerce* dan penyedia layanan logistik perlu dilakukan agar UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi dan perkembangan rantai pasok global.



Gambar 2. 31 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Kinerja pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan TPT di Kota Madiun. Inflasi bergerak menuju pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan harga yang harus dibayar oleh suatu Daerah jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, demikian pula inflasi. Ini merupakan efek dari inflasi permintaan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan agregat dengan cara yang mempengaruhi kenaikan harga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pandemi yang merebak di Tahun 2020 mengguncang perekonomian Kota Madiun dan pertumbuhan ekonomi menyusut hingga ke level -5,34. Kekhasan kota Madiun dan faktor ekonomi utama sektor perdagangan, industri, dan jasa membuat Kota Madiun sangat rentan terhadap gangguan permintaan. Perdagangan, industri, dan jasa menjadi sektor yang buruk bersama dengan usaha transportasi, hotel, dan pariwisata, menyebabkan inflasi berada di level 1,86 pada Tahun 2020.

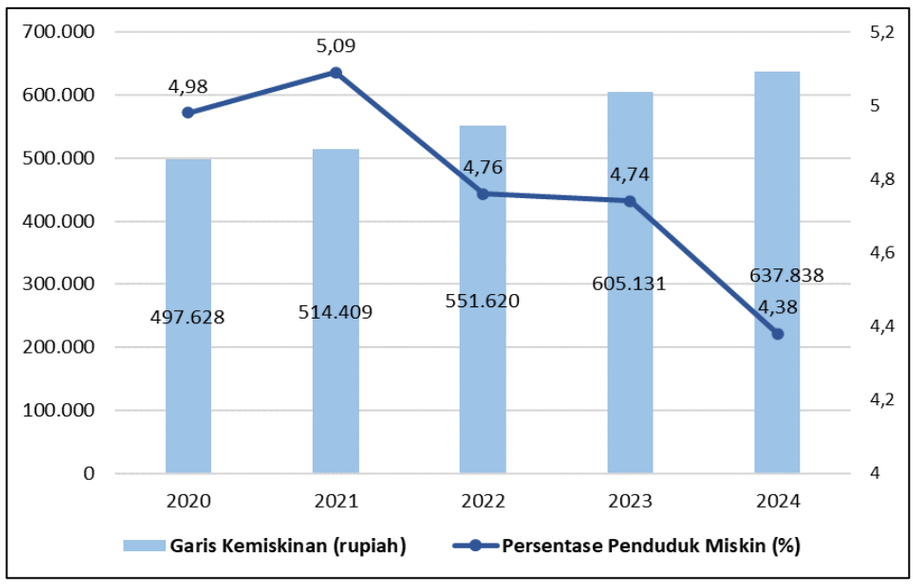
Menurunnya penyebaran *Covid-19* dan perekonomian yang kembali bangkit ditunjukkan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi bangkit sebesar 4,79% dan mencapai 5,52% pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023, inflasi menurun menjadi sebesar 2,35, begitu pula TPT yang mengalami penurunan menjadi 5,85%. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di Tahun 2023 sebesar 5,8%. Adapun di tahun 2024, inflasi turun menjadi 1,31% dan TPT juga turun menjadi 4,3%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,37%. Hal tersebut tidak luput dari program-program Pemerintah Kota Madiun yang telah mendukung pergerakan perekonomian Kota Madiun menjadi lebih baik.

B. Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Angka Kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu Daerah. Angka Kemiskinan dapat menjadi salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu masalah terbesar di berbagai tempat, tidak hanya di Kota Madiun. Penduduk dianggap miskin jika pengeluaran bulanannya berada di bawah garis kemiskinan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

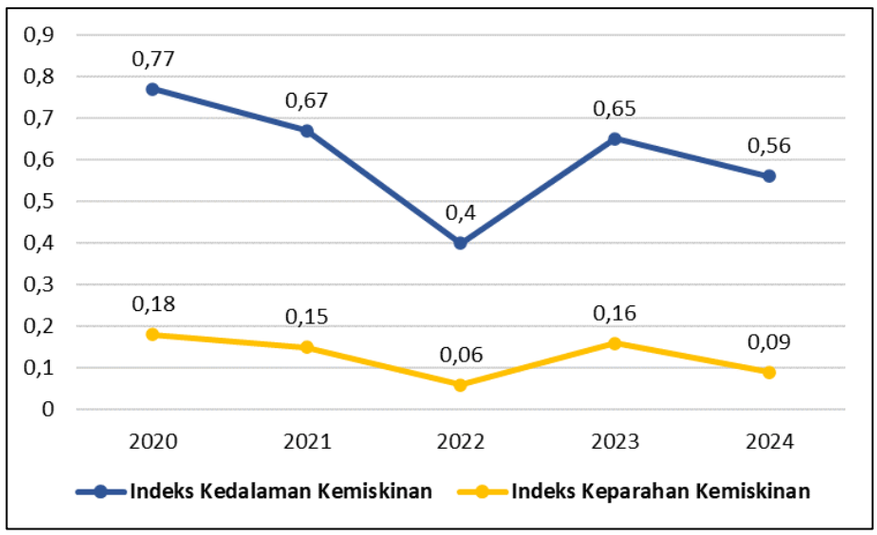


Gambar 2. 32 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Berdasarkan gambar diatas kondisi Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun berbanding terbalik. Sejak tahun 2020 Garis Kemiskinan terus mengalami kenaikan sedangkan dari segi Persentase Penduduk Miskinnya terus mengalami penurunan walaupun sempai terjadi kenaikan pada tahun 2021. Kenaikan Garis Kemiskinan dari tahun 2020 (497.628) sampai tahun 2024 (637.638) diakibatkan oleh adanya perubahan pola konsumsi di masyarakat selain itu di Kota Madiun setiap tahunnya selalu ada kenaikan upah minimum yang juga bisa mendorong Kenaikan Garis Kemiskinan. Walaupun Garis Kemiskinan terus mengalami kenaikan namun Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun terus mengalami penurunan menunjukkan bahwa ada kenaikan daya beli masyarakat dan pendapatan rill mereka meningkat, sehingga banyak penduduk yang berhasil keluar dari kategori miskin meskipun standar garis kemiskinannya terus naik.

Pemerintah Kota Madiun terus berupaya melakukan penurunan kemiskinan dengan berbagai program yang dijalankan seperti pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dan menstabilkan perekonomian. Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



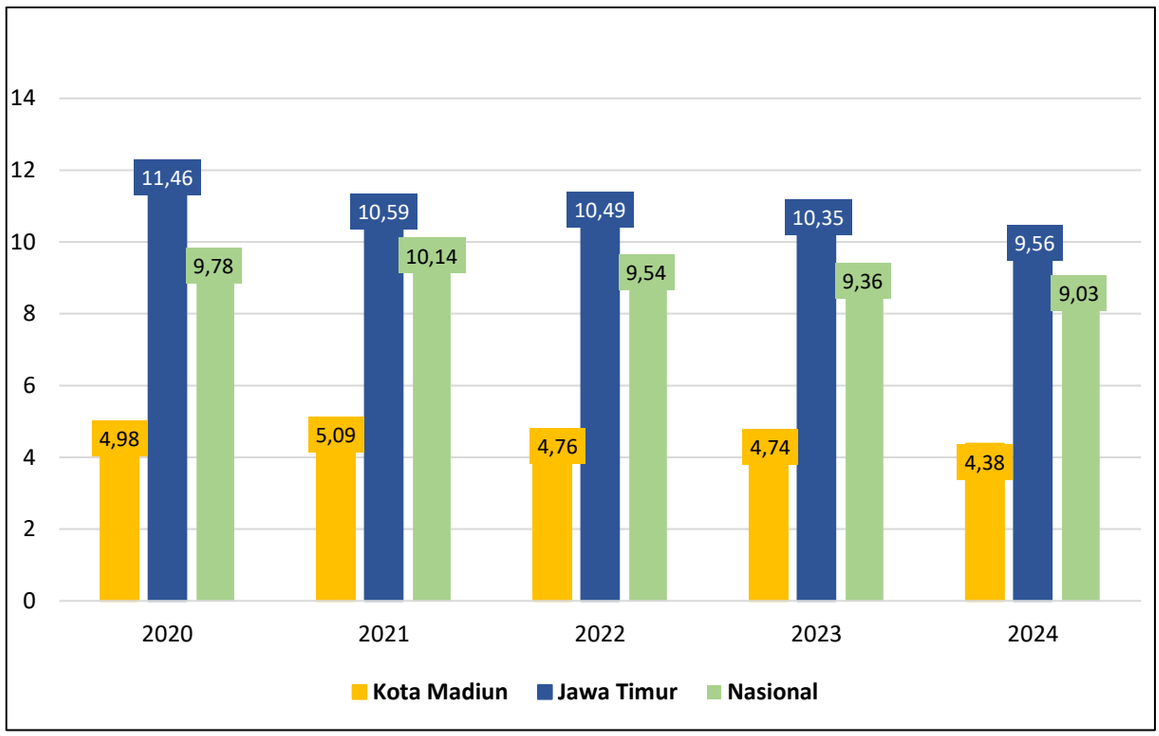
Gambar 2. 33 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Apabila ditinjau dari sisi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, Kota Madiun menunjukkan dinamika yang cenderung naik turun. Indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 0,77. Angka ini secara berangsur menurun hingga tahun 2022 yaitu sebesar 0,4. Di tahun 2022, indeks kedalaman kemiskinan mencapai angka paling rendah selama lima tahun. Sedangkan pada tahun 2024 indeks kedalaman kemiskinan menurun sebesar 0,56 meskipun pada tahun 2023 sempat meningkat di angka 0,65.

Demikian pula indeks keparahan kemiskinan yang perkembangannya sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan. Pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan mencapai titik tertinggi, yaitu 0,18. Angka ini kemudian berangsur-angsur turun hingga tahun 2022 di titik 0,06. Pada tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan berada pada angka 0,09, meskipun di tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,16.

Secara umum pola Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Madiun memiliki pola yang sama dan menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini menandakan bukan hanya jumlah penduduk miskin yang berkurang, tetapi juga Angka Kemiskinannya yang semakin ringan dimana penduduk miskin tidak semakin jauh dari garis kemiskinan yang menjadikan kesenjangan antar rumah tangga miskin mengecil. Hal ini bisa terjadi diakibatkan oleh efektivitas program perlindungan sosia yang tepat sasaran dan peningkatan daya beli masyarakat. Adapun perkembangan Angka Kemiskinan Kota Madiun dari tahun ke tahun disajikan pada gambar berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



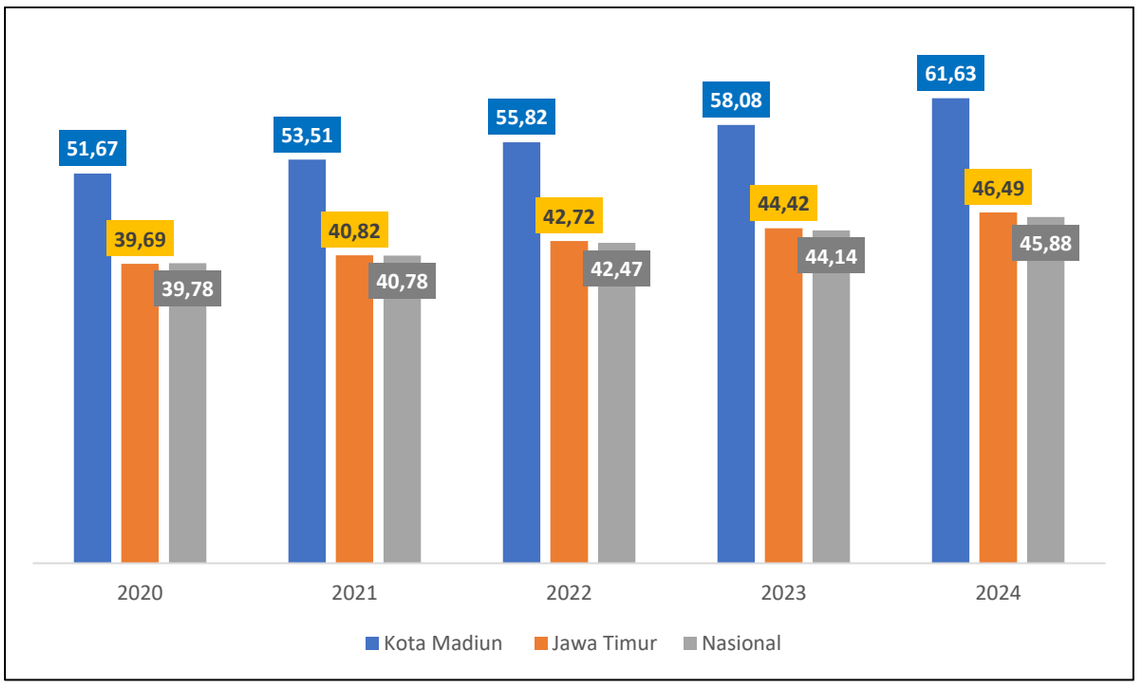
Gambar 2. 34 Angka Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Perkembangan Kemiskinan di Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun ini secara perlahan terus mengalami penurunan dan jika dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Kemiskinan Kota Madiun masih jauh dibawah sehingga bisa di golongkan dalam tingkat yang rendah. Walaupun tergolong rendah Pemerintah Kota Madiun tetap fokus untuk menurunkan Angka Kemiskinan ini agar kesejahteraaan masyarakat Kota Madiun terus meningkat. Pada tahun 2021 Kemiskinan Kota Madiun sedikit mengalami kenaikan yang mana ini merupakan imbas dari pandemi *Covid-19* menjadikan banyak rumah tangga yang mengalami penurunan bahkan kehilangan pendapatan mereka. Kemudian tahun 2021 sampai dengan 2024 perlahan kondisi Kemiskinan Kota Madiun terus mengalami penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh peningkatan perekonomian pasca pandemi, pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran serta upaya Pemerintah Kota Madiun dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat secara efektif dapat menekan angka kemiskinan.

C. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu Daerah dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu. PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi PDRB per kapita, maka tingkat kesejahteraan semakin baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



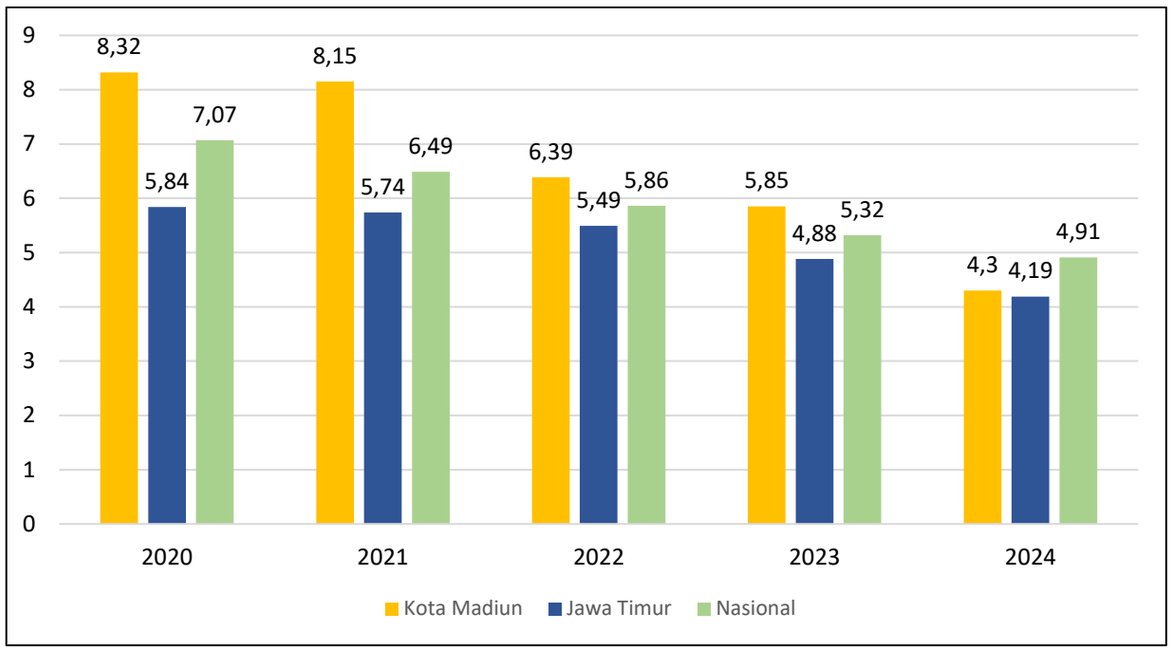
Gambar 2. 35 PDRB Per Kapita Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Dalam 5 (lima) tahun terakhir tingkat PDRB per kapita Kota Madiun berada di atas tingkat PDRB per kapita Provinsi dan Nasional. Hal ini menandakan perkembangan perekonomian Kota Madiun jauh lebih tinggi daripada rata rata pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional. PDRB per kapita Kota Madiun terus mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Kenaikan ini menandakan perkembangan perekonomian di Kota Madiun pasca *Covid-19* mengalami kenaikan yang positif. Kenaikan ini disumbang oleh sektor perdagangan dan jasa yang tumbuh pesat setelah pandemi selesai. Selain itu peningkatan investasi dan kenaikan konsumsi masyarakat juga menjadikan PDRB per kapita ini terus bertumbuh.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan di suatu Daerah dapat digambarkan melalui salah satu indikator yaitu pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja tidak baik. Pengangguran terbuka, merupakan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan diri untuk berwirausaha atau yang merasa tidak dapat memperoleh pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja. Gambaran mengenai data tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

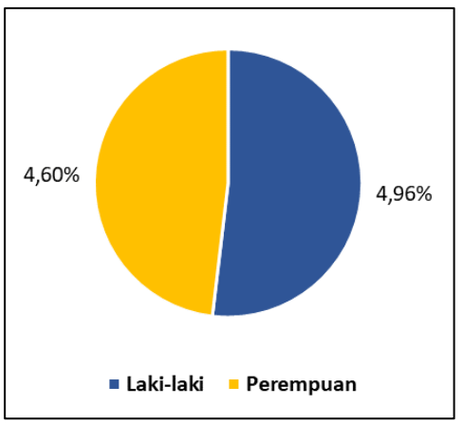


Gambar 2. 36 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional TPT Kota Madiun masih tergolong tinggi walaupun terjadi penurunan secara drastis di tahun 2024 sehingga berhasil dibawah tingka TPT Nasional namun masih di atas TPT Provinsi Jawa Timur. TPT Kota Madiun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 yang tinggi dikarenakan efek pandemi *Covid-19* yang menekan sektor perekonomian menjadikan banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mereka, selain itu kondisi masyarakat Kota Madiun yang berada pada usia produktif mengalami kenaikan. TPT Kota Madiun mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 8,15 menjadi 6,39 pada tahun 2022 diakibatkan oleh pemulihan ekonomi khusunya pada sektor jasa dan perdagangan. Penurunan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2024 dimana TPT Kota Madiun menjadi 4,3. Penurunan secara berkelanjutan ini disebabkan oleh pertumbuhan positif perekonomian pasca pandemi, UMKM yang kembali hidup serta masuknya investasi besar di Kota Madiun seperti perhotelan, kesehatan dan retail besar membuat lapangan pekerjaan di Kota Madiun semakin banyak yang mendorong penyerapan tenaga kerja.

Perbandingan antara tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan adalah sebesar 9,85% dan 2,30%. Tingkat pengangguran Kota Madiun berada diatas nilai Provinsi Jawa Timur dan Nasional mulai dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2023 nilai tingkat pengangguran Kota Madiun sebesar 5,85 diatas TPT Jawa Timur sebesar 4,88%.

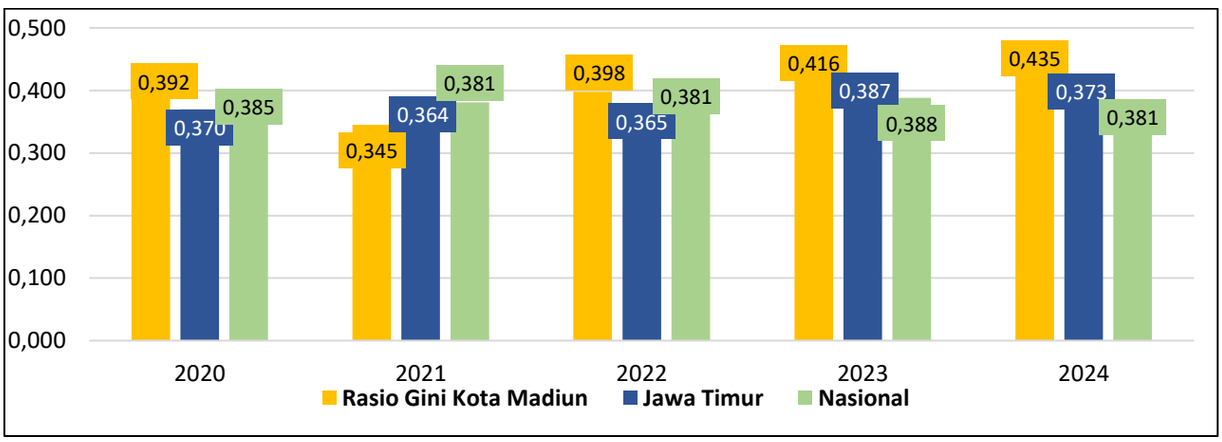
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 37 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 (%)
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

E. Indeks Gini

Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah yakni indeks gini. Nilai indeks gini berkisar nol sampai satu. Semakin nilai indeks gini mendekati angka nol maka pemerataan pendapatan semakin baik atau setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sedangkan jika nilai indeks gini semakin mendekati angka satu maka menunjukkan kesenjangan pendapatan dan ketimpangan yang tinggi di Daerah tersebut.



Gambar 2. 38 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, dan BPS Indonesia, 2025

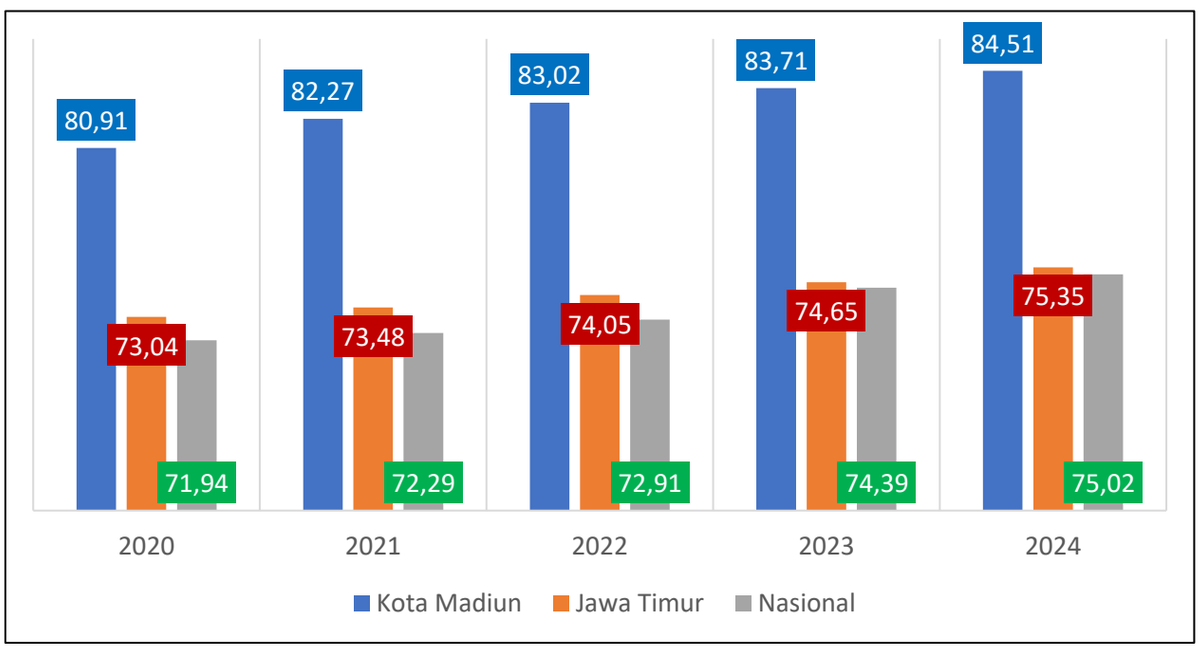
Indeks Gini Kota Madiun selama lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat, yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan yang memburuk. Pada tahun 2020 sebesar 0.392 dan menjadi 0,435 pada 2024. Meskipun masih berada dalam kategori ketimpangan sedang, angka ini menunjukkan ketimpangan yang makin melebar. Jika dibandingkan selama lima tahun terakhir secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan di Kota Madiun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lingkup yang lebih luas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Fluktuatifnya Indeks Gini Kota Madiun ini dipengarungi oleh beberapa faktor. Penurunan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 ini dipengaruhi oleh adanya pandemi *Covid-19* yang menjadikan kondisi ekonomi menurun drastris. Ini menjadikan pendapatan masyarakat relatif sama dan merata dikarenakan banyak sektor mengalami penurunan. Pemberian bantuan secara masih oleh pemerintah membantu dalam menekan ketimpangan. Sedangkan kenaikan pada 2021 sampai dengan 2024 dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi yang drastis pasca pandemi tidak merata dimana kelompok masyarakat menengah ke atas lebih cepat pulih dibandingkan kelompok masyarakat menengah kebawah. Melihat perkembangan ekonomi Kota Madiun yang meningkat drastis ini menjadikan banyak investasi besar yang masuk seperti perhotelan, ritel besar menjadikan *gap* pendapatan semakin menjauh.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen kualitas hidup. Dimensi dasar yang membentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana pendapatan penduduk, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain dapat mengarah pada hasil pembangunan. Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikator kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah tertentu.



Gambar 2. 39 IPM Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Secara umum IPM Kota Madiun terus mengalami kenaikan mulai tahun 2020 sebesar 80,91 dan di tahun 2024 menjadi sebesar 84,51. Jika dibandingkan dengan IPM Jawa Timur dan IPM Nasional, Kota Madiun selalu berada di atas sehingga menunjukkan bahwa perkembangan lebih maju. Kenaikan tingkat IPM di Kota Madiun ini dipengarungi beberapa faktor seperti pemulihan pasca pandemi yang cepat sehingga perekonomian tidak mengalami penurunan dalam kurun waktu yang lama, Investasi Pemerintah Kota Madiun dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur maksimal dilakukan sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, selain itu moderanisasi Kota dan pengembangan sektor jasa juga menjadi andil dalam kenaikan IPM Kota Madiun. Mulai Tahun 2020, penghitungan IPM menggunakan hasil Sensus Penduduk *Long Form* (SP LF Tahun 2020). Berdasarkan hasil SP LF 2020, IPM penyesuaian hasil SP LF mengalami peningkatan.

Tabel 2. 16 Komponen IPM Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Indeks	Kota Madiun	Provinsi Jawa Timur
Umur Harapan Hidup	75,67	75,07
Harapan Lama Sekolah	14,54	13,43
Rata-rata Lama Sekolah	12,11	8,28
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	17.518	12.852
IPM	84,51	78,6

Sumber: BPS Kota madiun, 2025

Tabel di atas menunjukkan nilai dari masing-masing dimensi pembentuk dari IPM. Umur harapan hidup di Kota Madiun pada Tahun 2024 yakni sebesar 75,67 tahun, harapan lama sekolah sebesar 14,54 Tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 12,11 tahun, dan pengeluaran per kapita sebesar Rp17.518.000, sehingga IPM Kota Madiun pada tahun 2024 mencapai 84,51 menandakan seluruh dimensi pembentuk IPM Kota Madiun terkategorikan tinggi jika dibandingkan Kab/Kota lain di Provinsi Jawa Timur.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

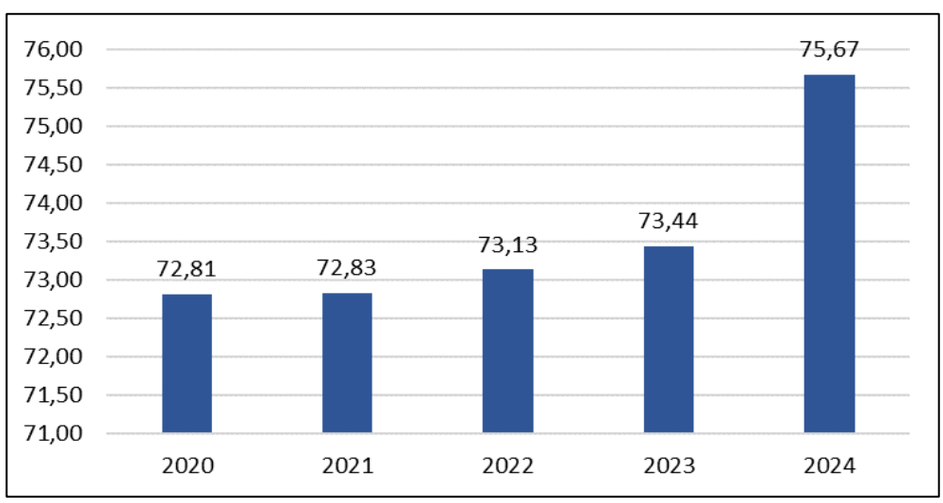
Pemerintah Kota Madiun secara konsisten menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakatnya. Hal tersebut tercermin dari capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terus mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sejak tahun 2019, Kota Madiun telah berhasil mencapai *Universal Health Coverage* (UHC), yaitu kondisi ketika lebih dari 90 persen penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pencapaian ini semakin diperkuat pada tahun 2022, dengan cakupan kepesertaan mencapai 99,29 persen, sekaligus memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat melalui penghargaan UHC pada tahun 2023. Kinerja positif ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana cakupan kepesertaan tetap terjaga pada tingkat yang sangat tinggi, yakni 99,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian UHC bukan hanya bersifat sesaat, melainkan mampu dijaga secara berkelanjutan. Dengan demikian, capaian jaminan kesehatan Kota Madiun dalam lima tahun terakhir menegaskan posisi Kota Madiun sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan program JKN. Pencapaian ini sekaligus menjadi bukti nyata atas komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap warga memperoleh hak dasar di bidang kesehatan secara adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.

A. Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah. UHH mencerminkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Tujuan pengukuran UHH adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesehatan masyarakat, serta efektivitas sistem kesehatan dalam memperpanjang harapan hidup penduduk. UHH juga berfungsi sebagai referensi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Umur Harapan Hidup Kota Madiun dari tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2020, UHH Kota Madiun berada di titik 72,81. Angka ini kemudian terus meningkat hingga tahun 2024 sebesar 75,67.

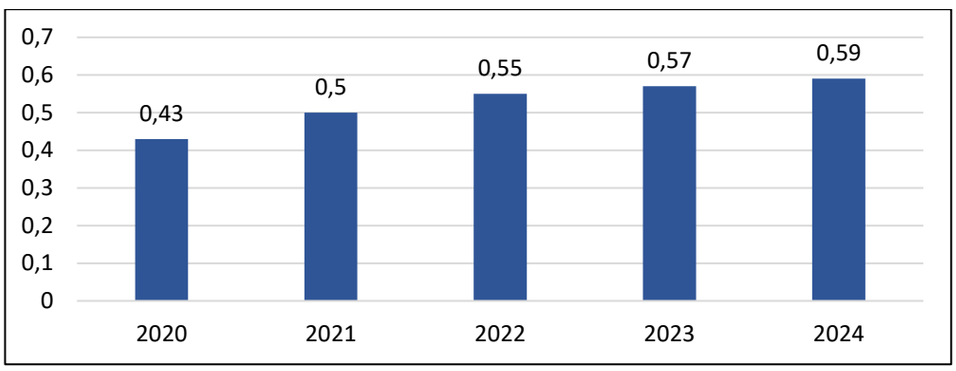


Gambar 2. 40 Umur Harapan Hidup Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Indeks Keluarga Sehat

Terdapat 12 indikator indeks keluarga sehat. Indikator tersebut adalah (1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan; (3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; (4) Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama 6 bulan; (5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; (6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; (7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; (8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih dan (12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.



Gambar 2. 41 Indeks Keluarga Sehat Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Madiun pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan capaian yang sama, yakni sebesar 0,57, dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 0,59. Berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan, capaian IKS dikategorikan sebagai berikut: tidak sehat (<0,50), pra-sehat (0,50–0,79), dan sehat (≥0,80). Dengan demikian, capaian IKS Kota Madiun selama tiga tahun terakhir berada dalam kategori pra-sehat, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar keluarga di Kota Madiun telah memenuhi beberapa indikator kesehatan dasar namun masih memerlukan perbaikan di sejumlah aspek penting. Peningkatan IKS dari 0,57 menjadi 0,59 menunjukkan adanya perbaikan kecil dalam kondisi kesehatan keluarga, kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan layanan kesehatan dasar, kesadaran masyarakat, atau cakupan program-program seperti imunisasi, ASI eksklusif, dan kepesertaan JKN. Meski begitu, angka ini masih menunjukkan perlunya penguatan intervensi pada indikator-indikator yang belum maksimal, seperti pengobatan rutin bagi penderita penyakit kronis, pengurangan perilaku merokok, serta akses terhadap air bersih dan jamban sehat.

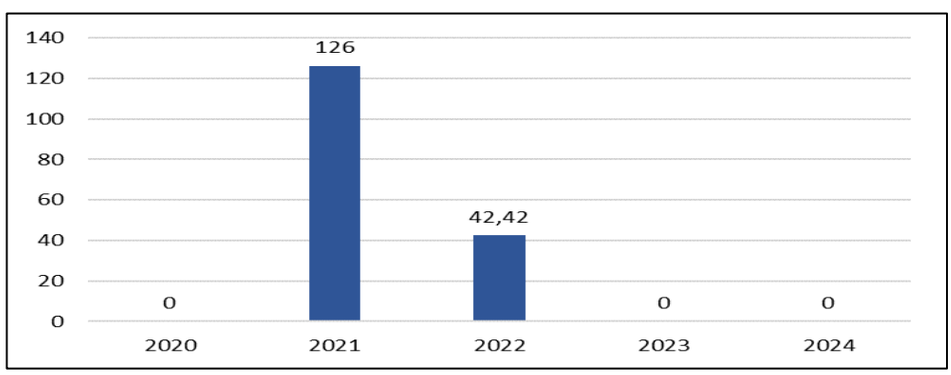
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Upaya terpadu lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong capaian menuju kategori "sehat" dalam beberapa tahun ke depan. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga Kota Madiun tahun 2023 sebesar 60,52, naik sebesar 70,55 tahun 2024 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Madiun menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, nilai iBangga Kota Madiun tercatat sebesar 60,52, yang masih berada pada kategori cukup berkembang. Namun pada tahun 2024, nilai tersebut meningkat tajam menjadi 70,55, atau naik hampir 10 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan peningkatan ketenteraman, kemandirian, serta kebahagiaan keluarga di Kota Madiun.

Peningkatan yang signifikan ini tidak terlepas dari konsistensi Pemerintah Kota Madiun dalam menjalankan berbagai program ketahanan keluarga, mulai dari penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan nilai sosial budaya masyarakat. Pada tahun 2023 Kota Madiun berhasil meraih penghargaan 5 (lima) besar Nasional dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu daerah dengan capaian peningkatan iBangga terbaik. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan di Kota Madiun.

C. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.



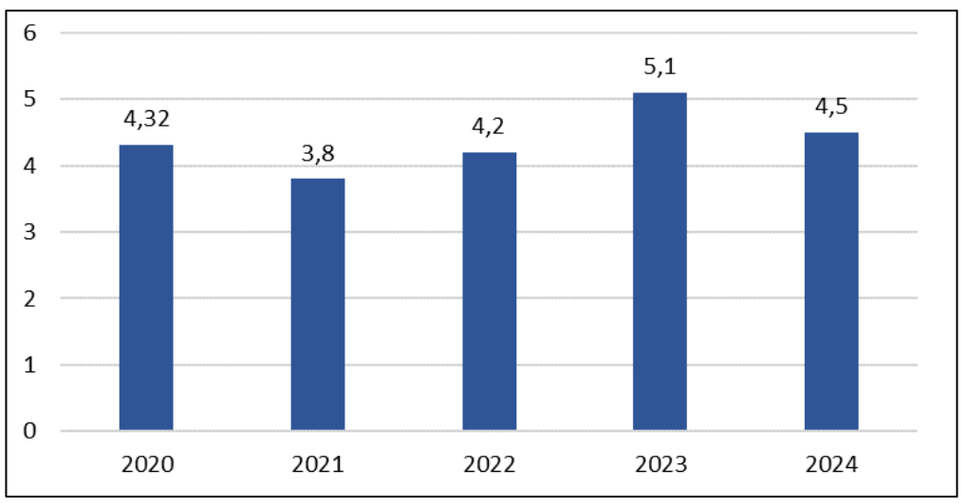
Gambar 2. 42 Angka Kematian Ibu Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Pada Tahun 2020 tidak ada kematian ibu. Namun angka ini meningkat secara signifikan pada tahun 2021 sebanyak 126 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2022 angka kematian ibu turun menjadi 42,42. Pada Tahun 2023 dan 2024, Angka kematian ibu tercatat tidak ada kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Kenaikan drastis pada tahun 2021 ini imbas dari pandemi *Covid-19*, akses pelayanan kepada ibu hamil terganggu akibat fasilitas kesehatan sepenuhnya dikerahkan untuk penanganan pandemi, selain itu dengan para ibu hamil engkan untuk memeriksakan kehamilannya karena berisiko terkena pandemi dan membahayakan kandungannya. Kenaikan yang drastis tahun 2021 ini juga ditengarai dikarenakan adanya rumah sakit provinsi yang menjadi rujukan pasien *Covid-19* di Kota Madiun, menjadikan banyak pasien yang sebenernya bukan dari masyarakat Kota Madiun yang akhirnya terhitung capaian di Kota Madiun. Setelah tahun 2022 sampai 2024 Tingkat Kematian Ibu berangsur turun di Kota Madiun.

D. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat bayi lahir sampai satu hari sebelum hari ulang tahun pertama. Berdasarkan penyebabnya, kematian bayi dibedakan oleh faktor endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen (kematian neonatal) adalah kejadian kematian yang terjadi pada bulan pertama sejak bayi dilahirkan umumnya disebabkan oleh faktor yang dibawa sejak lahir, diwarisi oleh orangtua pada saat konsepsi atau didapat dari ibunya selama kehamilan. Angka kematian bayi adalah jumlah kematian penduduk kurang dari 1 tahun yang dicatat selama satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.



Gambar 2. 43 Angka Kematian Bayi Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi. Pada tahun 2020 angka kematian bayi sebesar 4,32 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menurun di tahun 2021 sebesar 3,8. Namun di tahun 2022 dan 2023 angka kematian bayi meningkat menjadi 4,2 dan 5,1. Adapun angka kematian bayi di tahun 2024 adalah 4,5 per 1.000 kelahiran hidup.

E. Stunting

Stunting atau biasa disebut dengan Balita pendek merupakan permasalahan di Indonesia akhir-akhir ini. Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Menurut Dinas Kesehatan Kota Madiun, balita stunting pada Tahun 2022 sebanyak 497 balita. Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 392 balita. Jumlah balita stunting pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 355 balita.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar dengan penetapan anggaran sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang sebesar 20 persen dari APBD. Pelayanan aspek pendidikan diharapkan mampu mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah, serta mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan cerdas.

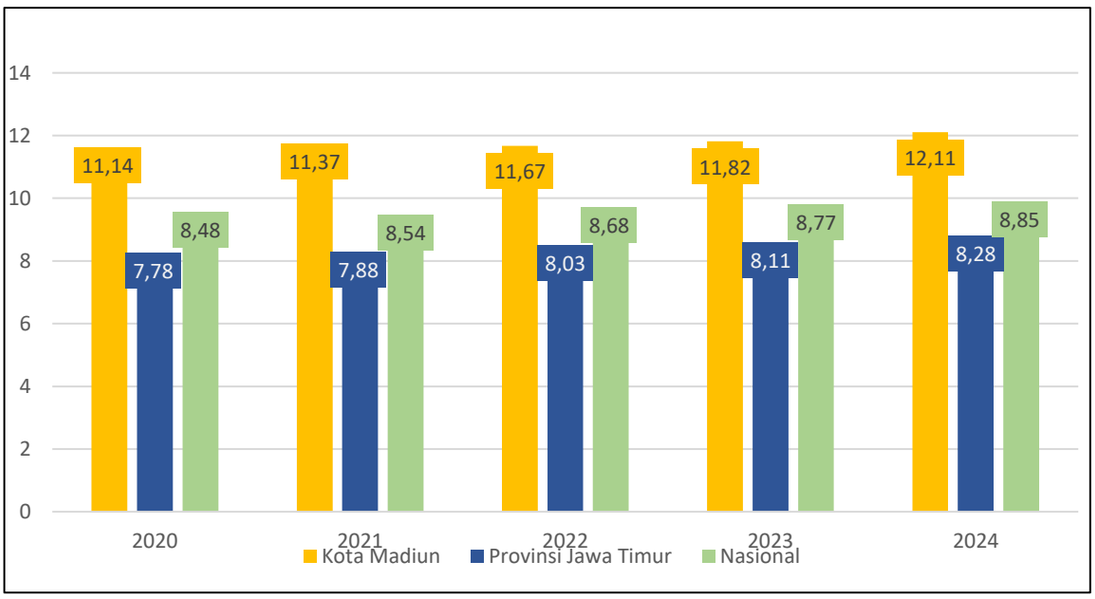
Kualitas dan akses pendidikan khususnya pendidikan formal dipresentasikan dari tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) khususnya pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan penduduk berumur 25 Tahun ke atas pada semua jenis pendidikan formal. Berbeda dengan metode lama yang menghitung rata-rata lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah pada jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 Tahun ke atas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Realisasi angka rata-rata lama sekolah Kota Madiun mengalami peningkatan dari Tahun 2002 sebesar 9,9 menjadi 12,11 pada Tahun 2024 atau setingkat dengan SMA kelas 3. Nilai rata-rata lama sekolah Kota Madiun tahun 2024 bahkan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang sebesar 8,28 dan 8,85. Peningkatan dan tingginya angka tersebut disebabkan semakin menyadari pentingnya pendidikan dan dukungan pemerintah kota Madiun, khususnya program pendidikan dasar, peningkatan sarana dan prasarana sekolah dasar dan menengah, serta program BOS dari pemerintah pusat.

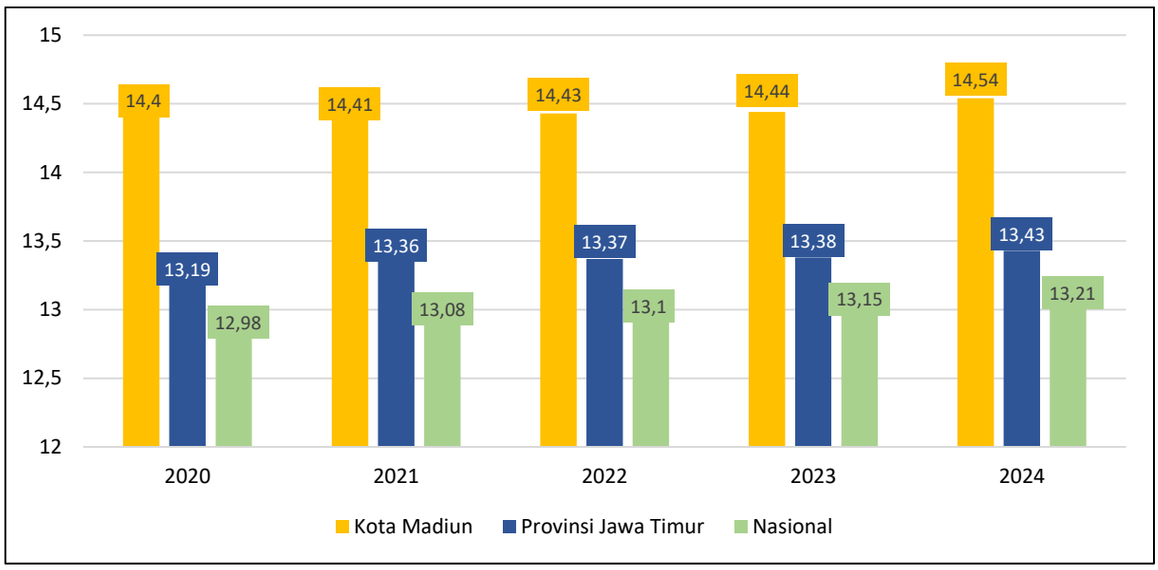


Gambar 2. 44 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

B. Harapan Lama Sekolah

Lama bertahannya seorang anak dalam pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan suatu Daerah. Angka harapan lama sekolah merupakan lama belajar (dalam Tahun) yang mungkin dialami seorang anak pada usia tertentu di masa depan. Capaian harapan lama sekolah Kota Madiun selama periode Tahun 2005-2024 mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Angka Harapan Lama sekolah pada Tahun 2005 sebesar 9,62 Tahun, kemudian pada Tahun 2024 mencapai 14,54 Tahun. Hal tersebut menunjukkan lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa depan telah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa, bantuan Laptop gratis, dan bantuan seragam gratis serta ongkos jahit bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

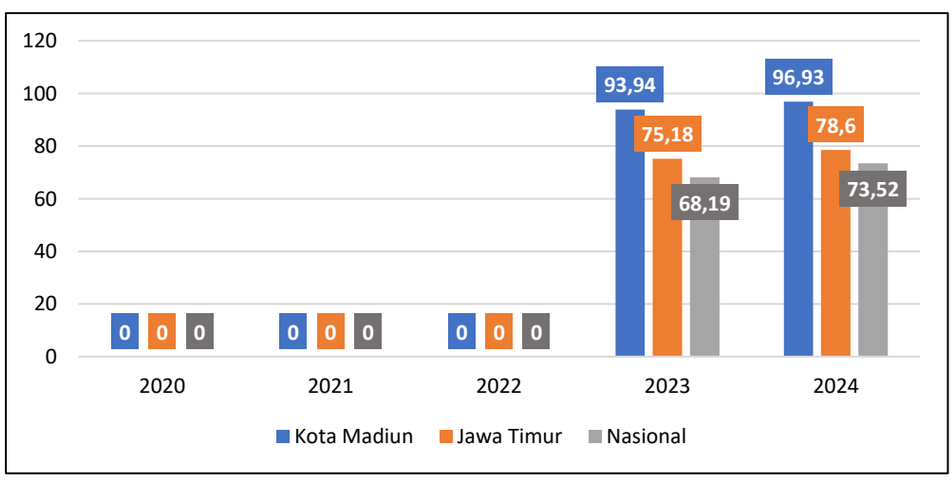
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 45 Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat terdiri dari 7 komponen, yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan berstandar Nasional Perpustakaan (SNP), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Aspek masyarakat (AM) terdiri dari 4 komponen, yaitu Jumlah Penduduk, Jumlah Civitas Sekolah, Jumlah Civitas Akademika, Jumlah Penduduk yang Bekerja.



Gambar 2. 46 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur , 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ini baru dihitung oleh BPS pada tahun 2023 dan 2024. Capaian Kota Madiun jauh di atas rata rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Ini menandakan bahwa program literasi di Kota Madiun berjalan lebih efektif. Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun mencapai 93,94 dan meningkat mencapai 96,93 pada tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti fasilitas literasi yang memadai dengan modernisasi perpustakaan kota sehingga bisa meningkatkan minat baca masyarakat, selain itu digitalisasi koleksi perpustakaan juga mempermudah dalam akses baca masyarakat sehingga bisa membaca dimana saja dan kapan saja. Selain itu Pemerintah Kota Madiun menggalakan Program Outdoor Learning kepada sekolah yang mana menjadikan kegiatan belajar lebih menarik sehingga minat baca siswa meningkat, menyediakan layanan perpustakaan keliling yang beroperasi secara rutin sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses buku bacaan sampai ke sudut-sudut kota.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

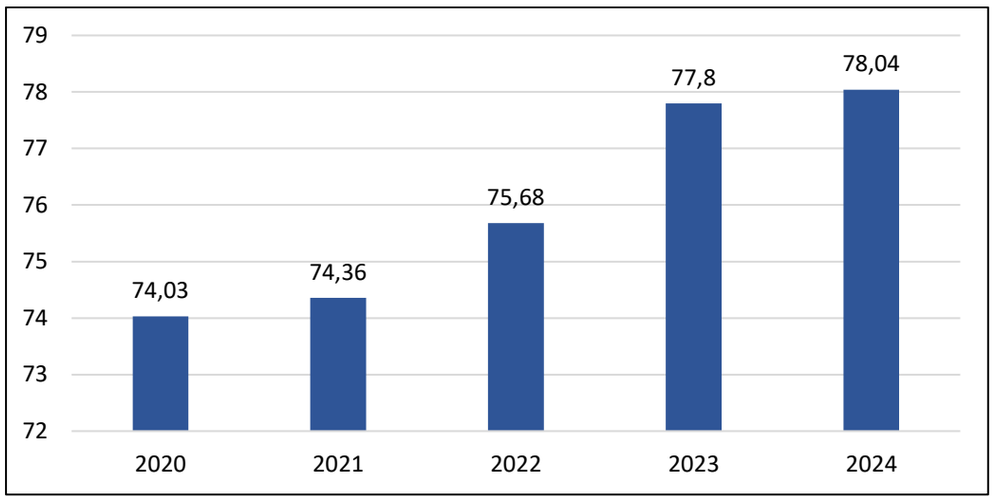
Kota Madiun selama Tahun 2020 hingga Tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Pada Tahun 2020 jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja sebanyak 23.294 pekerja. Tahun 2022 jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja di Kota Madiun sudah mencapai 25.506 pekerja. Tahun 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2.644 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlah penerima menjadi 28.150 pekerja.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Indeks Kerukunan

Kerukunan umat beragama memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini perlu dikelola dengan baik dan tepat. Agama apa pun yang dianut oleh masyarakat akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, asalkan ajaran agama tersebut dihayati dan diterapkan dengan benar. Terdapat lima dimensi yang diukur secara berurutan yaitu Jujur, Menerima, Menghormati, Kesetaraan dan Teladan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 47 Indeks Kerukunan Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, 2025

Secara umum Indeks Kerukunan Kota Madiun terus mengalami kenaikan sejak 2020 sebesar 74,03 menjadi 78,04 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat semakin harmonis dari tahun ke tahun. Faktor pendorongnya antara lain semakin pulihnya kondisi sosial pasca pandemi dan peran pemerintah yang terus melibatkan masyarakat dalam berbagai upaya pembangunan di Kota Madiun tanpa memandang ras, agama dan kedudukan. Budaya gotong royong dan solidaritas masih dijaga oleh masyarakat. Faktor ini menjadi fondasi kerukunan yang kuat dan menjadi modal penting dalam pembangunan berkelanjutan.

B. Seni Budaya dan Bangunan Budaya

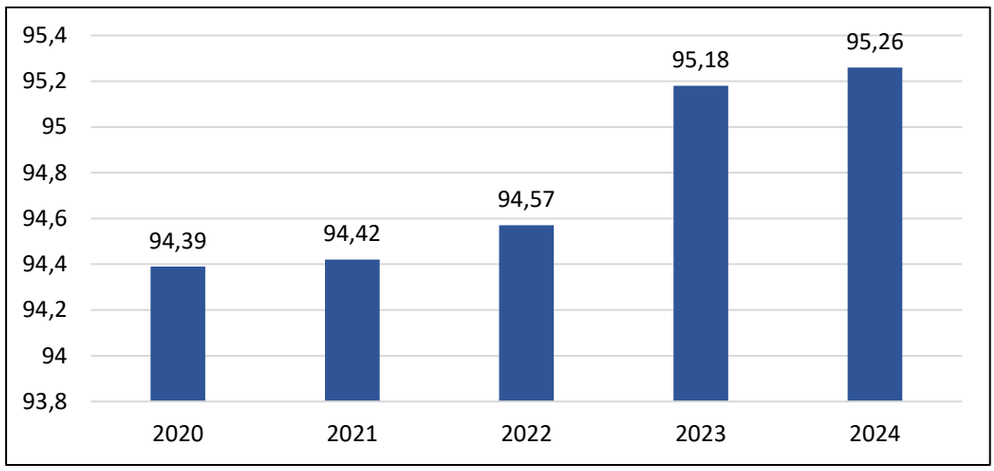
Aspek budaya di Kota Madiun dicerminkan melalui dua indikator, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan dan persentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan. Adapun capaian tersebut di Kota Madiun yaitu sebesar 100% pada indikator persentase seni budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan indikator persentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Pembangunan Gender

Dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG), IPG merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian dengan indikator yang sama seperti IPM, namun lebih fokus menunjukkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



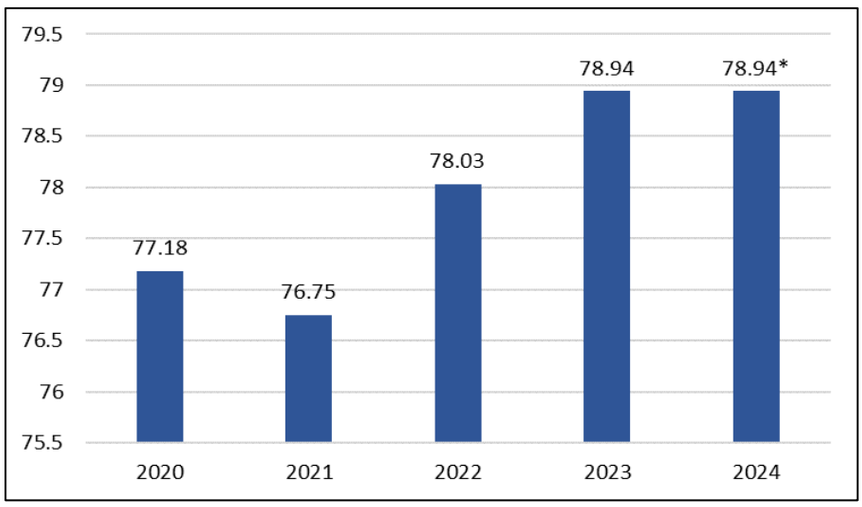
Gambar 2. 48 Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Madiun mengalami perkembangan yang positif dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023. Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun Tahun 2020 sebesar 94,38. Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 94,42. Tahun 2022, Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi sebesar 94,57, hingga Tahun 2024 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 95,26. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan data laporan pengaduan di Pusat Pelayanan Terpadu, tidak terdapat kekerasan terhadap perempuan dan anak. selama Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah ditangani dengan baik, dengan capaian sebesar 100%.

B. Indeks Pemberdayaan Gender

Kemudian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kota Madiun pada tahun 2020 sebesar 77,18 dan menurun menjadi 76,75 pada tahun 2021. Penurunan ini terjadi akibat adanya pandemi *Covid-19* dimana diberlakukan pembatasan interaksi langsung dan penurunan ekonomi yang tentunya menjadi tekanan besar kepada partisipasi perempuan khususnya pada sektor kerja karena banyak perempuan yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan mereka. Namun setelah pandemi mereda pada tahun 2022 sebesar 78,03 sampai dengan 2024 mencapai 78,94 Indeks Pemberdayaan Gender terus mengalami kenaikan. Kembali pulihnya perekonomian dan aktivitas sosial menjadikan banyak perempuan bisa kembali mendapatkan kembali pekerjaan layak.

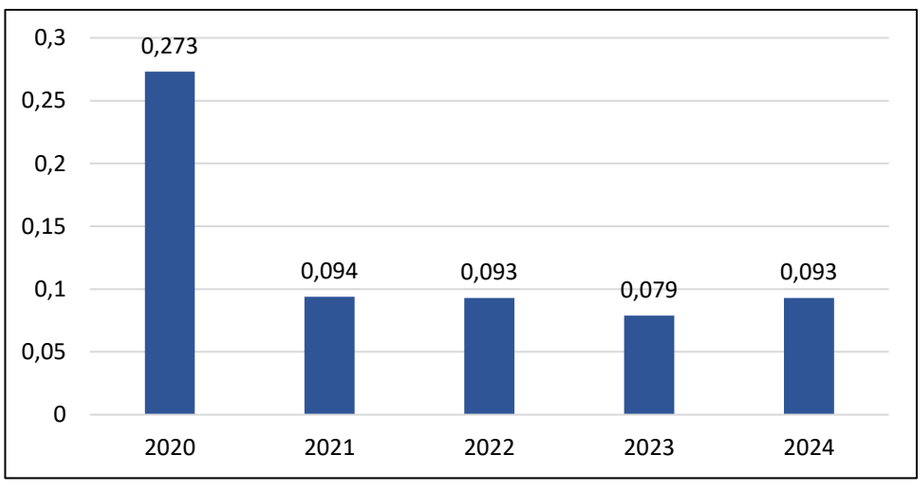
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 49 Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

C. Indeks Ketimpangan Gender

Salah satu indikator yang dapat melihat kesenjangan gender yakni Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merujuk pada metodologi yang digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam menyusun *Gender Inequality Index* (GII) 2010 dengan menyesuaikan data yang tersedia. IKG berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dengan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.



Gambar 2. 50 Indeks Ketimpangan Gender di Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Madiun pada Tahun 2020 mencapai 0,273. IKG Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,09. Adapun pada tahun 2023, IKG mengalami penurunan hingga 0,079. Namun pada tahun 2024 IKG kembali mengalami kenaikan menjadi 0,093. Jika dilihat secara umum IKG Kota Madiun sebenernya cukup stabil pada tahun 2021-2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kenaikan drastis tahun 2020 diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* dimana banyak perempuan yang harus kehilangan pekerjaan mereka akibat penurunan ekonomi terutama pada sektor Informal, UMKM dan pekerjaan rumah tangga. Penurunan drastis terlihat pada tahun 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi dan berhasil dijaga sampai dengan 2024. Hal ini merupakan keberhasilan program pemberdayaan perempuan, peningkatan partisipasi dalam ekonomi, pendidikan dan Kesehatan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merepresentasikan perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Sehingga Rasio Ketergantungan juga mencerminkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif.

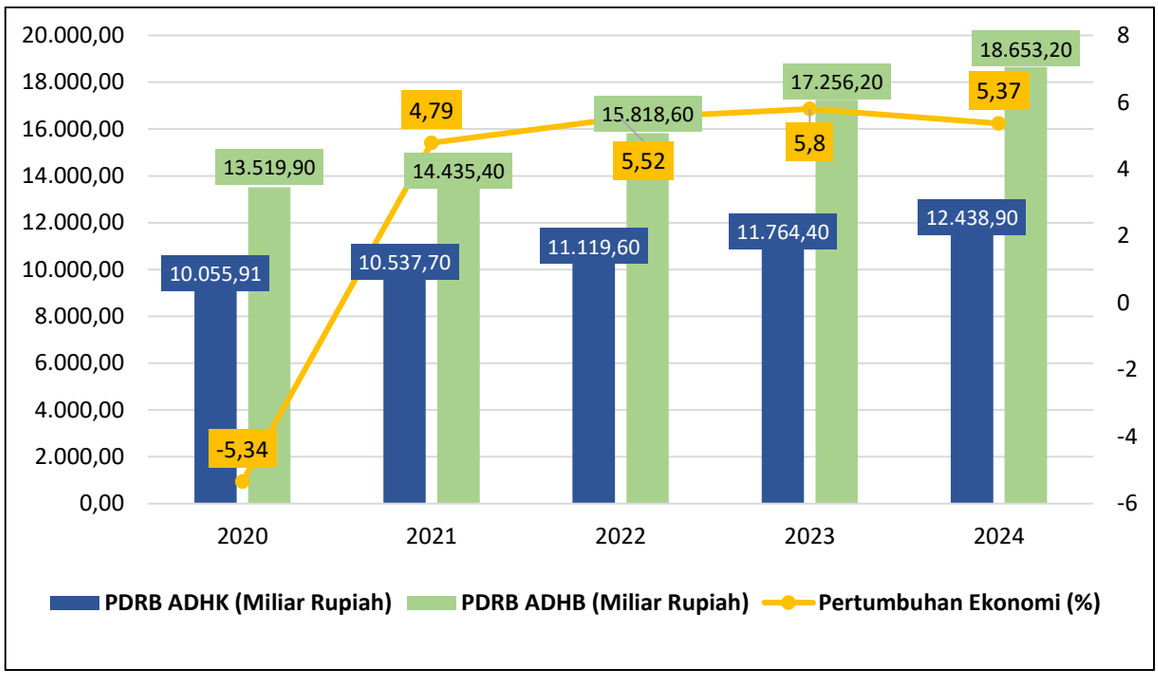
Adapun Rasio Ketergantungan Kota Madiun pada tahun 2024 adalah 42,77% yang berarti bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kota Madiun harus menanggung sekitar 43 orang usia tidak produktif. Angka ini relatif rendah, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Madiun berada dalam usia produktif, yang merupakan kondisi demografis yang menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, tetap perlu kebijakan untuk meningkatkan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan, terutama untuk penduduk tidak produktif agar beban ekonomi tidak semakin berat.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Bruto (ADHB)

PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga periode berjalan, sedangkan PDRB harga tetap dihitung dengan menggunakan harga Tahun tertentu pada Tahun dasar yakni menggunakan Tahun dasar 2010.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 51 PDRB ADHK, PDRB ADHB, Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kota Madiun menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun mengalami kontraksi di tahun 2020, PDRB ADHK terus meningkat setiap tahun setelahnya. Demikian pula PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Madiun juga menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19* yang berimbas kepada penurunan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Perkembangan positif mulai terlihat pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Program pemulihan dan penguatan perekonomian seperti pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, upaya peningkatan UMKM, Perbaikan saran dan prasarana perkotaan mendorong perkembangan perekonomian yang baik. Namun pada tahun 2024 terjadi sedikit perlambatan dikarenakan kondisi perekonomian sedang lesu ditambah adanya penurunan ekonomi global dan belum stabilnya perekonomian nasional pasca pemilihan presiden menjadi imbas penurunan ekonomi di Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 17 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (%) Tahun 2020-2024

No	Sektor/Kategori	Tahun					Rata - Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,84	0,74	0,66	0,66	0,71	0,72
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
3	Industri Pengolahan	14,23	14,54	14,08	14,37	13,63	14,17
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,23	0,24	0,23	0,23	0,21	0,23
6	Konstruksi	6,13	5,8	5,95	5,89	5,93	5,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	22,21	23,35	23,89	23,84	26,37	23,93
8	Transportasi dan Pergudangan	3,17	3,24	3,59	3,79	4,72	3,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,12	5,04	5,25	5,31	5,4	5,22
10	Informasi dan Komuniasi	19,3	19,29	19,37	19,44	15,04	18,49
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,36	8,97	8,53	8,29	9,49	8,93
12	Real Estate	2,62	2,53	2,52	2,49	2,46	2,52
13	Jasa Perusahaan	0,74	0,72	0,71	0,72	0,69	0,72
14	Administrasi Pemerintahaan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,13	2,96	2,79	2,65	2,82	2,87
15	Jasa Pendidikan	7,79	7,48	7,13	6,95	7,05	7,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	1,54	1,5	1,47	1,47	1,50
17	Jasa Lainnya	3,48	3,46	3,68	3,8	3,92	3,67
	PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

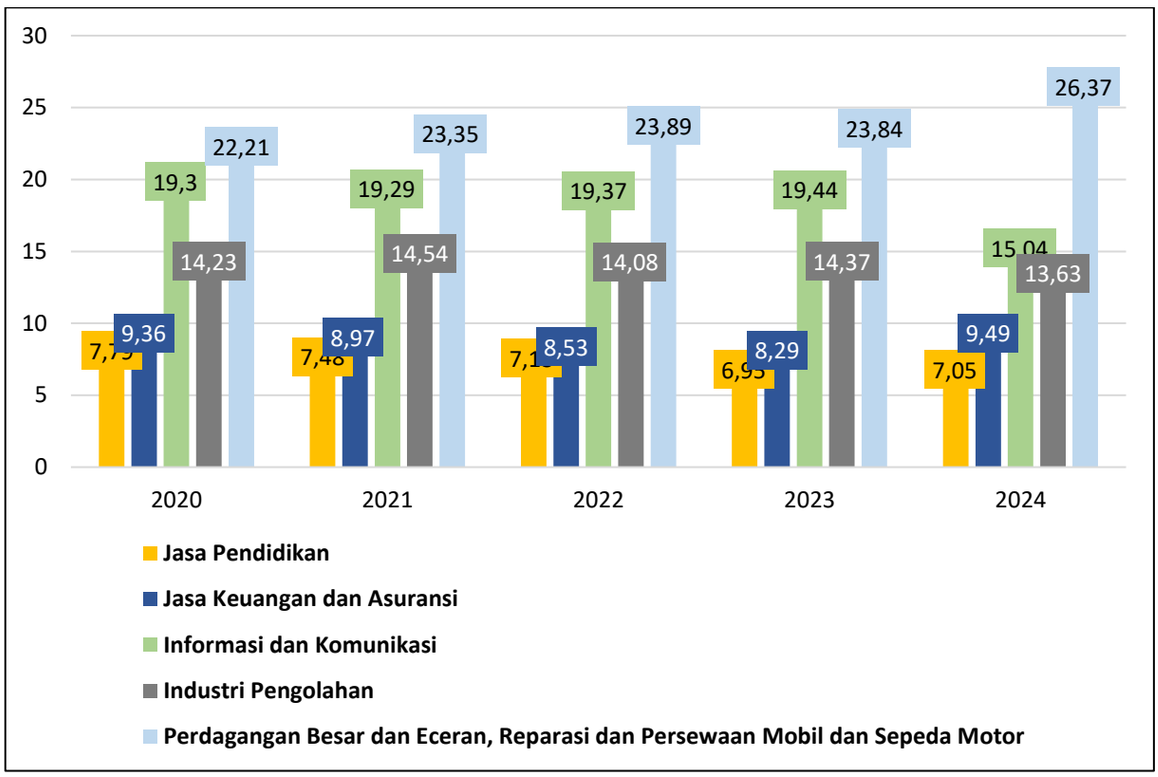
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam kurun waktu 5 tahun terkahir ini perkembangan kontribusi PDRB ADHB berdasarkan Lapangan Usaha di Kota Madiun mengelami tren fluktuatif. Terdapat beberapa sektor yang mengalami kenaikan dan ada juga sektor yang mengalami penurunan. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 sebesar 26.37% yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 22.21%. Dengan perkembangan positif dan besarnya kontribusi terhadap PDRB secara keseluruhan menjadikan sektor ini sebagai sektor utama penggerak perekonomian di Kota Madiun. Sektor lain yang mengalami kenaikan ada pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020 sebesar 9,36% menjadi 9,46% di tahun 2024. Pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebenarnya sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yang dimungkinkan besar kaitannya dengan perkembangan perekonomian di Kota Madiun yang meningkat menjadikan banyak masyarakat yang menarik dananya dari jasa keuangan untuk diinvestasikan atau digunakan. Sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2024 karena kondisi perekonomian secara kurang begitu baik menjadikan masyarakat memilih untuk menyimpan uang mereka untuk menjaga kestabilan ekonomi rumah tangganya.

Selain ada sektor yang berkembang positif terdapat juga sektor yang mengalami penurunan seperti pada sektor Industri Pengolahan. Sektor Industri pengolahan ini secara distribusi mengalami penurunan dari sebesar 14.23% tahun 2020 menjadi 13.63% pada tahun 2024. Secara potensi Industri Pengolahan di Kota Madiun akan sangat sulit tumbuh dikarenakan keterbatasan lahan diperkotaan yang tidak memungkinkan untuk munculnya industri pengolahan baru berskala besar. Industri Pengolahan di Kota Madiun sendiri sebenarnya hanya bertumpu kepada perkembangan INKA saja sehingga secara kontribusi biasanya bersifat stabil terkecuali ketika INKA mendapat pemesanan besar dari luar negeri. Dengan bergesernya kontribusi Industri Pengolahan ini sebenarnya memberikan potensi yang baik untuk Kota Madiun, dimana secara perekonomian Kota Madiun tidak lagi bertumpu kepada Industri besar INKA untuk bertumbuh, melainkan bisa melalui sektor lain yang lebih mudah untuk distimulus perkembangannya oleh pemerintah daerah. Sektor Jasa Pendidikan juga mengalami penurunan distribusi terhadap PDRB dimana tahun 2020 bisa sebesar 7.79% menurun pada tahun 2024 menjadi 7.05%. Penurunan ini dikarenakan beberapa sebab seperti pasca pandemi *Covid-19* menjadikan ada alternativ lain pembelajaran tidak harus secara luring melainkan bisa melalui darling. Selain itu pemanfaatan teknologi dan internet menjadikan siswa atau masyarakat bisa mengakses pendidikan dimana saja kapan saja dan secara gratis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Apabila ditinjau melalui kontribusi sektor terbesar terhadap PDRB, terdapat 5 (lima sektor) yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Jasa Pendidikan. Adapun perkembangan dari masing-masing sektor dari tahun 2008 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 52 Kontribusi 5 Sektor / Kategori Terbesar PDRB ADHB Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Perkembangan struktur perekonomian Kota Madiun dalam 5 tahun terakhir secara umum tidak berubah secara drastis. Sektor tersier tetap menjadi pilar utama perekonomian Kota Madiun dan terus berkembang setiap tahunnya. Perkembangan pada sektor tersier ini mengindikasikan bahwa secara ekonomi Kota Madiun mulai menuju perekonomian yang berbasis jasa dan layanan. Untuk itu diperlukan dukungan yang nyata pada sektor tersier ini untuk terus biasa berkembang melalui berbagai kebijakan, bantuan dan pembangunan infrastruktur yang maju oleh Pemerintah Kota Madiun. Penurunan sektor primer dan sekunder juga menjadi penanda pergeseran ekonomi Kota Madiun dari yang berbasis sumberdaya alam dan Industri kini menjadi jasa dan layanan. Pada tahun 2024 terdapat sedikit kenaikan pada sektor primer yang mengindikasikan adanya pemulihan pada sektor pertanian/ sumber daya alam yang mungkin menjadi fokus baru yang coba dikembangkan oleh Pemerintah Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

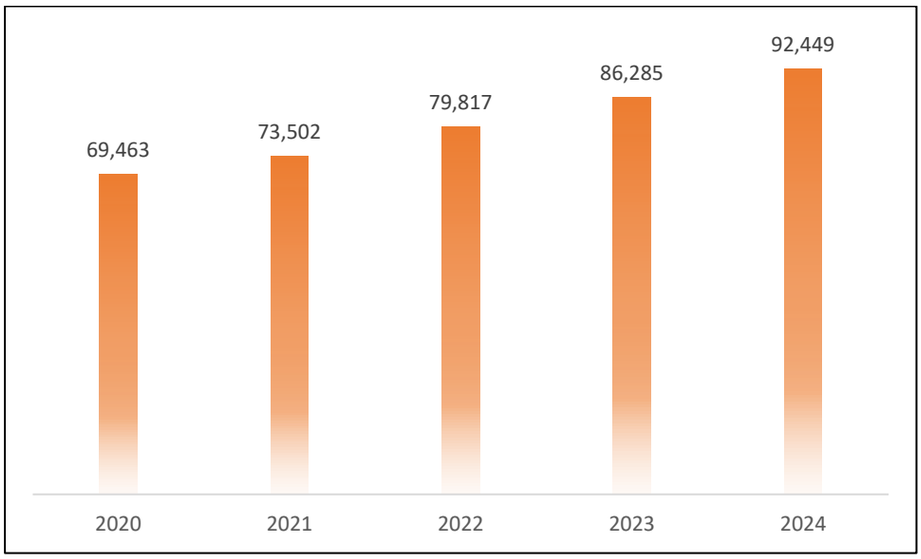
Tabel 2. 18 Struktur Perekonomian Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%) Tahun 2020-2024

Sektor	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Primer (%)	0.86	0.76	0.68	0.67	0,98
Sekunder (%)	20.68	20.66	20.35	20.58	19,3
Tersier (%)	78.46	78.58	78.97	78.75	79,72

Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita ADHB

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu Daerah dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu. PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi PDRB per Kapita, maka tingkat kesejahteraan semakin baik.



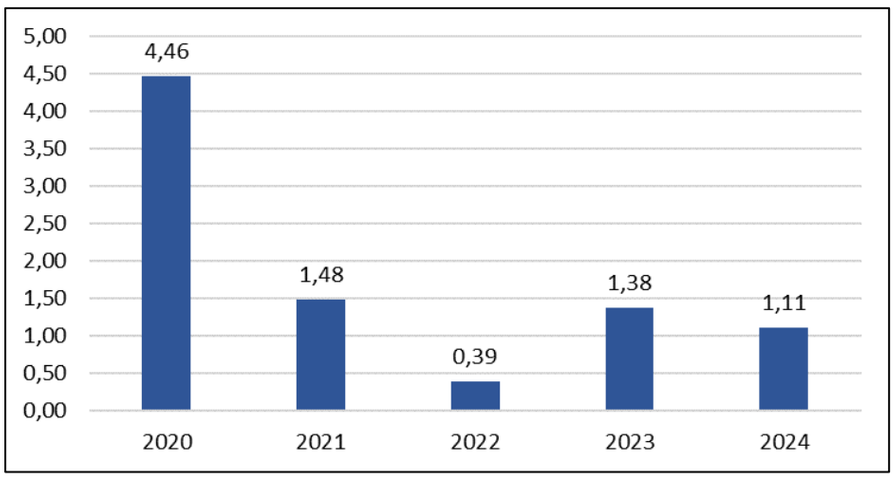
Gambar 2. 53 PDRB Per Kapita ADHB di Kota Madiun (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

PDRB per Kapita ADHB Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini sejalan dengan perkembangan perekonomian di Kota Madiun yang didukung oleh kenaikan beberapa sektor ekonomi seperti perdangan dan jasa. Selain itu kenaikan ini juga dipengaruhi oleh semakin banyaknya investasi yang masuk di Kota Madiun seperti perhotelan, ritel, rumah makan/ restoran yang semakin meningkatkan perkembangan ekonomi Kota Madiun.

C. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Madiun Tahun 2020-2024

Rasio PDRB industri pengolahan dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Tahun 2020 mencatat rasio tertinggi sebesar 4,46 dan kemudian menurun drastis pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,39. Meski pada 2023 dan 2024 mengalami kenaikan kembali sebesar 1,38 dan 1,11, namun capaian ini belum kembali ke level sebelum pandemi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 54 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

D. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Madiun dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pemulihan. Setelah mengalami penurunan tajam pada 2020 sebesar -7,98, sektor ini melonjak ke 3,21 pada 2021, mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2023 sebesar 6,94, sektor ini tetap menunjukkan tren positif hingga 2024 hingga 7,6.



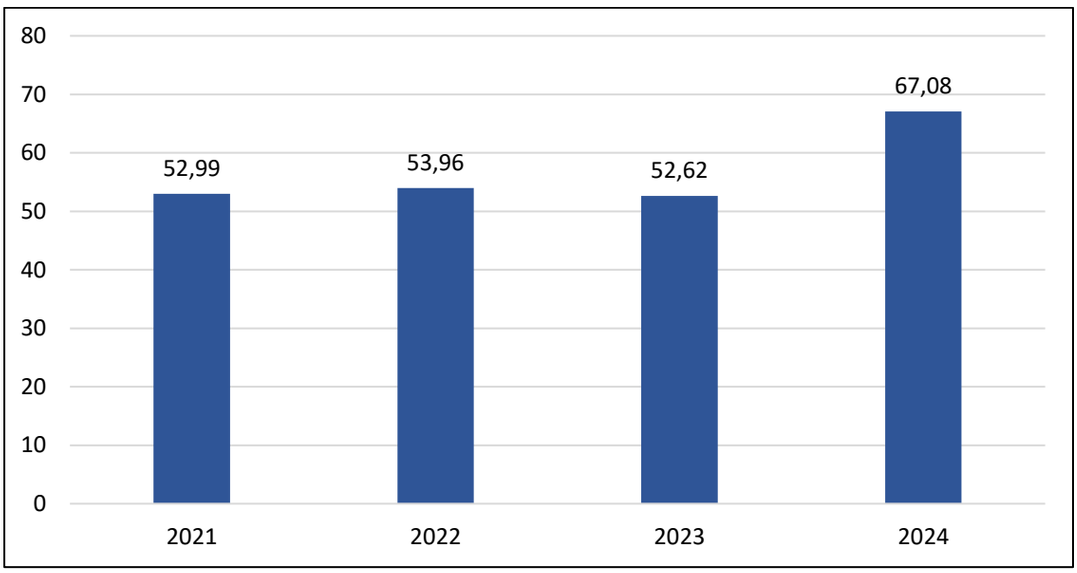
Gambar 2. 55 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Secara keseluruhan, sektor Akomodasi, Makan, dan Minum menunjukkan daya tahan dan peran strategis dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Walaupun sempat terpuruk pada 2020, sektor ini mampu *rebound* dengan pertumbuhan signifikan pada 2021–2022 dan berlanjut dengan tren stabil pada 2023–2024. Dengan rasio yang relatif stabil di kisaran 5%, sektor ini tetap menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Kota Madiun, khususnya yang terkait dengan pariwisata, konsumsi rumah tangga, dan jasa pelayanan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

E. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi suatu daerah dalam berbagai aspek, seperti kebijakan, ekonomi, teknologi, dan pelayanan publik. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih inovatif dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah. Indeks Inovasi Daerah Kota Madiun menunjukkan peningkatan dari 52,99 pada tahun 2021 menjadi 67,08 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan upaya inovasi daerah dalam kebijakan, teknologi, dan ekonomi kreatif. Namun, pada tahun 2023 sempat mengalami sedikit penurunan sebesar 52,62.

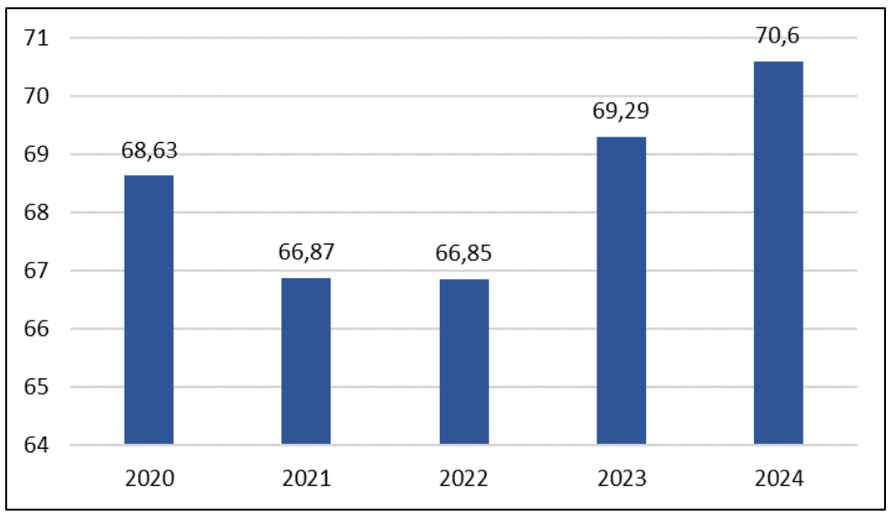


Gambar 2. 56 Indeks Inovasi Daerah Kota Madiun Tahun 2021-2024
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

F. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK menunjukkan tren yang positif setelah mengalami penurunan pada 2021-2022 sebesar 66,87 pada tahun 2021 dan 66,85 pada tahun 2022. Sedangkan tahun 2023 dan 2024 mencatat peningkatan signifikan sebesar 69,29% dan 70,6%, menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang masuk dalam pasar tenaga kerja, menandakan perbaikan dalam kesempatan kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 57 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau

Perencanaan penerapan ekonomi hijau di Kota Madiun bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada pelestarian lingkungan dan efisiensi sumber daya. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam dengan efisiensi tinggi, seperti penggunaan air dan energi, serta mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Selain itu, pengembangan infrastruktur hijau, seperti ruang terbuka hijau dan bangunan ramah lingkungan, juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengurangan ketergantungan pada energi fosil dapat dilakukan dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti energi surya dan biomassa. Pengelolaan sampah berbasis lingkungan, melalui daur ulang dan pengolahan sampah, juga menjadi langkah penting. Untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu adanya fokus pada transportasi ramah lingkungan dan pembangunan yang efisien dalam penggunaan energi.

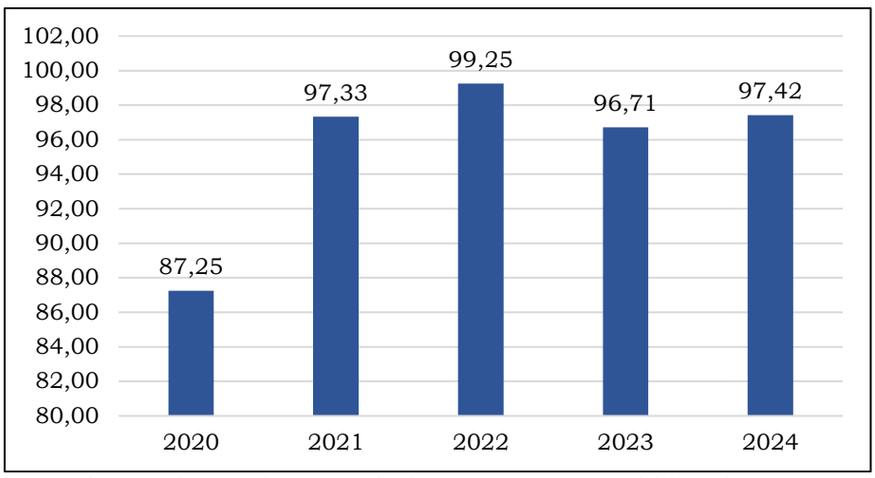
Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi tentang sektor ekonomi hijau dapat menciptakan peluang kerja baru. Kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi hijau serta memberikan insentif bagi praktek ramah lingkungan juga harus diterapkan. Dengan langkah-langkah ini, Kota Madiun diharapkan dapat mencapai pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.3.4 Transformasi Digital

A. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik agar masyarakat mengetahui apa saja yang telah diperbuat oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya terkait dengan standar operasional.



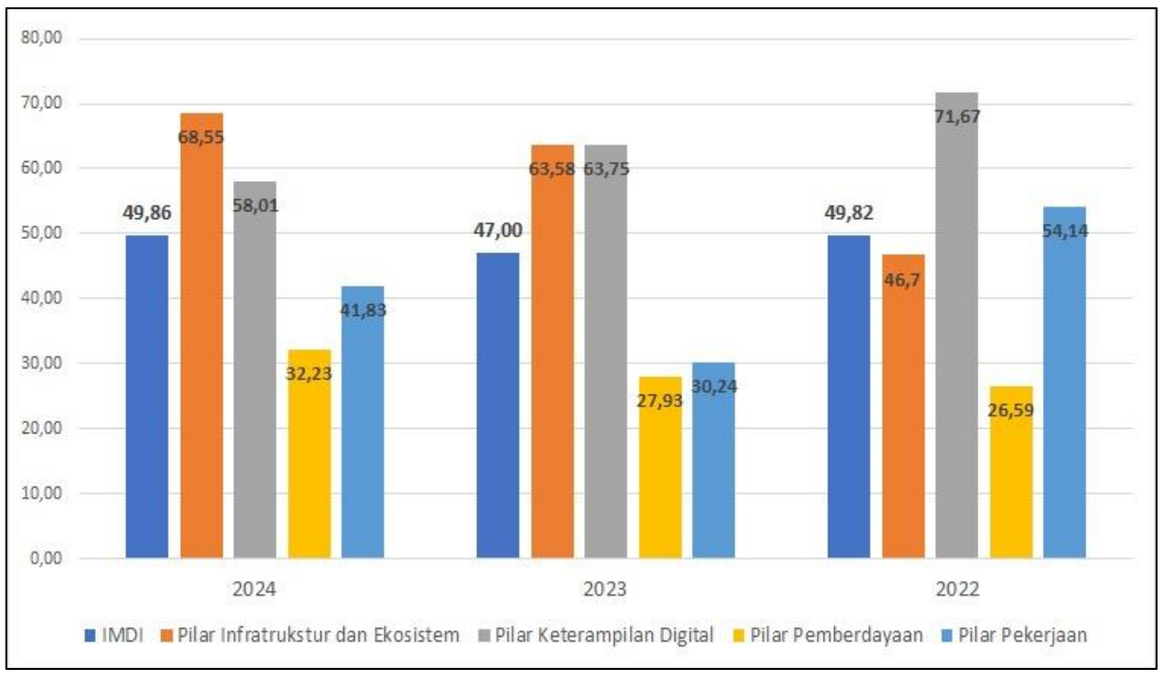
Gambar 2. 58 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2025

Tingkat keterbukaan informasi publik Kota Madiun mengalami peningkatan pada tahun 2020-2022. Pada tahun 2020, tingkat keterbukaan informasi publik tercatat sebesar 87,25%. Kemudian, pada tahun 2021, meningkat menjadi 97,33%. Peningkatan lebih lanjut terjadi pada tahun 2022 dengan tingkat keterbukaan yang mencapai 99,25%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode tersebut. Sementara itu, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 98,71%. Tingkat keterbukaan informasi publik kembali meningkat pada tahun 2024 dengan mencapai 97,42%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kota Madiun semakin meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publiknya sepanjang periode 2020-2024.

B. Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital (IMDI) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan 4 (empat) pilar utama: infrastruktur dan ekosistem, keterampilan, pemberdayaan, dan pekerjaan, Indeks Masyarakat Digital kota madiun mengalami perkembangan fluktuatif, pada tahun 2022-2024 sebagaimana capaian tiap pilar sebagaimana tabel dibawah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 59 Indeks Masyarakat Digital Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2025

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Madiun berada pada kisaran 47,00-49,86 yang menunjukkan kategori sedang. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem cukup kuat dengan nilai tertinggi 68,55, diikuti Keterampilan Digital yang relatif baik (58,01-71,67). Namun, Pilar Pemberdayaan masih rendah (26,59-32,23) dan Pilar Pekerjaan juga belum optimal (30,24-54,14).

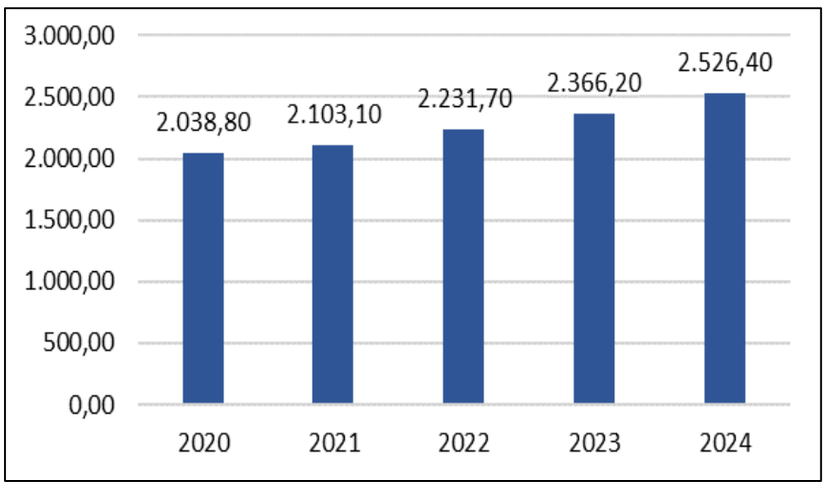
Secara keseluruhan, Kota Madiun memiliki fondasi digital yang baik melalui infrastruktur dan keterampilan masyarakat, tetapi perlu memperkuat pemanfaatan digital di sektor pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan agar transformasi digital lebih inklusif dan berdampak luas.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

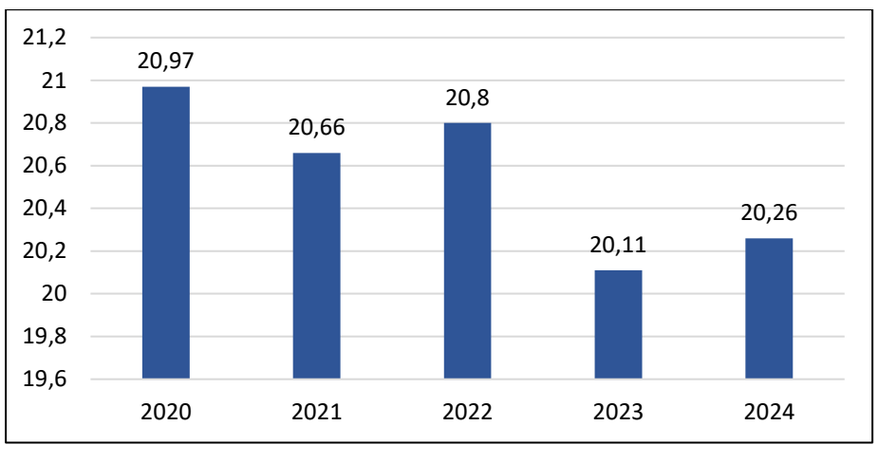
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PMTB tercatat sebesar Rp2.038,80 miliar dan meningkat secara konsisten setiap tahunnya hingga mencapai Rp2.526,40 miliar pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan pertumbuhan investasi di sektor aset tetap seperti infrastruktur, bangunan, dan peralatan produksi, yang menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peningkatan PMTB ini menunjukkan adanya optimisme pelaku usaha dan pemerintah dalam memperkuat perekonomian daerah melalui investasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 60 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Sedangkan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 20,97 pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 sebesar 20,66, nilai kontribusi PMTB mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 sebesar 20,80. Pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga sebesar 20,11 dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 20,26. Peningkatan kontribusi PMTB ini mengindikasikan adanya pertumbuhan investasi dalam aset tetap seperti infrastruktur, peralatan, dan bangunan yang mendukung aktivitas ekonomi di Kota Madiun. Hal ini berkontribusi positif terhadap PDRB, mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan daya saing ekonomi daerah.



Gambar 2. 61 Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

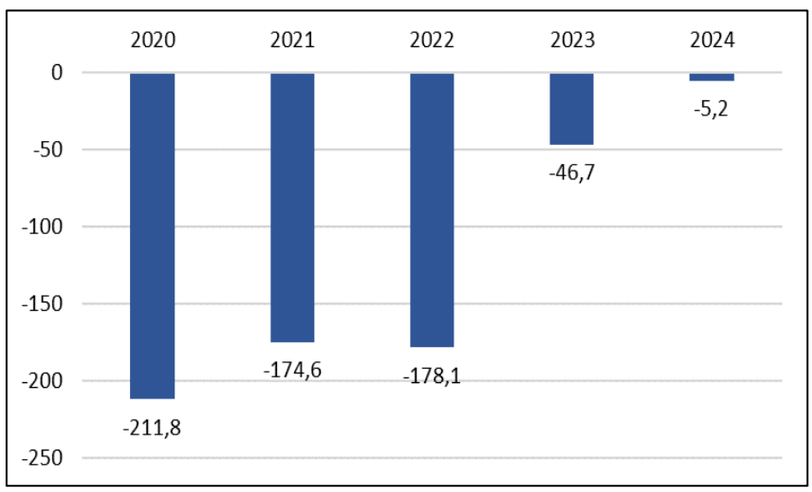
Selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kota Madiun menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Pada tahun 2020, ICOR sempat berada pada angka –3,59, mencerminkan kondisi khusus akibat pandemi *Covid-19* di mana penurunan output ekonomi lebih besar dibandingkan dengan penambahan investasi yang dilakukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tahun 2021, nilai ICOR meningkat tajam menjadi 4,37, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi kembali bergerak meski dengan efisiensi investasi yang masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2022, ICOR menurun menjadi 3,84 dan kembali turun ke 3,67 pada tahun 2023, yang menunjukkan perbaikan efisiensi investasi di Kota Madiun. Tahun 2024 nilai ICOR sedikit meningkat menjadi 3,75, namun masih berada pada level yang relatif efisien dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tren ICOR Kota Madiun dalam lima tahun terakhir memperlihatkan arah perbaikan pasca pandemi. Investasi yang digulirkan semakin mampu memberikan output ekonomi dengan biaya modal yang lebih terkendali, menandakan peningkatan efisiensi pembangunan.

B. Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor barang dan jasa di Kota Madiun menunjukkan tren defisit dari tahun 2020 hingga 2024, meskipun mengalami perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2020, defisit net ekspor mencapai Rp211,8 miliar, yang kemudian menurun menjadi Rp174,6 miliar pada 2021, Rp178,1 miliar pada 2022, dan Rp46,7 miliar pada 2023. Pada tahun 2024, defisit net ekspor hampir mendekati keseimbangan dengan hanya Rp5,2 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan Kota Madiun terhadap impor semakin berkurang, atau ekspor barang dan jasa dari Kota Madiun semakin meningkat. Perbaikan dalam neraca perdagangan ini dapat mencerminkan adanya peningkatan daya saing produk lokal atau efisiensi dalam rantai distribusi.

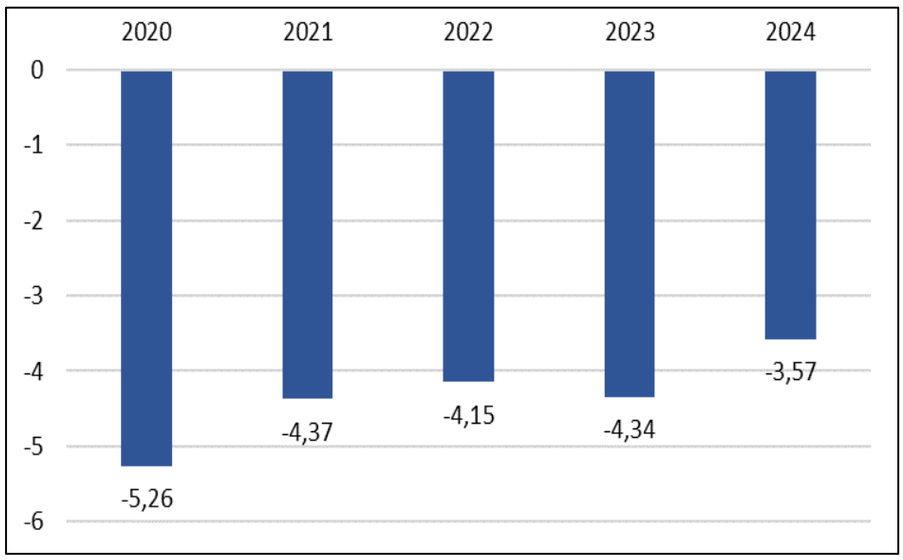


Gambar 2. 62 Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Sementara kontribusi *net* ekspor menunjukkan tren negatif sepanjang periode 2020-2024, meskipun mengalami perbaikan dari -5,26 pada tahun 2020 menjadi -3,57 pada tahun 2024. Defisit net ekspor yang terus berlanjut menunjukkan bahwa impor masih lebih tinggi dibandingkan ekspor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Namun, tren perbaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja ekspor atau penurunan impor, yang bisa menjadi indikasi peningkatan daya saing produk lokal atau efisiensi dalam konsumsi barang impor. Meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih negatif, perbaikan ini dapat membantu mengurangi tekanan terhadap keseimbangan perdagangan daerah.



Gambar 2. 63 Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

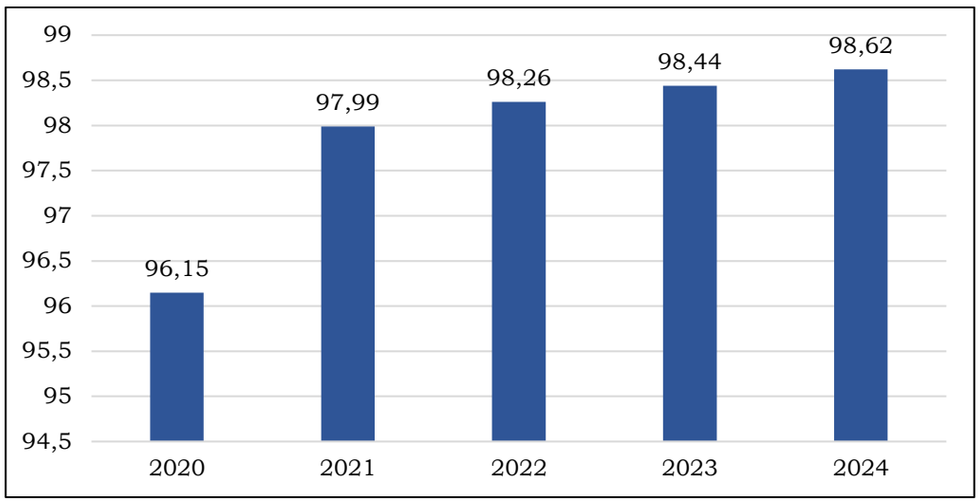
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Indeks Infrastruktur

Dalam mengukur kinerja infrastruktur digunakan indikator indeks Infrastruktur. Indikator ini mempresentasikan kinerja infrastruktur Kota. Infrastruktur yang menjadi faktor yang mempengaruhi capaian indeks infrastruktur antara lain: kualitas infrastruktur jalan beraspal, cakupan layanan air bersih perpipaan, dan cakupan layanan sanitasi aman bagi masyarakat. Indeks Infrastruktur Kota Madiun dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan, dari 96,15 pada tahun 2020 hingga 98,62 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur di Kota Madiun terus mengalami perbaikan.

Perbaikan Infrastruktur ini juga menjadi upaya Pemerintah Kota Madiun untuk menyediaan pelayanan Infrastruktur yang baik untuk masyarakat Kota Madiun, selain itu Pemerintah Kota sudah berkomitmen untuk menerapkan program pembangunan yang berkelanjutan sehingga pembangunan infrastruktur menjadi efektif dan efisen sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

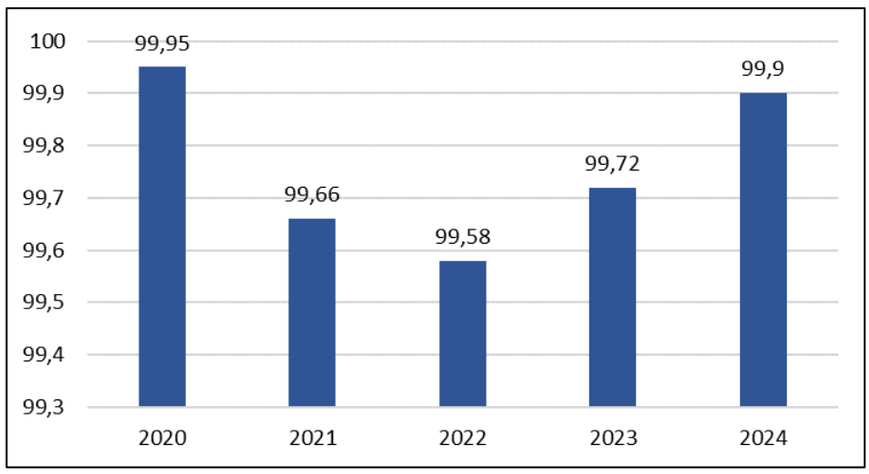


Gambar 2. 64 Indeks Infrastruktur Kota Madiun 2020-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2025

B. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni Kota Madiun dari tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Tahun 2020-2022, rasio rumah layak huni menunjukkan penurunan. Namun pada tahun 2023 dan 2024, rasio rumah layak huni mengalami peningkatan, yaitu sebesar 99,72 pada tahun 2023 dan 99,9 pada tahun 2024. Pemenuhan Rumah Layak Huni ini menjadi cukup sulit ketika Kota Madiun diharuskan untuk membangun baru lokasi perumahan yang layak. Hal ini dikarenakan kondisi Kota Madiun yang kecil sehingga ketersediaan lahan yang terbatas. Dengan keterbatasan lahan ini Rumah Susun merupakan solusi tepat untuk mengurangi permintaan rumah layak huni. Namun tentu untuk menyediakan Rumah Susun ini memerlukan sumber dana yang besar. Rumah susun yang terbangun di Kota Madiun hingga tahun 2024 sebanyak 2 lokasi yang terletak di Kecamatan Manguharjo. Rumah susun tersebut terdiri dari 174 Jumlah unit kamar dengan jumlah pemanfaat 160 rumah tangga. Adapun Rasio Rumah Layak Huni tahun 2020 sampai dengan 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

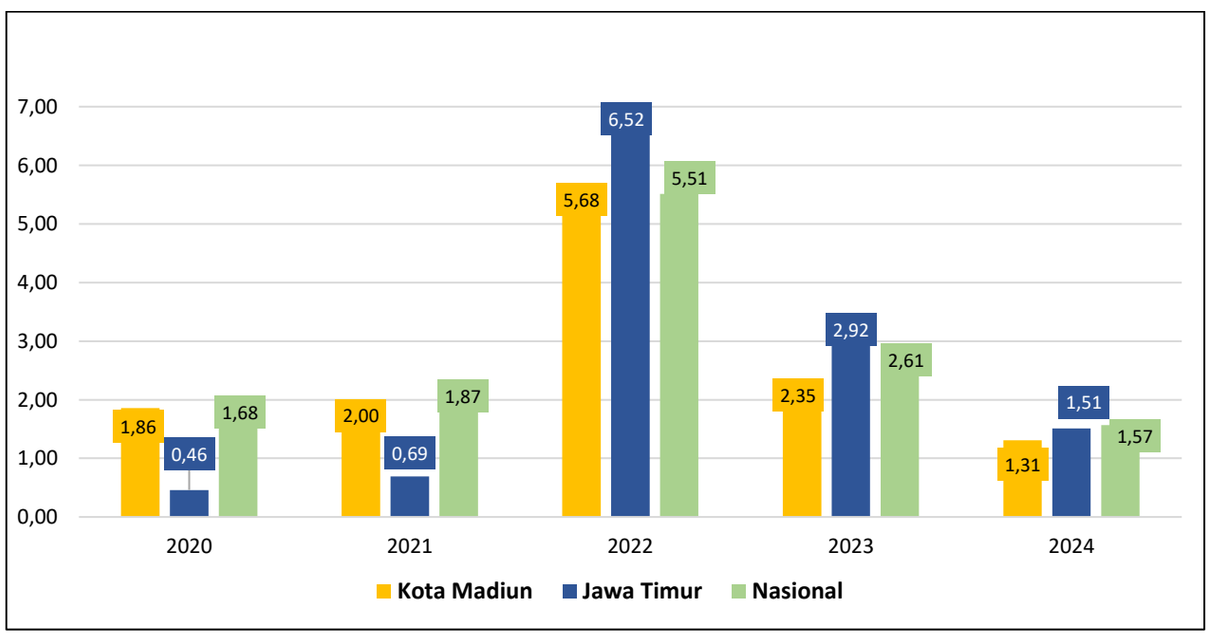


Gambar 2. 65 Rasio Rumah Layak Huni Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2025

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

A. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama periode waktu tertentu. Inflasi menjadi salah satu indikator yang terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari yang yang dimiliki masyarakat, terutama yang berpenghasilan tetap. Laju inflasi di Kota Madiun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tingkat inflasi Kota Madiun pada tahun 2005 sebesar 12,27% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tingkat inflasi pada tahun 2024 yang mencapai 1,31%. Posisi inflasi Kota Madiun tahun 2024 senilai berada di bawah provinsi Jawa Timur (1,51%) serta berada di atas tingkat nasional (1,57%). Inflasi tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 2. 66 Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2002-2024
Sumber: BPS Jawa Timur dan BPS Kota Madiun, 2025

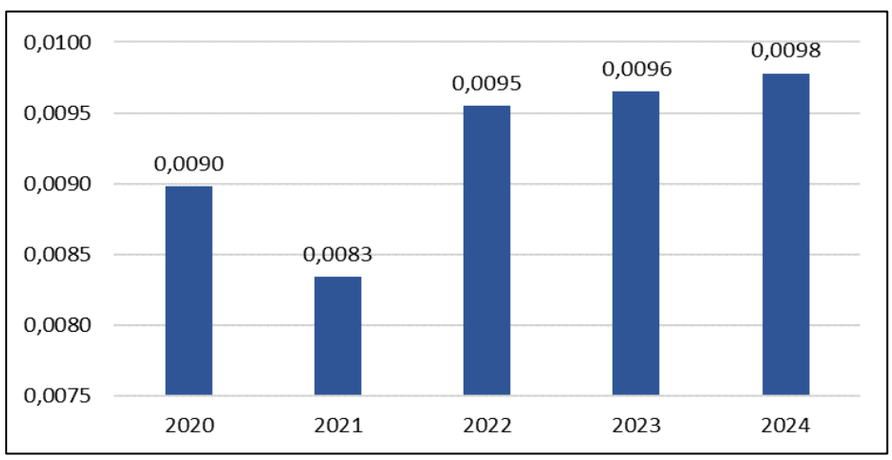
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Melihat tren inflasi yang terus berkembang, diperlukan strategi yang lebih menyeluruh untuk mengantisipasi dampaknya, terutama melalui peningkatan ketahanan pangan lokal, pengembangan sistem informasi harga yang transparan, serta penguatan koordinasi antar wilayah. Mengingat adanya potensi fluktuasi harga yang tajam dan gangguan terhadap pasokan global, langkah-langkah tersebut sangat penting guna menjaga kestabilan ekonomi domestik dan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, penguatan sektor pangan lokal menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menstabilkan pasokan bahan pangan. Pembuatan sistem informasi harga yang terintegrasi dan *real-time* juga sangat diperlukan agar masyarakat dan pelaku ekonomi dapat memperoleh informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Selain itu, kerjasama yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah, sangat penting untuk menciptakan jaring pengaman ekonomi yang kuat. Koordinasi yang efektif dalam penanggulangan inflasi dapat mengurangi dampak dari gangguan pasokan global dan meningkatkan ketahanan ekonomi secara keseluruhan. Melalui upaya-upaya ini, tidak hanya stabilitas harga yang bisa dijaga, tetapi juga daya beli masyarakat dapat dipertahankan, sehingga ekonomi dapat terus tumbuh meskipun di tengah ketidakpastian global.

B. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Berdasarkan data rasio pajak terhadap PDRB Kota Madiun dalam periode 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi dalam kontribusi pajak terhadap PDRB. Pada tahun 2020, rasio pajak terhadap PDRB tercatat sebesar 0,0090. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,0083 dan kembali meningkat signifikan menjadi 0,0095 pada tahun 2022. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2023 dengan rasio sebesar 0,0096 dan mencapai 0,0098 pada tahun 2024.



Gambar 2. 67 Rasio Pajak Terhadap PDRB Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2025

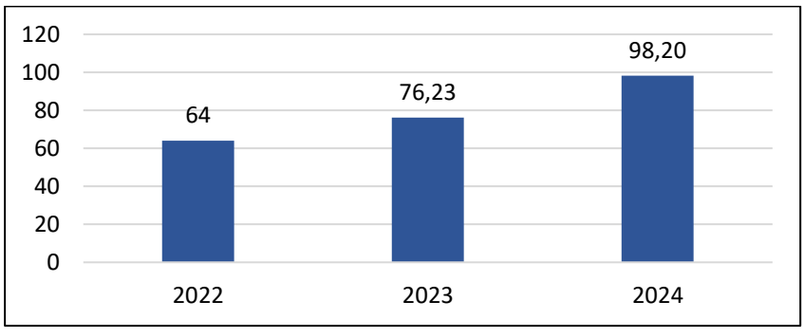
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Indeks Reformasi Hukum

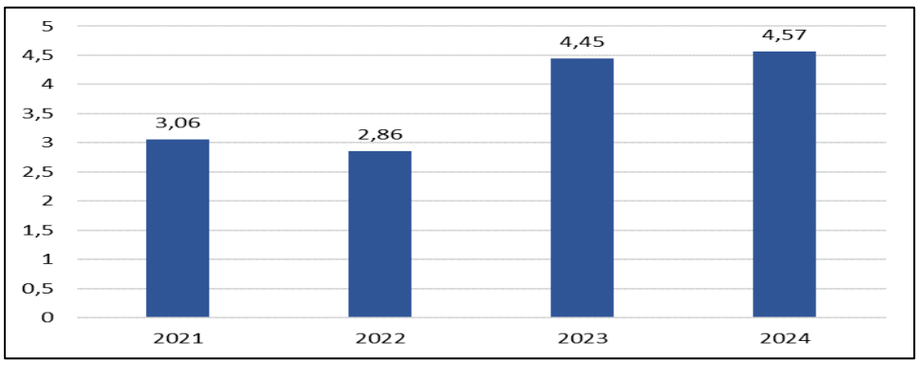
Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Berdasarkan hasil capaian Indeks Reformasi Hukum Kota Madiun menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2024, angka indeks IRH secara konstan meningkat dari tahun 2022 sebesar 64; tahun 2023 sebesar 76,23; serta tahun 2024 sebesar 98,20.



Gambar 2. 68 Indeks Reformasi Hukum Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Madiun, 2025

B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan optimal, merupakan amanat pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Melalui penerapan SPBE secara terpadu dan menyeluruh, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



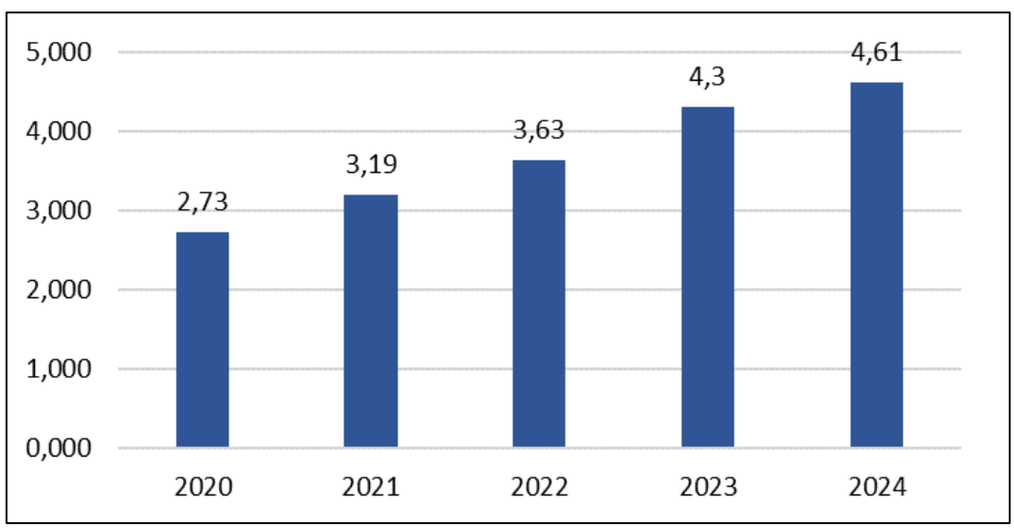
Gambar 2. 69 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hasil capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Madiun menunjukkan tren yang fluktuatif. Di tahun 2020 tidak terdapat data untuk Indeks SPBE. Sementara di tahun 2021 Indeks SPBE sebesar 3,06. Angka ini kemudian menurun di tahun 2022 sebesar 2,86. Namun di tahun 2023 dan 2024, Indeks SPBE menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 4,45 dan 4,57. Peningkatan selama dua tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah meningkat sehingga kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik Kota Madiun lebih baik, efisien dan optimal.

C. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Adapun komponen utama penyusun IPP adalah kebijakan pelayanan yang meliputi regulasi, standar operasional prosedur (SOP), dan instrumen-instrumen yang digunakan untuk memastikan pelayanan publik dilaksanakan dengan baik; profesionalisme sumber daya manusia (SDM) yang meliputi kompetensi dan kinerja SDM; sarana dan prasarana pelayanan berupa fasilitas fisik dan teknologi; inovasi pelayanan; serta kepuasan pengguna layanan.



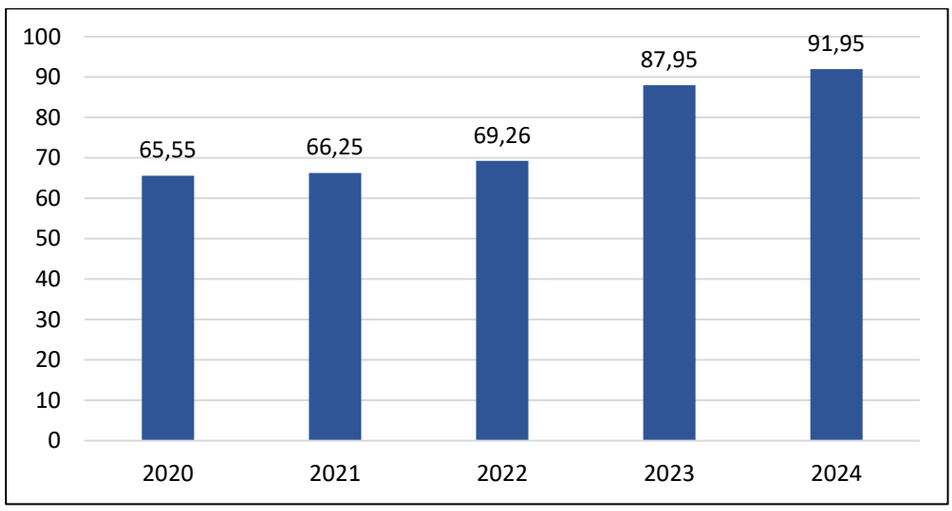
Gambar 2. 70 Indeks Pelayanan Publik Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Madiun dari tahun 2020-2024 secara konstan menunjukkan peningkatan. Di tahun 2020, IPP menunjukkan angka 2,73 dan kemudian meningkat menjadi 3,19 di tahun 2021. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2022 sebesar 3,63 dan tahun 2023 sebesar 4,3. Adapun IPP di tahun 2024 adalah sebesar 4,61. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kota Madiun selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

D. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah Suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.



Gambar 2. 71 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Madiun, 2025

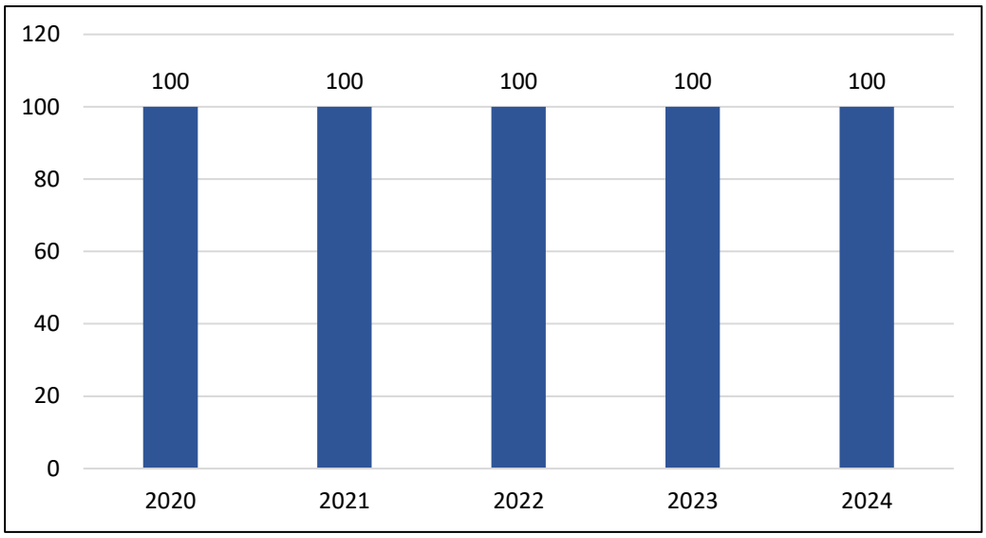
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Madiun dari tahun 2020-2024 selalu menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 capaiannya sebesar 65,55 dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 66,25. Di tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 69,26 dan tahun 2023 sebesar 87,95. Adapun tahun 2024 data Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 91,95.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

A. Persentase Penegakan Perda

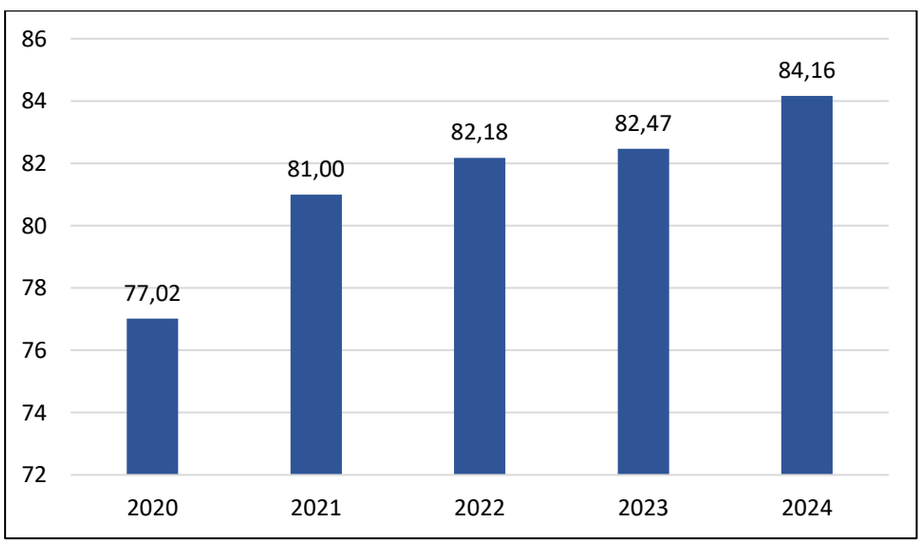
Capaian persentase penegakan Perda Kota Madiun selama lima tahun dari 2020 hingga 2024 menunjukkan 100% atau dengan kata lain semua gangguan dan pengaduan sudah tertangani dengan baik.



Gambar 2. 72 Persentase Penegakan Perda Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2025

B. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman mengukur sejauh mana masyarakat merasa aman dalam lingkungan sosialnya. Hal ini mencakup indikator-indikator seperti tingkat kejahatan, tingkat kepuasan terhadap pelayanan keamanan, dan tingkat kepercayaan antarwarga dalam membangun suasana aman dan nyaman. Indeks Rasa Aman mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan hingga 84,16.



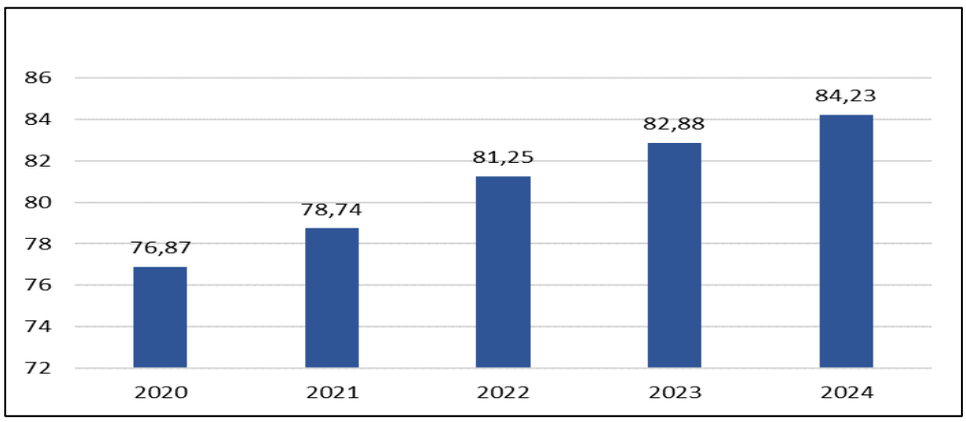
Gambar 2. 73 Indeks Rasa Aman Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan *press release* akhir tahun 2024 wilayah hukum Polres Madiun Kota memaparkan pencapaian gangguan keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang mengalami penurunan sebesar 14,3% dibandingkan tahun sebelumnya atau tercatat 189 kasus pada tahun 2023 menjadi 162 kasus pada tahun 2024. Adapaun tingkat penyelesaian kasus 155 kasus pada tahun 2023 menjadi 169 kasus pada tahun 2024. Kasus-kasus tersebut diantaranya : Pencurian dengan pemberatan (Curat), Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor), Perjudian, Pembunuhan, Korupsi, Bahan Bakar Minyak (BBM) Oplosan, *Illegal Logging*, Minuman Keras (Miras) dan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba).

C. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang dicerminkan oleh Indeks Ketenteraman dan Ketertiban. Capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota Madiun menunjukkan tren yang meningkat. Tahun 2020 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban sebesar 76,87. Angka ini meningkat menjadi 78,74 di tahun 2021 dan 81,25 di tahun 2022. Adapun di tahun 2023 dan 2024, Indeks Ketenteraman Ketertiban meningkat kembali menjadi 82,88 dan 84,23.



Gambar 2. 74 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2025

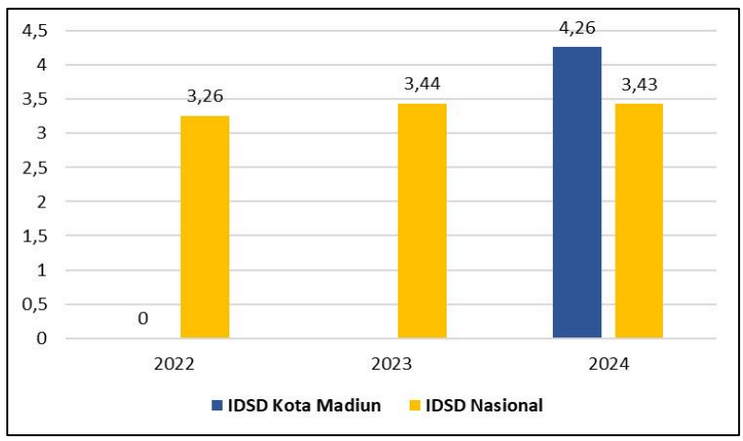
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah

IDSD mengukur produktivitas dan kemajuan daerah menggunakan kerangka *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum* (WEF). Secara singkat, daya saing sebuah entitas wilayah ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan produktivitas di tiga lini yaitu produktivitas dalam faktor produksi, produktivitas yang didorong oleh efisien dan produktivitas yang didorong oleh inovasi. Faktor pendorong produktivitas tersebut dituangkan ke dalam 4 komponen utama dan dijabarkan melalui 12 pilar daya saing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada IDSD 2024, dilakukan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan baik pada level indikator maupun metode pengukuran sehingga diharapkan dapat lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah di seluruh Indonesia.



Gambar 2. 75 Indeks Daya Saing Daerah Kota Madiun Tahun 2022-2024
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), capaian IDSD Kota Madiun mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 4,26 sedangkan pada tahun 2023 IDSD Kota Madiun tidak bisa teridentifikasi dikarenakan ketidak keterisiannya data pada Pilar 9. Skor IDSD Kota Madiun 4,26 termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”, bahkan mendekati batas maksimal di rentang tersebut. Menandakan bahwa Kota Madiun memiliki daya saing yang sangat tinggi, utamanya dalam aspek-aspek seperti kualitas pemerintahan, infrastruktur, inovasi, dan daya ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan produktivitas dan kemajuan Kota Madiun yang semakin membaik dalam dua tahun terakhir, meskipun data di tahun 2022 tidak ada.

Daya Saing Daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.4 Kinerja setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan uraian capaian dan kondisi terkini dari masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan pemerintahan daerah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib Pelayanan Dasar (SPM) mencangkup 6 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, PU-PR, perumahan & kawasan permukiman, sosial, trantibumlinmas. Dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar misalnya tenaga kerja, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, dan lain-lain.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kota Madiun perlu dipahami secara terpadu, khususnya pada enam urusan wajib pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Posyandu, peran posyandu mengalami transformasi signifikan. Posyandu kini tidak hanya menjalankan fungsi di bidang kesehatan, tetapi juga mendukung pencapaian enam urusan wajib pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman/ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Dengan demikian, Posyandu menjadi simpul kolaborasi antar perangkat daerah pengampu SPM, sehingga kinerja pembangunan pada setiap urusan dapat lebih terpadu, efektif, dan berkesinambungan.

Tabel 2. 19 Standar Pelayanan Minimal pada Posyandu

Bidang SPM	Keterkaitan dengan Posyandu
1. Pendidikan	Posyandu menjadi sarana edukasi keluarga tentang tumbuh kembang anak, literasi keluarga, pencegahan putus sekolah, serta pendidikan anak usia dini.
2. Kesehatan	Layanan utama Posyandu: kesehatan ibu & anak, imunisasi, gizi, penanggulangan stunting, kesehatan lansia, serta deteksi dini penyakit.
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Posyandu mendorong perilaku hidup bersih & sehat yang terhubung dengan penyediaan air bersih, sanitasi, drainase, serta lingkungan permukiman sehat.
4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	Menjadi titik kumpul pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni, PHBS, dan pemanfaatan ruang terbuka ramah keluarga.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Posyandu sebagai pusat interaksi warga dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi mitigasi bencana, kesiapsiagaan lingkungan, dan perlindungan anak serta perempuan.
6. Sosial	Posyandu menjangkau kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin), menjadi pintu masuk pemberdayaan sosial dan penguatan jaring pengaman sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

A. Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang anggaranya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu sebesar 20 persen dari APBD yang harapannya dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah serta menciptakan SDM yang cerdas dan terampil. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kota Madiun sudah memetakan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik jenjang pendidikan terendah yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK), serta jumlah peserta didik yang dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 20 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
PAUD				
1.	Bangunan PAUD (unit)	61	67	75
2.	Peserta PAUD	579	535	581
3.	Tenaga Pendidik	74	76	85
TK				
1.	Jumlah Siswa (Orang)	1537	1264	1812
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (Unit)	112	104	150

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, data pada Tahun 2024 menunjukkan fasilitas pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan ketersediaan pendidik yang memadai, meskipun bangunan PAUD pada 2024 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2023.

Jumlah bangunan PAUD di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 61 unit dengan jumlah peserta didik 579 anak, Kecamatan Manguharjo sebanyak 67 unit dengan jumlah peserta didik 535 anak, dan Kecamatan Taman sebanyak 581 unit dengan jumlah peserta didik sebanyak 581 anak. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) untuk wilayah Kecamatan Kartoharjo terdapat 112 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa 1.537 anak, untuk Kecamatan Manguharjo terdapat 104 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa 1.264 anak, dan untuk Kecamatan Taman terdapat 150 unit bangunan dengan jumlah siswa 1.812 anak.

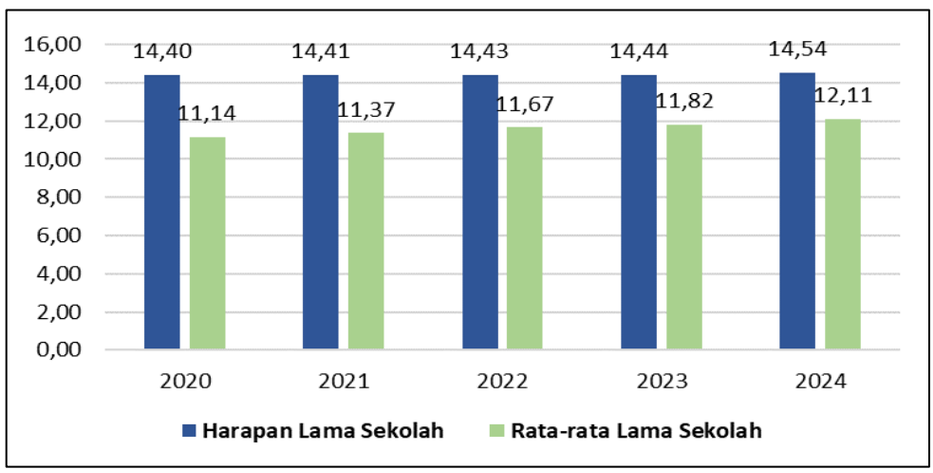
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 21 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Manguharjo	Taman	Kartoharjo	
Sekolah Dasar (SD)	20	25	22	67
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	7	7	3	17
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	10	3	24
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	3	0	4
Sekolah Mengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)	13	15	12	40
Madrasah Aliyah (MA)	0	4	1	5

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, jumlah sekolah dasar (SD) di Kota Madiun tahun 2024 sebanyak 67 unit dan Madrasah Ibtidaiyah 17 unit. Jumlah sekolah jenjang SMP sebanyak 24 unit dan MTs sebanyak 4 unit. Jumlah sekolah menurut SMA/SMK sebanyak 40 unit dan MA sebanyak 5 unit. Kecamatan Taman menjadi kecamatan terbanyak yang memiliki jumlah unit sekolah, mengingat jumlah penduduk terbanyak juga terdapat pada Kecamatan Taman. Kondisi dan jumlah bangunan di beberapa jenjang pendidikan akan mendorong meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan indikator dimensi pengetahuan pada IPM, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan perlahan mengalami kemajuan di Kota Madiun, peningkatan tersebut selanjutnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2. 76 Perkembangan Indikator IPM Tahun 2020 - 2024
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada gambar di atas, angka HLS terus menunjukkan peningkatan. Ini menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Tahun 2024, HLS di Kota Madiun telah mencapai 14,54 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 Tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada periode yang sama, capaian RLS di Kota Madiun juga terus meningkat. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. RLS Kota Madiun Tahun 2024 mencapai 12,11 tahun yang menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kota Madiun usia 25 tahun keatas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas XII (SMA Kelas 3). Pada Aspek Pelayanan Umum, ada beberapa indikator pendidikan yang terdapat Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, di antaranya adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 22 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2020 – 2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Dasar					
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	113.75	119.83	119.83	111.9	114.8
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk	1:56	1:16	1:37	1:42	1:32
1.1.3	Rasio guru/murid	1:16	1:16	1:15	1:13	1:16
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:24	1:15	1:25	1:15	1:23
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	174.89	130	114.99	107.71%	111.06%
1.2	Fasilitas Pendidikan					
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	98.48	97.2	89%	99.80%	98.99%
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/Mts	92.63	99.5	95%	99.70%	98.85%
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1.3.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95.61	90.04	198.27	104.06%	132.48%
1.4	Angka Putus Sekolah					
1.4.1	Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	0.7	0	0	0	0
1.4.2	Rata-rata Angka Putus Sekolah	0.7	0	0	0	0
1.5	Angka Kelulusan					
1.5.1	Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan	100	100	100	100	100
1.5.2	Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100
1.5.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.	96.83	97	99.6	93.3	97.2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7
1.5.4	Rata-rata Angka Kelulusan	100	100	100	100	100
1.6	Manajemen Pelayanan Pendidikan					
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100	100
1.6.2	Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS)	100	100	100	100	100
1.6.3	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional	398	1,212	1,200	1,215	1,153
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100	100
1.7	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	15,21%	11,74%	12,29%	14,4%	14,91%

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, LPPD Kota Madiun, 2025

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan pada materi sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS) dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs. Capaian Angka APS pada pada tahun 2020 sebesar 113.75%. Pada Tahun 2021 capaian APS meningkat mencapai 119.83%. Angka ini tetap hingga tahun 2022. Sementara itu, tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 111,9%. Tahun 2024 capaian APS sebesar 114,8% Secara umum APS ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun.

2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah digunakan untuk mengukur jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini merupakan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Untuk tahun 2020 capaiannya sebesar 1:56 dan tahun 2021 menurun menjadi 1:16. Angka ini terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya, yaitu 1:37 pada tahun 2022, 1:42 pada tahun 2023 dan 1:32 pada tahun 2024. Capaian pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 1 (satu) lembaga pada jenjang pendidikan dasar menampung 32 siswa per 10.000 penduduk usia sekolah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Capaian rasio guru murid pada tahun 2020 yaitu 1:16, angka ini tetap untuk tahun 2021 yang artinya bahwa satu orang guru menangani 16 siswa. Pada tahun 2022, capaian ini menurun menjadi 1:15. Kondisi ini menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 1:16. Sementara itu, pada tahun 2024 rasionya menjadi 1:16, yang berarti satu orang guru menangani 16 siswa.

4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada 2020 sebesar 1:24, artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombel dengan rata-rata siswa sebanyak 24 siswa. Tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan dibanding capaian tahun sebelumnya. Sedangkan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 1:25, yang artinya 1 guru dapat menangani 1 kelas/rombel dengan rata-rata siswa sebanyak 25 siswa. Tahun 2023 menjadi 1:15 dan tahun 2024 menjadi 1:23. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM berisi persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM SD/SMP tahun 2020 sebesar 174,89%. dan menurun menjadi 130%. pada tahun 2021. Penurunan ini konsisten hingga tahun 2023, yaitu sebesar 114,99%. pada tahun 2022 dan 107,71% pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024, capaiannya menjadi 111,06%. Angka tersebut mencerminkan sekitar 111,06% anak usia 7-15 Tahun yang mengikuti pendidikan dasar (SD/MI) di Kota Madiun.

6. Kondisi Sekolah Pendidikan Dasar Kondisi Bangunan Baik

Kondisi sekolah pendidikan dasar dengan kondisi bangunan baik akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif. Capaian kondisi sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik pada tahun 2020 sebesar 98,48%. Angka ini sedikit menurun hingga tahun 2022, yaitu sebesar 97,2% pada tahun 2021 dan 89% pada tahun 2022, hal ini terjadi karena untuk rehab serta pembangunan hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2023 angka ini meningkat menjadi 99,8% dan sedikit menurun pada tahun 2024 yaitu sebanyak 98,99%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) dalam hal ini APK PAUD Formal atau Taman Kanak-Kanak.

APK PAUD pada tahun 2020 sebesar 95,61% dan menurun menjadi 90,04% pada tahun 2021. Akan tetapi pada Tahun 2022 APK PAUD mengalami peningkatan secara signifikan mencapai 108,23 poin sehingga menjadi 198,27% dan pada tahun 2023 menjadi 104,06%. Sedangkan pada tahun 2024, peningkatan ini terus berlanjut menjadi 132,48%.

8. Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar Dan Rata-Rata Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah dan rata-rata putus sekolah pendidikan dasar pada tahun 2020 sebesar 0,7. Angka ini kemudian menurun menjadi 0 pada tahun 2021-2024. Hal ini dapat diartikan bahwa di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat.

9. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM)

Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM) merupakan persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2020 hingga tahun 2024 secara konsisten menunjukkan angka 100, yang berarti bahwa semua lulusan SD/MI dan SMP/MTs melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi pendidikan selain menjadi tuntutan profesi juga merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntutan tersebut wajib dipenuhi oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai agen pembelajaran, sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional. Guru merupakan aset strategis yang dituntut terus mengalami proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar (*on going formation*) serta memiliki kemampuan untuk melihat ke depan. Itu semua dapat terpenuhi jika guru berusaha meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Kualifikasi pendidikan berhubungan erat dengan kinerja guru dalam mengemban peran sebagai agen pembelajaran (*learning agent*). Sebagai agen pembelajaran guru memiliki peran sentral dan strategis sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, selama kurun waktu 5 (lima) Tahun, jenjang Pendidikan guru yang ada di Kota Madiun sesuai pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 23 Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kualifikasi	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	SMA	0	0	0	0	0
2	D1	0	0	0	0	0
3	D2	0	0	0	0	0
4	D3	19	32	7	50	50
5	DIV/S1	1,804	1,956	1,849	2,274	2,301
6	S2	93	102	125	108	113

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 sebanyak 1.804 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 1.956 orang pada tahun 2021 dan kemudian menurun menjadi 1.849 orang pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan menjadi 2.274 orang dan 2.301 orang pada tahun 2024. Sedangkan pada jenjang S2 pada tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu dari 93 orang pada tahun 2020 menjadi 125 pada tahun 2022. Sedangkan capaian pada tahun 2023 adalah 108 orang dan tahun 2024 menjadi 113 orang.

Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, terutama pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru yang mengajar.

11. Pengolahan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pengelolaan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan TIK merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi terpadu yang memuat seluruh data dan informasi pendidikan tingkat kota secara terpadu. Capaian pengolahan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK pada tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah 100%. Data dan informasi ini dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mulai tahun 2013 semua pendataan sudah berbasis internet dan terkoneksi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dimana semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru serta data peserta Ujian Nasional data bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Sejak Tahun 2015 hingga saat ini DAPODIK menjadi satu-satunya basis data bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menentukan jumlah penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia Pintar maupun bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu keharusan dan harus di *update* terus menerus.

Data tersebut harus diperbaharui setiap saat dengan sistem online yang terkoneksi langsung dengan server Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan di *upload* secara Nasional. Semua sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun sudah berbasis *web* dan terkoneksi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang sekarang bertransformsi menjadi kementerian baru sejak 21 oktober 2024 menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

12. Sekolah semua jenjang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan MBS pada lembaga sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari, yaitu:

a) sekolah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
b) sekolah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); dan
c) sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah. RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite sekolah dan disahkan oleh SKP Pendidikan Kota.

Sekolah di wilayah Kota Madiun memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dokumen tersebut selalu diperbaharui setiap Tahun anggaran dan Tahun ajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian satuan pendidikan semua jenjang telah melaksanakan manajemen berbasis sekolah sebesar 100% mulai dari Tahun 2020 hingga tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional

Capaian pada tahun 2020 adalah 398 guru. Sedangkan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2024 capaian tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan profesional terus mengalami peningkatan dengan capaian 1.212 orang guru Tahun 2021, sebanyak 1.200 guru di Tahun 2022, sebanyak 1.215 guru di Tahun 2023 serta sebanyak 1.153 guru di tahun 2024.

14. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang Pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 24 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021 – 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN											
			2021			2022			2023			2024		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
PENDIDIKAN														
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	23,184	21,803	94.04%	26,323	30,270	114.99%	25,902	28,417	109.71%	26,011	28,888	111.06%
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	89.56	85.99	96.01%	89.56	89.06	99.44%	89.56	91.01	101.62%	89.56	88.23	98.51%
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	72.69	56.5	77.73%	72.69	72.29	99.45%	72.69	79.2	108.96%	72.69	82.65	113.70%
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	92.48	86.66	93.71%	92.48	92.37	99.88%	92.48	92	99.48%	92.48	96.95	104.83%
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	73.84	63.34	85.78%	73.84	73.74	99.86%	73.84	88.89	120.38%	73.84	93.65	126.83%
		Iklim keamanan SD	75.13	75.13	100.00%	75.13	74.97	99.79%	75.13	75.59	100.61%	75.13	78.51	104.50%
		Iklim keamanan SMP	73.41	79.5	108.30%	73.41	73.31	99.86%	73.41	75.89	103.38%	73.41	76.3	103.94%
		Iklim kebinekaan SD	72.83	61.66	84.66%	72.83	72.73	99.86%	72.83	76.93	105.63%	72.83	76.67	105.27%
		Iklim kebinekaan SMP	70.98	62.99	88.74%	70.98	70.88	99.86%	70.98	77.14	108.68%	70.98	75.91	106.95%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN											
			2021			2022			2023			2024		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
		Iklim inklusivitas SD	60.14	56.8	94.45%	60.14	58.94	98.00%	60.14	58.25	96.86%	60.14	61.37	102.05%
		Iklim inklusivitas SMP	58.46	54.3	92.88%	58.46	58.26	99.66%	58.46	61.96	105.99%	58.46	67.17	114.90%
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,381	176	12.74%	175	273	156%	225	320	142.22%	161	305	189.44%
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	2,582	2,483	96.17%	2,607	3,030	116.23%	5,162	5,395	104.51%	5,271	5,273	100.04%
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	94.81		0.00%	94.81		0.00%	94.81	94.71	99.89%	94.81	95.64	100.88%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2024 secara keseluruhan sebesar 133,51% atau masuk dalam kategori Tuntas Paripurna.

B. Pelayanan Kesehatan

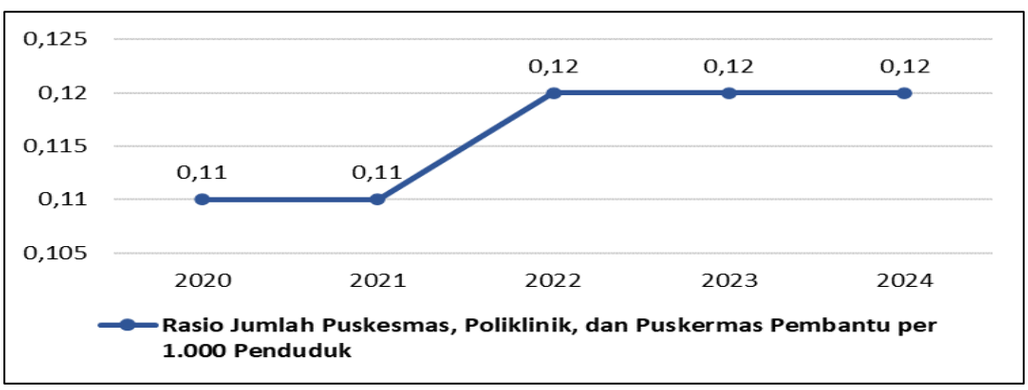
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu Urusan Wajib Pelayanan Dasar selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Persebaran jumlah rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 25 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Puskermas Pembantu per 1.000 Penduduk
2020	0.11
2021	0.11
2022	0.12
2023	0.12
2024	0.12

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, selama tahun 2020 hingga 2024, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada Tahun 2020 hingga 2021, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,11. Pada tahun 2022-2024, rasio sedikit mengalami peningkatan sehingga rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu stabil di angka 0,12. Berikut tren rasio Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun tahun 2020-2024, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 77 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

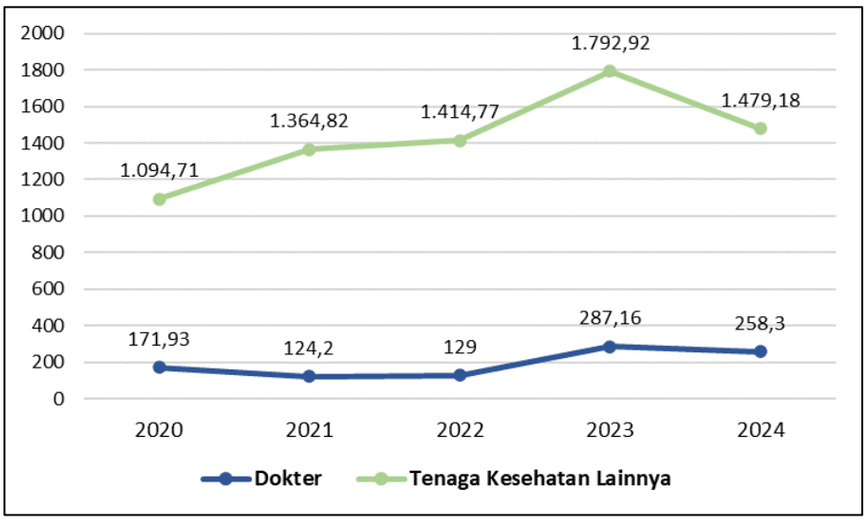
Selanjutnya terdapat tabel rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk yang dijabarkan pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 2. 26 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2020-2024

Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2020	171,93	1.094,71
2021	124,2	1.364,82
2022	129	1.414,77
2023	287,16	1.792,92
2024	258.3	1,479.18

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2024, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun pada tahun 2020 berkisar antara 171,93 dan menurun menjadi 124,2 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 capaiannya menjadi 129. Angka ini kemudian naik secara signifikan, yaitu sebesar 287,16 pada tahun 2023 dan 258,3 pada tahun 2024. Secara keseluruhan rasio dokter mengalami fluktuasi. Rasio tenaga kesehatan dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren meningkat.



Gambar 2. 78 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar diatas, setelah mengetahui rasio puskesmas dan rasio dokter serta tenaga kesehatan, berikut tabel rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun, yaitu pada tabel dibawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 27 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2020-2024

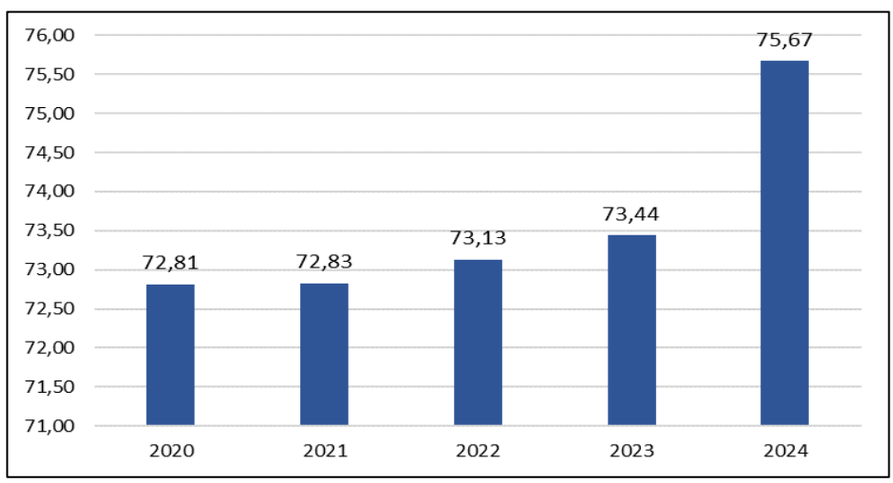
Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2020	8	209.950	0,0380
2021	8	201.452	0,0397
2022	8	201.760	0,0397
2023	9	202.544	0,0444
2024	10	201,733	0.050

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada tabel diatas, selama tahun 2020 hingga tahun 2022 di Kota Madiun sebanyak 8 rumah sakit masih beroperasi yang kemudian mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 9 rumah sakit dan kemudian meningkat kembali menjadi 10 rumah sakit pada tahun 2024.

Adapun rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2020 menuju 2024 di Kota Madiun mengalami peningkatan dari 0,0380 menjadi 0,05. Perubahan tersebut terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan secara absolut jumlah rumah sakit turut bertambah.

Salah satu aspek kesehatan direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh UHH saat lahir. UHH di Kota Madiun terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 79 Umur Harapan Hidup saat Lahir Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Aspek kesehatan juga menangani kasus Kejadian Luar Biasa (KLB), jumlah kasus KLB pada tahun 2022 terjadi di 2 (dua) kelurahan. Pada tahun 2023, kasus KLB terjadi di 27 kelurahan. Sampai dengan bulan April Tahun 2024 kasus KLB terjadi di 26 kelurahan. Namun pada akhir tahun 2024 (desember 2024), kasus KLB turun terjadi hanya di 4 kelurahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 28 Jumlah Kasus KLB Kota Madiun Tahun 2022 - 2024

No	Jenis Kasus KLB	Waktu Kejadian Diketahui	Kelurahan Tempat Kejadian
1	Demam Berdarah Dengue (DBD)	Januari – Desember 2022	2 Kelurahan
		Januari – Desember 2023	27 Kelurahan
		Januari – April 2024	26 Kelurahan
		Desember 2024	4 Kelurahan

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian KLB di masyarakat, yaitu sebagai berikut:

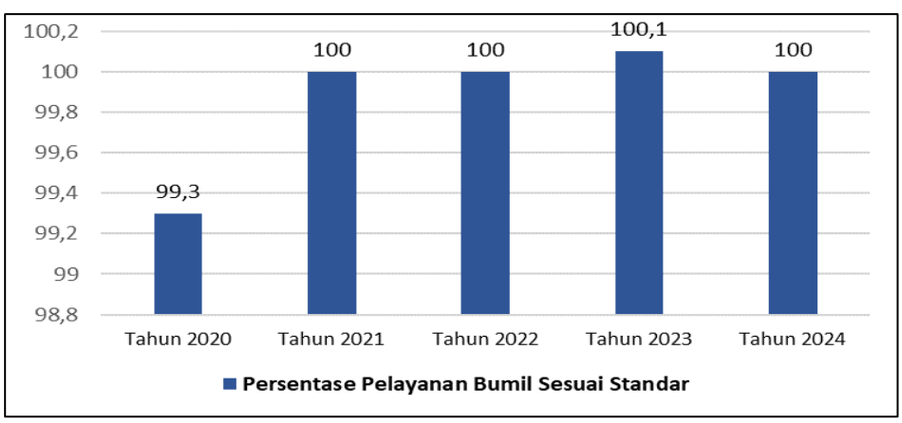
1. Meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempertahankan kekebalan kelompok sehingga kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat ditekan/menurun;
2. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh jejaring surveilans epidemiologi;
3. Meningkatkan Surveilans Aktif Rumah Sakit guna kewaspadaan dini dan respon; dan
4. Pemberantasan sarang nyamuk di tempat yang berpotensi terjadinya perkembang biakan nyamuk.

Berikutnya yang harus diperhatikan yakni pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, data pelayanan kesehatan ibu hamil pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 29 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kota Madiun Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Ibu Hamil	2.614	2.490	2.470	2.450	2,861
2	Pelayanan Bumil Sesuai Standar	2.596	2.490	2.470	2.453	2,861
3	Persentase Pelayanan Bumil Sesuai Standar	99,3	100	100	100,1	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025



Gambar 2. 80 Capaian Persentase Pelayanan Ibu Hamil, Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana termuat pada tabel dan gambar diatas, terlihat bahwa capaian persentase pelayanan ibu hamil sesuai standar di tahun 2024 sebesar 100%. Pelayanan ibu hamil sesuai standar sudah mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah mendapat pelayanan secara paripurna dengan minimal 4 (empat) kali kunjungan dan terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun.

Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun. Sedangkan, strategi kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

a. sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin;
b. optimalisasi kelas ibu hamil di Puskesmas;
c. terjalin kerja sama yang baik dengan SpOG terkait pelayanan ANC terpadu;
d. pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan;
e. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman; dan
f. pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan setelah persalinan.

Penduduk Kota Madiun harus dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan, peran kelurahan siaga aktif berstrata puri sangat dibutuhkan. Berikut terdapat data kelurahan siaga pada Tahun 2024:

Tabel 2. 30 Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Kelurahan Siaga	27	27	27	27	27
2	Jumlah Kelurahan Siaga Puri	15	16	23	25	27
3	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Puri	55.55	59.26	85.19	92.59	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada Tabel di atas, jumlah desa siaga puri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga, capaian persentase kelurahan siaga aktif puri juga meningkat. Sebagaimana termuat pada tabel diatas, terlihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif di tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari 27 kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut dikarenakan:

1. peran aktif kader kelurahan siaga aktif dalam upaya menghidupkan kegiatan kelurahan siaga aktif;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. adanya kegiatan inovasi sangat membantu tercapainya kelurahan siaga berstrata PURI; dan
3. kerja sama lintas sektor dengan OPD terkait menggerakkan pemberdayaan masyarakat terutama Kelurahan Siaga Aktif sebagai induk UKBM di kelurahan.

Rasio jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu pada Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 31 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Madiun Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6	6
2	Jumlah Puskesmas Pembantu	18	18	18	18	18
3	Jumlah Penduduk	209.950	201.452	201.760	202.544	201.733
4	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik Dan Puskesmas Pembantu Per 1.000 Penduduk	0,11	0,35	0,119	0,12	0,12

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada tabel diatas, terlihat bahwa dari tahun 2020 hingga 2024 tidak ada penambahan jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Madiun. Rasio jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk pada tahun 2020 hingga 2024 tidak ada perubahan di kisaran 0,11. Rasio tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,35, Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,119, dan kembali meningkat di Tahun 2023 menjadi 0,12. Sedangkan capaian di tahun 2024 tetap pada angka 0,12. Pada saat ini di setiap kelurahan di Kota Madiun sudah terdapat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) sehingga aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup mudah. Kota Madiun terdapat 9 (sembilan) RS sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun sudah terpenuhi.

1. Jumlah Puskesmas Poned

Puskesmas yang masuk dalam kategori Pelayanan Mampu PONED (Pelayanan *Obstreti Neonatal Emergency* Dasar) terdapat 1 (satu) Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarejo.

2. Rasio Rumah Sakit (RS) per 1.000 Penduduk

Pada tahun jumlah RS di Kota Madiun sebanyak 10 (sepuluh) RS dan rasio jumlah rumah sakit terhadap per 1.000 penduduk adalah 0,05. Rasio RS di Kota Madiun dapat dilihat di tabel berikut ini :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 32 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Madiun Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi	1	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Milik TNI/AD	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Swasta	3	3	3	4	5
5	Rumah Sakit Khusus	2	2	2	2	2
6	Jumlah Rumah Sakit	8	8	8	9	10
7	Jumlah Penduduk	209.950	201.452	201.760	202.544	201.733
8	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk	0,0380	0,0397	0,0397	0,04443	0,05

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada tabel diatas, terlihat bahwa tahun 2020 rasio jumlah RS terhadap 1000 penduduk adalah 0,0380. Pada tahun 2021 dan 2022 rasio jumlah rumah sakit meningkat menjadi 0,0397 dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk. Lebih lanjut di tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 0,0444 dikarenakan adanya tambahan satu RS swasta. Di tahun 2024, terjadi penambahan 1 (satu) rumah sakit swasta kembali sehingga rasionya menjadi 0,05.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran pada Aspek Pelayanan Umum yang diukur dengan indikator kinerja sasaran fokus pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 33 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

No.	PEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	4	5	6	7	8
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Kesehatan					
2.1	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12
2.2	Jumlah Puskesmas PONED	1	1	1	1	1
2.3	Rasio jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk	0.038	0.0397	0.0397	0.0444	0.05
2.4	Rasio dokter per 100.000 penduduk	171.93	116.9	129	287.16	258.3
2.5	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk	1,094.71	132.83	1,414.77	1,792.92	1,479.18
2.6	Puskesmas berstandar ISO	0	0	0	0	0
2.7	SOP Pelayanan	478	0	195	67	78

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	4	5	6	7	8
2.8	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani	100	100	100	100	100
2.9	Cakupan kelurahan siaga aktif	100	100	100	100	100
2.10	Persentase rumah tangga ber-PHBS	69	69.43	64.88	70.94	71.49
2.11	Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*	62.96	100	100	100	100
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	48	100	100	100
2.13	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	126	42.42	0	0
2.14	Persentase rumah tangga sehat	69	99.92	88.41	89.25	89.8
2.15	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar	95.17	113	98.73	100.61	101.02
2.16	Jumlah kasus KLB	162	2	2	4	4
2.17	Persentase penanganan penyakit	100	100	100	83.34	100
2.18	Persentase kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	40.74	74.1	100	100	100
2.19	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100	100	85	100	100
2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	74.94	84.917	86.02	85.98	84.1
2.21	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	50	100	100
2.22	Persentase produk makanan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat	86.63	100	90.72	95	93.9
2.23	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	100	100	100	110	100
2.24	Persentase penduduk yang di skrining faktor resiko PTM	90.25	118.4	110.81	110.62	108.3
2.25	Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	55.55	59.26	85.19	92.59	100
2.26	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	502	550	252	161	257
2.27	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	100	100	100.12	100
2.28	Persentase TTU dan TPM sehat	86.32	TTU : 95,3	TTU : 81	TTU : 95,7	TTU : 99,26
			TPM: 95,2	TPM : 96,67	TPM : 89,7	TPM : 93,9
2.29	Angka kematian bayi	4.32	3.8	4.2	5.1	4.5
2.30	Angka kesehatan orang dengan resiko terinfeksi kusta	0.3	0.6	0.1	0.4	0.2
2.31	IKM rumah sakit	80.19	83.39	88.94	89.56	89.49
2.32	Capaian pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	81.52	79.35	88.17	89.13	90.32
33	Persentase desa ODF	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS Kota Madiun dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana data yang termuat pada tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama tahun 2020 hingga 2024, rasio jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021, rasio berada di angka sebesar 0,11 meningkat sedikit di tahun 2022-2024 menjadi 0,12.

2. Jumlah Puskesmas PONED

Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar (PONED) di puskesmas berperan dalam menurunkan angka kematian ibu. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan kunci keberhasilan pelayanan PONED. Selama tahun 2020 hingga 2024 jumlah puskesmas yang menyediakan layanan PONED sebanyak 1 puskesmas.

3. Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk

Selama Tahun 2020 hingga Tahun 2022 RS yang beroperasi sebanyak 8 (delapan) RS. RS tersebut terdiri dari 1 (satu) RS milik Pemerintah Kota Madiun, 1 (satu) RS milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) RS milik TNI/AD, 1 (satu) RS swasta, dan 1 (satu) RS khusus. Rasio RS per 1.000 penduduk di Kota Madiun pada tahun 2020 sebesar 0,0380. Sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 sehingga nilainya mencapai 0,0397. Pada 2023 peningkatan juga terjadi dan nilai rasio RS per 1.000 penduduk menjadi 0,0444 meningkat kembali menjadi 0,05 pada tahun 2024.

4. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

Rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 171,93 hingga 258,3. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2024. Secara keseluruhan, dalam lima tahun rasio dokter mengalami peningkatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk

Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan lainnya per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar 1.094,71 hingga 132,83. Adapun pada tahun 2022, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk Kota Madiun adalah 1.414,77 dan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 1.792,92. Pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 1.479,18.

6. Puskesmas Berstandar ISO

Fungsi utama puskesmas sebagai unit pelayanan masyarakat adalah upaya promotif dan pr*event*if terhadap resiko penyakit di tengah masyarakat yang dilayani. Puskesmas berstandar ISO adalah Puskesmas plus yang dapat menjalankan rawat inap dan rawat jalan secara simultan. Berdasarkan data, sejak tahun 2020 hingga 2024 belum mempunyai puskesmas yang telah mempunyai standar ISO.

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dasar dalam melakukan pekerjaan dan sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk menunjang pelayanan. Skor SOP Pelayanan di Kota Madiun tahun 2020 sebesar 478. Sedangkan pada tahun 2021, skor SOP Kota Madiun tercatat sudah mencapai angka 0. Sedangkan pada tahun 2022 skor mencapai 195 dan menurun menjadi 67 pada tahun 2023. Pada tahun skor SOP mencapai 78.

8. Cakupan Masyarakat Miskin Terlayani

Tahun 2020 hingga 2024, di Kota Madiun penanganan masyarakat miskin yang terlayani telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Madiun.

9. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

Kelurahan/Desa siaga aktif adalah Kelurahan/Desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan. Kota Madiun pada tahun 2020 hingga 2024 cakupan kelurahan siaga aktif sebesar 100% yang berarti seluruh Kelurahan/Desa aktif beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10. Persentase Rumah Tangga berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan menciptakan suatu Rumah Tangga Sehat dimana setiap anggota menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Persentase rumah tangga yang mempraktikan rumah tangga ber-PHBS yaitu sebesar 69% pada tahun 2020 mencapai 69,43% pada tahun 2021. Tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 64,88% namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 70,94. Sedangkan di tahun 2024 mencapai 71,49. Penurunan capaian di tahun 2022 disebabkan adanya perubahan definisi operasional penilaian pada indikator tidak merokok. Definisi operasional dari "apabila tidak ada anggota rumah tangga umur 10 tahun keatas yang merokok didalam rumah" menjadi "tidak ada anggota rumah tangga umur 10 tahun keatas yang merokok".

11. Cakupan Kelurahan *Universal Chilf Immunizazion* (UCI)

Cakupan kelurahan *Universal Chilf Immunizazion* di Kota Madiun, pada 2020 telah mencapai 62,96%. Dengan demikian, diharapkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat dari suatu penyakit dapat diminimalisir. Adapun pada tahun 2021 hingga 2024, cakupan kelurahan UCI di Kota Madiun kembali mencapai 100%.

12. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyelesaian dan penanganan DBD diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020 dan 2022-2024 kota Madiun berhasil menangani kasus DBD dengan persentase mencapai 100%. Hal ini didukung oleh keterlibatan lintas program dan lintas sektor, seperti koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan lingkungan dalam melaporkan kasus serta adanya penanganan yang cepat. Meskipun pada tahun 2021, capaian ini hanya mencapai 48%.

13. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2020 tercatat angka kematian ibu sebesar 0 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2021 mencapai 126 dan 42,42 pada tahun 2022. Akan tetapi, angka kematian ibu di tahun 2023 dan 2024 mengalami perbaikan sehingga skornya 0 dari 100.000 kelahiran hidup.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

14. Persentase Rumah Tangga Sehat

Rumah tangga sehat akan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Persentase rumah tangga sehat tahun 2020 sebesar 69%. Capaian ini meningkat tajam pada tahun 2021 meningkat tajam mencapai 99,92%, akan tetapi menurun menjadi 88,41% pada tahun 2022. Faktor melandasinya pandemi *Covid-19* menyebabkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat menurun. Namun, di tahun 2023, terjadi peningkatan persentase rumah tangga sehat menjadi 89,25%. Angka ini meningkat menjadi 89,8% pada tahun 2024.

15. Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Pra Bayar

Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar Kota Madiun tahun 2020 sebanyak 95,17%. Sebagian besar masyarakat Kota Madiun telah memiliki Jaminan Pra Bayar. Tahun 2021, persentase penduduk yang memiliki Jaminan Pra Bayar Kota Madiun telah mencapai 113%, dan menurun menjadi 98,73% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan kembali pada persentase penduduk yang memiliki jaminan prabayar menjadi 100,61%. Sedangkan pada tahun 2024, terjadi peningkatan menjadi 101,02%.

16. Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB)

KLB adalah timbulnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu Daerah dalam waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jenis KLB yang terjadi di Kota Madiun diantaranya *Covid-19*, DBD, dan *Monkeypox*. Jumlah kasus KLB di Kota Madiun tahun 2020 yang tertangani kurang dari 24 jam sebanyak 162 kejadian, mengingat pada tahun tersebut terjadi fenomena wabah yang dapat menular yaitu kasus terjadinya virus corona. Pada tahun 2022, jumlah KLB di Kota Madiun mencapai 2 (dua) kejadian. Selanjutnya, di tahun 2023 jumlah kasus luar biasa meningkat menjadi 4 (empat) kejadian. Capaian ini tetap hingga tahun 2024, yaitu sebanyak 4 (empat) kejadian.

17. Persentase Penanganan Penyakit

Persentase penanganan penyakit Kota Madiun tahun 2020 - 2022 pemerintah berhasil meningkatkan persentase penanganan penyakit menjadi 100%. Adapun di masa tahun ketiga *Covid-19* melanda Indonesia, pemerintah Kota Madiun mendapatkan persentase penanganan penyakit sebesar 100%. Namun, pada tahun 2023, diketahui terdapat penurunan persentase penurunan penyakit menjadi 83,34%. Namun pada tahun 2024, capaian ini mencapai 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

18. Persentase Kelurahan ber- Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Masalah kesehatan lingkungan merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan, salah satunya masalah sanitasi yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Pada tahun 2020 capaian ini mencapai 40,74%. Adapun pada tahun 2021, STBM Kota Madiun mencapai 74,1% dan telah mencapai 100% pada tahun 2022 hingga 2024.

19. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat di Kota Madiun tahun 2020 hingga 2021 mencapai angka 100%, artinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pada tahun 2022, persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun hanya mencapai 85% dan di tahun 2023 dan 2024 ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun meningkat menjadi 100%.

20. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan Kota Madiun

Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan dinas kesehatan Kota Madiun tahun 2020 IKM sebesar 74,94. Sedangkan pada Tahun 2021, 2022, 2023 dan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Madiun berturut-turut mencapai 84,917; 86,02; dan 85,98.

21. Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pencapaian Kinerja BLUD Kota Madiun tahun 2020 hingga 2021 telah mencapai 100%. Pencapaian Kinerja BLUD Kota Madiun terbilang baik hingga saat ini. Adapun pada tahun 2022 pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun turun secara signifikan menjadi hanya sebesar 50%. Penyebab dari tidak tercapainya target tersebut adalah tidak tercapainya *Bed Occupancy Rate* (BOR), semakin banyak fasilitas kesehatan rawat inap yang baru kasus covid yang tetap masih ada, meskipun memiliki tren menurun, sehingga ketersediaan fasilitas untuk *Covid-19* masih dipersiapkan dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan: selalu berinovasi terkait layanan yang ada di rumah sakit dan berupaya dalam pemanfaatan Tempat Tidur (TT) dengan melakukan analisa dan evaluasi untuk penyediaan TT. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun kembali meningkat signifikan menjadi 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

22. Persentase Produk Makanan Lahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Dinilai

IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Kota Madiun tahun 2020 sebesar 86,63%. Pada tahun 2021 produk olahan IRTP Kota Madiun telah mencapai 100%, akan tetapi kembali menurun menjadi 90,72% pada tahun 2022. Meskipun capaian tahun 2022 menurun, namun melebihi target dari yang direncanakan sebesar 87,88. Kemudian, capaian pada tahun 2023, meningkat menjadi 95%. Adapun pada tahun 2024, capaiannya turun menjadi 93,9%.

23. Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai Standar

Sarana dan Prasarana rumah sakit merupakan peralatan yang mendukung pelayanan mendasar perawatan kesehatan yang aman. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit di Kota Madiun tahun 2020 hingga 2024 telah memenuhi standar dengan capaian sebesar 100%.

24. Persentase Penduduk yang di *Skrining* Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penduduk yang di *skrining* faktor resiko PTM tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 90,25%, yang mana menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 persentase penduduk yang terkena faktor resiko PTM adalah sebesar 118,4% dan 110,81%. Sementara itu, pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan menjadi 110,62% dan 108,3%.

25. Persentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI

Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI tahun 2020 sebesar 55,55% dan meningkat menjadi 59,26%. Pada tahun 2022, persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI di Kota Madiun mencapai 85,19% dan 92,59 pada tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2024 capaian ini sebesar 100%.

26. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang Beroperasi Sesuai Perundangan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan pada tahun 2020 sejumlah 502 dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 550 sarana. Meningkatnya sarana pelayanan kesehatan diharapkan semakin banyak masyarakat yang terpenuhi haknya dalam mendapat layanan kesehatan. Namun pada tahun 2022, jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan mengalami penurunan hampir 50% hingga mencapai 252 sarana. Namun pada tahun 2023, sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan sebesar 161 sarana kesehatan. Sementara itu, tahun 2024 capaian ini meningkat menjadi 257 sarana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

27. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Madiun tahun 2020 hingga tahun 2022 telah sesuai standar serta mendapatkan persentase sebesar 100%. Pada tahun 2023, persentase ini meningkat menjadi 100,12% dan turun kembali menjadi 100% pada tahun 2025.

28. Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU)/Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)/ Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) sehat

Persentase TTU dan TPM sehat mencapai 86,32% pada tahun 2020. Diharapkan tempat-tempat umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan serta tempat pengolahan makanan seperti warung makan, toko penjual makanan, dan lokasi jajanan makanan dapat dilakukan pengawasan lebih lanjut agar persentase mengalami peningkatan.

Tahun 2021 TTU dan TPM yang sudah dalam kategori sehat di Kota Madiun sudah mencapai 95,3% TTU dan 95,2% TPM. Dan pada tahun 2022, TTU turun menjadi 81% akan tetapi TPM meningkat menjadi 96,67%. Pada tahun 2023 untuk TTU telah menggunakan istilah baru yaitu Tempat Fasilitas Umum (TFU) dengan capaian 95,7% begitu pula dengan TPM disebut dengan istilah baru Tepat Pengelolaan Pangan (TPP) dengan capaian 2023 mencapai 89,7%. Sementara itu, pada tahun 2024 TFU meningkat menjadi 99,26% dan TPP meningkat sebesar 93,9%.

29. Angka Kematian Bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi. Pada tahun 2020 angka kematian bayi menjadi sebesar 4,32. Adapun angka kematian bayi Kota Madiun pada Tahun 2021 mencapai 3,8 dan meningkat menjadi 4,2 pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada 2023 menjadi 5,1. Sementara itu, pada tahun 2024, angka kematian bayi turun di angka 4,5.

30. Angka Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Kusta

Penghitungan angka kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Kusta menggunakan angka prevalensi kusta per 10.000 penduduk, di Kota Madiun capaiannya cenderung fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2022 merupakan capaian terendah diantara periode tahun 2020-2024 yaitu mencapai 0,1 saja. Namun pada tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 0,4 resiko orang terinfeksi kusta. Pada tahun 2024, angka ini turun menjadi 0,2.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

31. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Hasil survey IKM terhadap pelayanan publik pada RSUD Kota Madiun mengalami peningkatan dari 80,19 pada tahun 2020 menjadi 89,49 pada tahun 2024. Ini terjadi karena RSUD Kota Madiun dalam penerapan pelayanan melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kepuasan masyarakat.

32. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD

Capaian SPM RSUD Kota Madiun juga cenderung meningkat seiring meningkatnya capaian IKM pada RSUD Kota Madiun. Capaian SPM tahun 2020 adalah sebesar 81,52 dan pada tahun 2021 turun menjadi 79,35. Pada tahun 2022 capaian SPM RSUD mencapai 88,17 dan kembali meningkat pada 2023 menjadi 89,13. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2024 hingga 89,49 namun secara kategori masuk dalam Tuntas Madya.

33. Persentase Desa *(Open Defecation Free)* ODF

Pemerintah Kota Madiun telah mencanangkan bebas ODF pada tahun 2014. Program unggulan untuk mendukung pencapaian ODF adalah program JAMBANISASI (Pembangunan Jamban untuk Masyarakat tidak Mampu). Capaian persentase desa ODF di Kota Madiun dari tahun 2020-2024 mencapai 100%.

34. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diterapkan di Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 34 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Madiun Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Hasil	Capaian	Target	Hasil	Capaian	Target	Hasil	Capaian	Target	Hasil	Capaian
KESEHATAN														
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2,490	2,490	100%	2,470	2,470	100%	2,450	2,453	100.12%	2,847	2,861	100.50%
2	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2,377	2,384	100.29%	2,357	2,360	100.13%	2,338	2,347	100.38%	2,847	2,851	100.10%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2,264	2,991	101.19%	2,245	2,257	100.53%	2,227	2,256	101.30%	2,690	2,719	101.10%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	9,218	9,198	99.78%	9,145	9,202	100.62%	9,081	9,099	100.20%	10,611	10,684	100.70%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	32,074	28,629	89.26%	31,855	31,855	100%	31,582	31,582	100%	31,650	31,650	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	115,489	136,729	118.39%	115,110	127,548	110.81%	114,664	126,836	100.00%	129,392	140,124	108.30%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	25,597	28,406	99.33%	29,585	30,187	102.03%	30,573	31,360	102.57%	33,407	34,940	104.60%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	68,685	37,767	54.99%	68,973	38,781	56.23%	69,278	42,970	62.03%	12,731	12,752	100.20%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	8,111	9,574	118.04%	8,143	9,890	121.45%	7,741	8,425	108.84%	10,755	11,012	102.40%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Hasil	Capaian	Target	Hasil	Capaian	Target	Hasil	Capaian	Target	Hasil	Capaian
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	338	389	115.09%	339	360	106.19%	339	374	110.32%	383	403	105.20%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulusis	Jumlah warga negara terduga *tuberculusis* yang mendapatkan layanan kesehatan	3,261	1,718	52.68%	5,184	6,553	126.41%	5,076	5,763	113.53%	6,597	6,684	101.30%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodefiviency virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	5,845	5,968	102.10%	5,780	6,849	118.49%	5,828	6,664	114.34%	6,240	7,482	119.90%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada tahun 2024 capaian kesehatan secara keseluruhan adalah 103.69% atau dikategorikan Tuntas Paripurna. Secara keseluruhan dari 12 indikator capaian kesehatan tahun 2024 sudah memenuhi target. Data capaian pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan 3 (tiga) Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 35 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	2024	
				Target Pencapaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6
3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes, PP dan KB	per 100.000 kelahiran hidup	183/100.000 KH	0/100.000 KH
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya : (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Dinkes, PP dan KB	%	100	100.14
3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, PP dan KB	per 1000 kelahiran hidup	AKB = 16/1000 KH	AKBa = 5.2/1000 KH AKB = 4.5/1000 KH
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, PP dan KB	per 1000 kelahiran hidup	10/1000 KH	AKN = 3.7/1000 KH
3.3 Pada Tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Dinkes, PP dan KB	%		
	Jumlah kasus baru HIV		kasus		156
	Presentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standart		%	100	120,13
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinkes, PP dan KB	%	673	629,9
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinkes, PP dan KB	%		0,07
3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinkes, PP dan KB		1	1
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Dinkes, PP dan KB	%	<2%	3.71%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
	Jumlah kasus hepatitis B		kasus		DDHB Bumil = 28; Umum (faktor resiko) = 176
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Dinkes, PP dan KB	per 100.000 penduduk	<1	Filariasis: 0,04 Kusta : 0,22
3.3.5 (a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Dinkes, PP dan KB	Program eliminasi merupakan program nasional, indikator menanyakan jumlah kab/kota jadi merupakan indikator provinsi	1	1 (eliminasi tahap I)
3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Dinkes, PP dan KB	Program eliminasi merupakan program nasional, indikator menanyakan jumlah kab/kota jadi merupakan indikator provinsi	1	1
3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.					
3.4.1 (a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 Tahun.	Dinkes, PP dan KB	Data tidak tersedia karena memerlukan survei		
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinkes, PP dan KB	%	47.7	11.5
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan esehatan sesuai standar	Dinkes, PP dan KB	%	100	100.16
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 Tahun.	Dinkes, PP dan KB	%	90%	108.3
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.					
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	Dinkes, PP dan KB	kasus		0
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Dinkes, PP dan KB	kasus		0
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 Tahun dalam satu Tahun terakhir.	_____	orang		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
3.6 Pada Tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.					
3.6.1*	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Polres Madiun Kota	orang		
3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.					
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Dinkes, PP dan KB	%	68	70.5
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 Tahun; umur 15-19 Tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Dinkes, PP dan KB	%	4.6	5.4
3.7.2 (a)	*Total Fertility Rate (TFR).*	Dinkes, PP dan KB	%	<2.1	1.85
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Dinkes, PP dan KB	Tidak ada data		
3.8.1 (a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Dinkes, PP dan KB	%	<7	5.58
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	BPS	Tidak ada data		
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinkes, PP dan KB, BPJS	%	100	101.02
3.9 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.					
3.9.3*	Angka kematian akibat keracunan.	Dinkes, PP dan KB	%	0	0
3.a Memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control* WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.					
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 Tahun.	Dinkes, PP dan KB, BPS			
		Dinkes PP dan KB	Tidak Ada Data		
		BPS	%		
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai *the Doha Declaration* tentang *the TRIPS Agreement and Public Health*, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.					
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Dinkes, PP dan KB			
	Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Dinkes, PP dan KB	%	100% (dari 95% SI)	92.9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
3.b.2*	*Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.*	Dinkes, PP dan KB	Indikator ini tidak ada		
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Dinkes, PP dan KB	%	100	100
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.					
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinkes, PP dan KB	%	11.6	19.7
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.					
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Dinkes, PP dan KB	SK	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2025

C. Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020 hingga 2024 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 36 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
4.1	Rasio rumah layak huni	99.95	99.66	99.58	99.72	99.9
4.2	Rasio permukiman layak huni	100	99.66	99.58	99.72	99.9
4.3	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	87.12	89.22	90.55	94.05	99.05
4.4	Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani (Ha)	12.08	31.98	20.43	0.91	45.01

Sumber : BPS Kota Madiun dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana data yang termuat pada tabel diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Madiun tahun 2020 hingga 2024 mengalami perkembangan fluktuatif. Semakin tinggi rasio berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah layak huni. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2020 mencapai 99,95. Tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan menjadi 99,66 dan 99,58. Tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan menjadi 99,72 dan 99,9. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai hibah dan bansos sehingga baru tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Adanya usulan-usulan baru mengakibatkan jumlah perkembangan rasio menjadi fluktuatif.

2. Rasio permukiman layak huni

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi dari Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Mengacu pada hal diatas tentang lingkungan permukiman kumuh bahwa sampai dengan tahun 2024 rasio permukiman layak huni mencapai 99,9% atau dengan kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni.

3. Indeks Sarana Prasarana Permukiman

Indeks Sarana Prasarana Permukiman adalah indikator yang menjadi tujuan dari dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, penopang indikator ini adalah Indeks Perumahan Permukiman dan Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman. Untuk menghitung Indeks perumahan terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu Persentase RTH yang dikelola kondisi baik, persentase penerangan jalan yang dikelola, dan persentase peningkatan fasilitas permakaman.

Selain itu untuk menghitung indeks pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu persentase Rumah Layak Huni, Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Cakupan Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 87,12 pada tahun 2020 menjadi 99,05 pada tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Kawasan Kumuh yang Tertangani

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun nomor: 360-401.206/193/2020 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Madiun, telah ditentukan terdapat sebesar 64,49 Ha untuk lokasi yang perlu peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 65,4 Ha lokasi yang sudah dilakukan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Sedangkan pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor: 648/185/401.111/2025 bahwa luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kota Madiun berjumlah 45,01 Ha dengan kategori peremajaan yang semuanya tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan, sehingga masih terdapat 166,10 Ha luasan kawasan kumuh yang masih harus segera di tangani.

5. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 37 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN											
			2021			2022			2023			2024		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN											
			2021			2022			2023			2024		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/ kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah Daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	65	65	100%	105	105	100%	105	105	100%	140	140	100%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2025

Adapun capaian standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman pada tahun 2021-2024 secara keseluruhan mencapai 100% atau termasuk kategori Tuntas Paripurna.

D. Pelayanan Sosial

Untuk indikator fasilitas penyediaan rumah yang pelayanan sosial penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 38 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2020-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
6	Sosial					
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16	16	16	16
6.2	Jumlah Penerima Bantuan	49.075	52.260	19.094	26.670	11.437
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	30.295	27.358	30.690	33.716	24.493

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7
6.4	Persentase PMKS/ PPKS yang tertangani	99.80%	99.66%	99.95%	99.90%	99,69%
6.5	PMKS/ PPKS yang memperoleh bantuan sosial	49.075	52.260	19.094	26.670	11.437
6.6	Angka Kemiskinan	4.98	5.09	4.76	4.74	4,38
6.7	Indeks Gini	0.39	0.345	0.398	0.416	0.435

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, 2025

Sebagaimana data yang termuat pada tabel diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun pada tahun 2020 hingga 2024 terdapat 16 lembaga sarana sosial, terdiri dari 15 Panti Asuhan dan 1 (satu) Panti Jompo yang terdaftar sedangkan yang aktif dan menerima bantuan sosial permakanan sebanyak 8 (delapan) lembaga,. Jumlah bantuan sosial untuk Panti Asuhan menyesuaikan dengan jumlah masing-masing anak yang diasuh.

2. Jumlah penerima bantuan

Jumlah penerima bantuan di wilayah Kota Madiun pada tahun 2020 sebanyak 49.075 orang dan meningkat menjadi 52.260 orang pada tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah penerima bantuan telah menurun drastis menjadi 19.094 orang. Namun, setelah adanya penurunan drastis tersebut, pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 26.670 penerima bantuan. Capaian ini menurun dua kali lipat lebih pada tahun 2024, yaitu sebesar 11,437 orang penerima bantuan.

3. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Jumlah penanganan PPKS pada tahun 2020 sebesar 30.295, kemudian menurun menjadi 27.358 pada tahun 2021. Capaian ini mengalami peningkatan hingga tahun 2022, yaitu sebesar dan meningkat sebesar 33.690. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 capaian ini meningkat menjadi 33.716 dan 24.493. Tujuan dari penanganan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga berdampak pada upaya untuk mencapai hidup layak. susah. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PPKS, yang dahulu disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Jumlah PPKS di Kota Madiun sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1% dari total jumlah penduduk. Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2 % dari jumlah penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin) sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan berupa bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

4. PMKS/ PPKS yang tertangani

Dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2024, persentase PMKS/ PPKS yang tertangani konsisten berada di atas 99%. Seperti pada tahun 2020 capaian penanganan sebesar 99,8%. Sedangkan pada tahun 2021, capaiannya meningkat menjadi 99,66. Sedangkan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 cakupan PMKS/ PPKS yang tertangani berturut-turut sebesar 99,95%; 99,90%; dan 99,69%.

5. PMKS/ PPKS yang memperoleh bantuan sosial

Data PMKS/ PPKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2024 ditampilkan pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 2. 39 Rincian PMKS/ PPKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2024

JENIS PPKS		JUMLAH	BANTUAN
1.	Lanjut Usia Terlantar/ Nonpotensial	200	Rp1,600,000,000
2.	Anak Terlantar	-	-
3.	Fakir Miskin dengan rincian:		
-	Fakir Miskin KPM BPNT	7.414	Rp17.793.600,000
-	Fakir Miskin KPM PKH	3.168	Rp9.491.090.590
-	Fakir Miskin KPM BLTD, BLT	3.410	Rp7.437.900.000
Jumlah		14.192	Rp36.322.590.590

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada tabel diatas, pada tahun 2024 jumlah PMKS/ PPKS yang menerima bantuan sosial sebanyak 14.192 orang. Jenis PMKS/ PPKS yang diberi bantuan yaitu lanjut usia terlantar/non potensial berupa bantuan uang tunai sebesar Rp8.000.000,- per orang. Jumlah penerima bantuan terbanyak yaitu jenis PMKS/ PPKS fakir miskin dengan jumlah 13.992 orang dengan total bantuan sebesar Rp34,722,590,590.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Sesuai data BPS Angka Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2021 sebesar 5,09% atau sekitar 9.060 penduduknya berada dibawah garis kemiskinan (Rp. 514.409,-/jiwa/bln). tahun 2022 Angka Kemiskinan Kota Madiun mengalami penurunan sebesar 0,33 poin atau berada pada 4,76% atau sebanyak 8.490 penduduk miskin. Berbagai bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD dan pemberdayaan sosial yang diterima masyarakat ditujukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat demi menurunkan Angka Kemiskinan di Kota Madiun. Pada tahun 2023, terjadi penurunan Angka Kemiskinan menjadi sebesar 4,74. Angka Kemiskinan pada tahun 2024 menurun kembali menjadi 4,38%.

7. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kab/Kota, maka jenis pelayanan dasar Bidang Sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 40 Capaian SPM Bidang Sosial Kota Madiun Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN											
			2021			2022			2023			2024		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
SOSIAL														
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	93	100	107.53%	100	95	107.53%	97	117	120.60%	198	198	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	457	628	137.42%	460	736	160.22%	465	613	131.82%	470	470	100%
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	135	276	204.44%	137	213	155.47%	139	251	180.57%	253	253	100%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	50	50	100%	92	72	78.26%	94	105	111.70%	96	96	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN											
			2021			2022			2023			2024		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	3,300	5,734	173.75%	36	17	47.22%	36	58	161.11%	49	49	100%

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, 2025

Capaian SPM urusan bidang sosial secara keseluruhan tahun 2024 adalah 100% sehingga dapat dikategorikan Tuntas Paripurna.

E. Pelayanan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada aspek tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 47 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
7	Tenaga Kerja					
7.1	Angka sengketa pengusaha pekerja per Tahun	100	18	13	14	12
7.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68.63%	66.87%	66.85%	69.29%	70,60%%
7.3	Pencari kerja yang ditempatkan	73.04	79.15	91.76	92.43%	91,90%
7.4	Tingkat pengangguran terbuka	8.32%	8.15%	6.39%	5.85%	4,30%
7.5	Keselamatan dan perlindungan	23,294	25,218	25,505	28,150	37,884
7.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Daerah	100	0	0	0	0
7.7	Rasio Kewirausahaan	15,27	14,98	10,13	15,18	14,14

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana data yang termuat pada tabel diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Angka sengketa pengusaha pekerja per Tahun

Indikator ini menunjukkan capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Dalam era industrialisasi, masalah sengketa pengusaha dan pekerja menjadi semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai- nilai pancasila. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial. Hal ini dilakukan untuk mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Mediator hubungan industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh dan stabilitas dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota Madiun perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha di Tahun 2020 yang terdaftar pengaduan dan dapat terselesaikan dengan capaian kinerja 100% penyelesaian pengaduan ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan perjanjian bersama.

Pada tahun 2021 sampai 2024 terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka sengketa pengusaha pekerja per tahun. Dilihat dari data yang ada ternyata angka sengketa hanya mencapai 18% pada Tahun 2021, 13% pada tahun 2022, 14% pada tahun 2023 serta 12% pada tahun 2024. Dengan kata lain penurunan angka sengketa ini dapat sukses dilaksanakan saat terjadi implementasi Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di suatu perusahaan.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. TPAK tahun 2020 sebesar 68,63% da meningkat menjadi 68,63% pada tahun 2021. Angka ini menurun di tahun berikutnya. Pada tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Madiun terealisasi sebesar 66,85%. Hal ini menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Berarti yang sisanya sebanyak 33 orang adalah bukan angkatan kerja yang terdiri dari usia sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Pada tahun 2023, Capaian TPAK mengalami peningkatan menjadi 69,29%. Sedangkan pada tahun 2024, TPAK mengalami peningkatan hingga 70,60%.

Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurung waktu tahun 2020-2024 mengalami perkembangan fluktuatif naik. Hal ini dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan keterampilan serta menciptakan wirausaha baru.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

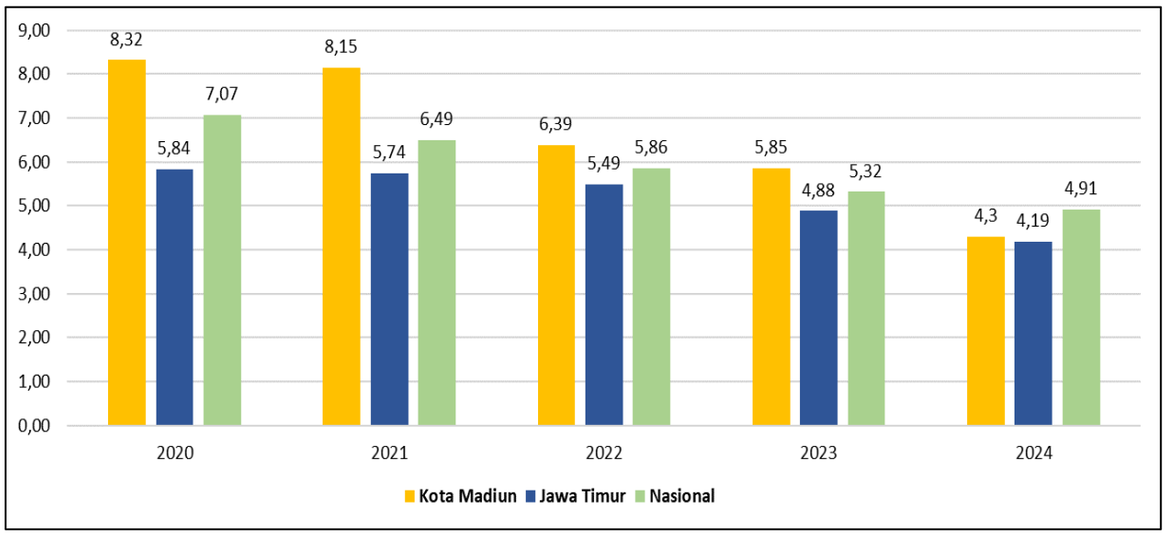
Pencari kerja yang ditempatkan dapat dihitung dengan cara persentase dari jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari kerja yang terdaftar. Persentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan sebesar 73,04%. Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 79,15% dan pada tahun 2023 kembali secara signifikan di posisi lebih dari 90% yaitu 92,43%. Hal ini disebabkan pandemi yang sudah dapat penanganan dan teratasi dengan baik sehingga perekonomian perlahan berangsur normal karena perekrutan tenaga kerja baru pada perusahaan. Sedangkan pada tahun 2024, capaian ini berada di angka 91,90%.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka atau sering juga di istilahkan dengan pengangguran penuh merupakan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain Angka Kemiskinan. TPT Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. Pada tahun 2020 capaian TPT sebesar 8,32%. Angka TPT di Kota Madiun mengalami penurunan 0,17 poin di Tahun 2021 dan penurunan 1,76 poin di tahun 2022. Data dari BPS untuk TPT Kota Madiun pada tahun 2021, 2022 dan 2023 sebesar 8,15%, 6,39% dan 5,85%. Sedangkan pada tahun 2024 TPT sebesar 4,3%.



Gambar 2. 81 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kota Madiun, 2025

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun dari tahun 2020-2024 selalu berada di atas TPT Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

5. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

Sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, begitu juga dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menaati peraturan tersebut guna memberikan kenyaman dan keamanan bagi pekerja di lingkungan pekerjaannya. Sedangkan bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kota Madiun selama tahun 2020-2024 selalu menunjukkan peningkatan jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Pada tahun 2020 jumlahnya sebanyak 23.294 pekerja. Tahun 2022 jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja di Kota Madiun sudah mencapai 25.506 pekerja. Tahun 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2.644 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlah penerima menjadi 28.150 pekerja. Serta sebanyak 37.884 pekerja pada tahun 2024.

6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Daerah

Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance*. Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat (3), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/16/MEN/2001, merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus dipahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha.

Pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah bersama sama menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian bersama (PB). Meskipun sudah adanya PB yang disepakati antara pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha.

Untuk Kota Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha di 2020 yang terdaftar dapat terselesaikan semua. Pada tahun 2021 dan 2024, permasalahan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah ternyata tidak terdapat permasalahan berarti. Hal itu terjadi mengingat penyelesaian masalah yang berjumlah 0, dalam arti lain tidak ada permasalahan mengenai perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Kota Madiun yang terjadi pada tahun 2021-2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah penduduk yang berwirausaha terhadap total penduduk suatu wilayah pada periode tertentu. Rasio kewirausahaan Kota Madiun mengalami fluktuasi perkembangan paska terjadinya *Covid-19*. Rasio kewirausahaan Kota Madiun tahun 2020 sebesar 15,27 % dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2022 mejadi 10,13 %. Nilai rasio ini mengalami kenaikan di pada tahun 2023 menjadi 15,18 % dan kembali mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 14,14 %. Secara umum rata – rata rasio kewirausahaan sebesar 13,61 %.

F. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengarusutamaan gender dengan sasaran meningkatkannya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 41 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	12.72	7.83	13.47	11.73	12,70
8.2	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0.016	0.032	0.00023	0.00024	0.00024
8.3	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100
8.4	Indeks Pemberdayaan Gender	77.18	76.75	78.03	78.94	78.94*
8.5	Indeks Pembangunan Gender	94.38	94.42	94.57	95.18	95.18*

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, 2025

Sebagaimana data yang termuat pada tabel diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. Jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk realisasi tahun 2020 sebesar 12,72%, dan tahun 2021 sebesar 7,83%. Beberapa alasan yang menyebabkan penurunan adalah pensiun, mutasi, ataupun meninggal dunia. Adapun pada tahun 2022 jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah secara signifikan naik menjadi sebesar 13,47%, hal ini dikarenakan terdapat mutasi masuk dan pengangkatan ASN. Namun, pada tahun 2023, mengalami penurunan menjadi 11,73%. Namun pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan menjadi 12,7%.

2. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Realisasi tahun 2020 sebesar 0,016 sedangkan tahun 2021 mencapai 0,032. Rasio KDRT menggambarkan jika semakin tinggi rasio maka kesadaran kaum perempuan untuk melapor apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pada tahun 2022 turun signifikan menjadi 0,00023 dan pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,000204, hal ini dikarenakan edukasi dan pendampingan di dalam keluarga telah berhasil dilakukan lewat kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan data tahun 2024 belum tersedia.

3. Jumlah persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Semua laporan pengaduan yang masuk di pusat pelayanan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2020 hingga 2024 didata dan tertangani semuanya, sehingga capaiannya 100%.

4. Jumlah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakan perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG Kota Madiun tahun 2020-2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Tahun 2020 capaiannya sebesar 77,18%. Angka ini menurun di tahun 2021 menjadi 76,75% dan naik kembali di tahun 2022 menjadi 78,03%. Di tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan menjadi 78,94. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Adapun data untuk tahun 2024 diestimasikan sebesar 78,94, namun angka ini masih sementara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Jumlah Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Nilai IPG Kota Madiun tercatat mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 94,38 dan tahun 2021 sebesar 94,42. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil, dibuktikan dengan data di lapangan yang di dapat oleh BPS bahwasannya IPG Kota Madiun sudah mencapai 94,57 pada Tahun 2022. tahun 2023 sebesar 95,18. Adapun data IPG untuk tahun 2024 adalah 95,18, namun angka ini masih angka sementara.

G. Pelayanan Perhubungan

Untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 42 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
14	Perhubungan					
14.1	Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu	94%	100%	100%	100%	100%
14.2	Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	90	93	98%	98%	100%
14.3	IKM terhadap pelayanan pelayanan angkutan dan lalu lintas	85.9	85.903	87.289	87.36	89.13
14.4	Persentase Perlengkapan Jalan	67%	84%	100%	100%	100%
14.5	Kinerja Angkutan Umum	35%	40%	70%	70%	70%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2025

Sebagaimana data yang termuat pada tabel diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Persentase jumlah pemasangan rambu-rambu

Data menyatakan bahwasannya persentase jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Madiun pada tahun 2020 sebesar 94%. Sedangkan pada tahun 2021-2024 realisasinya mencapai 100%.

2. Persentase sarana dan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang berfungsi baik

Persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik pada tahun 2020 sebesar 90%. Sedangkan tahun 2021 adalah 93% dan tahun 2022 adalah 98%, sedangkan tahun 2023 dan 2024 realisasinya mencapai 98% dan 100%. Lebih detailnya sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 43 Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik di Kota Madiun Tahun 2022 – 2024

No.	NAMA	2022			2023			2024		
		JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%	JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%	JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%
1	2	3			4			5		
1	TRAFFIC LIGHT	30	30	100%	30	30	100%	31	31	100%
2	HALTE	12	10	83%	12	11	91%	13	13	100%
3	CCTV	25	25	100%	25	25	100%	75	75	100%
4	WARNING LIGHT	65	65	100%	65	65	100%	70	70	100%
JUMLAH		132	130	98%	132	131	98%	189	189	100%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2025

Sebagaimana yang ditampilkan pada tabel diatas diatas dapat dilihat bahwa persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang yang berfungsi baik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu 98% di tahun 2022, 98% di tahun 2023 dan 100% di tahun 2024.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas

IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas tahun 2020 IKM terhadap layanan angkutan dan lalu lintas mencapai 85,9. Sedangkan pada tahun 2021 IKM masyarakat kembali meningkat walau tidak signifikan dengan angka sebesar 85,903 dan terjadi peningkatan sebesar 1,457 poin dengan realisasi 87,360 di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2024 capaiannya naik menjadi 89,13.

4. Persentase Perlengkapan Jalan

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Jenis perlengkapan jalan yang wajib tersedia berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan di luar badan jalan, dan penyelenggaraan perlengkapan jalan.

Persentase perlengkapan jalan Kota Madiun 67% pada tahun 2020 dan 84% pada tahun 2021. Sedangkan tahun 2022-2024, persentase perlengkapan jalan di Kota Madiun sudah mencapai 100%. Hal itu berarti semua jalan sudah dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Kinerja Angkutan Umum

Kinerja angkutan umum di Kota Madiun ditandai dengan indikator *Load Factor* atas angkutan sekolah gratis. *Load Factor* angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah penumpang yang terangkut dengan kapasitas angkut maksimum kendaraan. *Load factor* juga dapat diartikan sebagai tingkat keterisian penumpang dalam suatu moda transportasi. *Load factor* yang tinggi menunjukkan pemanfaatan kendaraan yang optimal, sementara *load factor* yang rendah bisa mengindikasikan adanya kelebihan kapasitas atau kurangnya permintaan. Load Factor dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Total Penumpang Yang Terangkut}}{\text{Jumlah Kapasitas Total Angkutan umum}}$$

Sehingga dapat diketahui kinerja angkutan umum pada Dinas Perhubungan Kota Madiun adalah sebagai berikut; Kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 35%. Angka ini meningkat menjadi 40% pada tahun 2021. Peningkatan di tahun 2021 merupakan dampak kebijakan untuk angkutan umum gratis khusus Pendidikan membuat kinerja angkutan umum. Pada tahun 2022-2024, kinerja load factor angkutan umum dapat terealisasi secara signifikan mencapai 70% dikarenakan angkutan sekolah gratis sudah banyak diminati oleh masyarakat khususnya wali murid dari berbagai sekolah di Kota Madiun sehingga terjadi peningkatan jumlah penumpang yang signifikan pada armada angkutan sekolah gratis.

Penyediaan angkutan umum di Kota Madiun masih sangat terbatas pada Angkutan Sekolah Gratis. Perlu ada kebijakan yang lebih komprehensif dan menyeluruh agar mendorong masyarakat secara umum mau menggunakan angkutan umum sebagai pilihan transportasi.

Penyediaan angkutan umum tersebut harus dibantu dengan kebijakan "*Push and Pull Policy*". Penyediaan angkutan umum dengan skema "*Buy The Services*" sangat perlu dilakukan karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan angkutan umum sedangkan pasar untuk perusahaan angkutan umum masih jauh dari yang diharapkan dikarenakan belum terciptanya iklim transportasi yang berorientasi pada transit/penggunaan angkutan umum. Dengan penyediaan angkutan umum berbasis "*Buy The Services*", diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim transportasi yang berorientasi pada lokasi transit/penggunaan angkutan umum.

H. Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data menunjukan bahwa pada 2020 hingga 2022, sekitar lebih dari 90% penduduk di Kota Madiun telah memiliki akses air minum atau terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan pada tahun 2023 hingga 2024 persentasenya sudah mencapai 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 44 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Madiun Tahun 2020-2024

Tahun	Penduduk Berakses Air Minum
2020	96,58
2021	98,14
2022	98,17
2023	100
2024	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2025

Drainase merupakan infrastruktur dasar pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang selain jalan, sistem drainase yang baik akan memperlancar aliran air dan juga mencegah terjadinya penumpukan air di permukaan tanah untuk masuk dalam selokan/saluran air. Persentase *draine* baik yang ada di kota madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 45 Persentase drainase dalam kondisi baik Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jaringan Sistem Drainase (Km)	60.72	72.78	72.78	72.776	72.78
Panjang Drainase Tersumbat (Km)	20.24	14.53	13.8	13.346	13.15
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	90.4	80.03	80.06	80.09	80.12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2025

Lebih lanjut, kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang yang ditunjukkan melalui ketaatan RTRW tercatat selama lima tahun berturut-turut, dari tahun 2020 hingga 2024 adalah 100%, yang menunjukkan bahwa kegiatan atau proyek yang diukur selalu memenuhi ketentuan atau pedoman yang ditetapkan dalam RTRW selama periode tersebut. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan setiap tahunnya.

Tabel 2. 46 Ketaatan terhadap RTRW Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 47 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN											
			2021			2022			2023			2024		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	41,409	40,637	98.14%	44,831	44,011	98.17%	42,650	42,728	100.20%	47.702	47.702	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	41,409	40,591	98.02%	44,831	42,706	95.25%	44,706	46,141	103.20%	47.702	47.612	99.81%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2025

Secara umum tahun 2024 capaian indikator SPM bidang Pekerjaan Umum mencapai 99,9% sehingga dikategorikan Tuntas Paripurna.

I. Pelayanan Pertanahan

Salah satu pelayanan urusan pertanahan adalah fasilitasi terkait tanah yang bersengketa di Kota Madiun, pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 terdapat beberapa kali mediasi terkait konflik masalah pertanahan yang ada di Kota Madiun.

Tabel 2. 48 Data Layanan Pertanahan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Layanan	Penyelesaian
1	2020	0 layanan	-
2	2021	1 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
3	2022	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
4	2023	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
5	2024	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2025

J. Pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga Kota Madiun pada tahun 2020-2024 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasarannya berikut:

Tabel 2. 49 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
18	Pemuda dan Olahraga					
18.1	Jumlah organisasi pemuda	6	5	5	5	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
18.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	1	1	1	1	1
18.3	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
18.4	Lapangan olahraga	83	83	83	83	83
18.5	Jumlah Organisasi Olah Raga	28	28	28	28	28
18.6	Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional	3	4	6	8	13
18.7	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	79	97	205	212	222
18.8	Jumlah Peserta Olah Raga	2,015	2,895	7,835	7,965	7965
18.9	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Madiun, 2025

Penjelasan untuk masing-masing indikator tersebut adalah :

1. Jumlah organisasi pemuda

   Jumlah organisasi kepemudaan di Kota Madiun tahun 2024 antara lain:

   a. OSIS Tingkat SMP dan SMA Kota Madiun;
   b. Gugus Pramuka Tingkat SMP Kota Madiun;
   c. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meliputi :
      - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor);
      - Karang Taruna;
      - Forum Komunikasi Pemuda Kota Madiun (FKPKM);
      - Pemuda Madiun Bergerak (PMB);
      - Pemuda Katolik;
      - Pemuda Muhammadiyah;
      - Hiampunan Mahasiswa Islam;
      - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
      - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia; dan
      - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.

2. Jumlah kegiatan kepemudaan

   Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka.

3. Gelanggang / balai remaja

   Gelanggang/balai remaja di Kota Madiun tahun 2020 sampai 2024 berjumlah 3 (tiga) gelanggang/balai remaja dan tidak mengalami penambahan. Adapun gelanggang/balai remaja yang dikelola pemerintah Kota Madiun, yaitu:

   a. Lapangan Sepak bola Stadion Wilis Jl. Mastrip Kota Madiun;
   b. GOR Basket Jl. Mastrip Kota Madiun;
   c. Gedung Kesenian Jl. Ringin Kota Madiun; dan
   d. Lapangan di setiap kelurahan Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Lapangan olahraga

Jumlah lapangan olahraga yang tersebar di Kota Madiun tahun 2020 hingga 2024 tidak mengalami perubahan, hingga saat ini tahun 2024 masih berjumlah 83 lapangan.

5. Jumlah organisasi olahraga

Tahun 2024 jumlah organisasi olahraga tetap sama dari tahun 2020, yaitu terdapat 28 organisasi olahraga.

Tabel 2. 50 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah		No	Uraian	Jumlah	
1	2	3		4	5	6	
1	Bulu Tangkis	9	Klub	15	Angkat Besi	1	Klub
2	Tenis Lapangan	18	Klub	16	Taekwondo	1	Klub
3	Renang	5	Klub	17	Panjat Tebing	1	Klub
4	Atletik	1	Klub	18	Judo	3	Klub
5	Wushu	1	Klub	19	Senam	3	Klub
6	Pencak Silat	13	Klub	20	Balap sepeda	1	Klub
7	Catur	1	Klub	21	Tinju	1	Klub
8	Tenis Meja	4	Klub	22	Menembak	5	Klub
9	Panahan	2	Klub	23	Karate	3	Klub
10	Basket	3	Klub	24	Sepatu Roda	2	Klub
11	Bola Volly	5	Klub	25	Drumband	1	Klub
12	Sepak Bola	8	Klub	26	Bilyard	1	Klub
13	Sepak Takraw	1	Klub	27	Sepak Bola Futsal	2	Klub
14	Gulat	1	Klub	28	KONI	46	Klub

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Madiun, 2025

6. Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olahraga tingkat Nasional

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah memberangkatkan para atlet berprestasi untuk mengikuti berbagai pertandingan di tingkat Provinsi, nasional maupun internasional pada tahun 2024. Jumlah prestasi di bidang pemuda dan olahraga tingkat nasional meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 13 prestasi dibandingkan tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) prestasi.

7. Jumlah prestasi olahraga tingkat Regional dan Nasional

Prestasi olahraga untuk tahun 2024 di tingkat regional dan nasional juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 222 dibandingkan tahun 2023 sebanyak 212 prestasi.

8. Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak

Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak Kota Madiun tahun 2020-2023 telah mencapai 100%. Adapun kondisi sarpras olahraga di tahun 2024 juga mencapai 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

K. Pelayanan Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan.

Tabel 2. 51 Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	Uraian Data	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Perpustakaan yang dibina/ didampingi (unit)	36	36	217	218	212
2.	Jumlah Koleksi Buku (eksemplar)	85,518	88,765	90,674	98,396	100,180
3.	Jumlah Pengunjung (orang)	108,211	56,178	94,986	83,682	152,433
4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (persen)	-	-	-	35,84	35
5.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	-	-	18,47	18,47	18,67

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2025

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memberikan penyediaan bantuan taman bacaan yang ada di kelurahan. Jumlah perpustakaan masyarakat yang dibina pada 2024 ada sebanyak 212 unit. Adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum pada hari Sabtu dan Minggu dapat meningkatkan tren jumlah pengunjung. Namun data jumlah kunjungan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Yaitu 108.211 di tahun 2020 dan menurun drastis di tahun 2021, yaitu sebanyak 56.178 orang. Di tahun 2022 pengunjung meningkat menjadi 94.986 dan turun kembali di tahun 2023 menjadi 83.682 orang. Di tahun 2024, jumlah pengunjung meningkat signifikan menjadi 152.433 orang.

Lebih lanjut persentase perpustakaan sesuai standar perpustakaan nasional mengalami penurunan pada tahun 2023 ke 2024, yaitu sebesar 35,84 menjadi 35 persen. Hal ini menunjukkan bahwa standar perpustakaan Kota Madiun masih jauh dari standar nasional. Hal ini berkebalikan dengan capaian nilai Tingkat Kegemaran Membaca yang mencapai 18,64 pada tahun 2024 yang meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu 18,47.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

L. Pelayanan Pangan

Urusan pemerintahan bidang pangan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaran urusan pemerintahan bidang pangan di Kota Madiun berorientasi untuk "memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan" dengan sasaran "meningkatnya ketersediaan pangan". Indikator utama dalam mencapai tujuan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut diukur dengan indikator neraca bahan makanan. Sedangkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan bahan pangan utama (beras). Sedangkan indikator pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan energi dan protein. Adapun perkembangan indikator kinerja pembangunan Daerah urusan pemerintahan bidang pangan dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2. 52 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
9	Pangan					
9.1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	ada	ada
9.2	ketersediaan pangan utama	138.56	139	217	152	159
9.3	Ketersediaan Energi dan Protein	138.63	126.77	126,77*	132,23*	136.68

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2025

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Regulasi ketahanan pangan

Adapun regulasi bidang ketahanan pangan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 501-401.113/67/2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Madiun;
b. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 520-401.113/110/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 520-401.204/23/2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/129/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Madiun;

d. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/126/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Rumah Pangan Lestari Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 188-401.2014/27/2015 tentang Pembentukan Tim Bina Kegiatan Rumah Pangan Lestari;

e. Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun No. 188-401.113/01/2017 Tanggal 24 November 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun Nomor 060-401.204/001/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun.

2. Ketersediaan pangan utama

Berdasarkan perhitungan diperoleh rasio ketersediaan pangan utama di tahun 2020 adalah 138,56. Adapun pada tahun 2021 ketersediaan bahan pangan utama di Kota Madiun meningkat sedikit di posisi 139 dan meningkat signifikan di tahun 2022 yang berada pada posisi 217 namun mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 65 basis poin menjadi 152. Adapun ketersediaan pangan utama di tahun 2024 adalah 159, naik 7 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Jumlah ketersediaan energi dan protein

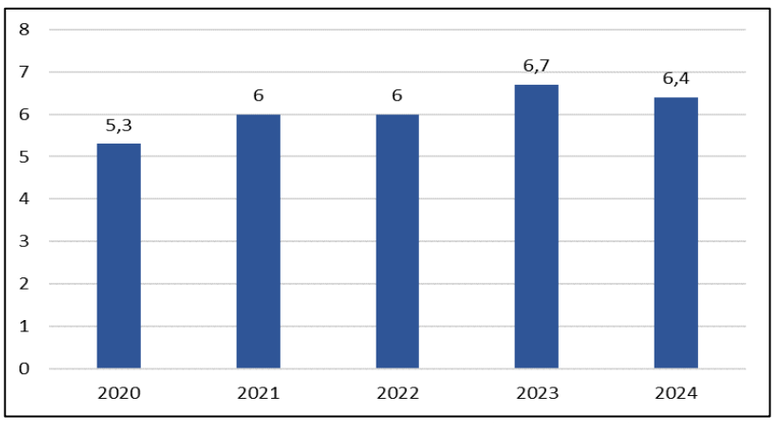
Standar kecukupan energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan saat ini yakni WNPG X tahun 2012, yaitu AKE (angka kecukupan energi) di tingkat ketersediaan sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan AKP (angka kecukupan protein) di tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/ kapita/hari.

Jumlah ketersediaan energi dan protein per kapita per hari pada tahun 2020 sebanyak 138,63 Kkal. Sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 126,77% dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 132,23%. Sedangkan tahun 2024 meningkat kembali menjadi 136,68%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

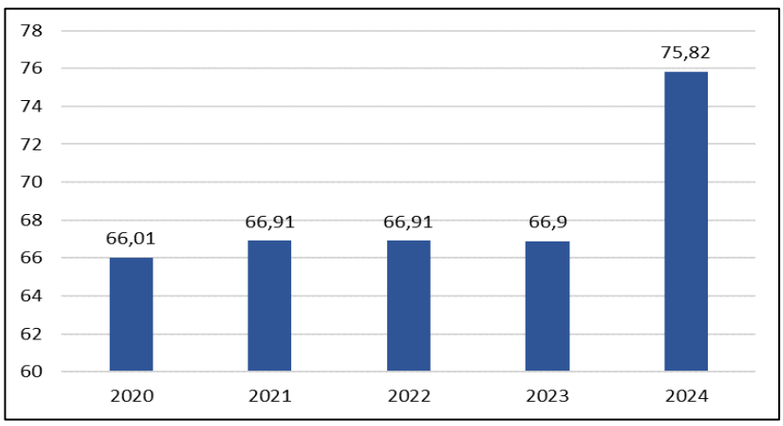
M. Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan dalam undang-undang, Cakupan petugas satuan polisi pamong praja dan pelindung masyarakat sangat berpengaruh dalam terciptanya suasana tertib dan tentram dalam masyarakat. Pemerintah Kota Madiun akan memperkecil rasio petugas dan jumlah penduduk dengan mengagendakan perekrutan petugas Satuan Polisi Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per kelurahan. Untuk mengetahui besar cakupan petugas tahun 2024 Satpol PP dan Linmas dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 82 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota madiun 2025

Berdasarkan gambar di atas, rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk Kota Madiun sedikit fluktuatif. Capaian tahun 2020 adalah 5,3. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 tetap berada di rasio 6. Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 6,7. Sedangkan tahun 2024 rasio jumlah Linmas menjadi 6,4 per 10.000 penduduk di Kota Madiun



Gambar 2. 83 Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar diatas, rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk selama tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 ke 2024 yang meningkat dari menjadi 6,99 menjadi 75,82. Adapun pada tahun 2020 capaiannya mencapai 66,01. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 capaiannya tetap di angka 66,91. Pada tahun hingga 2023, angka rasio petugas Pol PP di Kota Madiun sedikit turun di angka 66,9. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga mengampu penanganan kejadian kebakaran, pelayanan penanganan kebakaran ditunjukkan dengan persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap yang dicapai petugas pemadam kebakaran pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di kisaran waktu 15 menit untuk realisasi capaian setiap Tahunnya.

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga mencakup pelayanan kebencanaan, yang menjadi kewenangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Intensitas Bencana yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 53 Intensitas Bencana di Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	Jenis Bencana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Banjir	5	5	9	13	96
2.	Angin Puting Beliung	33	0	0	0	1
3.	Kebakaran	29	13	21	70	40

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kab/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maka jenis pelayanan dasar bidang Sub bidang bencana Daerah dan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 54 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN											
			2021			2022			2023			2024		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
1	2	3	4			5			6			7		
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	45	45	100%	45	45	100%	41	41	100%	40	40	100%
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2,575	2,575	100%	153,367	153,367	100%	950	950	100%	400	400	100%
2	Pelayanan pencehan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2,575	2,575	100%	2,395	2,395	100%	252	252	100%	261	261	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	12%	12	100%	156	156	100%	42	42	100%	12	12	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, 2025

Pada tahun 2024 Capaian SPM untuk bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara keseluruhan yakni 100% atau termasuk kategori Tuntas Paripurna.

N. Pelayanan Perizinan

Pada saat ini pengurusan perizinan sudah sangat efektif. Rata-rata lama mengurus perizinan di Kota Madiun membutuhkan proses selama 5 (lima) hari kerja. Jumlah persyaratan yang harus dilengkapi jumlahnya berbeda-beda sesuai perizinan yang akan diurus. Hal ini dapat dilihat sesuai tabel dibawah terkecuali untuk perizinan yang melibatkan beberapa rekomendasi dari berbagai instansi dikarenakan harus ada survei lapangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 55 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun Tahun 2024

No.	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
1	2	3	4	5
A	Pelayanan Perizinan Non Berusaha			
1	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Bahu Badan Jalan	3(tiga)	3(tiga)	Tidak Ada
2	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Penurunan Trotoar	3(tiga)	4(empat)	Tidak Ada
3	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan/atau Lapangan	2(dua)	3(tiga)	Tidak Ada
4	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan/atau Bangunan	3(tiga)	4(empat)	Tidak Ada
5	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Lahan Parkir	3(tiga)	5(lima)	Tidak Ada
6	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) non Berusaha	12(dua belas)	9(sembilan)	Tidak Ada
7	Izin Penempatan Bangunan Reklame	9(sembilan)	13(tiga belas)	Tidak Ada
8	Izin Reklame Insidentil	3(tiga)	5(lima)	Tidak Ada
9	Izin Reklame Permanen	3(tiga)	9(sembilan)	Tidak Ada
10	Izin Praktik Psikolog Klinis	9(sembilan)	7(tujuh)	Tidak Ada
11	Izin Praktik Perawat	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
12	Izin Praktik Bidan	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
13	Izin Praktik Tenaga Gizi	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
14	Izin Kerja Tenaga Gizi	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
15	Izin Praktik Apoteker	9(sembilan)	8(delapan)	Tidak Ada
16	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
17	Izin Praktik Fisioterapis	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
18	Izin Kerja Fisioterapis	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
19	Izin Praktik Okupasi Terapis	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
20	Izin Kerja Okupasi Terapis	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
21	Izin Praktik Terapis Wicara	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
22	Izin Kerja Terapis Wicara	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
23	Izin Praktik Akupuntur Terapis	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
24	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
25	Izin Kerja Perekam Medis	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
26	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
27	Izin Kerja Refraksionis Optisien	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
28	Izin Kerja Optometris	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
29	Izin Kerja Teknisi Gigi	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
30	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
31	Izin Praktik Penata Anestesi	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
32	Izin Kerja Radiografer	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
33	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
34	Izin Praktik Fisikawan Medis	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
35	Izin Praktik Ortotis Prostetis	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
36	Izin Praktik Elektromedis	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
37	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
38	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
39	Izin Tukang Gigi	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
40	Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis	4(empat)	9(sembilan)	Tidak Ada
41	Izin Penempatan Pedagang Pasar;	3(tiga)	7(tujuh)	Tidak Ada
42	Izin Promosi dalam Pasar;	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
43	Izin Reklame dalam Pasar;	9(sembilan)	4(empat)	Tidak Ada
44	Izin Pengelolaan Parkir Pasar;	9(sembilan)	3(tiga)	Tidak Ada
45	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/WC Pasar;	3(tiga)	3(tiga)	Tidak Ada
46	Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG);			
	-Fungsi Hunian	30(tiga puluh)	2(dua)	(L Gedung x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun) + (L Prasarana Penunjang x Indeks x Lingkup Pembangunan x HS Retribusi)
	-Fungsi Usaha	30(tiga puluh)	2(dua)	(L Gedung x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun) + (L Prasarana Penunjang x Indeks x Lingkup Pembangunan x HS Retribusi)
	-Fungsi Sosbud	30(tiga puluh)	2(dua)	(L Gedung x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun) + (L Prasarana Penunjang x Indeks x Lingkup Pembangunan x HS Retribusi)
	-Fungsi Keagamaan	30(tiga puluh)	2(dua)	Tidak Ada
	-Fungsi Campuran	30(tiga puluh)	2(dua)	(L Gedung x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun) + (L Prasarana Penunjang x Indeks x Lingkup Pembangunan x HS Retribusi)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
47	Pencabutan Surat Izin Tenaga Kesehatan	9(sembilan)	4(empat)	Tidak Ada
48	Konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);	1(satu)	1(satu)	Tidak Ada
49	Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;	3(tiga)	Konsultasi dan Pengaduan Secara Langsung/ Tatap muka : 3 (Tiga) Konsultasi dan Pengaduan Secara Online : 3 (Tiga)	Tidak ada
50	Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP)	3(tiga)	Penelitian Perorangan : 6 (enam) Penelitian Kelompok : 6 (enam) Penelitian Badan Usaha : 6 (enam) Penelitian Ormas Tidak Berbadan Hukum : 7 (tujuh) Penelitian Ormas Berbadan Hukum : 7(tujuh)	Tidak ada
B	Pelayanan Perizinan Berusaha			
1	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar;	32(tiga puluh dua)	9(sembilan)	Tidak ada
2	Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;	32(tiga puluh dua)	9(sembilan)	Tidak ada
3	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi Kewenangan DPMPTSP Kota Madiun;	Sesuai Service Level Agreement pada sistem OSS berdasarkan sektor	UMK Perorangan : 3 (Tiga) UMK Badan Usaha : 6 (Enam) Non UMK : 6 (Enam)	Tidak ada

Sumber: Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun, 2025

O. Pelayanan Perindustrian

Jika dilihat dari jumlah industri yang tercatat dan tenaga kerjanya menurut kecamatan di Kota Madiun tahun 2024, kecamatan yang memiliki jumlah industri terbanyak yakni Kecamatan Taman yaitu 13 industri yang hanya dapat menyerap tenaga kerja sebesar 271 orang. Namun Kecamatan Manguharjo dengan jumlah industri hanya sebanyak 12 industri mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat besar yaitu sebanyak 4.819 orang, yang juga merupakan penyerapan tenaga kerja terbanyak dibanding kecamatan lain.

Tabel 2. 56 Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan Kota Madiun, Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Industri Besar Sedang					Tenaga Kerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Manguharjo	5	6	9	12	14	1874	2818	4782	4819	4847
2	Taman	9	10	11	13	14	325	412	238	271	290
3	Kartoharjo	7	7	7	8	8	294	311	369	371	371
Jumlah		21	23	27	33	36	2493	3541	5389	5461	5508

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

P. Pelayanan Perdagangan

Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas pasar. Jumlah pasar umum di Kota Madiun tahun 2024 terdapat 9 unit, pasar khusus 2 unit, dan pasar desa 6 unit dengan jumlah pedagang tetap sebanyak 3.567 pedagang.

Tabel 2. 57 Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, 2020-2024

No.	Sarana Perdagangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pasar Umum	9	9	9	9	9
2.	Pasar Khusus	2	2	2	2	2
3.	Pasar Desa	6	6	6	6	6
4.	Pedagang Tetap	3.555	3.143	3.320	3.524	3.567

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Madiun, 2025

Q. Pelayanan Kepariwisataan

Pelayanan kepariwisataan di Kota Madiun dilakukan dengan mendata dan membina destinasi pariwisata serta tujuan wisata untuk dikembangkan serta mendata dan membina pelaku ekonomi kreatif, kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 mencapai 7,55% dan meningkat terus hingga 18,83% di tahun 2024, perkembangan data jumlah destinasi pariwisata serta tujuan wisata yang dibina sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 58 Data Jumlah Destinasi Pariwisata serta tujuan wisata yang dibina Tahun 2024

No	Destinasi Pariwisata	Tahun 2024
1	Lapak/ODTW	35 tempat
2	THM/Karaoke	23 tempat
3	Cafe	66 tempat
4	Rumah Makan	68 tempat
5	Restoran	52 tempat
6	Hotel	36 tempat
7	*Home Stay* dan *Guest House*	37
8	Jumlah Kamar Penginapan	1.502
9	Destinasi Tujuan Wisata	34 Lokasi

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun, 2025

Pada tahun 2024 terdapat 22 orang pelaku ekonomi kreatif yang dibina, Sedangkan data jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Madiun sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 59 Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2024

No	Pelaku Ekonomi Kreatif	Tahun
		2024
1	Seni Pertunjukan	15
2	Fesyen	20
3	Kriya (kerajinan tangan)	5
4	Kuliner	39
5	Fotografi	21
6	Musik	15

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Pelaku Ekonomi Kreatif	Tahun
		2024
7	Periklanan	6
8	Seni Rupa	6
9	Film Animasi	-

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun, 2025

Selain itu pelayanan kepariwisataan juga menghitung nilai tambah terhadap perekonomian di Kota Madiun, gambaran ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah berhasil dalam mewujudkan pengembangan sektor pariwisata di Kota Madiun, penilaian tersebut mencakup sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 60 Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Terhadap PAD	6,67	6,49	10,58	13,04	13,04*

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun, 2025

R. Pelayanan Kebudayaan

Pelayanan kebudayaan di Kota Madiun dilakukan dengan mendata *event* budaya yang diselenggarakan serta jumlah seniman, *event* budaya yang diselenggarakan pada tahun 2020 hanya 6 (enam) *event*. Seiring perkembangan Kota Madiun sebagai pusat perekonomian dan pariwisata maka di tahun 2024 jumlah *event* meningkat dua kali lipat menjadi 15 *event* dengan di dukung sejumlah 34 kesenian yang dibina dan 218 seniman bersertifikasi.

S. Pelayanan Kepegawaian

Fungsi pelayanan kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan berperan penting untuk mengatasi permasalahan seperti kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi jabatan, serta dinamika kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan. Indikator kinerja persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya serta Indeks Profesionalitas ASN dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pembinaan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun. Capaian Indeks Profesionalitas ASN dan persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 61 Pelayanan Kepegawaian Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Indeks Profesionalitas ASN	46,49	49,72	79,88	83,38	84.95
2	Persentase penempatan ASN sesuai dengan Kompetensinya	34,38	71%	63,22%	67,82%	83.61%

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun, 2025

T. Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kota Madiun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Tingkat keterbukaan informasi publik yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam untuk mengukur keberhasilannya seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2. 62 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87.25	97.33	99.25	96.71	97.42
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	3.06	2.86	4.45	4.57

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2025

U. Pelayanan Statistik

Bidang urusan statistik daerah mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun telah merangkum berbagai statistik Kota Madiun yang selanjutnya merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kota Madiun. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain Buku Analisis ASPM (Analisa Situasi Pembangunan Manusia) dan Buku Data Sektoral. Penyusunan 2 (dua) buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan dan penyusunan program kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Namun karena Buku Analisis ASPM memiliki subtansi yang sama dengan IPM, sehingga sudah tidak diterbitkan kembali.

Tabel 2. 63 Capaian Pelayanan Statistik Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.	Buku Analisis ASPM	ada	ada	-	-	-
2.	Buku Data Sektoral	ada	ada	ada	ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2025

V. Pelayanan Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat daerah yakni bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian sesuai arah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian, dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Tabel 2. 64 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87.25	97.33	99.25	96.71	97.42
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	3.06	2.86	4.45	4.57

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

W. Pelayanan Perkoperasian

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah persentase koperasi aktif. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedang koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024, persentase koperasi aktif, jumlah koperasi, dan persentase koperasi aktif di Kota Madiun menunjukkan tren fluktuatif, peningkatan dan penurunan diakibatkan jumlah koperasi yang mengalami penambahan dan pengurangan selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2. 65 perkembangan koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Madiun Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Jumlah Koperasi Keseluruhan	155	156	156	156	155
Jumlah Koperasi Aktif	153	154	156	140	140
Jumlah Koperasi Sehat	-	-	2	3	2
Persentase Koperasi Aktif	98.71	98.71%	100%	89.74%	90.91%
Persentase koperasi yang berkualitas		11	85	78,2	88,57
Meningkatnya Koperasi Berkualitas		83	85	133	124
Persentase Koperasi Ber NIB	-	-	15%	47%	59,29%
Usaha Mikro yang dibina	-	170	363	363	363
Persentase Usaha Mikro yang beromset naik		0	0	0	98
Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromzet naik		9	0	273	252
Usaha Mikro yang dikembangkan dan naik kelas	-	-	60	110	80
Usaha Mikro yang difasilitasi	-	-	148	693	276
Usaha Mikro yang diakses perbankkan	-	-	68	82	77
Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		0	1	0,45	0,38
Jumlah UMKM yang memiliki NIB	-	1.055	5.593	13.577	21.626

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Terdapat faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan koperasi. Hal ini dikarenakan kurangnya wawasan serta keahlian pengurus, pengawas dan anggota koperasi dalam pengembangan usaha dan perkoperasian, regenerasi kepengurusan koperasi kurang berjalan dengan baik terutama terhadap minat generasi muda untuk menjadi bagian dari kepengurusan koperasi, tata kelola koperasi yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku masih perlu ditingkatkan.

X. Pengawasan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan bidang pengawasan, indikator yang dapat digunakan adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Jumlah Unit Kerja yang memiliki predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)/WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), Indeks Persepsi Anti Korupsi, Survey Penilaian Integritas (SPI), dan Nilai *Monitoring Center for Prevention (MCP).*

Tabel 2. 66 Capaian Kinerja Pengawasan

NO	INDIKATOR CAPAIAN	2023	2024
1	2	3	4
1.	Level Maturitas SPIP	3 Level (skor 3,252)	3 Level (skor 3,286)
2.	Level Kapabilitas APIP	3 Level (skor 3,00)	3 Level (skor 3,16)
3.	Indeks Manajemen Risiko	3 Level (skor 2,856)	3 Level (skor 3,056)
4.	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	2 Level (skor 2,690)	2 Level (skor 2,910)
5.	Jumlah Unit Kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	-	1 unit kerja (Dinas Dukcapil)-WBBM
6.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	92,44	96,20
7.	Nilai SPI	81,86	77,07
8.	Nilai MCP	92	96

Sumber : Inspektorat Kota Madiun, 2025

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka pendanaan dalam RPJMD dirancang dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan secara menyeluruh, memfokuskan sumber daya pada tema-tema prioritas, serta memastikan sinergi antara program lintas perangkat daerah dan wilayah. Dalam implementasinya, pendekatan tersebut didukung oleh kebijakan anggaran berbasis prinsip money follows program, yang mengarahkan alokasi dana pada program-program yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dengan prinsip ini, prioritas penganggaran diberikan kepada kegiatan yang relevan dengan sasaran strategis RPJMD dan memiliki tingkat urgensi serta manfaat yang tinggi bagi masyarakat. Kerangka pendanaan juga mempertimbangkan aspek spasial untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata di seluruh wilayah. Selain itu, sinergi antara program pemerintah daerah, provinsi, dan nasional dioptimalkan untuk memaksimalkan manfaat pembangunan. Dengan kerangka pendanaan yang terintegrasi ini, diharapkan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dalam lima tahun ke depan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah dua kali mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terjadi perubahan mendasar dalam pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Perubahan ini mengarahkan pada manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabel, sehingga mempengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah secara signifikan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang serta seluruh bentuk kekayaan yang dapat menjadi milik daerah terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain itu, Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup seluruh kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan ini harus dilakukan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dianggap baik apabila berhasil merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab, termasuk di Kota Madiun. Hal ini mencakup manajemen sumber pendapatan daerah, yang melibatkan optimalisasi penerimaan dari pajak daerah, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya. Selain itu, pengelolaan belanja daerah juga harus dilakukan secara efisien dan tepat sasaran untuk mendukung program pembangunan prioritas, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan di Kota Madiun. Berbagai sumber pembiayaan, baik dari transfer pemerintah pusat, dana alokasi umum, maupun dana alokasi khusus, juga harus diintegrasikan dengan baik untuk mendukung kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.

Kota Madiun, sebagai salah satu daerah yang berkomitmen terhadap transparansi keuangan, perlu mengembangkan sistem pengelolaan yang akuntabel guna memastikan setiap dana yang dikeluarkan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pengawasan dan evaluasi secara berkala juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan pengelolaan keuangan yang terencana dan berkelanjutan, Kota Madiun dapat memperkuat posisi sebagai kota yang inovatif dan berdaya saing di tingkat regional. Daerah yang mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan meminimalkan ketergantungan pada dana transfer memiliki peluang lebih besar untuk menjadi daerah yang maju dan mandiri. Untuk menilai tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Madiun, perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah, baik dari segi kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang mendasari pengelolaannya. Lebih lanjut, gambaran umum keuangan daerah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah, termasuk kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan. Setiap aspek dianalisis secara mendetail sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah komponen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terkandung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan representasi kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam struktur yang mencerminkan alokasi pendanaan untuk mencapai berbagai sasaran, sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan nyata masyarakat untuk periode tertentu. Dengan demikian, APBD berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, untuk melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan kajian terhadap pelaksanaan APBD selama lima tahun terakhir, guna menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dievaluasi berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Aspek pendapatan daerah mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sementara itu, pembiayaan terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berikut merupakan struktur APBD yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.



Gambar 2. 84 Struktur APBD

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

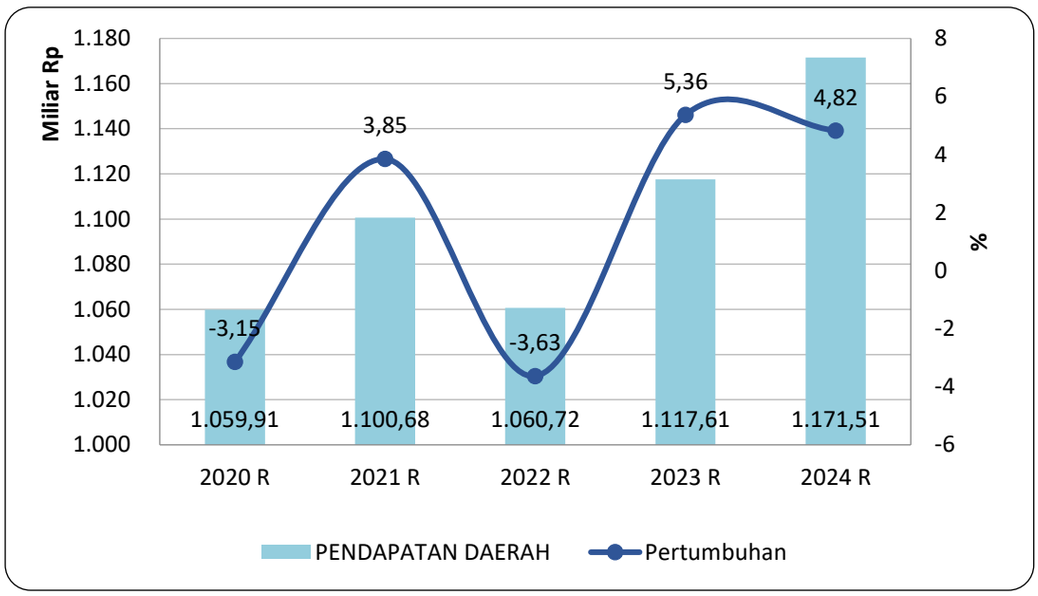
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.1.1 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Pada dasarnya, konsep penganggaran melibatkan perbandingan antara anggaran dan realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran. Demikian pula, dalam APBN/APBD, inti dari penganggaran adalah membandingkan anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, analisis keuangan daerah dalam bagian ini akan dibagi menjadi dua kerangka: penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada bagian penerimaan daerah, akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah serta penerimaan pembiayaan, yang kemudian akan diikuti oleh proyeksi selama 5 tahun ke depan yang akan dijelaskan pada bagian tersendiri.

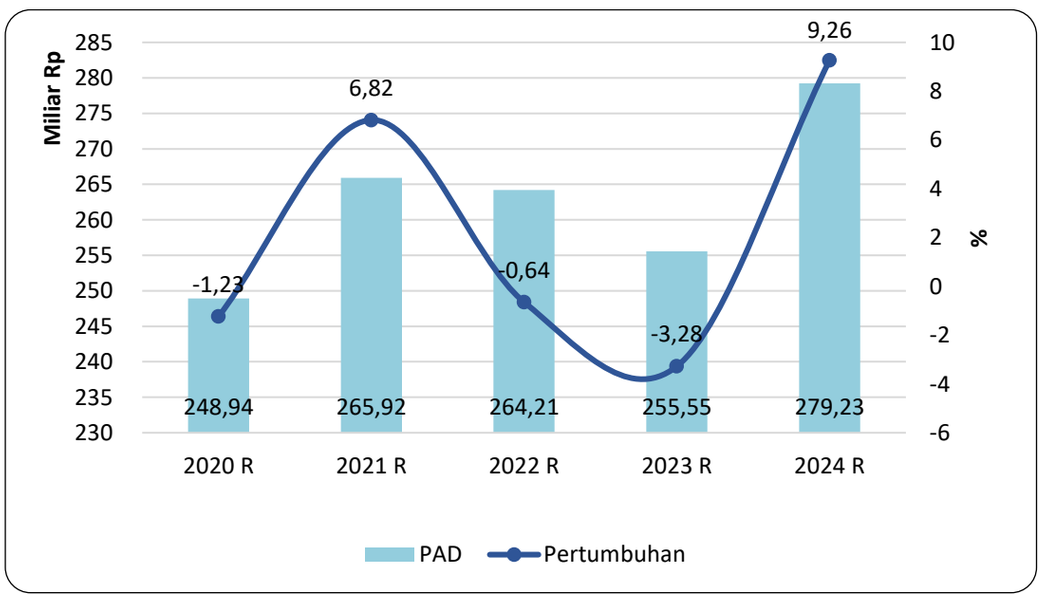
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diklasifikasikan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Kota Madiun terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer diantaranya berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Gambaran realisasi pendapatan daerah ini harapannya dapat membantu dalam mendorong berbagai kebijakan, program dan belanja daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 85 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Realisasi pertumbuhan pendapatan daerah Kota Madiun dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi. Fluktuasi pertumbuhan pendapatan daerah Kota Madiun dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal, seperti pandemi *Covid-19*, kondisi inflasi dan ekonomi global, serta kebijakan fiskal pemerintah pusat, dan faktor internal berupa efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja BUMD, serta dinamika ekonomi lokal (UMKM, perdagangan, dan pariwisata). Dengan kata lain, naik-turunnya pendapatan daerah merupakan hasil interaksi antara kondisi makroekonomi nasional dan global dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang ada.

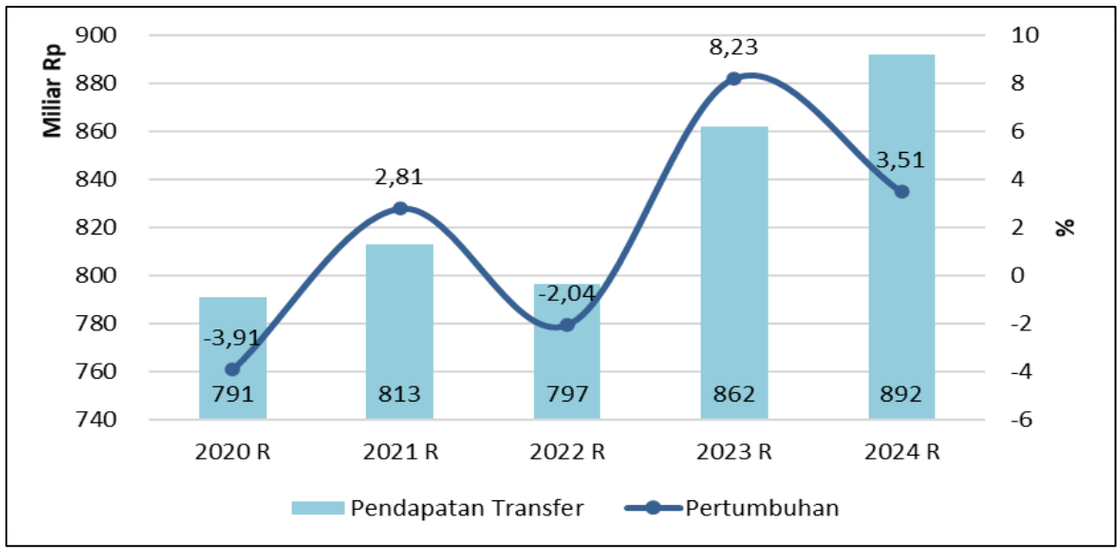


Gambar 2. 86 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber : BKAD Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Fluktuasi yang terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor eksternal (pandemi, inflasi, dan dinamika ekonomi) serta faktor internal (efektivitas pemungutan pajak, retribusi, dan kinerja BUMD). Penurunan PAD terjadi ketika aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat melemah, sedangkan lonjakan PAD pada tahun 2024 mencerminkan keberhasilan pemulihan ekonomi dan optimalisasi kebijakan pendapatan daerah. Optimalisasi sistem pembayaran digital, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan perbaikan kinerja BUMD mendorong lonjakan pertumbuhan PAD hingga 9,26 persen.

Selanjutnya, perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat dalam grafik berikut:



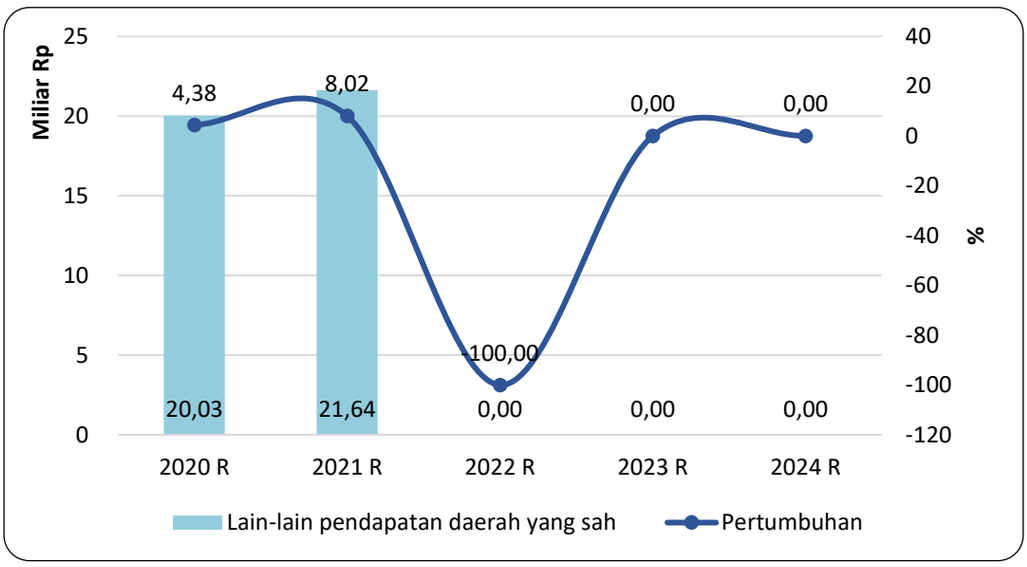
Gambar 2. 87 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber : BKAD Kota Madiun, 2025

Penurunan pendapatan transfer pada tahun 2020 dipicu oleh *refocusing* dan realokasi anggaran dari pemerintah pusat akibat pandemi *Covid-19*, sehingga alokasi Dana Transfer Umum (DTU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) berkurang. Pada tahun 2021 pemulihan fiskal nasional membuat alokasi transfer meningkat kembali, terutama melalui Dana Insentif Daerah (DID) dan tambahan Dana Desa yang didorong untuk pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022 fluktuasi terjadi akibat penyesuaian kebijakan fiskal pusat, efisiensi anggaran, serta prioritas belanja negara untuk program pemulihan tertentu, sehingga alokasi ke daerah menurun. Kemudian lonjakan terjadi pada tahun 2023 karena pemerintah pusat memperbesar alokasi transfer ke daerah untuk mendorong pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Meskipun masih tumbuh positif, penurunan laju pertumbuhan dibanding tahun 2023 terjadi akibat rasionalisasi anggaran pusat menjelang tahun politik, serta fokus belanja negara yang terbagi pada prioritas lain. Kesimpulannya fluktuasi pendapatan transfer Kota Madiun periode tahun 2020 hingga tahun 2024 dipengaruhi terutama oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat, termasuk refocusing anggaran pandemi, pemulihan ekonomi nasional, serta prioritas belanja negara. Dengan demikian, kinerja pendapatan transfer daerah sangat bergantung pada dinamika kebijakan pusat dan kondisi ekonomi nasional.

Selanjutnya, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:

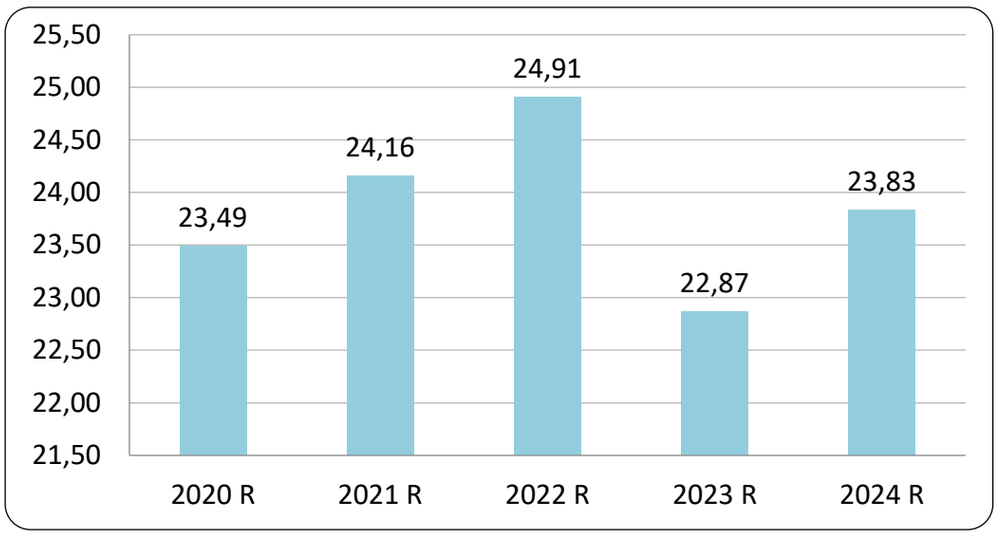


Gambar 2. 88 Perkembangan Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Madiun periode tahun 2020 hingga tahun 2024 dipengaruhi oleh keberadaan hibah sebagai sumber utama penerimaan. Peningkatan terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 sebesar Rp1,61 miliar karena adanya dukungan hibah, sedangkan ketiadaan pendapatan sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa tidak ada lagi alokasi hibah maupun pencatatan dana serupa pada komponen ini.

Berdasarkan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah, maka perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat dalam gambar berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 89 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Fluktuasi Derajat Desentralisasi Fiskal (DFF) Kota Madiun 2020–2024 dipengaruhi oleh kinerja PAD, besarnya transfer pusat, kondisi ekonomi, serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan DDF pada periode tahun 2020 hingga tahun 2022 dipengaruhi oleh naiknya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, seiring pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Penurunan pada 2023 terjadi karena melemahnya pertumbuhan PAD, terutama akibat penurunan pajak dan retribusi daerah. Besarnya dana transfer dari pemerintah pusat (DAU, DAK, DID) memengaruhi proporsi DDF. Jika transfer naik signifikan sementara PAD tidak tumbuh seimbang, derajat desentralisasi bisa turun. Peningkatan DDF mencerminkan kemandirian fiskal yang lebih baik, sedangkan penurunan menandakan ketergantungan yang lebih besar pada transfer pusat.

Realisasi Pendapatan Kota Madiun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 67 Realisasi Pendapatan Kota Madiun Tahun 2020 s.d. Tahun 2024

	Uraian	JUMLAH				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN DAERAH	1.059.913.793.139,59	1.100.682.829.130,86	1.060.716.312.084,55	1.117.612.130.232,42	1.171.513.055.718,60
01.01	Pendapatan Asli Daerah	248.944.404.487,59	265.920.295.216,86	264.212.229.517,55	255.554.493.407,62	279.229.358.932,97
01.01.01	Pajak daerah	90.291.466.033,07	87.874.777.059,32	106.165.312.122,76	113.514.116.369,67	121.651.792.796,00
01.01.02	Retribusi daerah	15.619.539.719,00	17.463.721.195,00	21.385.348.837,00	22.551.072.553,00	138.902.841.650,97
01.01.03	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15.216.268.562,40	16.199.882.796,95	15.595.752.355,97	14.983.008.032,73	13.456.071.814,53
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	127.817.130.173,12	144.381.914.165,59	121.065.816.201,82	104.506.296.452,22	5.218.652.671,47
01.02	Pendapatan Transfer	790.939.408.652,00	813.126.832.914,00	796.504.081.567,00	862.057.636.824,80	892.283.696.785,63
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	705.872.676.797,00	709.162.104.477,00	697.480.692.487,00	740.785.552.012,80	774.640.399.685,63
1.2.1.01.01.1	Dana bagi hasil pajak	25.788.438.430,00	33.962.127.578,00	29.804.646.600,00	24.092.136.000,00	42.582.355.741,00
1.2.1.01.01.2	Dana bagi hasil bukan pajak	44.866.769.518,00	63.851.956.219,00	82.308.678.000,00	36.475.210.342,00	27.094.012.200,00
1.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	15.455.519.425,00	19.833.010.286,00	21.802.781.361,00	35.959.029.435,00	29.153.043.000,00
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	473.852.439.000,00	465.495.171.000,00	463.486.748.121,00	487.141.770.396,00	509.310.785.281,00
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	72.596.481.424,00	72.994.976.394,00	71.207.048.405,00	82.402.483.839,80	117.131.678.463,63
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	0,00	53.024.863.000,00	28.870.790.000,00	74.714.922.000,00	49.368.525.000,00
1.2.1.01.03	Dana Penyesuaian	73.313.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.04	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	85.066.731.855,00	103.964.728.437,00	99.023.389.080,00	121.272.084.812,00	117.643.297.100,00
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	84.049.652.855,00	103.062.649.437,00	98.284.006.080,00	120.565.582.200,00	116.973.247.100,00
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.017.079.000,00	902.079.000,00	739.383.000,00	706.502.612,00	670.050.000,00
01.03	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Hibah	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

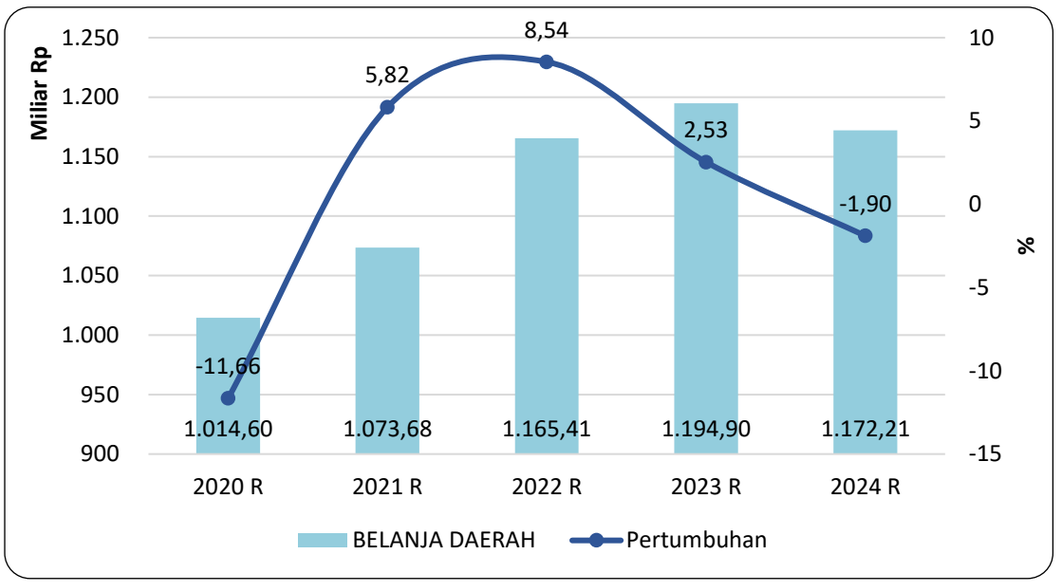
2.2.1.2 Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, disebutkan bahwa Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah, serta pengeluaran lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai pengurang ekuitas, yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan peraturan tersebut, Belanja Daerah dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran ditujukan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Berikut merupakan jenis-jenis belanja modal antara lain: belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai, belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai, belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai: belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai: belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai dan belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja tidak terduga juga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja transfer adalah proses transfer dana dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada pemerintahan ataupun institusi lain seperti pemerintah daerah yang lebih kecil, badan usaha milik negara (BUMN), lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau individu. Transfer ini dilakukan dengan tujuan untuk membiayai berbagai program, proyek, atau kegiatan tertentu. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.



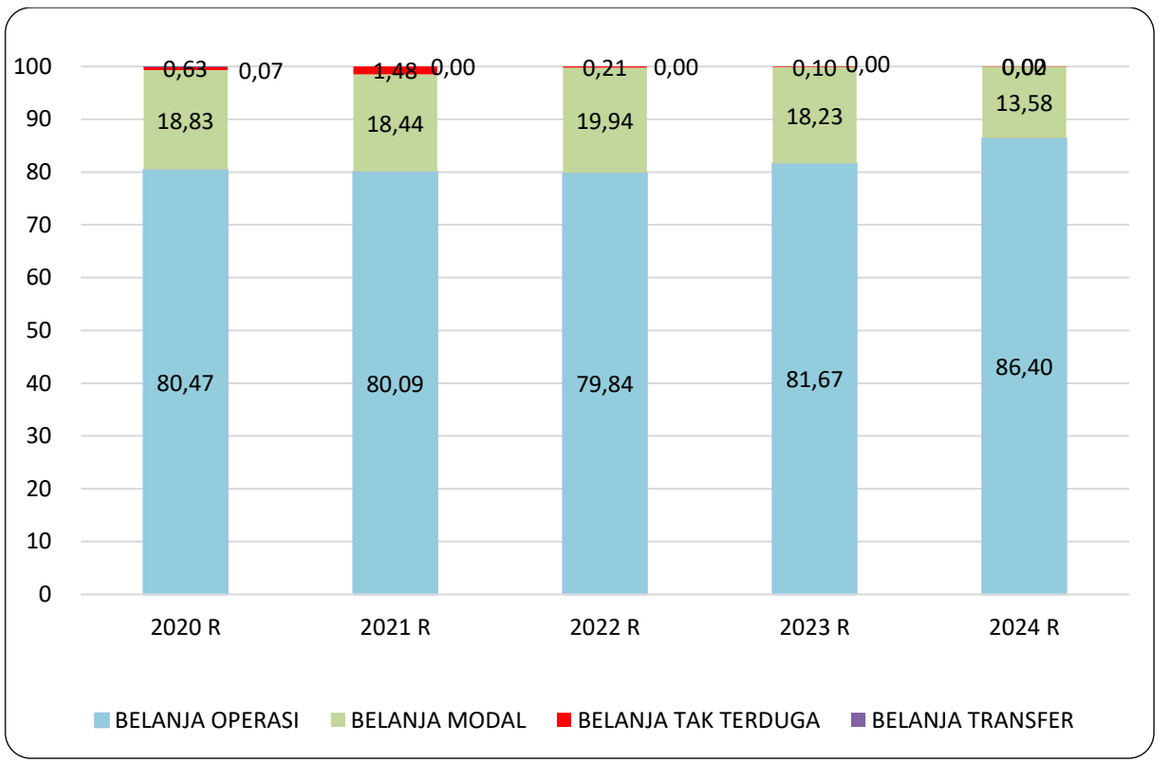
Gambar 2. 90 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Pada tahun 2020 dikarenakan adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan *refocusing* anggaran untuk penanganan kesehatan serta bantuan sosial menyebabkan kontraksi belanja daerah Kota Madiun −11,66%. Kemudian pada tahun 2021 Pemerintah pusat mendorong belanja daerah untuk mempercepat pemulihan, sehingga realisasi meningkat signifikan hingga 5,82%. Sejalan dengan kondisi ekonomi yang membaik, belanja daerah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, mendorong pertumbuhan belanja hingga 8,54%. Pemerintah daerah mulai menahan laju belanja, lebih fokus pada efisiensi, sehingga pertumbuhan belanja menurun ke 2,53%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kemudian dengan adanya keterbatasan pendapatan serta fokus pemerintah pusat dan daerah pada pengendalian fiskal menyebabkan belanja daerah kembali terkontraksi hingga −1,90%. Pola ini menunjukkan bahwa belanja daerah sangat responsif terhadap kondisi krisis dan pemulihan ekonomi, namun juga rentan terhadap keterbatasan fiskal dan prioritas kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, akan dipaparkan proporsi beberapa komposisi belanja daerah pada setiap tahun:

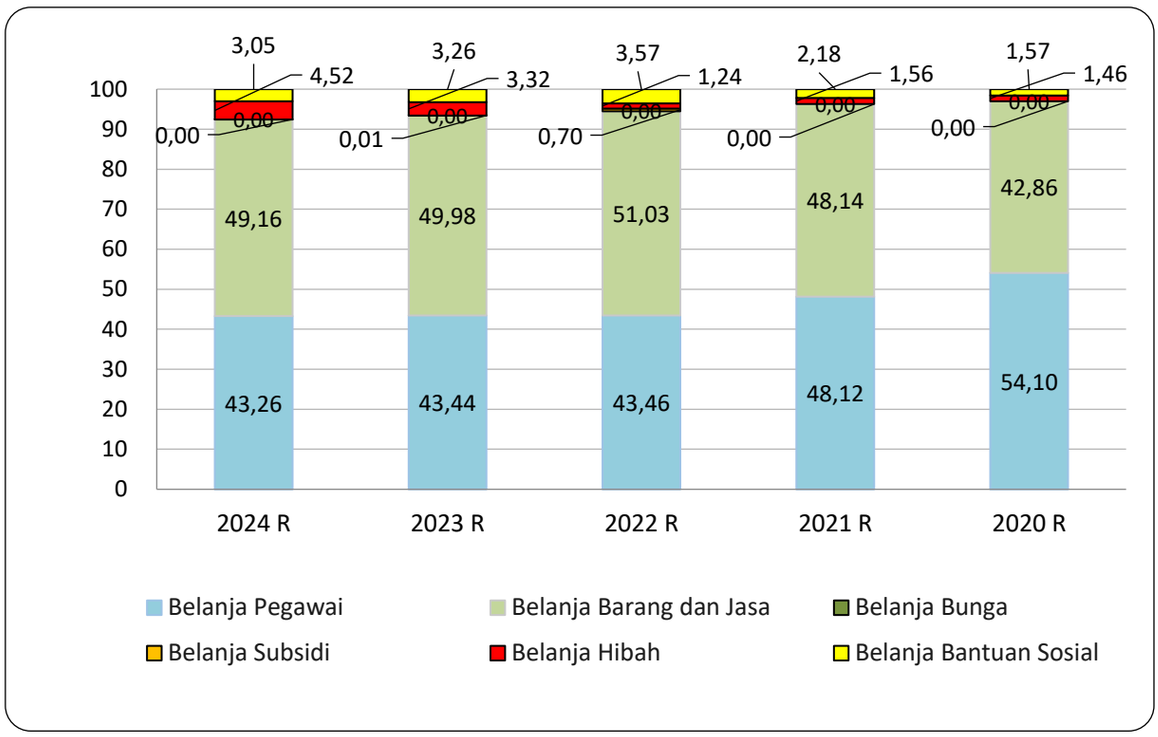


Gambar 2. 91 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Komposisi belanja daerah Kota Madiun 2020–2024 didominasi oleh belanja operasi karena kebutuhan rutin pemerintahan bersifat tetap, sedangkan belanja modal, Belanja Tidak Terduga (BTT), dan belanja transfer berfluktuasi mengikuti kondisi fiskal, kebijakan prioritas, serta kebutuhan darurat. Hal ini menunjukkan bahwa ruang fiskal Kota Madiun relatif terbatas, dengan fleksibilitas pengeluaran lebih banyak bergantung pada belanja modal dan belanja tak terduga.

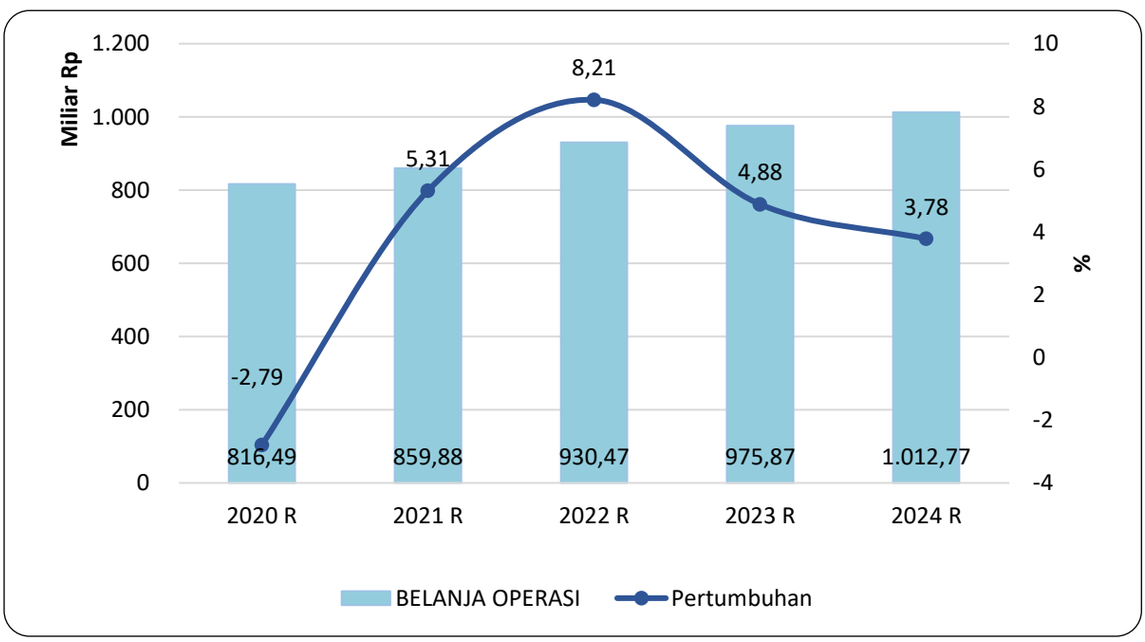
Perkembangan persentase belanja operasi Kota Madiun tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat dalam gambar berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 92 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Komposisi belanja operasi Kota Madiun periode tahun 2020 hingga tahun 2024 konsisten didominasi belanja pegawai serta barang dan jasa karena sifatnya yang rigid, wajib, dan berorientasi pada layanan publik. Faktor utama yang memengaruhi adalah struktur aparatur pemerintah, kewajiban pelayanan dasar, kebijakan fiskal pusat-daerah, serta kebutuhan respons terhadap kondisi krisis. Dengan demikian, ruang fleksibilitas anggaran Kota Madiun lebih terbatas pada belanja non-operasional.

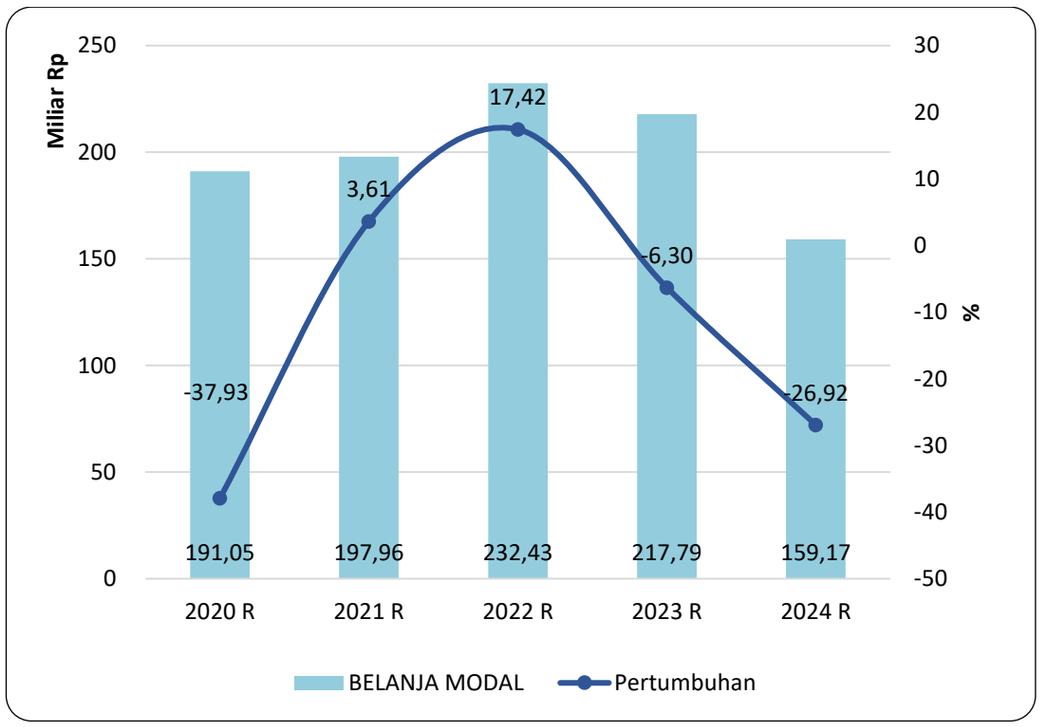


Gambar 2. 93 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Fluktuasi belanja operasi Kota Madiun tahun 2020 hingga tahun 2024 dipengaruhi oleh pandemi dan *refocusing* anggaran, program pemulihan ekonomi, serta kebijakan efisiensi fiskal. Tren peningkatan di tahun 2021 hingga tahun 2022 mencerminkan dorongan belanja dari pusat untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, bantuan sosial) sehingga mendorong kenaikan belanja operasi mencapai 8,21% di tahun 2022. Sedangkan penurunan di tahun 2023 hingga tahun 2024 menunjukkan langkah pengetatan dan rasionalisasi anggaran untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Selanjutnya adalah grafik perkembangan pertumbuhan Belanja Modal tahun 2020 hingga 2024:

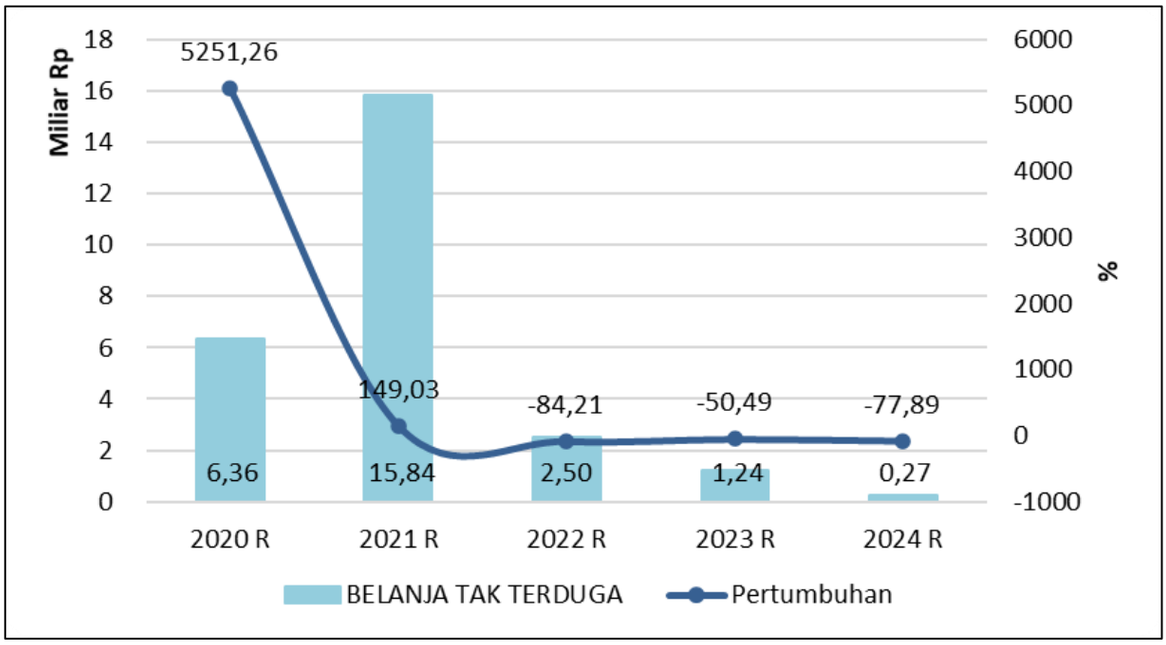


Gambar 2. 94 Perkembangan Belanja Modal Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Fluktuasi belanja modal Kota Madiun periode tahun 2020 hingga tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh *refocusing* anggaran pandemi, pemulihan fiskal dan ekonomi, prioritas pembangunan infrastruktur, serta efisiensi dan rasionalisasi fiskal. Peningkatan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mencerminkan dorongan pembangunan pasca-pandemi, sementara penurunan pada tahun 2023 hingga tahun 2024 menunjukkan keterbatasan fiskal daerah dan perubahan arah kebijakan belanja menuju efisiensi. Efisiensi dan pengendalian fiskal, di mana pemerintah daerah menahan sebagian belanja modal untuk menjaga keseimbangan anggaran. Fokus dialihkan pada penguatan belanja operasional dan prioritas jangka pendek.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perkembangan BTT dapat dilihat pada grafik berikut:

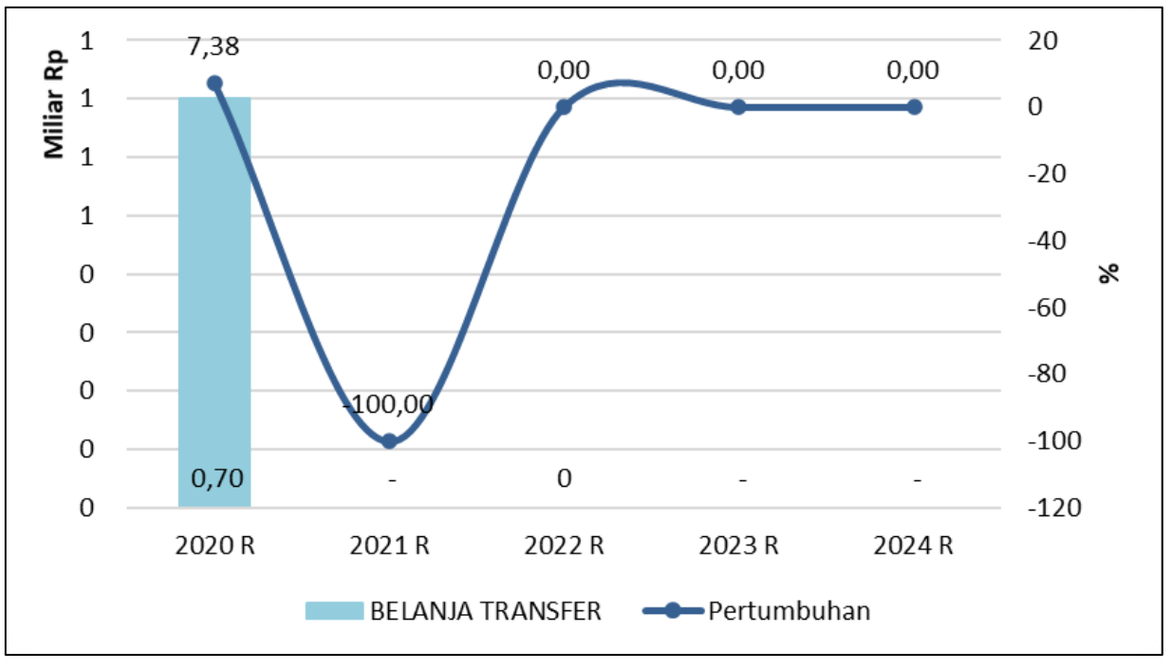


Gambar 2. 95 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Komponen belanja tidak terduga mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai respon dari adanya pandemi. Pandemi *Covid-19* menjadi faktor utama, sehingga diperlukan belanja tidak terduga dalam jumlah besar untuk penanganan darurat kesehatan, penyediaan sarana medis, bantuan sosial, dan mitigasi dampak ekonomi. Pemerintah pusat juga mendorong daerah menyiapkan BTT lebih besar sebagai antisipasi ketidakpastian. Hingga pada tahun 2022, komponen berangsur-angsur melambat hingga 2024. Berkurangnya kebutuhan darurat, karena situasi pandemi mulai terkendali dan program kesehatan dialihkan ke pos belanja reguler (belanja barang/jasa atau belanja modal). Penurunan tajam menunjukkan bahwa BTT kembali ke fungsi utamanya sebagai dana kontinjensi, bukan alokasi utama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selanjutnya perkembangan Belanja Transfer dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 96 Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun 2020-2024
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Komponen Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja transfer menunjukkan sedikit peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,38 persen atau sebesar 0,70 miliar. Alokasi ini biasanya terkait program dukungan keuangan jangka pendek atau penyesuaian kebutuhan fiskal pada masa awal pandemi. Namun, dari tahun 2021 hingga 2024, tidak ada alokasi anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Transfer. Kebijakan rasionalisasi fiskal pasca-pandemi, di mana belanja transfer dipangkas untuk memprioritaskan belanja operasional dan modal. Selain itu karakteristik Kota Madiun sebagai kota (bukan kabupaten) juga berpengaruh, karena tidak memiliki kewajiban transfer besar seperti dana desa, sehingga komponen ini cenderung kecil atau ditiadakan.

Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah Kota Madiun tahun 2020 hingga tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

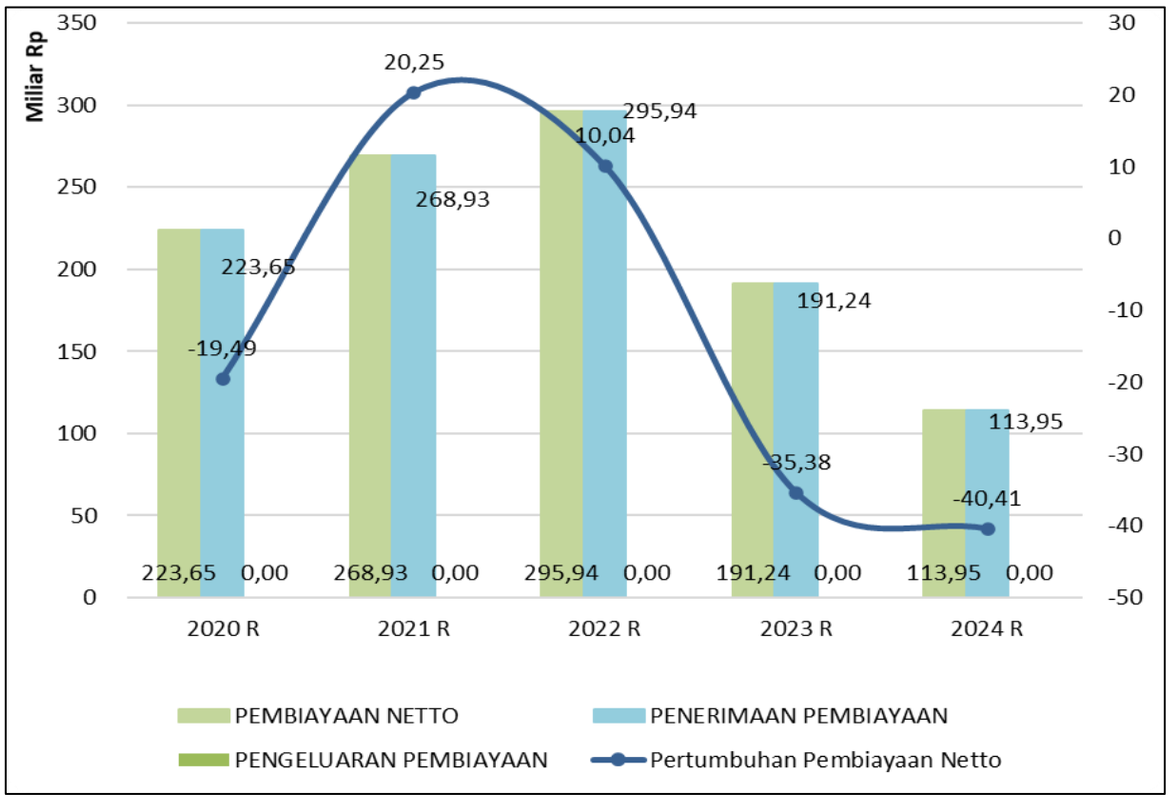
Tabel 2. 68 Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2020 - 2024

	Uraian	JUMLAH				
		2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 R
2	BELANJA DAERAH	1.014.603.268.152,20	1.073.679.343.613,92	1.165.410.106.455,26	1.194.903.395.527,39	1.172.206.504.141,49
2.1	BELANJA OPERASI	816.489.875.371,63	859.879.322.395,91	930.473.573.791,29	975.874.375.042,70	1.012.766.107.583,76
2.1.1	Belanja Pegawai	441.740.830.119,00	413.765.191.395,00	404.406.660.608,25	423.896.152.844,39	438.170.995.927,75
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	349.956.080.581,10	413.958.099.347,91	474.775.658.285,04	487.718.322.693,31	497.881.778.674,38
2.1.3	Belanja Bunga		0,00	0,00	-	
2.1.4	Belanja Subsidi		0,00	6.480.445.500,00	99.146.000,00	49.955.750,00
2.1.5	Belanja Hibah	11.938.091.671,53	13.431.646.653,00	11.562.623.718,00	32.355.896.005,00	45.781.591.231,63
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.854.873.000,00	18.724.385.000,00	33.248.185.680,00	31.804.857.500,00	30.881.786.000,00
2.2	BELANJA MODAL	191.051.897.074,57	197.958.260.924,01	232.434.449.701,97	217.790.302.662,69	159.166.507.474,73
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.972.500.000,00	0,00	0,00		-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.549.937.238,00	26.304.347.775,00	53.011.211.346,00	71.585.868.051,04	24.597.646.021,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.366.461.602,57	65.170.777.016,83	72.843.838.757,97	80.940.539.683,65	41.774.680.516,62
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.833.932.839,00	103.172.346.821,18	103.137.296.907,00	62.832.477.443,00	90.028.130.537,11
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.521.068.895,00	3.310.789.311,00	3.442.102.691,00	2.431.417.485,00	2.015.705.050,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.807.996.500,00	0,00	0,00		750.345.350,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	2.502.082.962,00	1.238.717.822,00	273.889.083,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	2.502.082.962,00	1.238.717.822,00	273.889.083,00
2.4	BELANJA TRANSFER	700.062.000,00	0,00	0	-	
2.4.1	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	700.062.000,00	0,00	0	0	
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.014.603.268.152,20	1.073.679.343.613,92	1.165.410.106.455,26	1.194.903.395.527,39	1.172.206.504.141,49
	SURPLUS / (DEFISIT)	45.310.524.987,39	27.003.485.516,94	-104.693.795.370,71	-77.291.265.294,97	-693.448.422,89

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.1.3 Kinerja Realisasi Pembiayaan Daerah



Gambar 2. 97 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Neto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BKAD Kota Madiun, Tahun 2025

Fluktuasi penerimaan pembiayaan netto Kota Madiun tahun 2020 hingga tahun 2024 dipengaruhi oleh pandemi dan *refocusing* anggaran, optimalisasi SiLPA pada masa pemulihan, serta kebijakan efisiensi dan pengendalian defisit fiskal. Kenaikan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 menunjukkan upaya mendukung pemulihan ekonomi melalui pembiayaan untuk mendukung belanja daerah. Pemerintah daerah mengoptimalkan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta potensi pinjaman daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Sedangkan penurunan tajam pada tahun 2023 hingga tahun 2024 mencerminkan keterbatasan ruang fiskal daerah serta fokus pada menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Penurunan kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya SiLPA serta kebijakan pengendalian defisit agar keuangan daerah tetap sehat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 69 Realisasi Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2020-2024

	Uraian	JUMLAH				
		2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 R
3	PEMBIAYAAN					
3.1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	295.937.467.818,14	191.244.870.447,43	113.953.605.152,46
3.1.2	Penggunaan SiLPA	223.649.613.313,81	268.933.182.301,20	295.936.667.818,14	191.243.672.447,43	113.953.605.152,46
3.1.3	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	
3.1.4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	
3.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	
3.1.6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.000.000,00	0	800.000,00	1.198.000,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	0	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	0	0	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	
3.2.5	PEMBIAYAAN NETTO	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	295.937.467.818,14	191.244.870.447,43	113.953.605.152,46
3.3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	268.961.138.301,20	295.936.667.818,14	191.243.672.447,43	113.953.605.152,46	113.260.156.729,57

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.1.4 Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan keuangan yang disusun secara bertahap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pemerintah. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan neraca daerah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah. Laporan ini memiliki signifikansi yang besar bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang terarah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi daerah secara efisien dan efektif. Komponen aset menjelaskan tentang sumber daya pemerintah daerah. Aset merupakan komponen penting dan berguna bagi ekonomi dan sosial pemerintah daerah maupun masyarakat. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Kewajiban adalah hasil dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab di masa lampau, yang mengindikasikan utang yang dimiliki pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim yang dimiliki pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Data mengenai kewajiban daerah selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa mayoritas kewajiban yang Pemerintah Kota Madiun tergolong dalam kategori kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, Ekuitas dana investasi adalah selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, dan aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 70 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah, Kota Madiun Tahun 2020-2024

Kode Rekening	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas						
	Kas di Kas Daerah	230.933.573.980,02	225.992.425.922,40	119.817.397.122,23	67.071.188.644,14	65.071.277.733,03	-16,49%
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	601.132.820,00	0,00	
	Kas di Bendahara Penerimaan	1.810.000,00	6.402.708,00	10.236.077,00	10.230.722,00	7.006.000,00	53,51%
	Kas di BLUD RSUD	29.262.961.668,85	61.231.491.260,82	64.695.549.324,61	38.758.539.712,32	38.226.719.616,04	45,73%
	Kas di BLUD Puskesmas/JKN	6.899.779.814,16	7.457.912.123,59	6.254.896.034,24	7.503.164.480,85	9.732.906.535,35	7,60%
	Kas Lainnya	1.835.056.838,17	1.265.487.451,33	474.385.599,35	610.481.593,15	316.796.569,67	-23,05%
	Deposito berjangka 1 bulan	-	-	-	-	-	
	Investasi Jangka Pendek						
1.1.2	Piutang						
	Piutang Pajak	6.885.095.803,80	6.108.731.819,64	6.017.702.060,07	7.699.432.088,15	6.360.997.962,82	-2,25%
	Piutang Retribusi	4.444.317.315,77	4.026.313.689,60	4.258.278.141,00	2.556.859.505,40	4.120.521.721,86	23,30%
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	124.170.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Piutang Lain-Lain	1.168.190.841,74	14.975.109.637,29	6.407.125.501,77	7.907.011.129,10	0,00	190,35%
	Penyisihan Piutang						
	Persediaan	17.752.061.975,45	16.850.713.465,45	12.928.832.764,50	13.537.733.840,96	15.621.339.731,80	-0,77%
	Belanja Dibayar Dimuka	19.008.000,00	2.426.620.307,19	0,00	364.051.750,00	0,00	
	Jumlah Aset Lancar	299.326.026.589,46	340.341.208.385,31	220.864.402.624,77	146.619.826.286,07	139.457.565.870,57	-11,00%
	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Non Permanen	19.724.433.249,08	15.359.084.166,09	15.307.987.050,25	15.283.625.503,56	15.487.455.432,07	-4,04%
	Investasi Dana Bergulir	24.563.736.456,36	25.066.085.246,76	24.999.610.290,58	25.418.517.513,89	25.880.593.192,96	1,49%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	-4.839.303.207,28	-9.707.001.080,67	-9.691.623.240,33	-10.134.892.010,33	-10.393.137.760,89	22,86%
	Investasi Permanen	134.595.268.646,15	137.650.214.782,00	140.522.766.667,00	140.534.524.709,00	149.581.069.347,18	2,90%
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	134.595.268.646,15	137.650.214.782,00	140.522.766.667,00	140.534.524.709,00	149.581.069.347,18	2,90%
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	154.319.701.895,23	153.009.298.948,09	155.830.753.717,25	155.818.150.212,56	165.068.524.779,25	2,06%
1.2	ASET TETAP						
1.2.1	Tanah	723.583.589.093,00	710.406.120.272,27	710.406.120.272,27	710.169.521.272,27	710.169.521.272,28	0,01%
1.2.2	Peralatan dan Mesin	152.070.927.750,18	135.163.846.953,17	130.422.575.349,17	138.394.873.535,96	122.571.483.349,62	-3,53%
1.2.3	Gedung dan Bangunan	648.584.107.723,85	689.088.753.042,37	751.716.876.145,21	836.519.132.716,83	843.133.580.022,47	5,92%
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	620.753.717.202,82	660.230.282.621,67	697.317.326.673,67	684.612.656.821,14	702.572.314.740,51	3,72%
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	6.141.437.160,19	5.844.680.976,19	5.554.463.859,27	5.519.250.109,27	5.489.113.244,03	-1,43%
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	7.607.044.242,00	8.578.638.932,00	9.539.402.677,35	6.523.176.460,39	6.043.108.848,39	7,95%
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	-	
	Jumlah Aset Tetap	2.158.740.823.172,04	2.209.312.322.797,67	2.304.956.764.976,94	2.381.738.610.915,86	2.389.979.121.477,30	2,72%
	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
1.3	ASET LAINNYA						
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	
1.3.2	Tuntutan Ganti Rugi	121.444.462,00	114.444.462,00	-	-		
1.3.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	119.532.900.004,00	119.532.900.004,00	119.532.900.004,00	119.532.900.004,00	119.532.900.004,00	0,00%
	Bangun Guna Serah (Built of Transfer)	-	-	-	-		
1.3.4	Aset Tak Berwujud	3.251.393.170,00	2.084.066.832,00	1.427.504.665,00	472.120.332,00	710.631.104,66	-17,70%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
	Aset Lain-lain	13.199.666.284,97	1.472.556.336,33	11.025.128.512,33	25.205.600.848,33	6.737.184.848,33	128,18%
	Jumlah Aset Lainnya	136.105.403.920,97	123.203.967.634,33	131.985.533.181,33	145.210.621.184,33	126.980.715.956,99	-0,60%
	TOTAL AKTIVA	2.748.491.955.577,70	2.825.866.797.765,40	2.813.637.454.500,29	2.829.387.208.598,82	2.821.485.928.084,11	1,21%
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1	Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	17.051.648,00	8.791.710,00	601.132.820,00	-	
	Hutang Bunga	-	-				
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-				
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Lainnya	-	-				
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - LK Bank	-	-				
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-				
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi	-	-				
	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Lainnya	-	-				
	Pendapatan Diterima Dimuka	4.482.211.157,44	4.966.403.060,42	4.898.956.358,67	5.051.616.973,67	4.444.474.919,16	-4,39%
	Utang Belanja	7.999.159.655,00	10.468.760.854,00	9.796.693.783,00	16.872.104.966,00	5.937.879.965,00	0,85%
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	12.481.370.812,44	15.452.215.562,42	14.704.441.851,67	22.524.854.759,67	10.382.354.884,16	-1,57%
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-			
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-			
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-			
	Utang Dalam Negeri – Obligasi	-	-	-			
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-			
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0	
	JUMLAH KEWAJIBAN	12.481.370.812,44	15.452.215.562,42	14.704.441.851,67	22.524.854.759,67	10.382.354.884,16	-1,57%
3	EKUITAS DANA						
3.1	EKUITAS DANA LANCAR						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	268.933.182.301	295.936.667.818,14	191.243.672.447,43	113.953.605.152,46	113.318.873.316,20	-9,21%
	Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	
3.1.2	Cadangan Piutang	-	-	-	-	-	
3.1.3	Cadangan Persediaan	-	-	-	-	-	
	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	
	Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-			
	Cadangan Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-			
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang	-	-	-			
	Jangka Pendek	-	-	-			
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	-	-	-			
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI		-	-			
3.2.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-	-			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	-	-			
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang	-	-	-			
	Jangka Panjang.	-	-	-			
	Jumlah Dana Investasi	-	-	-			
	EKUITAS DANA CADANGAN		-	-			
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-			
	RK PPKD	-	-	-			
	RK SKPD	-	-	-			
	JUMLAH EKUITAS DANA	2.736.010.584.764,27	2.810.414.582.202,98	2.798.933.012.648,62	2.806.862.353.839,15	2.811.103.573.199,94	1,26%
	TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA	2.748.491.955.576,71	2.825.866.797.765,40	2.813.637.454.500,29	2.829.387.208.598,82	2.821.485.928.084,10	1,21%

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan informasi dari neraca tersebut, kemampuan keuangan pemerintah dapat diidentifikasi melalui analisis rasio keuangan. Salah satu rasio yang digunakan untuk menilai solvabilitas adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset diperoleh dengan membagi jumlah kewajiban oleh total aset, sementara rasio kewajiban terhadap ekuitas dihitung dengan membagi jumlah kewajiban oleh ekuitas. Rasio lancar digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam membayar hutang-hutangnya dalam jangka pendek. Semakin tinggi nilai rasio, semakin lancar kemampuan pembayaran hutang jangka pendeknya.

Tabel 2. 71 Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Madiun Tahun 2020-2024

Rasio	Rumus	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	285.335.480.231,43	299.326.026.589,46	340.341.208.385,31	220.864.402.624,77	146.619.826.286,07
	Kewajiban Jangka Pendek	16.882.059.880,05	12.481.370.812,44	15.452.215.562,42	14.704.441.851,67	22.524.854.759,67
	Rasio Lancar	16,90	23,98	22,03	15,02	6,51
	Aset Lancar Persediaan	268.333.986.623,43	281.573.964.614,01	323.490.494.919,86	207.935.569.860,27	133.082.092.445,11
	Kewajiban Jangka Pendek	16.882.059.880,05	12.481.370.812,44	15.452.215.562,42	14.704.441.851,67	22.524.854.759,67
	Quick Ratio	15,89	22,56	20,93	14,14	5,91
	Total Hutang	16.882.059.880,05	12.481.370.812,44	15.452.215.562,42	14.704.441.851,67	22.524.854.759,67
Rasio Solvabilitas	Total Aset	2.658.741.300.273,45	2.748.491.955.577,70	2.825.866.797.765,40	2.813.637.454.500,29	2.829.387.208.598,82
	Rasio Total Hutang (%)	0,63%	0,45%	0,55%	0,52%	0,80%
	Total Hutang	16.882.059.880,05	12.481.370.812,44	15.452.215.562,42	14.704.441.851,67	22.524.854.759,67
	Total Ekuitas	2.641.859.240.393,40	2.736.010.584.764,27	2.810.414.582.202,98	2.798.933.012.648,62	2.806.862.353.839,15
	Rasio Hutang/ Modal (%)	0,64%	0,46%	0,55%	0,53%	0,80%

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Tabel 2.71 menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang dilihat dari rasio likuiditas dan solvabilitas. Hitungan rasio likuiditas berupa rasio lancar selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terlihat mengalami fluktuasi seiring dengan dinamika perubahan komposisi kewajiban jangka pendek daerah. Demikian juga dengan *quick ratio* yang mengalami tren fluktuatif selama lima tahun terakhir seiring dengan pemenuhan kewajiban jangka pendek daerah. Namun demikian secara keseluruhan terlihat bahwa cukup tingginya kemampuan keuangan daerah Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka pendek adalah cukup tinggi. Kemudian jika dilihat kemampuan keuangan Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dapat terlihat dari rasio solvabilitas. Sepanjang tahun 2020-2024, rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap ekuitas mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2020, angkanya mencapai 0,46% dan meningkat kembali mencapai 0,55% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami penurunan mencapai 0,52%. Tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan hingga 0,80 persen dan turun kembali menjadi 0,37 persen pada tahun 2024. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah utang daerah relatif kecil jika dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan analisis, hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio lancar pada Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki kemampuan untuk dengan mudah mengkonversi aset lancarnya menjadi uang tunai guna memenuhi seluruh kewajiban atau hutang jangka pendeknya. Namun, penting untuk dicatat bahwa nilai rasio lancar ini mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini dapat mengindikasikan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajibannya juga berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*), dikarenakan *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya walaupun nilainya mengalami tren yang fluktuatif. Akan tetapi, pada tahun 2022, *quick ratio* mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan menurunnya nilai selisih aset lancar dan persediaan.

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Madiun adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset relatif kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Madiun relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan- pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Kedepan

Proyeksi keuangan daerah lima tahun ke depan merupakan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang memberikan informasi mengenai pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Madiun pada masa 5 tahun kedepan, yaitu tahun 2025 hingga tahun 2030, serta tingkat belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Madiun dalam beberapa tahun mendatang. Terkait dengan hal terebut, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan kemampuan anggaran (proyeksi) adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan kumpulan data historis selama 5 tahun terakhir, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi, kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta kondisi ekonomi makro. Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam dokumen ini disajikan dengan menggunakan format sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diturunkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pada belanja derah secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Berdasarkan hasil proyeksi dapat diketahui bahwa pendapatan daerah Kota Madiun pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,12%. Berdasarkan data pada tahun 2025, Pendapatan Daerah Kota Madiun tercatat sebesar Rp1.080.275.072.209,00 , sehingga pada tahun 2026 diperkirakan Pendapatan Daerah Kota Madiun mengalami peningkatan sehingga mencapai Rp1.108.421.594.028,60, dan terus mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya sehingga pada tahun 2029 menjadi Rp1.158.894.236.254,00, dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2030 menjadi Rp1.175.304.515.321,36. Untuk belanja daerah Kota Madiun secara keseluruhan dalam beberapa tahun tersebut diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 1,32%. Belanja Daerah Kota Madiun berdasarkan data tahun 2025 diperkirakan mencapai sebesar Rp1.200.275.072.209, seiring dengan peningkatan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pada tahun 2026 sampai tahun 2030 diperkirakan Belanja Daerah Kota Madiun mengalami pertumbuhan 1,11% menjadi sebesar Rp1.266.608.685.513,36 pada tahun 2030.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Madiun pada tahun 2025 hingga 2030 ditunjang oleh adanya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai 3,67%. Pertumbuhan PAD selain didasarkan pada hasil proyeksi juga mempertimbangkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya (2020 hingga 2024) yang tumbuh rata-rata sebesar 2,19% dan pada tahun 2022 (pasca *Covid-19*) sampai tahun 2024 mampu tumbuh sebesar 1,78%. Selain itu, perkembangan perekonomian yang mulai mengalami pemulihan juga turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun. Dimana untuk pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2021 tercatat sebesar 4,79% atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2020) yang mengalami kontraksi sebesar -5,34%, sedangkan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun telah tumbuh sebesar 5,8% atau mendekati pertumbuhan normal sebelum *Covid-19* yang mencapai 5,69% di tahun 2019. Selain itu, adanya peningkatan PAD Kota Madiun juga mempertimbangkan adanya potensi yang diperoleh dari pemberlakuan Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun pada tahun 2030 diperkirakan memiliki proporsi sebesar 4,02% dari keseluruhan total Pendapatan Daerah Kota Madiun atau meningkat dari realisasi pada tahun 2024 yang mencapai 4,82%.Perkembangan pembangunan di Kota Madiun yang semakin pesat dalam menyongsong Kota Madiun sebagai Kota Mendunia memberikan dampak terhadap meningkatnya iklim usaha yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk pendapatan transfer pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar -1,12%, dimana untuk pendapatan transfer Pemerintah Pusat memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar -0,25%, sedangkan transfer antar daerah sebesar -7,03%. Pertumbuhan pendapatan transfer Kota Madiun pada tahun 2025 hingga 2030 yang lebih kecil dari realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kecenderungan menurun pada tahun 2029 dan 2030 mempertimbangkan adanya kerentanan terhadap pengaruh perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada struktur Belanja Daerah, Belanja operasi pada tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,32%. Walaupun secara keseluruhan belanja cenderung tumbuh, namun belanja modal diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar -2,87%. Dalam hal kebijakan belanja, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang HKPD, dimana anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, belanja infrastruktur layanan publik tersebar pada belanja modal dan belanja operasi. Sejak tahun 2024 Kota Madiun telah memenuhi minimal belanja infrastruktur sebagaimana diamanatkan undang- undang. Pada penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan mengalami kecenderungan penurunan dalam setiap tahunnya. Untuk mengetahui hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kota Madiun pada tahun 2026 hingga 2030 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 72 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kota Madiun Tahun 2026 - 2030

No	Uraian	*Baseline* Tahun 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN DAERAH	1.171.513.055.718,60	1.108.421.594.028,60	1.128.649.288.021,00	1.143.458.195.599,00	1.158.894.236.254,00	1.175.304.515.321,36
	Pendapatan Asli Daerah	279.229.358.932,97	293.915.701.028,60	308.308.575.341,00	320.442.437.699,00	333.193.805.904,00	346.598.264.121,36
	Pajak daerah	121.651.792.796,00	142.546.702.125,00	156.690.710.500,00	166.092.153.130,00	176.057.682.317,00	186.621.143.256,00
	Retribusi daerah	138.902.841.650,97	134.619.894.565,00	136.495.981.372,00	139.225.900.900,00	142.010.418.918,00	144.850.627.296,36
	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.456.071.814,53	15.447.565.426,60	14.433.092.969,00	14.433.092.969,00	14.433.092.969,00	14.433.092.969,00
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	5.218.652.671,47	1.301.538.912,00	688.790.500,00	691.290.700,00	692.611.700,00	693.400.600,00
	Pendapatan Transfer	892.283.696.785,63	814.505.893.000,00	820.340.712.680,00	823.015.757.900,00	825.700.430.350,00	828.706.251.200,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	774.640.399.685,63	747.915.741.000,00	753.459.912.080,00	755.815.000.700,00	758.359.985.000,00	761.175.590.400,00
	Dana bagi hasil pajak	42.582.355.741,00	34.095.384.000,00	34.600.291.680,00	34.821.000.000,00	35.345.900.000,00	35.620.400.500,00
	Dana bagi hasil bukan pajak	27.094.012.200,00	30.008.850.000,00	30.450.600.700,00	30.750.821.000,00	31.230.400.500,00	31.450.560.300,00
	Dana Bagi hasil cukai	29.153.043.000,00	32.236.305.000	32.640.340.200,00	32.830.400.500,00	32236305000	32.236.305.000,00
	Dana Alokasi Umum	509.310.785.281,00	530.628.223.000,00	534.821.700.500,00	536.465.800.200,00	538.600.400.500,00	540.921.345.600,00
	Dana Alokasi khusus	117.131.678.463,63	91.636.058.000,00	91.636.058.000,00	91.636.058.000,00	91.636.058.000,00	91.636.058.000,00
	Dana Insentif Daerah	49.368.525.000,00	29.310.921.000,00	29.310.921.000,00	29.310.921.000,00	29.310.921.000,00	29.310.921.000,00
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
	Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0	0
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	117.643.297.100,00	66.590.152.000,00	66.880.800.600,00	67.200.757.200,00	67.340.445.350,00	67.530.660.800,00
	Pendapatan Bagi Hasil	116.973.247.100,00	65.920.102.000,00	66.400.500.600,00	66.760.300.200,00	66.920.321.900,00	67.120.430.400,00
	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	670.050.000,00	670.050.000	480.300.000	440.457.000	420.123.450	410.230.400
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	0	0	0	0	0
	Hibah	0	0	0	0	0	0
	Dana darurat	0	0	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.171.513.055.718,60	1.108.421.594.028,60	1.128.649.288.021,00	1.143.458.195.599,00	1.158.894.236.254,00	1.175.304.515.321,36
2	BELANJA DAERAH	1.172.206.504.141,49	1.168.421.594.028,60	1.218.524.378.791,80	1.234.586.892.670,00	1.250.506.096.214,00	1.266.608.685.513,36
	BELANJA OPERASI	1.012.766.107.583,76	1.041.315.574.888,57	1.103.621.040.328,14	1.110.228.714.846,40	1.125.500.016.492,03	1.131.695.655.265,43
	Belanja Pegawai	438.170.995.927,75	495.906.694.869,14	529.075.391.170,80	531.379.197.671,00	534.062.360.560,00	536.904.620.492,00
	Belanja Barang dan Jasa	497.881.778.674,38	499.171.351.280,43	519.429.500.400,00	521.000.300.500,00	523.450.600.500,00	526.300.400.600,00
	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
	Belanja Subsidi	49.955.750,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	Belanja Hibah	45.781.591.231,63	16.450.149.269,00	27.242.550.709,74	27.586.292.592,23	37.560.400.500,00	35.560.400.500,00
	Belanja Bantuan Sosial	30.881.786.000,00	29.687.379.470,00	27.773.598.047,60	30.162.924.083,17	30.326.654.932,04	32.830.233.673,43
	BELANJA MODAL	159.166.507.474,73	120.106.019.140,03	109.903.338.463,66	119.358.177.823,60	120.006.079.721,97	129.913.030.247,93
	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.597.646.021,00	31.106.048.898,20	31.599.388.877,97	34.317.842.656,44	34.504.127.298,27	37.352.572.001,05
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.774.680.516,62	31.889.337.606,83	33.756.566.706,87	36.660.599.650,89	36.859.601.282,30	39.902.499.168,45
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.028.130.537,11	55.543.886.435,00	42.891.042.270,68	46.580.902.108,59	46.833.753.278,52	50.700.054.700,50
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.015.705.050,00	1.116.746.200,00	1.013.087.975,78	1.100.242.599,13	1.106.214.952,94	1.197.537.132,91
	Belanja Modal Aset Lainnya	750.345.350,00	450.000.000,00	643.252.632,37	698.590.808,56	702.382.909,94	760.367.245,02
	BELANJA TAK TERDUGA	273.889.083,00	7.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	273.889.083,00	7.000.000.000	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0	0
	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.172.206.504.141,49	1.168.421.594.028,60	1.218.524.378.791,80	1.234.586.892.670,00	1.250.506.096.214,00	1.266.608.685.513,36
	SURPLUS / (DEFISIT)	-693.448.422,89	-60.000.000.000,00	-89.875.090.770,80	-91.128.697.071,00	-91.611.859.960,00	-91.304.170.192,00
3	PEMBIAYAAN						
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	113.953.605.152,46	60.000.000.000,00	89.875.090.770,80	91.128.697.071,00	91.611.859.960,00	91.304.170.192,00
	Penggunaan SiLPA	113.953.605.152,46	60.000.000.000,00	89.875.090.770,80	91.128.697.071,00	91.611.859.960,00	91.304.170.192,00
	Pencairan Dana Cadangan						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
	Penerimaan Pinjaman Daerah						
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman						
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0
	Pembentukan Dana Cadangan						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah						
	Pembayaran Pokok Utang						
	Pemberian Pinjaman Daerah						
	PEMBIAYAAN NETTO	113.953.605.152,46	60.000.000.000,00	89.875.090.770,80	91.128.697.071,00	91.611.859.960,00	91.304.170.192,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	113.260.156.729,57	0	0	0	0	0

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.3 Kebijakan Keuangan Terbaru

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, APBD disusun untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan secara terencana dan terkendali. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan prioritas pembangunan daerah, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan keuangan oleh pemerintah daerah. Untuk memahami lebih lanjut, berikut ini adalah beberapa fungsi utama APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

a) Fungsi otorisasi – Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
b) Fungsi perencanaan – Anggaran daerah berperan sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan selama satu tahun anggaran;
c) Fungsi pengawasan – Anggaran daerah digunakan sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
d) Fungsi alokasi – Anggaran daerah diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, mencegah pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
e) Fungsi distribusi – Kebijakan anggaran daerah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dalam distribusi sumber daya;
f) Fungsi stabilisasi – Anggaran pemerintah daerah berfungsi sebagai alat untuk menjaga dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sistem terintegrasi digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, mencakup seluruh siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pemeriksaan, hingga tahap pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Seluruh penerimaan uang yang masuk ke rekening kas umum daerah, yang meningkatkan ekuitas dana dan menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran tanpa perlu dikembalikan, termasuk dalam pendapatan daerah. Sumber pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Untuk pengelolaan pendapatan daerah Kota Madiun telah ditetapkan beberapa kebijakan utama sebagai arah strategis, di antaranya sebagai berikut:

1. Penentuan target pendapatan daerah menyesuaikan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan regulasi lainnya yang sesuai;
2. Peningkatan target pendapatan daerah dilakukan secara bertahap dan terencana, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian;
3. Pelaksanaan Opsen PKB, BBNKB, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
4. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial di daerah;
5. Menurunkan *administrative* dan *compliance cost* melalui restrukturisasi jenis pajak dan rasionalisasi retribusi;
6. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah;
7. Memperkuat peran serta fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil guna meningkatkan pelayanan serta pendapatan;
8. Memaksimalkan penerimaan pendapatan transfer, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;
9. Transfer Berbasis Kinerja: yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian SPM daerah, penyaluran berbasis kinerja untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik;
10. Meningkatkan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
11. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah;
12. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dengan melakukan perbaikan pada sistem pelayanan pungutan daerah;
13. Memperkuat penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar Peraturan Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penggunaan belanja daerah bertujuan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yang mencakup urusan wajib, urusan pilihan, serta urusan tertentu yang penanganannya dapat dilakukan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah daerah telah mengatur beberapa hal penting terkait belanja daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja pegawai agar diperhatikan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai melebihi 30%, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang- Undang ini diundangkan;
2. Pengalokasian Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa serta Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah;
4. Dalam rangka Peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan;

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, penyusunan kebijakan belanja daerah difokuskan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik dari segi *output* maupun *outcome*-nya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun dirancang untuk mendukung tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Madiun didasarkan pada kebijakan-kebijakan berikut:

1. Peningkatan kualitas anggaran belanja daerah dilakukan melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang dilengkapi dengan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah dengan memanfaatkan dana sesuai dengan prioritas daerah (*money follow priority program*);
3. Pengelolaan belanja daerah dilakukan berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap pengeluaran diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Optimalisasi anggaran dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah;
6. Fokus belanja daerah diarahkan untuk memenuhi *mandatory spending* atau belanja yang telah ditetapkan, seperti 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Selain itu, belanja daerah juga ditujukan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, dengan mengikuti peraturan yang berlaku serta berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM).

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Bagian ini membahas masalah strategis yang menjadi fokus utama dalam pembangunan Kota Madiun pada periode 2025 hingga 2029. Isu-isu strategis yang diidentifikasi berlandaskan pada hasil evaluasi pembangunan di periode sebelumnya serta mengacu pada berbagai dokumen perencanaan, seperti RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, RTRW Kota Madiun 2023-2043, dan RPJPD Kota Madiun 2023-2045. Dengan dasar analisis yang komprehensif ini, RPJMD Kota Madiun 2025-2029 dirancang untuk menghadapi tantangan pembangunan yang meliputi isu ekonomi, sosial, infrastruktur, tata kelola, serta lingkungan hidup. Pendekatan strategis ini bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan Kota Madiun dengan visi jangka panjang nasional, provinsi, dan kebutuhan daerah, sekaligus mendorong keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.1 Permasalahan

2.3.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga, pembangunan di tingkat daerah sangat penting. Sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah untuk memperhatikan masalah yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Kebijakan yang responsif dan berhasil bergantung pada analisis menyeluruh tentang berbagai tantangan yang dihadapi oleh wilayah. Secara umum, permasalahan dominan di Kota Madiun berkisar pada tekanan lingkungan perkotaan, kualitas SDM yang belum merata, ketimpangan kesejahteraan, stagnasi ekonomi lokal, serta tata kelola pemerintahan yang perlu diperkuat. Jika tidak segera diatasi, persoalan-persoalan ini dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan Kota Madiun yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Untuk membicarakan masalah daerah yang berkaitan dengan prioritas dan tujuan pembangunan, diperlukan pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Menurut analisis yang dilakukan, ada beberapa masalah utama yang akan menjadi perhatian pembangunan Kota Madiun selama lima tahun ke depan, dari tahun 2025 hingga 2029, antara lain:

A. Aspek Geografi dan Demografi

1. Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) belum optimal;
2. Rumah tangga yang terlayani sanitasi aman masih rendah;
3. Kualitas infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, dan jaringan air perlu ditingkatkan;
4. Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas RTH;
5. Kualitas Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) belum optimal Kualitas Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) belum optimal. IKA Kota Madiun menunjukkan kondisi sedang hingga tercemar ringan. Untuk perbaikan diperlukan upaya intensif dalam pengelolaan limbah domestik dan industri, penerapan IPAL komunal, serta mendorong peran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai. Sedangkan IKU Kota Madiun meski real-time cenderung sedang, secara tahunan tercatat baik berkat langkah penghijauan dan perluasan RTH. Upaya seperti penanaman pohon lebih luas, transportasi rendah emisi, dan pengendalian debu jalanan layak dipertahankan dan diperluas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Penanganan Sampah yang berasal dari Rumah Tangga masih rendah;
7. Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas RTH;
8. Volume sampah yang ada di TPA hampir mendekati kapasitas maksimal;
9. Kota Madiun termasuk dalam kategori wilayah dengan tingkat risiko bencana sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun relatif lebih rendah dibanding wilayah dengan risiko tinggi, Kota Madiun tetap memiliki potensi terjadinya bencana. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi, kesiapsiagaan, serta penguatan kapasitas masyarakat dan infrastruktur untuk meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang pendidikan. SPM terkait proporsi guru dengan kualifikasi minimal S1/DIV;
2. Angka Melek Huruf di usia produktif belum 100 %;
3. Kualitas literasi siswa perlu ditingkatkan;
4. Minat Baca Masyarakat masih belum optimal;
5. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melambat;
6. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang berpendidikan tinggi masih belum optimal;
7. Masih ada Balita Kurang Gizi dan stunting;
8. Masih terdapat kasus KLB DBD;
9. Angka kematian bayi 4,5/1000 kelahiran hidup;
10. pekerja yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan perlu dioptimalkan.
11. Masih perlunya peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di berbagai bidang;
12. Masih terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak;
13. Ketimpangan pendapatan semakin melebar;
14. Kesejahteraan Petani dan Peternak perlu ditingkatkan. Rasio pendapatan petani dengan produksi;
15. Kesejahteraan Petani dan Peternak perlu ditingkatkan;
16. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi;
17. Pelestarian seni, budaya dan sejarah belum optimal;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

C. Aspek Daya Saing Daerah

1. Kontribusi sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan terhadap PDRB yang cenderung stagnan;
2. Daya saing daerah belum optimal;
3. Belum ada pasar yang sesuai standar;
4. Kualitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Industri Kecil belum optimal;
5. Laju Inflasi Kota Madiun rawan mengalami fluktuasi;
6. Peningkatan kualitas pariwisata daerah sesuai dengan rencana pengembangan dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Madiun;
7. Nilai dan iklim investasi masih perlu ditingkatkan;
8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Madiun perlu ditingkatkan;
9. Tingkat konsumsi makan ikan masih belum optimal;
10. Belum adanya pelayanan angkutan umum massal berbasis *Buy The Service* (BTS);
11. Kualitas kinerja infrastruktur perkotaan belum optimal;
12. Masih perlunya peningkatan kualitas rumah layak huni;
13. Indeks Inovasi Daerah masih perlu ditingkatkan.

Daya saing Kota Madiun masih belum optimal ditandai dengan kontribusi sektor ekonomi yang stagnan, kualitas UMK, pasar, dan investasi yang rendah, serta fluktuasi inflasi dan TPAK yang belum stabil. Sektor pariwisata, infrastruktur perkotaan, transportasi publik, dan perumahan juga masih memerlukan peningkatan kualitas. Selain itu, indeks inovasi daerah masih rendah sehingga ekosistem riset dan inovasi perlu diperkuat. Secara umum, daya saing daerah membutuhkan penguatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta pengembangan investasi dan inovasi untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Kondisi ekosistem riset dan inovasi Kota Madiun saat ini menunjukkan adanya potensi besar dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. Namun, tantangan masih terdapat pada aspek kualitas SDM, kapasitas kelembagaan riset, serta keterbatasan jejaring kolaborasi antar-pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang unggul melalui penguatan kompetensi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal tersebut menjadi salah satu fokus program prioritas kepala daerah yaitu Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. Aspek Pelayanan Umum

1. Indeks Profesionalitas ASN sebesar 84,95 belum optimal;
2. Wilayah Bebas Korupsi masih terbatas;
3. Penegakan Perda dan Perwal di masyarakat perlu ditingkatkan;
4. Masih terdapat kejadian kriminal di Kota Madiun;
5. Nilai SPBE Kota Madiun masih sebesar 4,57;
6. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di perangkat daerah perlu ditingkatkan;
7. Capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih belum optimal;
8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dioptimalkan.

2.3.2 Isu strategis

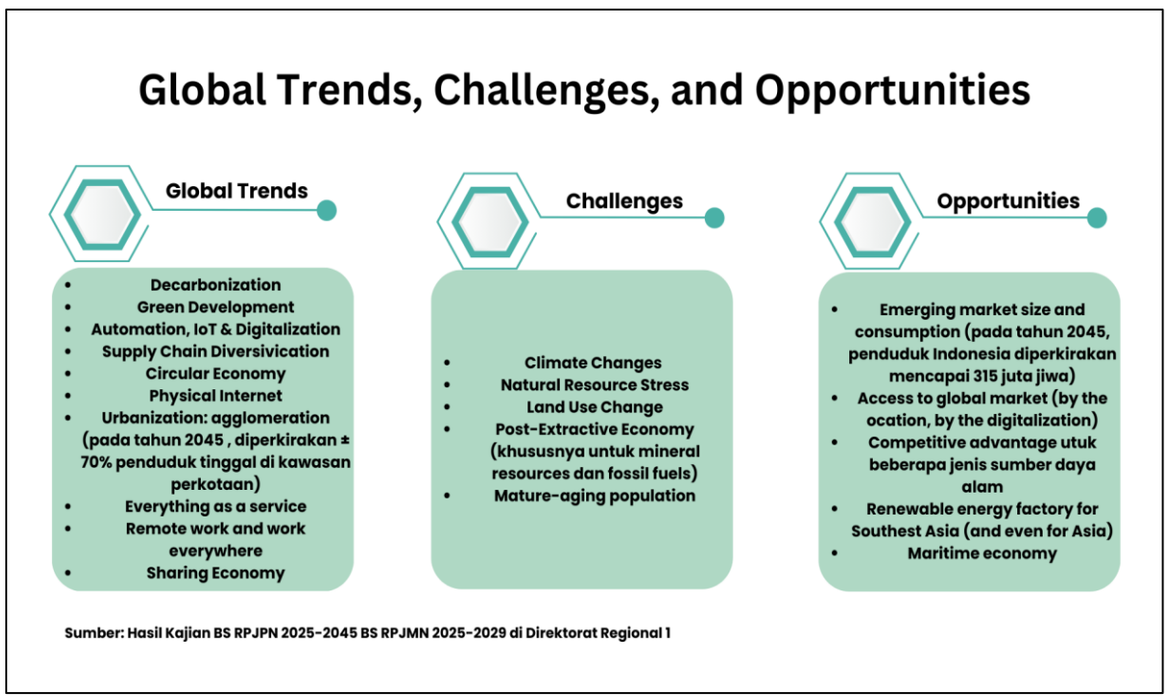
Dalam menentukan arah kebijakan masa depan dibutuhkan perhatian terhadap isu strategis. Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal, sebagaimana ditunjukkan dalam uraian kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan Kota Madiun. Analisis isu strategis didasarkan pada berbagai permasalahan pembangunan daerah yang telah dan akan terjadi, termasuk yang berdampak signifikan terhadap keberhasilan pembangunan. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang isu-isu yang menjadi fokus dan prioritas penanganan dalam lima tahun ke depan hingga berakhirnya periode perencanaan jangka menengah karena dampaknya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang diprioritaskan sedemikian rupa sehingga prospek pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun sisa pelaksanaan lebih besar dan pasti.

Jika isu strategis tidak diperhatikan, maka tujuan dan sasaran akan semakin sulit dicapai, dan jika tidak diantisipasi maka berdampak terhadap kerugian yang lebih besar, begitu pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Penetapan isu-isu strategis pembangunan Kota Madiun berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal berupa permasalahan/ agenda/aspek yang menjadi isu berpengaruh luas di tingkat internasional, nasional, dan regional. Selain itu, dilakukan analisis terhadap lingkungan internal berupa permasalahan pembangunan yang perlu ditangani selama lima tahun ke depan. Berikut isu-isu internasional, nasional, regional, dan permasalahan internal yang berdampak besar terhadap pembangunan Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.2.1 Isu Internasional

Dalam merumuskan perencanaan pembangunan Kota Madiun, penting untuk memperhatikan isu-isu internasional yang berkembang hingga tahun 2045 sebagaimana tercermin dalam megatren global. Isu seperti dekarbonisasi, pengembangan hijau, dan digitalisasi menuntut kota-kota untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan serta mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik dan sektor ekonomi. Tantangan perubahan iklim, tekanan terhadap sumber daya alam, dan penuaan populasi menuntut kebijakan adaptif yang berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan ruang dan ketahanan lingkungan. Di sisi lain, peluang seperti pertumbuhan pasar baru, akses global melalui digitalisasi, serta potensi pengembangan ekonomi maritim dan energi terbarukan memberikan peluang strategis bagi Kota Madiun untuk mengambil peran sebagai pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan berdaya saing. Dengan memperhatikan tren, tantangan, dan peluang ini, Kota Madiun dapat menyusun rencana pembangunan yang visioner, adaptif, dan selaras dengan dinamika global.



Gambar 2. 98 Megatren Global 2045
Sumber: RPJP Nasional, 2025-2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.2.2 Isu Nasional

Isu Nasional bersumber dari dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menjadi pedoman isu strategis pembangunan daerah. Isu Strategis Nasional sesuai dengan RPJPN 2025-2045 meliputi 14 isu yaitu:



Gambar 2. 99 Isu Strategis Nasional RPJPN 2025-2045
Sumber: RPJP Nasional, 2025-2045

Lebih lanjut, penjelasan tantangan pembangunan pada masing-masing isu strategis nasional dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 73 Isu Strategis Pembangunan Nasional dan Tantangan Pembangunan

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1	2
1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat b. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)	a. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;	Belum optimalnya pemanfaatan ekonomi laut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2
6. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
7. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas;	a. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas b. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
8. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010 2022 masih relatif tertinggal;	a. Kualitas Pendidikan yang masih rendah b. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah
9. Demokratisasi belum optimal	Demokrasi masih terbatas pada hal hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan. Selain itu partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal dan prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.
10. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	a. Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh dibawah kebutuhannya c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
11. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan;	a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan d. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi
12. Tata Kelola pemerintahan belum optimal	2. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation)* dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. 3. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif 4. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif 5. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2
	6. ASN berada dalam posisi rentan terhadap intervensi politik 7. Belum meratanya kualitas pelayanan publik 8. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan Masyarakat 9. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan Pembangunan 10. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan. 11. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan Pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang. 12. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas
13. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas;	a. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar.
14. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan b. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik c. Partisipasi masyarakat sipil dalam Pembangunan dan demokratisasi belum optimal d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan e. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar Pembangunan Masyarakat.

Sumber: RPJP Nasional, 2025-2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Maka, perencanaan pembangunan daerah wajib memperhatikan rencana pembangunan nasional. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2025-2045, sasaran periode pertama yaitu Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.



Gambar 2. 100 Visi Misi RPJMN 2025-2029
Sumber: RPJM Nasional, 2025-2029

RPJMN 2025-2029 mempunyai Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi yang kuat, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain itu juga terdapat Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, terdapat beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian serius dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Isu strategis Jawa Timur memperhatikan, meliputi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. 101 Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029
Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur, 2025-2029

2.3.2.4 Isu Strategis KLHS Kota Madiun

Isu strategis lingkungan dalam perencanaan pembangunan kota menjadi hal yang esensial dan imperatif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, kehidupan yang sehat, dan layak bagi penduduk kota serta generasi mendatang. Dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan kota dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan lingkungan, dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kehidupan kota dan masyarakatnya.

Isu strategis pembangunan berkelanjutan disusun dengan TPB yang direpresentasikan melalui jumlah indikator akumulatif dari 17 poin TPB yang ada. Berikut disajikan isu strategis lingkungan Kota Madiun yang diselaraskan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB):

1. Peningkatan kualitas dan daya saing;
2. Peningkatan ketertiban dan keamanan kota;
3. Peningkatan stabilitas dan daya saing ekonomi;
4. Pengelolaan pencemaran lingkungan (air, tanah udara);
5. Pelestarian RTH dan keanekaragaman hayati;
6. Peningkatan mitigasi perubahan iklim kota;
7. Peningkatan implementasi *good governance* dalam tata kelola dan pelayanan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.2.5 Isu Strategis Kota Madiun

Dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan Kota Madiun, analisis dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor yang relevan dan sesuai dengan kondisi daerah yang telah dijelaskan sebelumnya di Bab 2. Evaluasi juga dilakukan terhadap keadaan keuangan daerah yang telah dipaparkan secara rinci pada Bab 3. Proses analisis ini mempertimbangkan berbagai isu yang memiliki dampak besar, baik yang berasal dari tingkat global, nasional, maupun regional. Isu-isu tersebut meliputi tantangan serta peluang yang timbul akibat perubahan dinamika dunia, kebijakan nasional, dan perkembangan di tingkat regional yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung pembangunan di Kota Madiun.

Dengan mempertimbangkan semua elemen tersebut, strategi pembangunan yang disusun bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang yang tidak hanya memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga mampu mengantisipasi perkembangan di masa depan. Hal ini diharapkan dapat membangun kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, sehingga tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan bagi warga Kota Madiun. Berdasarkan isu-isu strategis di level internasional, nasional, Provinsi Jawa Timur, telaah terhadap dokumen RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043, permasalahan di Kota Madiun, maka dapat dirumuskan 8 (delapan) isu strategis Kota Madiun.



Gambar 2. 102 Isu Strategis Kota Madiun
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

A. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas internasional melalui penguasaan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dan berkualitas internasional melalui penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi aspek krusial dalam perencanaan pembangunan. Kota Madiun memahami bahwa di era globalisasi, keberhasilan suatu daerah tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas SDM yang mampu bersaing secara internasional. Oleh karena itu, strategi pembangunan akan difokuskan pada pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan penguasaan IPTEK, termasuk peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan juga akan ditingkatkan untuk mendukung SDM yang tangguh dan siap bersaing di tingkat global. Selain itu, penguasaan IPTEK akan menjadi landasan utama untuk menggerakkan sektor industri dan ekonomi Kota Madiun. Melalui peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan, penerapan inovasi, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta, Kota Madiun berharap dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan wirausaha dan industri berbasis IPTEK. Dengan demikian, kualitas SDM yang kompetitif dan berkualitas internasional dapat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun menuju tahun 2045. Dalam konteks strategi pengembangan jangka pendek, terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan.

Untuk meningkatkan kualitas SDM baik dari aspek pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing dan berkualitas internasional melalui penguasaan IPTEK, berikut adalah beberapa alternatif strategi yang bisa diterapkan:

1. Aspek pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah Kota Madiun dilakukan melalui strategi
   - Mengembangkan dan memperluas program STEM *(Science, Technology, Enginering, Mathematics)* di sekolah-sekolah.
   - Menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk guru dalam penggunaan teknologi dan metode pengajaran inovatif.
   - Mendirikan pusat pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan siswa dan tenaga kerja di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Meningkatkan infrastruktur digital di sekolah dan institusi pendidikan, termasuk komputer, akses internet, dan perangkat lunak.
- Mengembangkan perpustakaan digital yang menyediakan akses ke sumber daya pendidikan berbasis IPTEK.
- Menjalin kerjasama dengan industri untuk menyediakan program magang dan pelatihan kerja bagi siswa dan mahasiswa.
- Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di institusi pendidikan tinggi terkemuka.
- Mengadakan program pertukaran pelajar dengan institusi pendidikan Internasional untuk meningkatkan wawasan global.

2. Aspek Kesehatan melalui strategi
   - Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dalam penggunaan teknologi medis terbaru.
   - Sertifikasi profesional untuk tenaga kesehatan yang diakui secara Internasional.
   - Meningkatkan penggunaan *telemedicine* untuk menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
   - Mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan.
   - Menjalin kerjasama dengan institusi riset dan universitas dalam penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
   - Melakukan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit.
   - Mengintegrasikan edukasi kesehatan dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan kesadaran kesehatan sejak dini.
   - Meningkatkan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan masyarakat berstandar global.
   - Meningkatkan penggunaan teknologi dalam layanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas perawatan.
3. Meningkatkan Literasi Digital melalui
   - Menyediakan pelatihan literasi digital untuk siswa, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi.
   - Menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya digital untuk pendidikan dan kesehatan, termasuk *e-learning* dan aplikasi kesehatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, Kota Madiun dapat meningkatkan kualitas SDM di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga mampu bersaing secara internasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguasaan IPTEK.

B. Peningkatan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Kota Madiun menghadapi tantangan kompleks dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan produktif untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Beberapa isu strategis yang muncul meliputi perluasan sektor perdagangan dan jasa, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan promosi pariwisata kota, serta pendorong ekonomi kreatif. Isu utama yang perlu diatasi adalah ketidakmerataan inklusivitas pembangunan ekonomi, di mana sebagian masyarakat belum merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai. Selain itu, peningkatan produktivitas UMKM memerlukan dukungan dalam hal akses modal, pelatihan, dan strategi pemasaran yang efektif. Pengembangan sektor pariwisata membutuhkan strategi yang terkoordinasi untuk meningkatkan daya tarik dan infrastruktur pendukung. Sementara itu, ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan inovatif dan berkelanjutan perlu didorong melalui kebijakan yang mendukung serta insentif yang mendorong inovasi dan kreativitas. Keseluruhan, penyelesaian permasalahan dan isu strategis ini memerlukan pendekatan holistik dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Kota Madiun.

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Madiun dalam jangka menengah, berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Penguatan Infrastruktur Ekonomi
   - Meningkatan kualitas infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan air untuk mendukung aktivitas ekonomi.
   - Memperluas akses internet ke seluruh kota untuk mendukung ekonomi digital dan inovasi.
   - Meningkatkan sistem transportasi dan logistik untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Pengembangan Sektor Unggulan
   - *Urban Farming* Berkelanjutan melalui pengembangan sektor pertanian perkotaan dengan praktik berkelanjutan, teknologi modern, dan diversifikasi produk.
   - Industri Kreatif dan Pariwisata dengan mengembangkan lokasi-lokasi pariwisata dan mendorong pengembangan industri kreatif untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan lokal.
   - Mendorong pertumbuhan industri, teknologi dan mendukung inovasi.
3. Dukungan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
   - Meningkatkan akses ke pembiayaan kreatif bagi UMKM.
   - Meningkatkan pelatihan dan bimbingan UMKM dalam manajemen, pemasaran, dan teknologi.
   - Meningkatkan fasilitasi UMKM dalam mengakses pasar yang lebih luas melalui pameran, *platform e-commerce*, dan kerjasama dengan perusahaan besar.
4. Inklusi Ekonomi
   - Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi komunitas kurang mampu dan kelompok rentan.
   - Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dengan memberikan pelatihan, akses ke pembiayaan, dan peluang kerja.
   - Pembangunan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan untuk memastikan manfaat yang inklusif.
5. Penerapan Teknologi dan Inovasi
   - Meningkatkan implementasi inisiatif kota pintar *(smart city)* untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan kualitas hidup.
   - Meningkatkan inkubator bisnis dan pusat inovasi untuk mendukung startup dan usaha baru dalam mengembangkan produk dan layanan inovatif.
   - Mendorong kegiatan riset dan pengembangan untuk menciptakan solusi inovatif dalam berbagai sektor.
6. Pembangunan Berkelanjutan
   - Menerapkan kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan yang baik untuk memastikan kelestarian sumber daya alam.
   - Mendorong penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi dalam aktivitas ekonomi dan rumah tangga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Mengembangkan infrastruktur hijau seperti taman kota, ruang terbuka hijau, dan sistem pengelolaan air yang ramah lingkungan.

7. Kerjasama dan Kolaborasi
   - Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan ekonomi.
   - Meningkatkan kerjasama dengan daerah lain untuk mengembangkan potensi ekonomi regional dan mengatasi tantangan bersama.
   - Membangun hubungan dengan mitra internasional untuk mendapatkan investasi, teknologi, dan pasar baru.

C. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan yang modern, dan lingkungan hidup berkelanjutan

Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan infrastruktur kota yang modern dan berkelanjutan di Kota Madiun merupakan tantangan serius dalam mendorong transformasi pembangunan. Salah satu isu utama adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dan kapasitas infrastruktur yang tersedia. Kota ini menghadapi tekanan signifikan terkait kepadatan penduduk, mobilitas, dan kebutuhan akan fasilitas yang lebih modern.

Selain itu, isu strategis yang mendominasi mencakup manajemen limbah perkotaan, keberlanjutan energi, dan pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi berbasis teknologi. Implementasi infrastruktur yang modern dan berkelanjutan juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis yang teliti, kolaborasi lintas sektor, serta investasi yang cerdas untuk menciptakan kota yang tidak hanya maju secara teknologi tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kota Madiun menghadapi berbagai permasalahan dan isu strategis yang harus ditangani dengan hati-hati. Pertumbuhan perkotaan yang cepat, bersama dengan peningkatan aktivitas industri dan komersial, mengancam kualitas udara dan air. Tingginya tingkat polusi udara, serta peningkatan limbah industri, dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem lingkungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain itu, urbanisasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan degradasi lahan, mengancam keberlanjutan ekosistem alami, dan mengurangi ruang terbuka hijau. Masalah pengelolaan sampah juga menjadi perhatian utama, mengingat pertumbuhan populasi yang signifikan dapat meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, isu strategis dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Madiun melibatkan perluasan infrastruktur hijau, peningkatan efisiensi pengelolaan limbah. Pelestarian keanekaragaman hayati di Kota Madiun tidak hanya menjaga ekosistem dan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya tarik kota, serta mendukung ketahanan ekologis jangka panjang. Strategi-strategi ini dapat diintegrasikan dengan program pembangunan berkelanjutan sehingga tercapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan kelestarian lingkungan. Solusi holistik dan terpadu juga perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini, sejalan dengan komitmen menuju perkembangan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam upaya mencapai peningkatan kualitas sarana infrastruktur perkotaan yang modern dan lingkungan hidup berkelanjutan dalam jangka menengah dapat melakukan beberapa alternatif strategi sebagai berikut:

1. Perbaikan dan Pengembangan Infrastruktur Jalan Terpadu
   - Meningkatkan perbaikan jalan utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan penting serta jalan sekunder di area padat penduduk;
   - Meningkatkan pemanfaatan teknologi pemantauan dan manajemen lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi.
2. Peningkatan Sistem Drainase dan Penanganan Banjir
   - Meningkatkan kualitas saluran drainase yang ada di area rawan banjir. Integrasikan solusi seperti sumur resapan dan kolam retensi untuk mengelola aliran air hujan;
   - Revitalisasi aliran sungai dan saluran kecil untuk meningkatkan kapasitas drainase dan mengurangi risiko banjir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Pengembangan dan Pemeliharaan infrastruktur Ruang Terbuka Hijau
   - Revitalisasi Taman dan Ruang Publik dengan fasilitas baru seperti *jogging track*, area bermain anak, dan ruang berkumpul komunitas dengan mempertimbangkan penambahan tanaman lokal untuk meningkatkan estetika dan manfaat ekologis;
   - Pembangunan Ruang Terbuka Baru di area yang kurang memiliki akses ke ruang hijau.
4. Implementasi Teknologi Ramah Lingkungan dan *Smart City*
   - Mengimplementasikan sistem manajemen lalu lintas cerdas dan pemantauan kualitas udara untuk meningkatkan efisiensi kota;
   - Menambahkan Energi Terbarukan dan Hemat Energi salah satunya melalui pemasangan panel surya di gedung-gedung publik dan ganti lampu jalan dengan LED hemat energi.
5. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah dan Kebersihan terpadu Berbasis Teknologi
   - Membangun fasilitas daur ulang yang dilengkapi dengan teknologi canggih seperti pemisah otomatis, penghancur, dan mesin sortasi berbasis sensor untuk meningkatkan efisiensi proses daur ulang;
   - Meningkatkan penggunaan teknologi Pengolahan Sampah Organik dengan menggunakan teknologi komposting terkontrol dan anaerobik untuk mengolah sampah organik menjadi kompos atau biogas.
6. Pengelolaan Sampah
   - Efisiensi Pengelolaan Sampah: Meningkatkan sistem pengelolaan sampah Kota Madiun dengan melaksanakan program-program pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali yang lebih terintegrasi dan berbasis data;
   - Edukasi dan Kesadaran Publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Madiun tentang pentingnya pengelolaan sampah melalui kampanye edukasi yang inovatif dan program pelatihan di tingkat komunitas.
7. Konservasi Lingkungan Hidup
   - Memperkuat upaya konservasi lingkungan hidup di Kota Madiun dengan inisiatif yang fokus pada perlindungan air, tanah, dan ruang hijau, serta melaksanakan proyek rehabilitasi ekosistem yang berkelanjutan;
   - Mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan yang mendukung pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, dengan melibatkan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Pengelolaan Air
   - Optimalisasi Pengelolaan Air di Kota Madiun melalui program efisiensi penggunaan, pengolahan air limbah, dan konservasi yang terintegrasi;
   - Menyelenggarakan kampanye edukasi yang mendalam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan air yang berkelanjutan, dengan penekanan pada praktik sehari-hari yang dapat mengurangi pemborosan.
9. Pengembangan Lingkungan Perkotaan
   - Memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan di Kota Madiun dengan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, termasuk perbaikan sistem sanitasi dan jaringan air, serta penerapan desain berkelanjutan;
   - Melaksanakan proyek rehabilitasi untuk mengatasi area yang rusak dan memperkenalkan program-program kesadaran publik untuk mendukung pemeliharaan lingkungan kota.
10. Kemitraan dan Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat
   - Meningkatkan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, akademisi, dan media di Kota Madiun untuk memperkuat upaya perlindungan lingkungan melalui kolaborasi yang terarah dan berbasis hasil;
   - Mengembangkan dan melaksanakan inisiatif bersama yang melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan program lingkungan yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.
11. Penggunaan Teknologi Lingkungan
   - Meningkatkan penggunaan teknologi lingkungan di Kota Madiun, seperti sistem monitoring kualitas udara dan air, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan respons terhadap isu lingkungan;
   - Mendukung penelitian dan penerapan teknologi baru yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dan mempromosikan solusi berkelanjutan di tingkat lokal.
12. Sistem Peringatan Dini (EWS)
   - Meningkatkan kapabilitas sistem peringatan dini di Madiun dengan memperkuat infrastruktur dan teknologi yang mendukung deteksi dan respons cepat terhadap potensi risiko lingkungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sistem peringatan dini, serta memfasilitasi pelatihan dan simulasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

D. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis *Smart* dan *World Class Government*

Salah satu tantangan utama adalah efektivitas tata kelola pemerintahan, termasuk sistem administrasi publik, kebijakan, dan pelayanan masyarakat yang terkait. Kelemahan dalam bidang ini dapat menghambat efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, penerapan inovasi berbasis *smart city* dan pemerintahan kelas dunia membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur teknologi, yang mungkin terbatas oleh keterbatasan sumber daya finansial dan teknologi. Tantangan lainnya mencakup keamanan data dan privasi, terutama dalam pengelolaan informasi dan layanan digital yang melibatkan data sensitif masyarakat.

Dalam hal ini, keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat dianggap kunci keberhasilan, namun, upaya untuk memastikan partisipasi yang merata dan inklusif bisa menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan dan isu strategis ini sangat penting untuk merancang serta melaksanakan kebijakan dan strategi yang efektif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mendorong inovasi berbasis *smart city* dan pemerintahan kelas dunia di Kota Madiun. Beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
   - Meningkatkan pemanfaatan Portal Pemerintahan Terintegrasi yang menyediakan akses ke semua layanan publik secara terintegrasi, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah;
   - Meluncurkan inisiatif open data untuk memungkinkan publik mengakses data pemerintah secara transparan, mendukung akuntabilitas dan partisipasi warga;
   - Meningkatkan dan mengambangkan *dashboard* kinerja pemerintah yang dapat diakses publik untuk memantau dan mengevaluasi kinerja semua instansi pemerintahan secara *real-time*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Digitalisasi Layanan Publik
   - Meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah untuk mendukung digitalisasi layanan publik dan meningkatkan akses internet bagi warga;
   - Mengembangkan data *center* pemerintah yang aman dan handal untuk mendukung penyimpanan dan pengolahan data;
   - Mengembangkan aplikasi mobile untuk layanan pemerintah yang memudahkan warga mengakses informasi dan layanan kapan saja dan di mana saja;
   - Mengintegrasikan semua layanan publik dalam satu sistem layanan satu pintu untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan warga.
3. Pengembangan SDM Pemerintahan
   - Meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai pemerintah dalam teknologi dan manajemen modern melalui sertifikasi kompetensi dan bimbingan teknis untuk memastikan standar kompetensi dan profesionalisme yang tinggi di kalangan aparatur pemerintah;
   - Mengembangkan program kepemimpinan transformasional bagai aparatur yang berfokus pada inovasi, visi strategis, dan kemampuan adaptasi.
4. Partisipasi Publik dan Keterlibatan Warga
   - Mengembangkan aplikasi partisipasi publik yang memungkinkan warga memberikan masukan, suara, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan;
   - Menyelenggarakan forum konsultasi digital secara rutin untuk mendiskusikan isu-isu penting dengan warga.
5. Inovasi dan Efisiensi Layanan Publik
   - Membangun dan meningkatkan inkubator inovasi pemerintahan untuk mengembangkan solusi kreatif dalam layanan publik.
   - Meningkatkan kemitraan dengan universitas, media masas, lembaga riset, dan industri untuk mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan;
   - Menggunakan *Artificial Intelligence (AI)* dan analitik *big* data untuk meningkatkan efisiensi, prediksi, dan pengambilan keputusan;
   - Menerapkan teknologi *Internet of Think* (*IoT)* untuk memantau dan mengelola infrastruktur kota, seperti transportasi, energi, dan lingkungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Pengelolaan Sumber Daya dan Keuangan yang Efektif
   - Meningkatkan implementasi sistem SIPD untuk perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran yang transparan dan akuntabel;
   - Mengembangkan sistem *e-procurement* untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang efisien dan bebas dari korupsi;
   - Mengembangkan sistem manajemen aset digital untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah;
   - Menerapkan program efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dalam operasional pemerintahan.

E. Peningkatan pelayanan publik yang berintegritas dan perilaku anti korupsi

Peningkatan pelayanan publik yang berintegritas dan perilaku anti korupsi menjadi isu strategis yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien. Kota Madiun berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, pemerintah Kota Madiun akan melakukan reformasi birokrasi, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat layanan, serta memberikan pelatihan kepada aparatur sipil negara (ASN) dalam hal etika kerja dan integritas.

Selain itu, upaya pemberantasan korupsi akan terus menjadi perhatian utama. Kota Madiun akan mengimplementasikan sistem pengawasan yang lebih ketat, termasuk penggunaan teknologi untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Program pencegahan korupsi, seperti *whistleblowing system* dan penguatan sistem pelaporan, akan diperkuat untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan publik berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik korupsi. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, Kota Madiun bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam jangka menengah adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Transparansi dalam Pelayanan Publik
   - Menerapkan sistem e-Government untuk memberikan akses informasi yang lebih mudah dan transparan bagi masyarakat;
   - Menyediakan aplikasi mobile untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik dan status prosesnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Membuka saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik terkait kualitas pelayanan yang diterima;
- Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah tentang pentingnya transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka;
- Melakukan audit eksternal secara rutin untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik
   - Meningkatkan pengawasan internal dengan membentuk tim evaluasi kinerja pegawai pemerintah secara periodik;
   - Mengimplementasikan sistem laporan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelayanan publik yang dapat diakses masyarakat;
   - Membangun sistem monitoring kinerja yang dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
   - Menyediakan pelatihan berkelanjutan tentang etika pelayanan dan kepatuhan pada aturan bagi pegawai pemerintah;
   - Menggunakan teknologi untuk melacak alur proses pelayanan, memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.
3. Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan dan Sosialisasi
   - Menyelenggarakan pelatihan anti korupsi secara berkala kepada pegawai pemerintahan dan masyarakat;
   - Mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk kesadaran generasi muda;
   - Membangun pusat informasi yang menyajikan materi terkait bahaya korupsi dan cara mencegahnya bagi masyarakat umum;
   - Mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
   - Menjalin kerjasama dengan lembaga antikorupsi untuk meningkatkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi.
4. Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
   - Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik secara online;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi untuk pengajuan dan pengecekan status layanan publik, sehingga lebih efisien dan mengurangi potensi korupsi;
- Mengembangkan aplikasi berbasis smartphone untuk pelayanan publik yang memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah;
- Menyediakan pelatihan untuk aparatur pemerintah tentang penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat;
- Meningkatkan infrastruktur teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan akuntabel.

5. Penguatan Sistem Pengaduan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Korupsi
   - Mengembangkan sistem pengaduan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat melaporkan praktik korupsi secara anonim;
   - Menyediakan perlindungan hukum bagi pelapor korupsi untuk memastikan tidak ada ancaman atau intimidasi terhadap mereka;
   - Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek pemerintah melalui forum transparansi dan konsultasi publik;
   - Melakukan penyuluhan tentang hak-hak masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut akan pembalasan;
   - Mengintegrasikan pengaduan dan laporan masyarakat ke dalam sistem evaluasi dan audit rutin terhadap kinerja pemerintah.

F. Peningkatan partisipasi dan inovasi masyarakat dalam pembangunan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi isu strategis yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kota Madiun percaya bahwa pembangunan yang sukses tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, Kota Madiun akan mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan, dan program-program yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain itu, inovasi masyarakat juga akan menjadi pilar utama dalam mempercepat kemajuan pembangunan. Kota Madiun akan mendukung pengembangan ide-ide inovatif dari masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Fasilitas pendukung seperti pusat inovasi dan inkubator usaha akan diperkuat untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan solusi-solusi yang bermanfaat bagi pembangunan kota. Dengan mengintegrasikan partisipasi aktif dan inovasi masyarakat dalam proses pembangunan, Kota Madiun diharapkan dapat menciptakan kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam jangka menengah adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
    - Menyelenggarakan forum musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan warga untuk mengusulkan ide dan prioritas pembangunan;
    - Membuka saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan terkait proyek pembangunan yang ada;
    - Melibatkan perwakilan masyarakat dalam komite perencanaan pembangunan untuk memastikan kepentingan semua kelompok terwakili;
    - Menyediakan platform online yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan;
    - Menyebarluaskan informasi terkait rencana pembangunan kepada masyarakat secara terbuka dan transparan.
2. Mendorong Inovasi Lokal dalam Ekonomi dan Sosial
    - Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu masyarakat mengembangkan ide-ide inovatif dan meningkatkan kapasitas kewirausahaan;
    - Menyediakan dana hibah atau kompetisi untuk mendukung inisiatif inovatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    - Menyediakan pelatihan keterampilan teknis untuk masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi dalam pengembangan usaha;
    - Mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi dalam mendanai dan mendukung inovasi lokal yang berpotensi meningkatkan perekonomian;
    - Menyediakan akses ke teknologi dan pasar bagi pengusaha lokal untuk memperluas jangkauan dan dampak dari inovasi mereka.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat
   - Mengadakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi;
   - Menyediakan fasilitas wifi publik yang dapat diakses masyarakat di berbagai tempat untuk mendukung kegiatan belajar dan kerja;
   - Mengembangkan platform pembelajaran online yang mudah diakses untuk mengedukasi masyarakat tentang keterampilan digital dan teknologi;
   - Menyediakan pelatihan teknis terkait penggunaan aplikasi digital untuk usaha kecil dan menengah agar mereka lebih kompetitif;
   - Menyediakan beasiswa untuk pelatihan keterampilan digital yang dapat membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan di era digital.
4. Pengembangan Infrastruktur untuk Mendukung Inovasi dan Partisipasi Masyarakat
   - Membangun pusat inovasi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengembangkan ide-ide bisnis dan teknologi baru;
   - Menyediakan ruang publik yang nyaman untuk kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat;
   - Mengembangkan infrastruktur teknologi di seluruh kota untuk mendukung kegiatan inovasi masyarakat, seperti pusat akses internet dan ruang kerja bersama;
   - Menyediakan fasilitas dan pelatihan tentang teknologi yang dapat digunakan untuk pengembangan produk atau layanan baru;
   - Mengintegrasikan teknologi dalam pembangunan infrastruktur publik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan bagi masyarakat.
5. Pemberdayaan Komunitas dalam Pembangunan Sosial
   - Menyediakan pelatihan keterampilan sosial untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berinteraksi dan berkolaborasi dalam proyek pembangunan;
   - Mengaktifkan kembali kelompok kerja sosial yang melibatkan masyarakat untuk memberikan bantuan kepada kelompok rentan;
   - Mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial yang bermanfaat bagi semua pihak;
   - Menyediakan dukungan bagi komunitas lokal untuk membangun infrastruktur sosial yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama;
   - Mendorong pembentukan lembaga atau organisasi masyarakat yang dapat berperan dalam memajukan dan mengawasi program pembangunan sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

G. Peningkatan Trantibumlinmas dan Harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat

Peningkatan ketertiban, keamanan, dan pelayanan masyarakat (Trantibumlinmas) serta harmonisasi sosial merupakan elemen penting dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kota Madiun menyadari bahwa stabilitas sosial yang kuat akan menjadi landasan dalam menciptakan iklim yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat Trantibumlinmas dilakukan melalui peningkatan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat. Selain itu, fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum menjadi prioritas, dengan melibatkan masyarakat dalam program pengawasan dan pengamanan di tingkat kelurahan.

Peningkatan harmonisasi sosial juga menjadi bagian dari strategi ini. Kota Madiun berkomitmen untuk memperkuat toleransi, kerukunan antarumat beragama, serta saling menghargai antar sesama, terlepas dari latar belakang sosial, budaya, dan agama. Strategi pembangunan ini mencakup program-program yang mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis, termasuk peningkatan komunikasi antar warga dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan terciptanya Trantibumlinmas yang solid dan hubungan sosial yang harmonis, Kota Madiun akan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, damai, dan mendukung perkembangan ekonomi dan sosial yang inklusif.

Beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam mendukung peningkatan trantibumlinmas dan harmonisasi sosial jangka menengah adalah:

1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum;
   - Meningkatkan frekuensi patroli gabungan antara aparat keamanan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban;
   - Memperkuat Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dengan pelatihan intensif bagi warga dalam menjaga ketertiban;
   - Menggunakan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) untuk memantau area rawan kejahatan dan meningkatkan pengawasan;
   - Menyediakan pelatihan penanganan konflik bagi tokoh masyarakat dan aparat untuk mengurangi potensi kerawanan;
   - Membangun fasilitas pos keamanan di titik-titik strategis untuk mempercepat respon terhadap gangguan ketertiban.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Penjagaan Ketertiban
   - Membentuk kelompok pengawas lingkungan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda;
   - Mengaktifkan aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan gangguan ketertiban secara *real-time*;
   - Menyediakan ruang komunikasi langsung antara warga dan aparat untuk koordinasi dalam penanggulangan masalah ketertiban;
   - Mengadakan forum-forum sosial untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam menjaga keamanan;
   - Mendorong pembentukan kelompok masyarakat peduli ketertiban yang rutin melakukan kegiatan pengawasan di lingkungan masing-masing.
3. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial
   - Menyediakan pelatihan untuk warga tentang cara mengelola dan menyelesaikan konflik secara damai;
   - Mengembangkan media sosial untuk kampanye perdamaian yang mengedepankan nilai toleransi dan kerukunan antar umat;
   - Menyelenggarakan acara yang mempertemukan berbagai kelompok sosial untuk membangun dialog antar masyarakat;
   - Melakukan kampanye bersama untuk mengurangi isu-isu sensitif yang dapat memicu perpecahan sosial;
   - Membangun mekanisme mediasi antar kelompok yang berseteru dengan melibatkan pihak netral dari komunitas;
4. Meningkatkan Keharmonisan Sosial Antar Kelompok Masyarakat
   - Mengadakan kegiatan sosial dan budaya yang mengedepankan gotong royong di antara berbagai kelompok masyarakat;
   - Mendorong keterlibatan komunitas dalam proyek-proyek sosial yang memiliki dampak positif bagi masyarakat luas;
   - Menyediakan ruang publik yang nyaman untuk kegiatan interaksi sosial yang melibatkan semua elemen masyarakat;
   - Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga keagamaan dalam membina hubungan antarumat beragama dengan pendekatan yang lebih inklusif;
   - Melibatkan kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan keberagaman suara dan kepentingan terakomodasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Meningkatkan Program Penyuluhan tentang Nilai Kebangsaan
   - Menyediakan pelatihan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar memperkuat semangat kebangsaan;
   - Mengadakan kampanye kebangsaan yang mengedepankan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa;
   - Mengembangkan kurikulum pendidikan di sekolah yang mengajarkan nilai-nilai sosial, toleransi, dan keadilan;
   - Melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan kegiatan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air;
   - Menyelenggarakan lomba atau kegiatan kreatif yang bertemakan nasionalisme dan kerukunan antar masyarakat.

H. Peningkatan kualitas ketahanan sosial dan budaya masyarakat

Penting untuk memastikan akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak sebagai bagian integral dalam mencapai ketahanan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu diberikan perhatian khusus untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusivitas sehingga semua segmen masyarakat dapat mengalami manfaat pembangunan secara adil.

Upaya ini mencakup penguatan jaringan komunitas, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan keterampilan dan kapasitas masyarakat. Dalam konteks budaya berkelanjutan, mendorong pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal sambil mendorong inovasi dan kreativitas yang memperkuat identitas kota.

Dalam jangka menengah, beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan adalah

1. Pemberdayaan Komunitas
   - Memperkuat Kepemimpinan Komunitas melalui pelatihan kepemimpinan untuk pemimpin komunitas guna meningkatkan keterampilan manajerial dan kemampuan mereka dalam membangun dan memelihara hubungan harmonis;
   - Melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan melalui inisiatif partisipatif seperti musyawarah desa dan konsultasi publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Promosi Kerukunan dan Toleransi
   - Mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya;
   - Melakukan kampanye yang mempromosikan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan persatuan melalui media sosial, radio, dan acara komunitas;
   - Mengadakan festival budaya tahunan yang menampilkan keragaman budaya lokal untuk mempererat hubungan antar kelompok masyarakat.
3. Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan Sosial
   - Mengembangkan Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas;
   - Inkubator Bisnis Sosial untuk mendukung kewirausahaan sosial dan proyek-proyek yang memiliki dampak sosial positif.
4. Pembangunan Infrastruktur Sosial
   - Pembangunan Fasilitas Komunitas;
   - Memperluas pusat kegiatan masyarakat di berbagai wilayah yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial, budaya, dan olahraga;
   - Mengembangkan ruang terbuka hijau seperti taman kota dan lapangan olahraga untuk mendorong interaksi sosial dan rekreasi.
5. Penggunaan Teknologi untuk Pemberdayaan Sosial
   - Membangun sistem informasi yang mengintegrasikan data sosial untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program sosial;
   - Meningkatkan pelatihan literasi digital bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi.
6. Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Positif
   - Meluncurkan kampanye yang mempromosikan nilai-nilai kesopanan, kepedulian, dan solidaritas antar warga;
   - Mengintegrasikan edukasi karakter dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan nilai-nilai positif sejak dini.
   - Memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial;
   - Meningkatkan jumlah penghargaan untuk inisiatif-inisiatif sosial yang sukses dan inspiratif, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.3 Keterkaitan Permasalahan dengan Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi Kota Madiun saat ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai isu yang berkembang baik di tingkat lokal maupun global. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mengidentifikasi sejumlah tantangan seperti penurunan kualitas lingkungan, keterbatasan ruang terbuka hijau, serta peningkatan emisi dari sektor transportasi dan permukiman. Isu-isu tersebut selaras dengan isu global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketahanan terhadap bencana, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Di tingkat nasional, isu strategis seperti transformasi ekonomi hijau, penguatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas yang harus direspons secara kontekstual oleh pemerintah daerah. Pada tingkat regional, integrasi antarwilayah dan pemerataan pembangunan menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan ketimpangan antar daerah. Oleh karena itu, isu strategis Kota Madiun dirumuskan sebagai respons terhadap keseluruhan permasalahan dan isu di berbagai level, guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan eksternal dan internal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 74 Perumusan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi tenaga kerja yang besar, karena kelompok usia produktif mendominasi.	Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang pendidikan. SPM terkait proporsi guru dengan kualifikasi minimal S1/DIV	Peningkatan kualitas dan daya saing	Demografi Global	Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)	Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas	Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas internasional melalui penguasaan IPTEK
	Angka Melek Huruf di usia produktif belum 100 %		Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%)			
	Kualitas literasi siswa perlu ditingkatkan					
	Minat Baca Masyarakat masih belum optimal					
	Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melambat					
	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang berpendidikan tinggi masih belum optimal					
	Masih ada Balita Kurang Gizi dan stunting					
	Masih terdapat kasus KLB DBD					
	Angka kematian bayi 4,5/1000 kelahiran hidup					
Sektor Industri Pengolahan Kota Madiun memiliki potensi pengembangan yang besar karena kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan terhadap PDRB yang cenderung stagnan	Peningkatan stabilitas dan daya saing ekonomi	Konstelasi Perdagangan Global	Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Peningkatan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
	Daya saing daerah belum optimal		Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7
Kota Madiun mendukung sebagai daerah *hinterland* karena memiliki potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.	Belum ada pasar yang sesuai standar		Pertumbuhan Kelas Menengah			
	Kualitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Industri Kecil belum optimal		Jumlah *middle* dan *upper income class* lebih dari 90% (8,8 miliar)	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi		
	Laju Inflasi Kota Madiun rawan mengalami fluktuasi		Geopolitik dan Geo ekonomi -Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan	
	Ketimpangan pendapatan semakin melebar		-kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71%			
	Peningkatan kualitas pariwisata daerah sesuai dengan rencana pengembangan dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Madiun			Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata		
	4,38% penduduk masih di bawah garis kemiskinan					
	kesejahteraan masyarakat masih harus ditingkatkan					
	Nilai dan iklim investasi masih perlu ditingkatkan		Pemanfaatan Luar Angkasa -Ekonomi Antariksa			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7
	Rasio pendapatan petani dengan produksi		Persaingan Sumber Daya Alam	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan petani	
	Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) belum optimal		Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA			
	Kesejahteraan Petani dan Peternak perlu ditingkatkan					
	Tingkat konsumsi makan ikan masih belum optimal			Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut		
Potensi tenaga kerja yang besar, karena kelompok usia produktif mendominasi.	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi		Urbanisasi Dunia	Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010 2022 masih relatif tertinggal	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan	
			Penduduk perkotaan 65% Peranan Produk Domestik Bruto (PDB) 70%			
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Madiun perlu ditingkatkan		Perkembangan Teknologi			
			Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7
Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2˚ atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun	Belum adanya pelayanan angkutan umum massal berbasis *Buy The Service* (BTS)	Pengelolaan pencemaran lingkungan (air, tanah udara)	Perubahan Iklim	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan yang modern, dan lingkungan hidup berkelanjutan
	Kualitas kinerja infrastruktur perkotaan belum optimal		Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana			
	Masih perlunya peningkatan kualitas rumah layak huni					
	Rumah tangga yang terlayani sanitasi layak masih belum optimal					
	Kualitas infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, dan jaringan air perlu ditingkatkan					
	Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas RTH	Pelestarian RTH dan keanekaragaman hayati		Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan		
	Kualitas Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) belum optimal					
	Penanganan Sampah yang berasal dari Rumah Tangga masih rendah.					
	Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas RTH					
	Volume sampah yang ada di TPA hampir mendekati kapasitas maksimal					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7
Mayoritas wilayah Kota Madiun memiliki struktur, karakteristik lahan, dan potensi berupa kandungan Aluvium serta jenis tanah kategori Alluvial. Kondisi tanah tersebut memiliki kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air	Adanya potensi bencana di Kota Madiun yang memiliki kategori resiko sedang, Kota Madiun masih berpotensi bencana	Peningkatan mitigasi perubahan iklim kota				
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban yang terus meningkat	Masih terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak.	Peningkatan ketertiban dan keamanan kota	Demografi Global	Kapasitas dan dan penegakan hukum masih lemah	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Peningkatan Trantibumlinmas dan Harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat
	Masih memiliki potensi terjadinya konflik sosial		Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%)			
	Masih terdapat kejadian kriminal di Kota Madiun					
	Penegakan Perda dan Perwal di masyarakat perlu ditingkatkan			Demokratisasi belum optimal		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang terus meningkat	Nilai SPBE Kota Madiun masih sebesar 4,57	Peningkatan implementasi *good governance* dalam tata kelola dan pelayanan publik	Tata Kelola Keuangan Global	Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis *Smart* dan *World Class Government*
	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di perangkat daerah perlu ditingkatkan		Pergeseran Kebijakan Fiskal, CBD, dan Fintech	Tata Kelola pemerintahan belum optimal		
	Capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih belum optimal					
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dioptimalkan					
	belum ada kerjasama antar kota antar negara					
	Capaian SAKIP Kota Masih Perlu ditingkatkan					
	Indeks Profesionalitas ASN sebesar 84,95 belum optimal					Peningkatan pelayanan publik yang berintegritas dan perilaku anti korupsi
	Wilayah Bebas Korupsi masih terbatas					
	capaian indeks kualitas kebijakan belum optimal					
	Indeks Inovasi Daerah masih perlu ditingkatkan, Capaian Tahun 2022 sebesar 53,96 dan meningkat pada Tahun 2024 sebesar 67,08					Peningkatan partisipasi dan inovasi masyarakat dalam pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7
Kota Madiun mendukung sebagai daerah *hinterland* karena memiliki potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.	pekerja yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan perlu dioptimalkan	Peningkatan kualitas dan daya saing	Urbanisasi Dunia	Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas	Peningkatan kualitas ketahanan sosial dan budaya masyarakat
	Masih perlunya peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di berbagai bidang		Penduduk perkotaan 65% Peranan Produk Domestik Bruto (PDB) 70%			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam hal ini, keterkaitan antara permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Madiun dengan isu-isu strategis daerah menjadi sangat penting. Isu-isu ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga mencerminkan tantangan strategis yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai permasalahan daerah dan bagaimana permasalahan tersebut berkaitan dengan isu-isu strategis daerah menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Lebih lanjut mengenai keterkaitan permasalahan daerah dengan isu strategis daerah tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 75 Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis Kota Madiun

PERMASALAHAN	Permasalahan Pokok	ISU STRATEGIS RPJMD Tahun 2025 - 2029
1	2	3
Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang pendidikan. SPM terkait proporsi guru dengan kualifikasi minimal S1/DIV	Permasalahan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas global	1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas internasional melalui penguasaan IPTEK
Angka Melek Huruf di usia produktif belum 100 %		
Kualitas literasi siswa perlu ditingkatkan		
Minat Baca Masyarakat masih belum optimal		
Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melambat		
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang berpendidikan tinggi masih belum optimal		
Masih ada Balita Kurang Gizi dan stunting		
Masih terdapat kasus KLB DBD		
Angka kematian bayi 4,5/1000 kelahiran hidup		
Masih terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak.		
kesejahteraan masyarakat masih harus ditingkatkan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
Masih perlunya peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di berbagai bidang		
4,38% penduduk masih di bawah garis kemiskinan	Belum optimalnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	
Kontribusi sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan terhadap PDRB yang cenderung stagnan	Permasalahan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	2. Peningkatan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Daya saing daerah belum optimal		
Belum ada pasar yang sesuai standar		
Kualitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Industri Kecil belum optimal		
Laju Inflasi Kota Madiun rawan mengalami fluktuasi		
Ketimpangan pendapatan semakin melebar		
Peningkatan kualitas pariwisata daerah sesuai dengan rencana pengembangan dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Madiun		
Nilai dan iklim investasi masih perlu ditingkatkan		
Kesejahteraan Petani dan Peternak perlu ditingkatkan.		
Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) belum optimal		
Tingkat konsumsi makan ikan masih belum optimal		
Rasio pendapatan petani dengan produksi		
Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi		
pekerja yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan perlu dioptimalkan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Madiun perlu ditingkatkan		
Belum adanya pelayanan angkutan umum massal berbasis *Buy The Service* (BTS)	Kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup belum optimal	3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan yang modern, dan lingkungan hidup berkelanjutan
Kualitas kinerja infrastruktur perkotaan belum optimal		
Masih perlunya peningkatan kualitas rumah layak huni		
Rumah tangga yang terlayani sanitasi layak masih belum optimal		
Kualitas infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, dan jaringan air perlu ditingkatkan		
Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas RTH		
Kualitas Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) belum optimal		
Penanganan Sampah yang berasal dari Rumah Tangga masih rendah.		
Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas RTH		
Volume sampah yang ada di TPA hampir mendekati kapasitas maksimal		
Adanya potensi bencana di Kota Madiun yang memiliki kategori resiko sedang, Kota Madiun masih berpotensi bencana		
Masih terdapat kejadian kriminal di Kota Madiun	Rendahnya efektivitas implementasi kebijakan perlindungan sosial dan keadilan inklusif di tingkat masyarakat.	4. Peningkatan Trantibumlinmas dan Harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat
Penegakan Perda dan Perwal di masyarakat perlu ditingkatkan		
Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dioptimalkan	Permasalahan Tata Kelola dan Pemerintahan	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis Smart dan World Class Government
Capaian SAKIP Kota Masih Perlu ditingkatkan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di perangkat daerah perlu ditingkatkan		
Capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih belum optimal		
capaian indeks kualitas kebijakan belum optimal		
Indeks Profesionalitas ASN sebesar 84,95 belum optimal		
belum ada kerjasama antar kota antar negara		
Wilayah Bebas Korupsi masih terbatas	Masih terbatasnya profesionalisme dan integritas aparatur negara	6. Peningkatan pelayanan publik yang berintegritas dan perilaku anti korupsi
Nilai SPBE Kota Madiun masih sebesar 4,57		
Indeks Inovasi Daerah masih perlu ditingkatkan, Capaian Tahun 2022 sebesar 53,96 dan meningkat pada Tahun 2024 sebesar 67,08	Rendahnya kapasitas dan ekosistem inovasi daerah secara menyeluruh.	7. Peningkatan partisipasi dan inovasi masyarakat dalam pembangunan
Masih memiliki potensi terjadinya konflik sosial	Permasalahan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	8. Peningkatan kualitas ketahanan sosial dan budaya masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi

Sebagai panduan utama dalam pembangunan, visi menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Visi ini harus selaras dengan arah pembangunan jangka panjang daerah serta mampu merespons berbagai isu dan tantangan strategis yang perlu diselesaikan dalam periode jangka menengah. Selain itu, visi harus konsisten dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk memastikan keberlanjutan arah pembangunan. Dengan demikian, visi berfungsi sebagai pendorong semangat bagi seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk bekerja secara optimal demi mencapai tujuan bersama. Perumusan Visi Kota Madiun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan situasi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang ada, serta isu-isu strategis yang telah dibahas sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, Visi Kota Madiun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

Terwujudnya Pemerintahan Maju Bersih Berwibawa Bersama Masyarakat Membangun Kota Mendunia

Visi RPJMD Kota Madiun 2025-2029 dirancang dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Visi ini terbagi menjadi lima pokok visi, melalui lima pokok visi ini diharapkan Kota Madiun dapat mencapai pemerintahan yang maju, bersih, berwibawa, dan dapat berkolaborasi aktif dengan masyarakat dalam mewujudkan Madiun, kota yang mendunia:



Gambar 3. 1 Pokok Visi RPJMD Kota Madiun 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Visi RPJMD Kota Madiun 2025-2029 disusun agar sesuai dengan visi RPJPD Kota Madiun 2025-2045, visi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029, dan visi RPJP Provinsi Jawa Timur 2025-2045. Untuk memastikan keselarasan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, penjelasan visi harus menunjukkan bagaimana RPJMD Kota Madiun terhubung dengan RPJPD Kota Madiun, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN. Keterkaitan visi Kota Madiun dengan RPJPD Kota Madiun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMN dapat dilihat dalam tabel berikut.



Gambar 3. 2 Keterkaitan Visi dengan RPJMD dan RPJPD

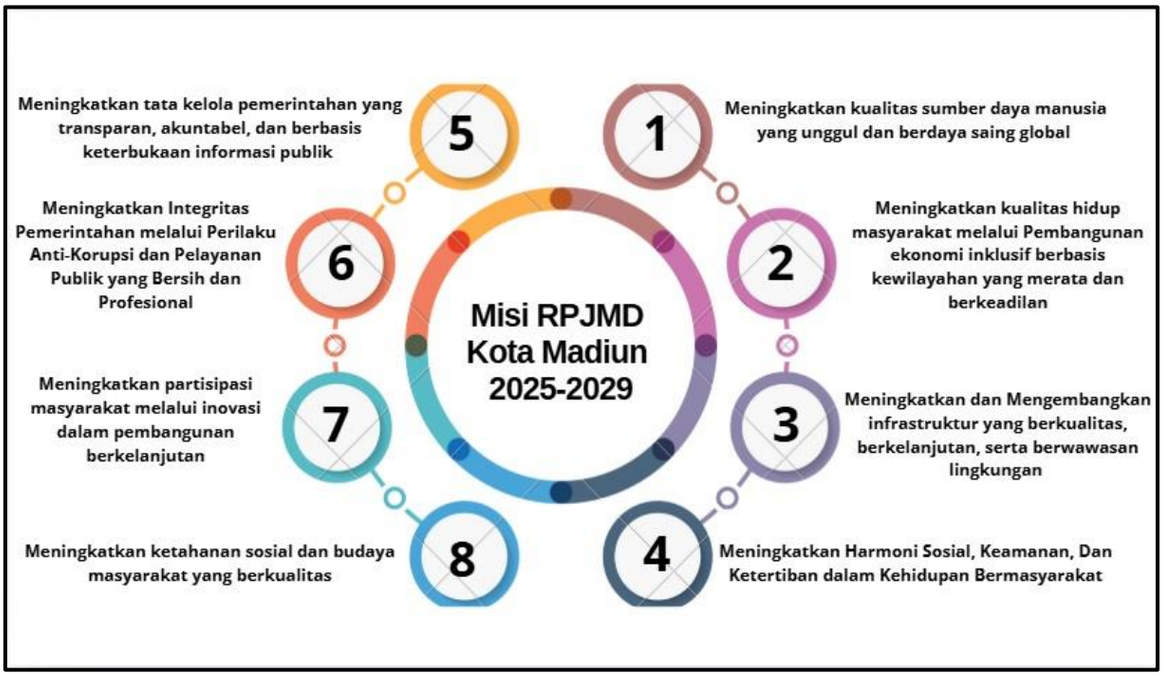
Visi “Membangun Kota Mendunia” selaras dengan semangat untuk menjadikan Madiun sebagai kota yang diakui secara global, sejalan dengan indikator *Global Power City Index* (GPCI) yang menilai daya saing global kota berdasarkan dimensi ekonomi, sosial, interaksi budaya, kelayakan hidup, lingkungan, serta aksesibilitas. Upaya menjadikan Madiun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan budaya dapat diarahkan pada penguatan inovasi ekonomi lokal, peningkatan kualitas infrastruktur publik, promosi budaya lokal di tingkat internasional, serta pengembangan tata kelola kota yang transparan dan berorientasi pada layanan publik. Dengan memenuhi indikator-indikator dalam GPCI, seperti kemampuan menarik wisatawan asing, kerjasama internasional seperti *sister city*, kualitas transportasi, serta daya tarik budaya, Kota Madiun berpotensi memperkuat posisinya di kancah kota-kota dunia yang berdaya saing tinggi.

3.1.2 Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Madiun 2025-2029, terdapat 8 (delapan) misi yang menjadi fokus pembangunan Kota Madiun. Rumusan misi ini menggambarkan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Rumusan misi ini disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang perlu ditempuh dalam mencapai visi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berikut merupakan Misi dalam RPJMD Kota Madiun 2025-2029:



Gambar 3. 3 Misi RPJMD Kota Madiun 2025-2029

Pemerintah Kota Madiun menetapkan delapan misi strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 sebagai komitmen menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Selanjutnya, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan juga menjadi prioritas penting. Demi menciptakan masyarakat yang harmonis, misi keempat menitikberatkan pada peningkatan harmoni sosial, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang tata kelola pemerintahan, Kota Madiun berkomitmen untuk mengelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan berbasis keterbukaan informasi publik. Misi berikutnya adalah memperkuat integritas pemerintah melalui perilaku anti-korupsi dan pelayanan publik yang bersih serta profesional. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan juga didorong melalui inovasi berkelanjutan. Terakhir, pemerintah berfokus pada peningkatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat agar tercipta kehidupan yang berkualitas secara menyeluruh. Keseluruhan misi ini mencerminkan arah pembangunan Kota Madiun yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kemajuan serta kesejahteraan masyarakatnya. Lebih lanjut, berikut penjelasan masing-masing misi dalam RPJMD Kota Madiun 2025-2029.

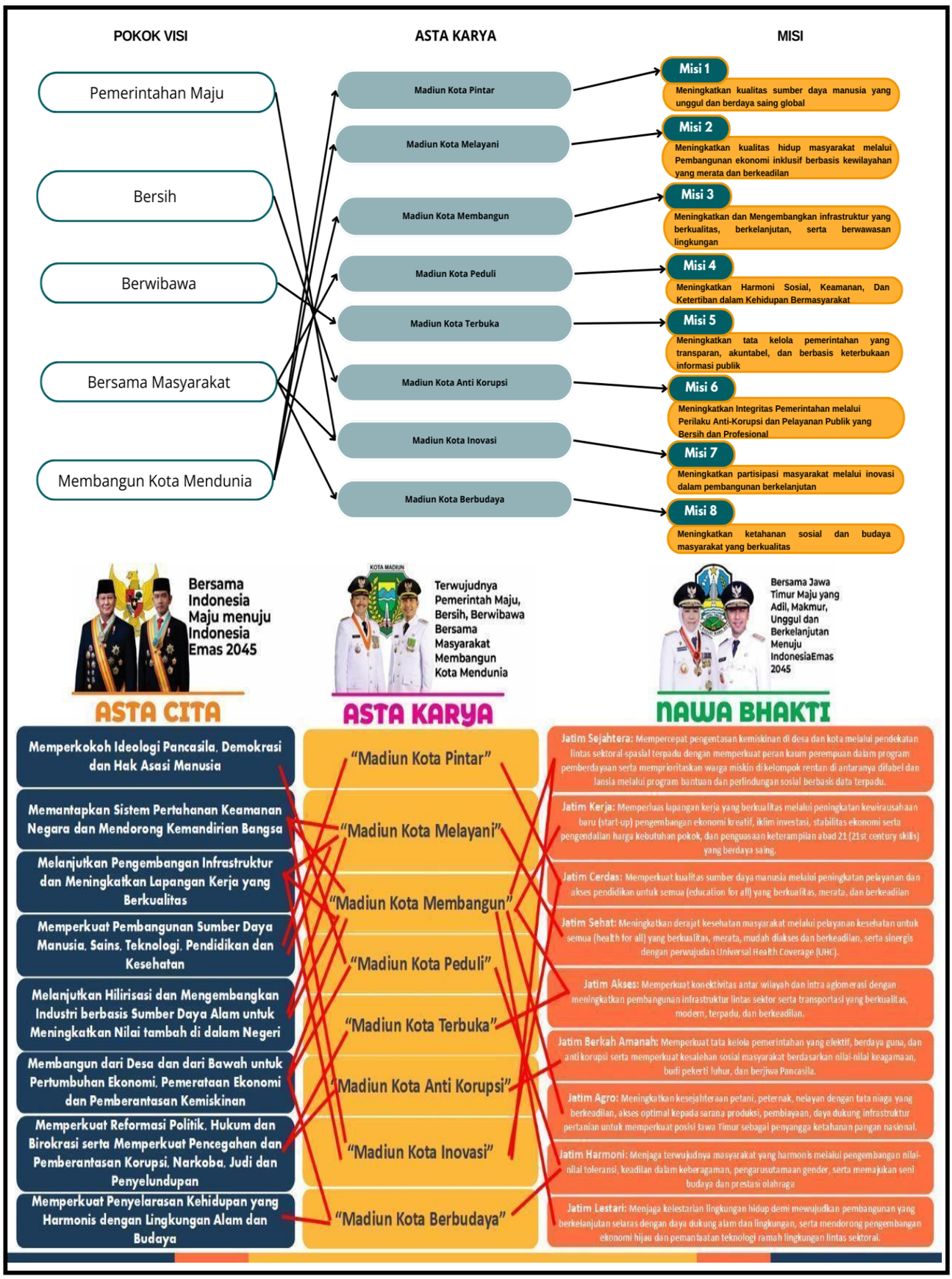
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 1 Penjelasan Misi RPJMD Kota Madiun 2025-2029

ISU STRATEGIS	MISI	PENJELASAN MISI
1	2	3
1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas internasional melalui penguasaan IPTEK	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global	Meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan kompetensi masyarakat agar mampu bersaing di tingkat global.
2. Peningkatan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan.	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dengan memberdayakan potensi wilayah dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan yang modern, dan lingkungan hidup berkelanjutan	3. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan	Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.
4. Peningkatan Trantibumlinmas dan Harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat	4. Meningkatkan harmoni sosial, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	Menciptakan masyarakat yang hidup rukun, harmonis, dan menjunjung tinggi keteraturan sosial, serta memastikan ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis Smart dan World Class Government	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis keterbukaan informasi publik	Memastikan transparansi dalam pemerintahan agar masyarakat dapat mengawasi kinerja serta mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.
6. Peningkatan pelayanan publik yang berintegritas dan perilaku anti korupsi	6. Meningkatkan integritas pemerintahan dengan budaya anti-korupsi dan pelayanan publik yang bersih dan profesional	Menerapkan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan bebas dari korupsi dengan standar internasional.
7. Peningkatan partisipasi dan inovasi masyarakat dalam pembangunan	7. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi dalam pembangunan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam inovasi pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang.
8. Peningkatan kualitas ketahanan sosial dan budaya masyarakat	8. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat yang berkualitas	Memperkuat jati diri, kearifan lokal, dan budaya nasional untuk menghadapi tantangan sosial serta mempertahankan identitas bangsa.

Misi disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan strategis, baik yang bersifat eksternal maupun internal, yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pembangunan daerah. Misi ini dibuat untuk memberikan gambaran jelas mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan visi. Selain itu, perumusan misi juga memperhatikan janji politik kepala daerah yang tercermin dalam Asta Karya, yang akan menjadi dasar dalam setiap misi yang dirumuskan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 4 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Asta Cita, Asta Karya, Nawa Bhakti dan Rumusan Misi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pokok-pokok visi Kota Madiun, yang mencakup Pemerintahan Maju, Bersih, Berwibawa, Bersama Masyarakat, dan Membangun Kota Mendunia, menjadi dasar bagi implementasi program prioritas Asta Karya yang terdiri dari delapan pilar pembangunan, seperti Madiun Kota Pintar, Madiun Kota Melayani, dan lainnya. Setiap pilar Asta Karya memiliki keterkaitan langsung dengan misi RPJMD Kota Madiun 2025-2029. Madiun Kota Pintar mendukung Misi 1 dalam meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing global, sementara Madiun Kota Anti Korupsi selaras dengan Misi 6 untuk meningkatkan integritas pemerintahan melalui perilaku anti korupsi dan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Selain itu, konsep pembangunan berkelanjutan dalam Asta Karya, seperti yang tercermin dalam Madiun Kota Inovasi dan Madiun Kota Berbudaya, sejalan dengan Misi 7 dan Misi 8 untuk memperkuat ketahanan sosial dan budaya. Dengan demikian, pokok visi, Asta Karya, dan misi RPJMD saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan Kota Madiun yang maju, inklusif, dan berdaya saing global.

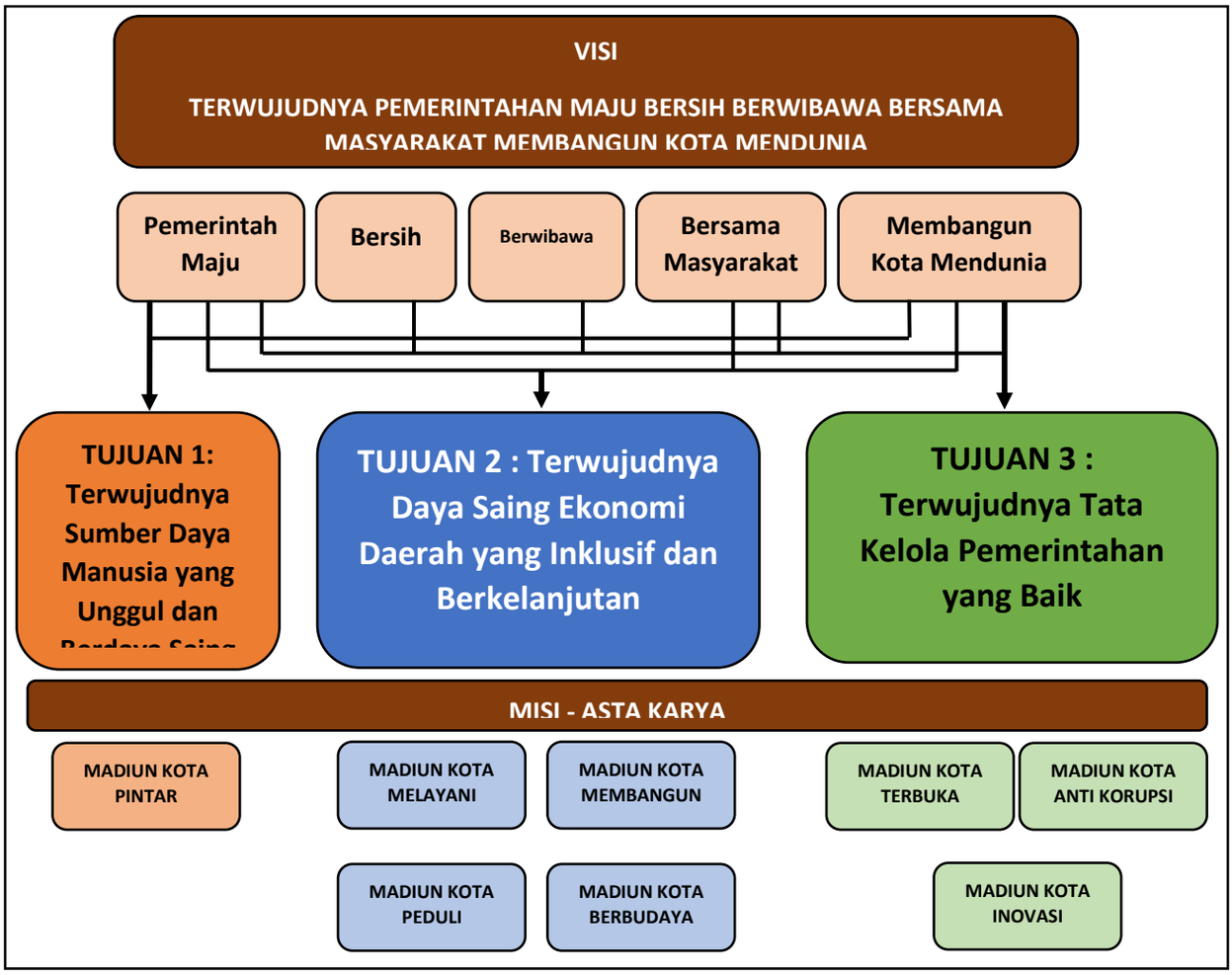
3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk pecapaian Visi Pemerintah Kota Madiun tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan masing-masing misi. Tujuan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan penjelasan visi maka fokus tujuan untuk 5 (lima) tahun kedepan, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global; Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing global dilakukan melalui misi Madiun Kota Pintar.
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif, produktivitas sektor unggulan, Stabilitas Perekonomian daerah, dan perluasan Lapangan Kerja. Untuk mewujudkan tujuan ini dilakukan melalui misi Madiun Kota Melayani, Madiun Kota Membangun, Madiun Kota Peduli dan Madiun Kota Berbudaya;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, dan pelayanan publik profesional berbasis Smart dan World Class Government. Tujuan ini akan diwujudukan melalui misi Madiun Kota Terbuka, Madiun Kota Anti Korupsi dan Madiun Kota Inovasi.

Adapun keterkaitan antara penjelasan visi, tujuan dan misi adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 5 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, tujuan dan asta karya

1. Tujuan dan Sasaran Misi Madiun Kota Pintar

Meningkatnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global merupakan salah satu tujuan yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Fokus dalam tujuan ini adalah peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk semua. Untuk itu, tujuan dan sasaran Madiun Kota Pintar ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

S1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat berstandar global;

S2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat berstandar international;

S3. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan;

S4. Menurunnya Pengangguran;

S5. Peningkatan Daya Beli Mayarakat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 6 Kerangka Logis Misi Madiun Kota Pintar

2. Tujuan dan Sasaran Misi Madiun Kota Melayani

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat fokus Pemerintah Kota Madiun dalam misi Madiun Kota Melayani adalah peningkatan daya saing, pemerataan pembangunan ekonomi, peningkatan produktivitas sektor unggulan, menjaga stabilitas perekonomian daerah, dan peningkatan perluasan lapangan kerja. Untuk itu, tujuan dan sasaran Madiun Kota Melayani ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan 2 : Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

S6. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Sektor Strategis;

S7. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi;

S8. Peningkatan Kualitas Investasi;

S9. Menurunnya Kemiskinan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 7 Kerangka Logis Misi Madiun Kota Melayani

3. Tujuan dan Sasaran Misi Madiun Kota Membangun

Madiun Kota Membangun berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, kualitas infrastruktur daerah dan peningkatan ketahanan dan mitigasi bencana. Madiun Kota Membangun merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi Inklusif, produktivitas sektor unggulan, stabilitas perekonomian daerah, dan perluasan lapangan kerja akan terwujud. Untuk itu, tujuan dan sasaran Madiun Kota Membangun ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan 2 : Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

S10. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;

S11. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

S12. Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 8 Kerangka Logis Misi Madiun Kota Membangun

4. Tujuan dan Sasaran Misi Madiun Kota Peduli

Madiun Kota Peduli adalah salah satu upaya untuk mencapai terwujudnya tujuan pembangunan ekonomi Inklusif, produktivitas sektor unggulan, stabilitas perekonomian daerah, dan perluasan lapangan kerja Kualitas Lingkungan dan mitigasi bencana. Dalam upaya untuk pencapaian tujuan tersebut maka fokus dari Madiun Kota Peduli adalah meningkatkan harmoni sosial, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat Untuk itu, tujuan dan sasaran Madiun Kota Melayani ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan 2 : Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

S13. Terwujudnya kondusivitas dan stabilitas daerah.



Gambar 3. 9 Kerangka Logis Misi Madiun Kota Peduli

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Tujuan dan Sasaran Misi Madiun Kota Terbuka

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, dan pelayanan publik profesional berbasis Smart dan World Class Government, Madiun Kota Terbuka difokuskan pada akuntabilitas kinerja dan keuangan serta peningkatan Kerjasama daerah. Untuk itu, tujuan dan sasaran Madiun Kota Terbuka ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

S14. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;



Gambar 3. 10 Kerangka Logis Misi Madiun Kota Terbuka

6. Tujuan dan Sasaran Madiun Kota Anti Korupsi

Madiun Kota Anti Korupsi merupakan upaya Pemerintah Kota Madiun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, dan pelayanan publik profesional berbasis Smart dan World Class Government. Madiun Kota Anti Korupsi difokuskan pada mewujudkan pemerintah yang bersih, peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan dan peningkatan pelayanan publik berbabis digital. Untuk itu, tujuan dan sasaran pembangunan Madiun Kota Anti Korupsi ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

S15. Pemerintahan Bersih Korupsi;

S16. Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Daerah;

S17. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima dan Profesional berbasis Digital.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 11 Kerangka Logis Misi Madiun Kota Anti Korupsi

7. Tujuan dan Sasaran Madiun Kota Inovasi

Madiun Kota Inovasi dengan fokus pada peningkatan inovasi daerah merupakan upaya Pemerintah Kota Madiun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, dan pelayanan publik profesional berbasis Smart dan World Class Government. Untuk itu, tujuan dan sasaran pembangunan Madiun Kota Inovasi ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

S18. Peningkatan Inovasi Daerah.



Gambar 3. 12 Kerangka Logis Misi Madiun Kota Inovasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Tujuan dan Sasaran Madiun Kota Berbudaya

Madiun Kota Berbudaya difokuskan pada peningkatan wawasan kebangsaan dan toleransi bermasyarakat. Pada peningkatan inovasi daerah merupakan upaya Pemerintah Kota Madiun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, dan pelayanan publik profesional berbasis Smart dan World Class Government. Untuk itu, tujuan dan sasaran pembangunan Madiun Kota Inovasi ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan 2 : Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

S19. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Bermasyarakat.



Gambar 3. 13 Kerangka Logis Misi Madiun Kota Berbudaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 2 Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2025-2030

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE	TARGET CAPAIAN					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MISI 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global										
T1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	84,51	84,51 – 84,78	84,60 – 85,96	85,00 – 86,32	85,00 – 86,32	85,48 – 86,73	85,48 – 86,73
S1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat berstandar global	Literasi Numerasi SD dan SMP	Nilai	87,78	88,15	88,58	89,24	89,84	90,18	90,49
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,11	12,15	12,36	12,49	12,67	12,86	13,00
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,54	14,57	14,60	14,67	14,75	14,89	15,00
S2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat berstandar international	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,67	75,74	76,00	76,27	76,54	76,79	77,03
S3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	95,26	95,50	95,82	96,15	96,35	96,60	96,79
S4	Menurunnya pengangguran	Produktifitas Tenaga Kerja	Rupiah (juta)	112,88	114,73	116,61	118,52	120,47	122,44	124,45
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,30	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	3,94 – 3,28
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,60	70,70	70,90	71,10	71,60	72,13	72,65
S5	Peningkatan Daya Beli Mayarakat	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	17.518	17.720	18.130	18.450	18.770	19.320	19.450

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan										
T2	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	4,26	4,26	4,30	4,36	4,45	4,51	4,60
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28
		Indeks Gini	Skor	0,435	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394
S6	Meningkatnya Daya Saing ekonomi sektor strategis	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (ADHK)	%	5,4	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,95 – 7,00
		Rasio PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	%	23,59	23,59	23,61	23,83	24,15	24,42	24,81
		Rasio PDRB Sektor Jasa (ADHK)	%	21,16	21,20	21,30	21,41	21,53	21,75	21,84
		Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	14,46	14,46	14,51	14,62	14,70	14,75	14,81
S7	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Tingkat Inflasi	%	1,31	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
S8	Peningkatan Kualitas Investasi	*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*	Skor	3,75	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14
S9	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	4,38	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	3,90-3,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MISI 3: Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan										
T2	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	4,26	4,26	4,30	4,36	4,45	4,51	4,60
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28
		Indeks Gini	Skor	0,435	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394
S10	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur	Skor	98,62	98,70	98,80	99,00	99,15	99,20	99,20
S11	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	62,21	66,23	66,31	66,39	66,47	66,55	66,63
S12	Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana (H&V 2021)	Skor	76,88	75,60	73,75	72,00	70,32	68,73	67,20
MISI 4: Meningkatkan harmoni sosial, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat										
T2	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	4,26	4,26	4,30	4,36	4,45	4,51	4,60
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28
		Indeks Gini	Skor	0,435	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394
S13	Terwujudnya kondusivitas dan stabilitas daerah	Indeks Rasa Aman	Skor	84,16	84,52	84,93	85,13	85,46	85,84	86,64
		Indeks Ketenteraman	Skor	84,23	84,72	85,34	85,81	86,24	86,67	87,12
MISI 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis keterbukaan informasi publik										
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	91,95	91,95	92,50	93,30	94,16	94,70	95,05

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S14	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Opini BPK terhadap LKPD	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP Kota Madiun	Nilai	81,03	81,03	81,34	81,52	81,80	82,01	82,32
MISI 6: Meningkatkan integritas pemerintahan melalui perilaku anti korupsi dan pelayanan publik yang bersih dan profesional										
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	91,95	91,95	92,50	93,30	94,16	94,70	95,05
S15	Pemerintahan Bersih Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	77,07	80,15	80,42	80,93	81,35	81,71	82,44
		Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP)	Nilai	96	96,05	96,44	96,92	97,21	97,40	97,54
		Persentase Unit Kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	%	20	20	40	40	60	60	80
S16	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Skor	68,67	68,67	70,39	71,14	72,26	73,27	74,50
		Indeks Reformasi Hukum	Skor	91,02	91,02	91,15	91,53	92,07	92,44	93,14
S17	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang prima dan profesional berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun	Skor	88,74	88,74	89,25	89,91	90,35	91,27	91,89

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Indeks Masyarakat Digital	skor	49,86	49,86	49,92	50,72	50,92	51,35	51,74
		Indeks Profesionalitas ASN	skor	84,95	84,95	84,95	85.00	85.10	85.15	85.20
MISI 7: Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi dalam pembangunan berkelanjutan										
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	91,95	91,95	92,50	93,30	94,16	94,70	95,05
S18	Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Skor	67,09	67,09	68,43	69,72	71,01	71,53	72,11
MISI 8: Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat yang berkualitas										
T2	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	4,26	4,26	4,30	4,36	4,45	4,51	4,60
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28
		Indeks Gini	Skor	0,435	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394
S19	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Bermasyarakat	Indeks Kerukunan	Skor	78,04	78,20	84,80	85,20	85,80	86,20	86,80

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.2 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan merupakan tahap awal dalam menyusun berbagai alternatif strategi pembangunan serta sebagai instrumen evaluasi terhadap alternatif tersebut. Strategi pembangunan mencakup serangkaian program yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi diwujudkan dalam bentuk pernyataan yang menjelaskan metode pencapaian tujuan dan sasaran, yang selanjutnya diperjelas melalui arah kebijakan. Pemerintah Kota Madiun merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, serta target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara efektif dan efisien dalam kurun waktu lima tahun. Dalam konteks ini, arsitektur perencanaan pembangunan daerah mencakup perencanaan strategis yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta perencanaan operasional yang berfokus pada pencapaian kinerja layanan dalam setiap sektor pemerintahan.

Perencanaan yang strategis bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang konkret. Setiap aspek yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan sebagai elemen strategis. Sementara itu, perencanaan operasional difokuskan pada implementasi tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD secara lebih terperinci, yang disusun berdasarkan masing-masing misi dengan pendekatan berbasis urusan, baik urusan wajib maupun pilihan. Selanjutnya, arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan strategi yang dipilih agar tetap selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran dalam setiap periode perencanaan. Penetapan arah kebijakan juga menjadi acuan utama dalam pengaturan dan pelaksanaan strategi pada setiap tingkatan pemerintahan. Secara lebih rinci, strategi dan arah pembangunan Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Madiun 2025–2029

Visi : Terwujudnya Pemerintahan Maju Bersih Berwibawa Bersama Masyarakat Membangun Kota Mendunia

MISI/ TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1		2		3	
Misi 1: meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global					
T1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	S1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Berstandar Global	1	Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pendidikan, pengembangan budaya literasi dan numerasi, pemanfaatan teknologi serta penguatan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat
				2	Mengembangkan infrastruktur pendidikan yang modern dan sesuai standar global
				3	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang merata dan inklusif menuju keadilan global
				4	Meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan layanan kesehatan
		S2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Berstandar International	1	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM kesehatan berstandar internasional
				2	Mengembangkan fasilitas kesehatan dengan standar mutu dan keselamatan internasional
		S3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan peningkatan akses terhadap kesempatan yang setara.
		S4	Menurunnya pengangguran	1	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja berkualitas di sektor ekonomi daerah.
				2	Meningkatkan kepatuhan dan aksesibilitas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh segmen tenaga kerja
				3	Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja dalam sektor berkeahlian menengah dan tinggi
		S5	Peningkatan Daya Beli Masyarakat	1	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan keluarga
Misi 2: meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan					
T2	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	S6	Meningkatnya Daya Saing ekonomi sektor strategis	1	Meningkatkan nilai tambah sektor unggulan
				2	Mengembangkan daya saing sektor akomodasi, makanan, dan minuman melalui penguatan kapasitas usaha, kualitas layanan, dan promosi berbasis potensi lokal.
				3	Mengembangkan ekosistem UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1		2		3	
				4	Meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah non-pertanian
				5	Meningkatkan ekosistem digital dan teknologi informasi yang inklusif dan berkelanjutan.
		S7	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	1	Meningkatkan pengelolaan inflasi yang efektif dan penguatan ketahanan ekonomi lokal.
		S8	Peningkatan Kualitas Investasi	1	Meningkatkan efisiensi penggunaan modal dan produktivitas ekonomi
				2	Meningkatkan iklim investasi
				3	Meningkatkan kapasitas pendukung daya saing daerah
		S9	Menurunnya Kemiskinan	1	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan keluarga miskin serta memperluas akses perlindungan sosial
Misi 3: meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan					
T2	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	S10	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	1	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan
				2	Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah
		S11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup
		S12	Meningkatnya Ketahanan Dan Mitigasi Bencana	1	Meningkatkan ketahanan daerah
				2	Meningkatkan mitigasi bencana dan penanganan dampak perubahan iklim
Misi 4: meningkatkan harmoni sosial, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat					
T2	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	S13	Terwujudnya Kondusivitas Dan Stabilitas Daerah	1	Meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah
				2	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban
Misi 5: meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis keterbukaan informasi publik					
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	S14	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	1	Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
				2	Meningkatkan dan memperluas akses layanan keuangan melalui inklusi keuangan, pengembangan infrastruktur layanan, dan diversifikasi produk keuangan
				3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan anggaran
				4	Meningkatkan kualitas perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah
				5	Meningkatkan kompetensi ASN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1		2		3	
Misi 6: meningkatkan integritas pemerintahan melalui perilaku anti korupsi dan pelayanan publik yang bersih dan profesional					
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	S15	Pemerintahan Bersih Korupsi	1	Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan
				2	Meningkatkan pencegahan korupsi
				3	Meningkatkan wilayah birokrasi bebas korupsi
		S16	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Daerah	1	Meningkatkan kualitas kebijakan dan produk hukum daerah
		S17	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang prima dan profesional berbasis digital	1	Meningkatkan keterbukaan informasi publik
				2	Peningkatan literasi digital, pemerataan infrastruktur TIK, dan pemanfaatan layanan publik digital berkelanjutan
Misi 7: meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi dalam pembangunan berkelanjutan					
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	S18	Peningkatan Inovasi Daerah	1	Meningkatkan peran dan kreativitas masyarakat dalam proses inovasi pembangunan
				2	Mengembangkan ekosistem inovasi berbasis kolaborasi
Misi 8: meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat yang berkualitas					
T2	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	S19	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Dan Toleransi Bermasyarakat	1	Meningkatkan kerukunan sosial dan kestabilan sosial
				2	Meningkatkan edukasi wawasan kebangsaan dan budaya yang inklusif

Berdasarkan tabel 3.3 maka perumusan strategi pembangunan pada tahun 2025 – 2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pendidikan, pengembangan budaya literasi dan numerasi, pemanfaatan teknologi serta penguatan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat

   Strategi meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pendidikan yang berdaya saing global bertujuan menciptakan sumber daya manusia di sektor pendidikan yang mampu bersaing secara internasional. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar akan dilakukan secara optimal bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Selain itu, penguatan karakter tenaga pendidik dan peserta didik melalui pembudayaan literasi dan numerasi di lingkungan sekolah. Optimalisasi kolaborasi antar stakeholder pendidikan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Mengembangkan infrastruktur pendidikan yang modern dan sesuai standar global

   Strategi pengembangan infrastruktur pendidikan yang modern dan sesuai standar global bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mendukung proses pembelajaran abad ke-21. Pemerintah Kota Madiun berkomitmen membangun dan merevitalisasi sarana pendidikan dengan fasilitas yang representatif, termasuk ruang kelas digital, laboratorium berteknologi tinggi, dan akses internet yang merata di seluruh sekolah. Penerapan konsep green building dan smart school juga mulai diintegrasikan agar infrastruktur pendidikan ramah lingkungan sekaligus responsif terhadap kebutuhan masa depan. Melalui strategi ini, diharapkan kualitas pendidikan meningkat secara menyeluruh dan mampu mencetak lulusan yang kompeten di kancah global.

3. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang merata dan inklusif

   Strategi meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang merata dan terjangkau difokuskan untuk menciptakan keadilan dalam memperoleh layanan pendidikan. Pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah kota secara merata. Subsidi pendidikan dan program beasiswa ditingkatkan untuk membantu kelompok masyarakat kurang mampu. Dengan strategi ini, diharapkan angka partisipasi pendidikan meningkat di semua jenjang.

4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM kesehatan berstandar internasional

   Strategi peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM kesehatan berstandar internasional diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang mampu bersaing di tingkat global dan memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Pemerintah Kota Madiun mendorong pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesi, dan kemitraan dengan institusi pendidikan serta lembaga kesehatan internasional. Fasilitas pelatihan modern dan kurikulum berbasis kompetensi dikembangkan untuk menunjang penguasaan teknologi medis terkini dan standar pelayanan global. Dengan strategi ini, diharapkan kualitas layanan kesehatan meningkat secara signifikan, serta tenaga kesehatan lokal memiliki daya saing tinggi di dunia kerja internasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Mengembangkan fasilitas kesehatan dengan standar mutu dan keselamatan internasional

   Strategi pengembangan fasilitas kesehatan dengan standar mutu dan keselamatan internasional difokuskan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kota Madiun berupaya membangun dan meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas, dengan mengadopsi standar akreditasi internasional. Teknologi medis mutakhir, sistem manajemen mutu, serta prosedur keselamatan pasien diterapkan secara konsisten. Selain itu, pengawasan dan evaluasi rutin dilakukan untuk menjaga standar pelayanan. Dengan strategi ini, diharapkan fasilitas kesehatan di Kota Madiun mampu memberikan pelayanan kelas dunia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan daerah.

6. Meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan layanan kesehatan

   Strategi meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan layanan kesehatan bertujuan menjamin hak seluruh warga untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pemerintah berupaya membangun dan memperluas fasilitas kesehatan hingga ke kelurahan dan kawasan pinggiran kota. Selain itu, tenaga kesehatan didistribusikan secara adil untuk menghindari kesenjangan pelayanan. Peningkatan sistem transportasi dan teknologi informasi juga mendukung keterjangkauan layanan ini.

7. Meningkatkan Kapasitas Pendukung Daya Saing Daerah berstandar internasional

   Strategi ini fokus pada peningkatan kapasitas pendukung daya saing daerah. Pemerintah mengembangkan infrastruktur penunjang, kualitas SDM, serta kebijakan yang ramah investasi. Sinergi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan turut diperkuat. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan menarik bagi pelaku ekonomi.

8. Meningkatkan nilai tambah sektor unggulan berorientasi global

   Meningkatkan nilai tambah sektor unggulan menjadi strategi penting untuk mendongkrak perekonomian daerah. Hal ini dilakukan melalui industrialisasi berbasis potensi lokal dan hilirisasi produk. Pemerintah juga mendorong inovasi dalam produksi dan pemasaran hasil usaha. Dengan strategi ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9. Mengembangkan daya saing sektor akomodasi, makanan, dan minuman melalui penguatan kapasitas usaha, kualitas layanan, dan promosi berbasis potensi lokal dan berwawasan global

   Strategi mengembangkan daya saing sektor akomodasi, makanan, dan minuman difokuskan untuk memperkuat peran sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan kualitas produk dan pelayanan menjadi aspek utama dalam menghadapi persaingan regional dan nasional. Pemerintah memberikan pelatihan, promosi, dan pendampingan usaha untuk meningkatkan standar industri ini. Penguatan branding Kota Madiun sebagai destinasi kuliner dan wisata turut mendorong sektor ini berkembang.

10. Mengembangkan ekosistem UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong pelaku usaha berdaya saing global

    Strategi mengembangkan ekosistem UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital bertujuan menciptakan ruang tumbuh bagi pelaku usaha lokal. Pemerintah menyediakan akses permodalan, pasar, serta pelatihan teknologi dan inovasi. Ekosistem ini dibentuk agar mampu bersinergi dan memperluas jaringan antar pelaku usaha. Kota Madiun diarahkan menjadi kota kreatif dan digital yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

11. Meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah non-pertanian

    Strategi meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah non-pertanian diarahkan untuk mendongkrak kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah. Pemerintah memberikan insentif, akses perbankan, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan. Inovasi dalam produk dan proses produksi terus didorong agar UKM mampu bertahan di tengah persaingan. Dengan dukungan ini, UKM diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

12. Meningkatkan ekosistem digital dan teknologi informasi yang inklusif dan berkelanjutan

    Strategi ini bertujuan meningkatkan ekosistem digital dan teknologi informasi yang inklusif. Pemerintah berupaya memperluas akses internet, pengembangan infrastruktur TIK, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Pemanfaatan platform digital dalam pelayanan publik dan ekonomi menjadi prioritas. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang adaptif terhadap revolusi industri 4.0.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13. Meningkatkan pengelolaan Inflasi yang Efektif dan Penguatan Ketahanan Ekonomi Lokal

    Strategi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat menghadapi tekanan eksternal. Pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta pemantauan pasokan dan distribusi barang secara real-time. Di sisi lain, ketahanan ekonomi lokal diperkuat melalui pemberdayaan UMKM, diversifikasi komoditas unggulan daerah, dan peningkatan konektivitas antara sentra produksi dan pasar. Dengan strategi ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian lokal menjadi lebih adaptif terhadap dinamika global dan nasional.

14. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah

    Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi penerimaan daerah melalui tata kelola yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel. Strategi ini mencakup penguatan sistem pendataan objek dan subjek pajak/retribusi, digitalisasi proses pemungutan, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola PAD. Dengan pengelolaan yang lebih efisien, kebocoran penerimaan dapat diminimalkan dan daya ungkit PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah dapat ditingkatkan. Selain itu, strategi ini juga mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas basis penerimaan daerah secara berkelanjutan.

15. Meningkatkan dan memperluas akses layanan keuangan melalui inklusi keuangan, pengembangan infrastruktur layanan, dan diversifikasi produk keuangan

    Strategi ini bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih inklusif dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Melalui perluasan jangkauan layanan keuangan formal hingga ke wilayah terpencil, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses layanan perbankan, pembiayaan mikro, serta asuransi. Selain itu, pengembangan infrastruktur seperti digital banking dan agen layanan keuangan akan mempercepat proses transaksi dan meningkatkan efisiensi layanan. Diversifikasi produk keuangan juga menjadi fokus penting agar kebutuhan berbagai segmen masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan rumah tangga berpendapatan rendah, dapat terlayani dengan lebih tepat dan berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

16. Mengembangkan Kemandirian Pangan Masyarakat dan Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal.

    Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi pangan lokal. Strategi ini mendorong masyarakat agar tidak bergantung pada satu jenis komoditas pangan utama, seperti beras, dengan memperkenalkan berbagai alternatif sumber karbohidrat, protein, dan gizi lain yang berasal dari kearifan lokal. Selain itu, penguatan kapasitas petani, pekarangan pangan lestari, dan pengembangan UMKM berbasis pangan lokal menjadi kunci dalam menciptakan kemandirian pangan yang berkelanjutan. Melalui langkah ini, diharapkan terjadi peningkatan konsumsi pangan bergizi, beragam, dan berimbang di tingkat rumah tangga serta tumbuhnya ekonomi lokal berbasis pertanian dan pangan.

17. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor ekonomi daerah.

    Strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor ekonomi daerah bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang adaptif, produktif, dan siap bersaing di pasar kerja. Langkah ini dapat diwujudkan melalui pelatihan vokasional, peningkatan keterampilan teknis, serta sertifikasi profesi yang relevan dengan kebutuhan industri lokal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha sangat penting untuk memastikan kurikulum pelatihan selaras dengan tuntutan pasar kerja. Dengan adanya tenaga kerja yang kompeten, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terdorong secara berkelanjutan dan mampu menarik investasi yang lebih besar.

18. Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja dalam sektor berkeahlian menengah tinggi

    Melalui peningkatan kompetensi baik bagi pekerja maupun pencari kerja diharapkan mampu untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Strategi ini mendorong tenaga kerja untuk mampu bekerja di sektor berkeahlian menengah tinggi. hal ini bertujuan untuk mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19. Meningkatkan kepatuhan dan aksesibilitas kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh segmen tenaga kerja

    Strategi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh dan merata, termasuk bagi pekerja formal, informal, serta pekerja rentan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan regulasi, intensifikasi pengawasan, dan pemberian insentif bagi pemberi kerja yang patuh terhadap ketentuan kepesertaan. Di sisi lain, aksesibilitas ditingkatkan melalui kemudahan pendaftaran, digitalisasi layanan, serta kolaborasi lintas sektor guna menjangkau kelompok pekerja yang selama ini sulit terakses. Dengan strategi ini, diharapkan seluruh tenaga kerja di daerah mendapatkan perlindungan yang layak dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko kerja.

20. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Modal dan Produktivitas Ekonomi

    Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan efisiensi penggunaan modal dan produktivitas ekonomi. Pemerintah mendorong investasi pada sektor produktif serta mengurangi pemborosan anggaran. Setiap belanja pembangunan diarahkan pada hasil nyata dan dampak ekonomi langsung. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi secara efisien.

21. Meningkatkan Iklim Investasi

    Meningkatkan iklim investasi merupakan langkah penting untuk menarik modal masuk ke daerah. Pemerintah berkomitmen menyederhanakan perizinan, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan stabilitas keamanan dan infrastruktur. Promosi potensi investasi dilakukan secara aktif, baik dalam forum nasional maupun internasional. Strategi ini bertujuan mendorong investasi berkualitas yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

22. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

    Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur perkotaan menjadi prioritas untuk mendukung konektivitas, pelayanan publik dan lingkungan hidup. Pemerintah memperkuat jalan, drainase, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya secara merata. Penataan ruang juga dilakukan untuk menciptakan kota yang nyaman dan tertata. Strategi ini mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan inklusif. Strategi ini mempertimbangkan arah kebijakan yang menjadi highlight RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagaimana berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkotaan Madiun, antara lain melalui:
    a. Penyusunan masterplan penataan Kawasan perkotaan dan rencana tata ruang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;
    b. Pemenuhan layanan dasar air minum, penangnan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau;
    c. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;
    d. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
- Pembangunan rumah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di Kawasan perkotaan Madiun;
- Pembangunan TPST regional Madiun;
- Pengembangan SPAM regional Madiun;
- Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Madiun;
- Pengembangan kota agropolitan Madiun;
- Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Soedono Madiun;
- Preservasi jalan ruas Madiun-Magetan dan Madiun-Ponorogo-Pacitan;
- Pembangunan/ revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di Kawasan Industri /Kawasan Ekonomi Khusus prioritas;
- Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Surabaya.

23. Meningkatkan Kualitas Konektivitas Antar Wilayah

    Pemerintah meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan membangun akses transportasi yang efisien dan aman. Pembangunan jembatan, jalan penghubung antar-kelurahan, serta sistem transportasi publik menjadi bagian dari strategi ini. Tujuannya adalah memperlancar mobilitas barang dan manusia serta memperkuat integrasi wilayah. Hal ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

24. Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup

    Strategi ini berfokus pada pengelolaan kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan polusi, pengelolaan sampah, dan pelestarian sumber daya alam. Pemerintah menggalakkan program penghijauan, pengelolaan sampah termasuk pengolahan sampah secara thermal dengan menggunakan teknologi incinerator di lokasi TPS. Disamping lokasi di TPS juga mengoptimalkan pemprosesan sampah di TPA termasuk menjadikan kawasan wisata hijau. Masyarakat dilibatkan aktif dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kota yang sehat, bersih, dan lestari

25. Meningkatkan Ketahanan Daerah

    Pemerintah memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, infrastruktur tahan bencana, dan edukasi masyarakat. Sistem peringatan dini dan koordinasi antarinstansi ditingkatkan. Strategi ini juga mencakup pemetaan risiko dan perlindungan aset vital kota. Tujuannya adalah mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.

26. Meningkatkan mitigasi bencana dan penanganan dampak perubahan iklim

    Mitigasi bencana dan penanganan dampak perubahan iklim menjadi bagian penting strategi adaptif Kota Madiun. Pemerintah melakukan rehabilitasi kawasan rawan bencana, memperkuat perencanaan tata ruang, serta membangun infrastruktur resiliensi iklim. Edukasi masyarakat tentang perubahan iklim juga ditingkatkan. Strategi ini diharapkan menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan iklim global.

27. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas internasional

    Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif. Melalui strategi ini, diharapkan terjadi penguatan mekanisme perencanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan pengelolaan anggaran. Peningkatan akuntabilitas akan mendorong efisiensi belanja publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, strategi ini mendukung terciptanya budaya kerja yang berorientasi hasil dan memperkuat pengawasan internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

28. Meningkatkan Kualitas Perencanaan serta Pengelolaan Keuangan Daerah

    Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses perencanaan anggaran didasarkan pada data yang akurat, kebutuhan riil masyarakat, serta mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas belanja publik. Strategi ini mencakup penguatan integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas SDM perencana dan pengelola keuangan, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan terencana, daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan dampak pembangunan yang lebih besar. Selain itu, kualitas pengelolaan keuangan yang baik juga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

29. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

    Strategi ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui strategi ini, pemerintah didorong untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat, sesuai dengan prinsip good governance. Keterbukaan informasi juga menjadi sarana penting dalam mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memperkuat demokrasi lokal yang responsif dan inklusif.

30. Meningkatkan Kompetensi ASN Berbasis Standar Internasional

    Strategi ini bertujuan meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan penilaian berbasis kinerja. Pemerintah mendorong budaya kerja profesional dan integritas tinggi di kalangan birokrasi. Sistem reward and punishment juga diterapkan secara adil. Dengan ASN yang kompeten, pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dan responsif.

31. Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengawasan berbasis World Class Government

    Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan pemerintahan menjadi prioritas agar setiap kebijakan berjalan sesuai aturan. Pemerintah memperkuat peran Inspektorat dan lembaga pengawas lainnya dalam mendeteksi potensi penyimpangan. Teknologi audit digital juga dikembangkan. Strategi ini menciptakan sistem birokrasi yang disiplin dan akuntabel.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

32. Meningkatkan pencegahan korupsi

    Strategi ini fokus pada pencegahan korupsi melalui pembangunan sistem integritas, penguatan nilai antikorupsi, dan sistem pelaporan publik. Pendidikan antikorupsi sejak dini dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga menjadi bagian dari pendekatan ini. Sistem gratifikasi dan pengaduan publik diperkuat. Tujuannya adalah membangun budaya birokrasi yang bersih dan terpercaya.

33. Meningkatkan wilayah birokrasi bebas korupsi

    Strategi untuk meningkatkan wilayah birokrasi bebas dari korupsi merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Upaya ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem pengawasan internal yang ketat, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, pelibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik turut menjadi kunci dalam mencegah praktik-praktik koruptif. Dengan membangun budaya integritas di lingkungan birokrasi, diharapkan tercipta iklim pelayanan yang profesional, responsif, dan terpercaya.

34. Meningkatkan kualitas kebijakan dan produk hukum daerah

    Strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan produk hukum daerah merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui proses perumusan kebijakan yang berbasis data dan kajian ilmiah, serta melibatkan partisipasi publik secara aktif dalam setiap tahapan penyusunan regulasi. Selain itu, penting untuk memastikan harmonisasi antara kebijakan daerah dengan regulasi di tingkat nasional agar tercipta sinkronisasi dan kepastian hukum. Evaluasi dan revisi secara berkala terhadap produk hukum yang sudah ada juga perlu dilakukan guna menyesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang.

35. Peningkatan literasi digital, pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan pemanfaatan layanan publik digital berkelanjutan.

    Strategi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif efisien dan partisipatif sehingga setiap warga dapat berkontribusi untuk kemajuan kota. Digitalisasi memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintah secara lebih mudah dan proses pelayanan dapat terstandarisasi. Digitalisasi juga memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur dan membuka peluang inovasi layanan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

36. Mengembangkan ekosistem inovasi berbasis kolaborasi

    Strategi peningkatan inovasi dalam layanan publik bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi digital, pengembangan sistem pelayanan berbasis data, serta kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat integrasi antar instansi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan juga menjadi kunci dalam menciptakan layanan publik yang adaptif dan tepat sasaran. Dengan demikian, peningkatan inovasi tidak hanya mendorong perbaikan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

37. Meningkatkan Peran dan Kreativitas Masyarakat dalam Proses Inovasi Pembangunan

    Pemerintah mendorong peran serta masyarakat dalam inovasi pembangunan melalui forum warga, lomba inovasi, dan pelibatan komunitas. Kreativitas warga menjadi sumber gagasan pembangunan yang relevan dan aplikatif. Program ini bertujuan menciptakan pembangunan partisipatif yang menjawab kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya.

38. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Daerah

    Strategi ini bertujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah melalui penguatan aparatur keamanan, pemantauan wilayah, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memperkuat sinergi dengan TNI/Polri dan meningkatkan sarana pemantauan seperti CCTV dan pos keamanan. Lingkungan yang aman akan mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga. Pendekatan ini juga mencegah konflik dan gangguan ketertiban.

39. Meningkatkan Kerukunan Sosial dan Kestabilan Sosial

    Meningkatkan kerukunan sosial dan kestabilan sosial menjadi fokus dalam menjaga harmoni masyarakat multikultural. Pemerintah mengadakan dialog antaragama, kegiatan lintas budaya, serta forum warga. Nilai toleransi dan gotong royong dikembangkan sejak dini di lingkungan keluarga dan pendidikan. Dengan demikian, potensi konflik sosial dapat dicegah dan persatuan daerah diperkuat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

40. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban

    Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Pemerintah memberdayakan satuan linmas dan RT/RW sebagai garda depan ketertiban lingkungan. Penegakan peraturan daerah dilakukan secara tegas namun humanis. Hal ini menciptakan ruang publik yang nyaman, tertib, dan aman bagi semua warga.

41. Meningkatkan edukasi wawasan kebangsaan dan budaya yang inklusif

    Meningkatkan wawasan kebangsaan dan toleransi dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai kebhinekaan dan bela negara. Pemerintah mengadakan kegiatan edukatif, budaya, dan dialog kebangsaan yang inklusif. Generasi muda dilibatkan aktif dalam penguatan karakter nasional. Strategi ini bertujuan menjaga persatuan dan identitas nasional di tengah keberagaman.

42. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Keluarga

    Strategi untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan keluarga difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan anggota keluarga melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan berkelanjutan. Melalui program pengembangan ekonomi keluarga, seperti usaha mikro dan koperasi berbasis komunitas, keluarga didorong untuk mandiri secara finansial. Di sisi lain, penyuluhan tentang pola asuh, kesehatan reproduksi, dan pengelolaan keuangan rumah tangga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha juga diperlukan untuk memastikan intervensi yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga keluarga dapat menjadi unit sosial yang kuat, produktif, dan sejahtera.

43. Meningkatkan pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Akses terhadap Kesempatan yang Setara.

    Strategi ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan akses terhadap kesempatan yang setara di semua sektor. Pemerintah mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dunia kerja, dan kewirausahaan. Pelatihan dan program perlindungan perempuan juga diperluas. Pendekatan ini menjamin pembangunan yang adil gender dan inklusif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

44. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan keluarga miskin serta memperluas akses perlindungan sosial

    Strategi Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan keluarga miskin serta memperluas akses perlindungan sosial difokuskan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan mamasukkan dimensi perlindungan sosial. Strategi ini akan dijalankan dengan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Keluarga Miskin, Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha, Peningkatan Akses Perlindungan Sosial, Penguatan Layanan Dasar bagi Keluarga Miskin, Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.

3.2.2 Pentahapan Pembangunan RPJMD

Dalam perencanaan pembangunan jangka lima tahun, strategi dan arah kebijakan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Strategi mencakup berbagai tema yang saling melengkapi dan secara simultan membentuk kerangka strategi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam arah kebijakan pembangunan tahunan. Sebagai pedoman utama, arah kebijakan berfungsi untuk mengarahkan implementasi strategi agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, arah kebijakan juga menentukan tema pembangunan serta menetapkan prioritas tahunan yang perlu dilaksanakan. Setiap tahun, fokus pembangunan diarahkan pada prioritas tertentu berdasarkan pemetaan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perumusan arah kebijakan bertujuan untuk merasionalisasi pilihan strategi agar memiliki fokus yang jelas serta sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaannya. Untuk memastikan kesinambungan pembangunan tahunan dalam periode lima tahun, langkah awal yang dilakukan adalah menyederhanakan perencanaan dalam bentuk agenda atau tema pembangunan untuk setiap tahapan tahunan. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, arah kebijakan dirumuskan secara lebih terperinci sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dengan lebih mudah diimplementasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, tahapan-tahapan yang telah disusun digunakan sebagai acuan utama dan diselaraskan dengan proses pentahapan dalam RKPD. Setiap tahun dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki fokus atau tema pembangunan yang dirancang secara berkesinambungan guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun fokus atau tema pembangunan Kota Madiun dapat dilihat pada gambar berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 14 Tema RPJMD/Arah Kebijakan Pemerintah Kota Madiun 2025-2029

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun, tema pembangunan setiap tahun dirancang secara berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan transformasi pembangunan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2026, agenda pembangunan menekankan pada penguatan fondasi transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola yang berkelanjutan bersama masyarakat membangun kota mendunia. Pada tahun 2027, prioritas pembangunan bergeser ke akselerasi transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola yang berkelanjutan bersama masyarakat membangun kota mendunia. Pada tahun 2028, arah kebijakan pemerintah kota Madiun berlanjut pada ekspansi transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola, yang berkelanjutan bersama masyarakat membangun kota mendunia.

Dalam penyusunan RPJMD Kota Madiun, pemetaan antara misi dan arah kebijakan menjadi langkah penting untuk memastikan keterpaduan dalam perencanaan pembangunan daerah. Setiap misi yang dirumuskan harus memiliki arah kebijakan yang jelas sebagai panduan dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan. Arah kebijakan ini berfungsi untuk menerjemahkan misi ke dalam langkah-langkah strategis yang lebih operasional, sehingga sasaran pembangunan dapat dicapai secara efektif dan terukur. Berikut adalah tabel yang menunjukkan keterkaitan antara misi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan RPJMD Kota Madiun 2025-2029

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MISI 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing global	TUJUAN 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	S1: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat berstandar global	Literasi Numerasi SD dan SMP	Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pendidikan, pengembangan budaya literasi dan numerasi, pemanfaatan teknologi serta penguatan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat	Peningkatan kualitas kompetensi SDM tenaga pendidik melalui pelatihan berbasis pedagogi global	Penguatan program literasi–numerasi ke seluruh sekolah serta meningkatkan keterlibatan orang tua	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah	Mengembangkan inovasi STEM/STEAM dalam pendidikan	Pengembangan kolaborasi dengan institusi pendidikan internasional untuk transfer pengetahuan	Pembudayaan literasi dan numerasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat secara berkelanjutan
				Rata-rata Lama Sekolah	Mengembangkan infrastruktur pendidikan yang modern dan sesuai standar global	Peningkatan sarana prasarana sekolah (laboratorium, perpustakaan, ruang kelas) berbasis standar internasional	Peningkatan konektivitas internet dan perangkat teknologi digital di seluruh satuan pendidikan	Peningkatan pembangunan pusat inovasi dan pembelajaran digital (smart classroom)	Peningkatan integrasi teknologi ramah lingkungan (green school infrastructure) di lingkungan pendidikan	Peningkatan sertifikasi dan standar bangunan sekolah yang aman, inklusif, dan tahan bencana	Peningkatan efisiensi dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan berbasis data spasial dan teknologi IoT
				Harapan Lama Sekolah	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang merata dan inklusif menuju keadilan global	Peningkatan layanan pendidikan di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil melalui penyediaan transportasi dan guru khusus	Peningkatan dukungan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga tidak mampu	Peningkatan akses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui program inklusi dan pendampingan	Peningkatan akses pendidikan digital melalui distribusi perangkat belajar daring dan jaringan Wi-Fi gratis	Peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM internasional untuk mendukung program inklusi pendidikan	Peningkatan integrasi sistem data siswa nasional untuk memantau aksesibiltas pendidikan
			S2: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat berstandar international	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Penguatan akses layanan primer melalui standardisasi Integrasi Layanan Primer (ILP) dan pemetaan ulang jangkauan layanan.	Perluasan jangkauan layanan melalui optimalisasi peran Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan penguatan jejaring dengan faskes swasta, termasuk rumah sakit.	Pengembangan layanan kesehatan digital (pendaftaran online, telekonsultasi awal) di tingkat Puskesmas sebagai gerbang awal sistem kesehatan.	Penguatan aksesibilitas program spesifik melalui kemitraan strategis (misal: CSR untuk sanitasi, kemitraan dengan rumah sakit untuk penjangkauan spesialis).	Optimalisasi sistem rujukan yang terintegrasi penuh secara digital untuk efisiensi dan pemerataan akses layanan spesialistik di rumah sakit.	Pematangan model layanan kesehatan berbasis komunitas yang mandiri dan berkelanjutan, didukung oleh sistem rujukan yang kuat ke Puskesmas dan Rumah Sakit.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Primer dan Rujukan	Peningkatan mutu dasar melalui pemenuhan standar akreditasi, adopsi Rekam Medis Elektronik (RME), dan standardisasi alur rujukan di seluruh faskes.	Penguatan sistem informasi kesehatan melalui integrasi data (SatuSehat) untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan manajerial.	Implementasi siklus peningkatan mutu berkelanjutan berbasis data dan penguatan tata kelola program penyakit prioritas (TBC, DBD, HIV, PTM).	Peningkatan kompetensi Global SDM Kesehatan sesuai standar dan kebutuhan spesifik (tenaga fungsional tertentu) melalui pelatihan berkelanjutan.	Pemanfaatan data terintegrasi untuk analisis prediktif tren penyakit dan evaluasi efektivitas program secara real-time.	Pembudayaan tata kelola klinis yang unggul dan bertaraf Internasional serta menjadikan Puskesmas sebagai *center of excellence* untuk pembinaan layanan primer.
					Mengoptimalkan kualitas program Keluarga Berencana dan Pengendalian penduduk serta meningkatkan ketahanan keluarga	Intensifikasi edukasi dan konseling untuk meningkatkan pemahaman tentang KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin (catin).	Revitalisasi peran Kelompok Kegiatan (Poktan) dan pengembangan program kesehatan reproduksi remaja di sekolah untuk intervensi hulu.	Peningkatan akses dan diversifikasi layanan KB MKJP di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) serta penguatan surveilans gizi untuk pencegahan stunting.	Pengembangan kampanye KB yang menargetkan partisipasi pria dan penguatan intervensi gizi sensitif lintas sektor.	Penguatan program ketahanan keluarga secara holistik (gizi, pola asuh, kesehatan lansia) berbasis data keluarga sehat.	Institusionalisasi program KB dan ketahanan keluarga yang terintegrasi penuh dalam siklus layanan kesehatan primer.
			S3: Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatkan pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Akses terhadap Kesempatan yang Setara.	Penguatan Program Pemberdayaan Perempuan dalam Sektor Ekonomi formal maupun non formal	Peningkatan Akses Perempuan terhadap Pendidikan dan Pelatihan	Penguatan Perlindungan Hukum dan Kesetaraan Gender	Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam struktur pemerintahan/organisasi masyarakat	Pengembangan Infrastruktur dan Layanan yang Ramah Gender	Penguatan Sosialisasi dan Kesadaran Gender di Masyarakat
			S.4: Menurunnya pengangguran	Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Berkualitas di Sektor Ekonomi Daerah.	Peningkatan jaminan dan perlindungan tenaga kerja informal	Peningkatan kerjasama dan hubungan Industrial	Peningkatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dalam rangka perluasan kesempatan kerja	Pengembangan Kewirausahaan bagi Angkatan Kerja Muda	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja di Sektor Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatkan kepatuhan dan aksesibilitas kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh segmen tenaga kerja	Peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja dan pemberi kerja	Peningkatan kemudahan pendaftaran dan layanan kepesertaan Jaminan Sosial melalui digitalisasi dan integrasi layanan	Peningkatan kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Peningkatan cakupan kepesertaan di sektor informal, pekerja mandiri, dan rentan	Peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam memperluas basis data dan perluasan kepesertaan	Peningkatan perlindungan jangka panjang bagi tenaga kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja dalam sektor berkeahlian menengah dan tinggi	Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri	Peningkatan kualitas lembaga pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi	Peningkatan literasi digital dan keterampilan teknologi bagi angkatan kerja muda	Peningkatan insentif bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja berkeahlian menengah dan tinggi	Peningkatan integrasi data pasar kerja untuk perencanaan tenaga kerja	Peningkatan peran pemerintah daerah dalam membina dan mengarahkan pengembangan SDM lokal
			S5: Peningkatan Daya Beli Mayarakat	Pengeluaran Per Kapita	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Akses Pendidikan dan Keterampilan untuk Keluarga	Pengembangan Layanan Kesehatan Keluarga yang Terjangkau melalui Optimalisasi new Posyandu sebagai simpul layanan masyarakat terpadu lintas sektor	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Peningkatan Kesadaran serta Perlindungan Anak dan Hak Keluarga	Pengembangan Infrastruktur Sosial untuk Keluarga	Peningkatan Kolaborasi Antar Lembaga dalam Pembangunan Keluarga
MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan	TUJUAN 2: Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	• Pertumbuhan Ekonomi • Indeks Gini • Indeks Daya Saing Daerah	S6: Meningkatnya Daya Saing ekonomi sektor strategis	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (ADHK)	Mengembangkan daya saing sektor akomodasi, makanan, dan minuman melalui penguatan kapasitas usaha, kualitas layanan, dan promosi berbasis potensi lokal.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha akomodasi, makanan, dan minuman melalui pelatihan manajemen usaha	Pengembangan infrastruktur pendukung seperti kawasan kuliner, area parkir wisata, dan penginapan berbasis potensi lokal.	Peningkatan promosi dan branding destinasi kuliner serta akomodasi unggulan Kota Madiun	Pengembangan kemudahan perizinan usaha dan sertifikasi bagi usaha makanan, minuman, dan akomodasi untuk mendorong formalitas sektor.	Peningkatan jejaring kemitraan antara pelaku usaha akomodasi, makanan, dan minuman dengan pelaku wisata dan agen perjalanan	Pengembangan kawasan wisata kuliner dan penginapan tematik berbasis kearifan lokal
				Rasio PDRB Sektor Jasa (ADHK)	Mengembangkan ekosistem UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital	Peningkatan kapasitas SDM UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif melalui pelatihan berbasis digital marketing	Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata	Peningkatan kolaborasi UMKM, pelaku wisata, dan komunitas kreatif melalui *event* tahunan berbasis ekonomi kreatif.	Pengembangan platform digital terpadu untuk promosi UMKM, destinasi wisata, produk kreatif, serta reservasi akomodasi dan kuliner.	Peningkatan kemitraan strategis dengan sektor swasta dan marketplace nasional untuk memperluas pasar UMKM pariwisata.	Pengembangan kawasan wisata tematik terintegrasi dengan ruang interaksi ekonomi digital yang memperhatikan kajian tata ruang pariwisata
				Rasio PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	Meningkatkan nilai tambah sektor unggulan berorientasi global	Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekonomi	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Kompeten yang sesuai dengan kebutuhan sektor unggulan	Peningkatan Diversifikasi dan Pengembangan Sektor Unggulan	Penguatan dan Modernisasi Sektor Industri	Peningkatan Daya Saing Produk Lokal di Pasar Regional, Nasional dan Internasional	Penguatan Kemitraan antara Pemerintah dan Dunia Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah non-pertanian	Peningkatan kapasitas UMKM non-pertanian melalui pelatihan keterampilan manajerial, pengelolaan usaha, dan pemasaran berbasis teknologi digital.	Pengembangan sistem informasi dan platform digital untuk mendukung pemasaran produk UMKM non-pertanian	Peningkatan akses permodalan untuk UMKM non-pertanian melalui kemitraan dengan lembaga keuangan dan bank daerah.	Peningkatan sistem distribusi dan logistik untuk UMKM non-pertanian	Peningkatan kualitas produk UMKM non-pertanian melalui sertifikasi produk, standar kualitas, dan teknologi produksi	Pengembangan kawasan UMKM non-pertanian yang terintegrasi dengan infrastruktur ekonomi, digitalisasi, dan akses pasar yang lebih luas dengan memperhatikan ekonomi hijau
					Meningkatkan ekosistem digital dan teknologi informasi yang inklusif dan berkelanjutan.	Peningkatan Infrastruktur TIK untuk Mendorong Akses Digital UMKM dan Pariwisata	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Teknologi Digital	Pengembangan Ekosistem Digital untuk Ekonomi Kreatif	Pengembangan Aplikasi Pariwisata Digital	Penyediaan Akses Pembiayaan Digital untuk UMKM	Pengembangan Smart City untuk Mendukung Sektor Ekonomi Digital
			S.7: Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Tingkat Inflasi	Meningkatkan Pengelolaan Inflasi yang Efektif dan Penguatan Ketahanan Ekonomi Lokal.	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok	Pengembangan Cadangan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Efektif	Peningkatan Akses kepada Pasar dan Konektivitas Distribusi Barang	Pengembangan Kebijakan Stabilitas Harga melalui Diversifikasi Produk Lokal	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi dan Logistik	Penguatan Kerja Sama Antar Daerah dan Penguatan Sistem Ekonomi Lokal
					Mengembangkan Kemandirian Pangan Masyarakat dan Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal	Pengendalian hasil panen untuk pangan	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Pangan	Pengembangan Diversifikasi Produk Pangan Lokal	Peningkatan Aksesibilitas dan Distribusi Pangan Lokal	Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Produsen Pangan	Pengembangan Gerakan Konsumsi Pangan Lokal Berbasis Masyarakat
			S.8: Peningkatan Kualitas Investasi	*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*	Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Modal dan Produktivitas Ekonomi	Penyederhanaan Proses Perizinan dan Regulasi	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Investasi	Diversifikasi Sumber Pembiayaan dan Peningkatan Akses Modal yang Efisien	Peningkatan Pengelolaan dan Diversifikasi Investasi	Optimalisasi Penggunaan Teknologi dan Inovasi dalam Proses Produksi	Pengembangan Ekosistem Kemitraan yang Efisien
					Meningkatkan Iklim Investasi	Peningkatan Fasilitas Pendukung Investasi di Kawasan Strategis	Peningkatan Promosi Investasi yang Terfokus dan Berkelanjutan	Pengembangan Kemudahan Berusaha Bagi Penanaman Modal Baru	Peningkatan Ketersediaan Data Potensi Investasi Daerah	Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Digital	Peningkatan Penyediaan Lahan Siap Investasi
					Meningkatkan Kapasitas Pendukung Daya Saing Daerah Berstandar Internasional	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial	Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Investasi Daerah	Peningkatan Integrasi dan Kolaborasi Antar Sektor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			S9: Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan keluarga miskin serta memperluas akses perlindungan sosial	Pemutakhiran Basis Data Terpadu Keluarga Miskin untuk Akurasi Sasaran Perlindungan Sosial	Perluasan Cakupan Program Bantuan Sosial Terintegrasi dengan Skema Pemberdayaan	Pengembangan Skema Perlindungan Sosial Adaptif bagi Pekerja Rentan dan Informal	Peningkatan Kapasitas Ekonomi Keluarga Miskin melalui Dukungan UMKM dan Koperasi	Digitalisasi Layanan Perlindungan Sosial untuk Transparansi dan Aksesibilitas	Penguatan Sistem Graduasi Keluarga Miskin menuju Kemandirian Ekonomi
MISI 3: Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan	TUJUAN 2: Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	• Pertumbuhan Ekonomi • Indeks Gini • Indeks Daya Saing Daerah	S10: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur permukiman	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan (Drainase, Sanitasi, dan PJU)	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan (Drainase, Sanitasi, dan PJU)	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan (Drainase, Sanitasi, dan PJU)	Peningkatan kualitas layanan Infrastruktur Perkotaan (Drainase, Sanitasi, dan PJU)	Peningkatan kualitas layanan Infrastruktur Perkotaan (Drainase, Sanitasi, dan PJU)
					Meningkatkan Kualitas Konektivitas Antar Wilayah	Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat	Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat	Pengembangan Moda Transportasi	Pengembangan Infrastruktur Jalan Lokal dan Akses Permukiman	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Penghubung	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Penghubung
			S11: Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah industri	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Penanaman Pohon	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengurangan Polusi Air	Pengurangan Polusi Udara dan Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan	Pemantauan dan Evaluasi Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Peningkatan Penggunaan Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi
			S12: Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana (H&V 2021)	Meningkatkan Ketahanan Daerah	Peningkatan Ketahanan Bencana Banjir	Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Penanggulangan Bencana	Penguatan Kapasitas SDM dalam Penanggulangan Bencana	Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mitigasi Bencana	Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi untuk Penanggulangan Bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
					Meningkatkan mitigasi bencana dan penanganan dampak perubahan iklim	Peningkatan Infrastruktur Pengurangan Risiko Bencana	Pengembangan Sistem Pemantauan dan Data Risiko Bencana	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Tahan Bencana	Penyusunan Peta Risiko Bencana yang Akurat dan Terkini	Penguatan Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana
MISI 4: Meningkatkan harmoni Sosial, Keamanan, dan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	TUJUAN 2: Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	• Pertumbuhan Ekonomi • Indeks Gini • Indeks Daya Saing Daerah	S13: Terwujudnya kondusivitas dan stabilitas daerah	Indeks Rasa Aman	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Daerah	Peningkatan Infrastruktur Keamanan dan Sistem Pemantauan	Penguatan peran tokoh masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kejahatan dan Keamanan	Pengembangan Teknologi Keamanan dan Sistem Informasi	Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Tentang Keamanan dan Ketertiban	Penguatan Penegakan Hukum/Perda
				Indeks Ketenteraman	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban	Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Ketenteraman Sosial	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman	Peningkatan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Sosial	Peningkatan Keterlibatan Lembaga Keamanan dalam Menjaga Ketenteraman Sosial	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Ketenteraman Sosial	Peningkatan Program Resolusi Konflik Sosial di Masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MISI 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis keterbukaan informasi publik	TUJUAN 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	S14: Peningkatan Akuntabilitas KInerja dan Keuangan	Opini BPK terhadap LKPD	Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Penyuluhan dan Sosialisasi	Penyempurnaan Kebijakan Pajak untuk Meningkatkan Daya Tarik dan Partisipasi Masyarakat	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk Administrasi Pajak	Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak	Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak Daerah	Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Nilai SAKIP	Meningkatkan dan memperluas akses layanan keuangan melalui inklusi keuangan, pengembangan infrastruktur layanan, dan diversifikasi produk keuangan	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Layanan	Pengembangan Layanan Digital dan Peningkatan Ketersediaan Produk Keuangan	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dan Penyesuaian Kebijakan	Penguatan Ekosistem Keuangan dan Penilaian Dampak	Penilaian kinerja dan peningkatan produk keuangan yang berkelanjutan
					Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan anggaran	Peningkatan Penguatan Sistem Pengelolaan Kinerja	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Manajemen Kinerja	Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Transparansi dan Pelaporan Kinerja	Penguatan Budaya Akuntabilitas	Peningkatan Penggunaan Teknologi untuk Pengelolaan Kinerja dan Akuntabilitas
					Meningkatkan Kualitas Perencanaan serta Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran Daerah	Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pengawasan Internal terhadap Pengelolaan Keuangan	Pengembangan Mekanisme Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Tepat Waktu	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik atas Pengelolaan Keuangan
MISI 6: meningkatkan integritas Pemerintahan melalui Perilaku Anti Korupsi dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Profesional	TUJUAN 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	S15: Pemerintahan Bersih Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengawasan	Peningkatan Pemahaman dan Komitmen Aparatur terhadap Zona Integritas	Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Internal Unit Kerja	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transparansi	Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Implementasi Zona Integritas	Peningkatan kapasitas inspektorat dalam Pengawasan	Pengembangan Inovasi Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi
				Nilai MCP	Meningkatkan pencegahan korupsi	Peningkatan Transparansi Pengelolaan Pemerintahan	Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Integritas dan Anti Korupsi	Pengembangan Audit Internal yang Berbasis Risiko	Peningkatan Kolaborasi Antara Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum	Pengembangan Sistem Reward and Punishment Berbasis Integritas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Persentase Unit Kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Meningkatkan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi	Peningkatan Transparansi Proses Pelayanan Publik	Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan Kapasitas dan Integritas SDM Birokrasi	Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pengawasan Birokrasi	Peningkatan Sistem Deteksi Dini dan Penindakan Praktik Korupsi	Peningkatan Reformasi Tata Kelola Kelembagaan
			S16: Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Indeks Reformasi Hukum	Meningkatkan kualitas kebijakan dan produk hukum daerah	Peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*)	Peningkatan kualitas data dan sistem informasi pendukung formulasi kebijakan daerah	Peningkatan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan regulasi	Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dan regulasi sektoral	Peningkatan sistem evaluasi dampak dan efektivitas kebijakan daerah secara berkala	Peningkatan digitalisasi dan transparansi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan publikasi regulasi daerah
			S17: Meningkatnya pelayanan publik yang prima dan profesional berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Infrastruktur Teknologi penunjang informasi publik	Pengembangan Sistem Layanan Informasi Publik Terintegrasi	Peningkatan Standar Layanan Informasi Publik di Setiap Perangkat Daerah	Peningkatan Literasi dan Sosialisasi Hak Akses Informasi kepada Masyarakat	Pengembangan Inovasi Layanan Informasi Publik Berbasis Digital berupa pembuatan satu data terintegrasi	Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
				Indeks Masyarakat Digital	Peningkatan literasi digital, pemerataan infrastruktur TIK, dan pemanfaatan layanan publik digital berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Teknologi penunjang layanan publik digital	Pelaksanakan pelatihan literasi digital berbasis komunitas dan memperkuat jaringan internet pelayanan publik dan ruang publik	Mengintegrasikan layanan publik utama ke platform digital kota	Mengembangkan ekosistem inovasi digital lokal melalui UMKM, start-up, dan kemitraan dengan perguruan tinggi	Memperluas partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital serta memperkuat keamanan dan kepercayaan publik terhadap sistem TIK	Menetapkan ekosistem layanan digital terintegrasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial) sehingga transformasi digital menjadi budaya masyarakat.
				Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan Kompetensi ASN	Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajerial ASN	Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Digital	Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Pemerintahan	Pengembangan Manajemen Talenta ASN	Peningkatan Kualitas Pelayanan ASN	Peningkatan Sistem Penghargaan dan Disiplin ASN
MISI 7: Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi dalam pembangunan berkelanjutan	TUJUAN 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	S18: Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan Peran dan Kreativitas Masyarakat dalam Proses Inovasi Pembangunan	Meningkatkan efektivitas sistem manajemen inovasi untuk mendukung implementasi pelayanan publik yang berkelanjutan.	Peningkatan kesadaran dan pemahaman aparatur terhadap pentingnya inovasi pelayanan publik	Peningkatan kualitas perencanaan dan seleksi inovasi yang berbasis kebutuhan masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan dan implementasi inovasi	Peningkatan dukungan kelembagaan dan pembiayaan terhadap pelaksanaan inovasi	Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi implementasi inovasi pelayanan publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Mengembangkan ekosistem inovasi berbasis kolaborasi	Peningkatan Literasi Inovasi kepada Masyarakat	Pengembangan Ruang Kreasi dan Inovasi Masyarakat	Peningkatan Kompetisi dan Apresiasi Inovasi Masyarakat	Peningkatan Kemitraan Inovasi antara Masyarakat dan Pemerintah	Pengembangan Program Inkubasi Ide Inovasi Masyarakat	Peningkatan Replikasi dan Penyebarluasan Inovasi Masyarakat
MISI 8: Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat yang berkualitas	TUJUAN 2: Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	S19: Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Bermasyarakat	Indeks Kerukunan	Meningkatkan Kerukunan Sosial dan Kestabilan Sosial	Peningkatan Sosialisasi Nilai-Nilai Kebhinekaan dan Toleransi	Pengembangan Forum Dialog Antar-Komunitas dan Organisasi Sosial	Penguatan Program Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengembangan Kebudayaan dan Tradisi Lokal sebagai Sarana Penyatuan	Peningkatan Kolaborasi Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan Kerukunan	Penguatan Program Pemuda dalam Kegiatan Sosial dan Kerukunan
					Meningkatkan edukasi wawasan kebangsaan dan budaya yang inklusif	Peningkatan pemugaran budaya lokal	Pengembangan Seni budaya	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Toleransi	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi	Pengembangan Program Kerja Sama Antar Kelompok Agama dan Budaya	Peningkatan Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.3 Program Prioritas Pembangunan

Perencanaan program pembangunan di Kota Madiun disusun dengan memastikan keterhubungan yang kuat antara bidang urusan pemerintahan dan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas program pembangunan daerah disusun sebagai bagian dari perencanaan strategis yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Madiun menetapkan sejumlah program prioritas yang menjadi fokus utama dalam setiap tahapan perencanaan. Program-program ini dirancang untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun bertanggung jawab dalam melaksanakan program prioritas tersebut guna mencapai hasil yang optimal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 3. 15 Program Prioritas 1 RPJMD Kota Madiun 2025-2029

Program prioritas yang pertama yaitu Madiun Kota Pintar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai inisiatif di bidang pendidikan dan kesehatan. Beberapa program unggulan yang telah dirancang meliputi pemberian bantuan laptop bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, bantuan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP Negeri, meningkatkan program satu Rukun Tetangga (RT) satu *free wifi*, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang unggul dan berdaya saing, peningkatan kerjasama dengan BUMN/ BUMD/ Swasta dalam penyediaan lapangan kerja, menambah jumlah armada bus sekolah untuk SD dan SMP, memberikan bantuan makan siang bagi siswa SD dan SMP Negeri di Kota Madiun dan mendukung program pemerintah pusat yaitu Sekolah Rakyat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain itu, Pemerintah Kota Madiun juga meningkatkan pembelajaran dengan penggunaan papan tulis digital untuk SD dan SMP Negeri, peningkatan sarana dan prasaran berupa laboratorium terpadu di tiap Kecamatan, meningkatkan program *outdoor learning centre* bagi siswa SD dan SMP Negeri, penyediaan ruang baca yang memadai di sekolah dan ruang publik untuk meningkatkan kompetensi unggul, dan meningkatkan kemampuan siswa SD SMP melalui kerjasama dengan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, program bantuan beasiswa S1, S2, S3 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus Guru dan non ASN, beasiswa bagi bantuan beasiswa S1, S2, dan S3 dalam/ Luar Negeri bagi lulusan Sekolah Lanjutan Atas juga disediakan guna meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi. Di sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mendukung program pemerintah pusat di bidang kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun, menyediakan bantuan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan dan mewujudkan ketahanan keluarga. Program ini selaras dengan program prioritas provinsi Jawa Timur yang keempat dan kelima serta prioritas pembangunan Presiden yang ketujuh dan kedelapan.



Gambar 3. 16 Program Prioritas 2 RPJMD Kota Madiun 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Program prioritas yang kedua yaitu Madiun Kota Melayani. Prioritas ini menitikberatkan pada penguatan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan. Berbagai langkah strategis melalui program telah dirancang, antara lain peningkatan pembangunan ekonomi inklusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan, meningkatkan dan mengoptimalkan bantuan modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Madiun melalui pembentukan unit usaha di setiap kelurahan salah satunya dengan mendukung Program Pemerintah Pusat pembentukan Koperasi Merah Putih guna memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat Kota Madiun maupun luar Kota Madiun, peningkatan dan mengembangkan pemasaran kemasan air mineral produk Perusahaan Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, dan meningkatkan fasilitas pengembangan usaha yang berpotensi bernilai ekspor melalui pelatihan dan pengembangan teknik pengemasan produk sehingga dapat diekspor hingga ke luar negeri, Selain itu, Pemerintah Kota Madiun mendorong peingkatan pembangunan ekonomi inklusif melalui peningkatan produktivitas daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional serta internasional, peningkatan peran perusahaan melalui peningkatan bantuan dana *corporate social responsibility (CSR)* dari berbagai perusahaan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan melalui bantuan subsidi pupuk bagi petani yang berhak menerima, meningkatkan asuransi bagi tenaga kerja sektor informal bagi masyarakat Kota Madiun. Program ini selaras dengan program prioritas provinsi Jawa Timur yang kedua, ketujuh dan kesembilan serta prioritas pembangunan Presiden yang pertama, kedua belas, keempat belas, dan kelima belas.



Gambar 3. 17 Program Prioritas 3 RPJMD Kota Madiun 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Program prioritas yang ketiga yaitu Madiun Kota Membangun. Program ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung penguatan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan. Beberapa program prioritas yang dilakukan mencakup mewujudkan *Peceland* sebagai prasarana dan sarana pertanian maju, mandiri, dan modern bekerja sama dengan investor dalam negeri maupun luar negeri, mewujudkan pola ruang kawasan tepi sungai sebagai bagian wisata Kota Madiun, meningkatkan bantuan perbaikan prasarana dan sarana lingkungan masyarakat kepada setiap Rukun Tetangga melalui ketua Rukun Tetangga (RT), mengurangi kawasan kumuh perkotaan, peningkatan kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Madiun yang nyaman, tentram, dan berkelanjutan dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pada saat prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan akses transportasi melalui mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Ring Road Timur. Program ini selaras dengan program prioritas provinsi Jawa Timur yang ketiga dan kesembilan serta prioritas pembangunan presiden yang kesebelas dan ketiga belas.



Gambar 3. 18 Program Prioritas 4 RPJMD Kota Madiun 2025-2029

Program prioritas yang keempat yaitu Madiun Kota Peduli. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan tertib melalui berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat termasuk harmonisasi sosial politik. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup penguatan sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING) terpadu, bantuan insentif sertifikasi tanah wakaf di Kota Madiun, penyelenggaraan program edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, serta pembangunan kepercayaan dan solidaritas antar kelompok masyarakat. Program ini selaras dengan program prioritas provinsi Jawa Timur yang kedelapan serta prioritas pembangunan presiden yang kelima, keenam, kesembilan dan keenam belas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 19 Program Prioritas 5 RPJMD Kota Madiun 2025-2029

Program prioritas yang kelima yaitu Madiun Kota Terbuka. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, dan pelayanan publik profesional berbasis *Smart* dan *World Class Government*, program unggulan yang dipersiapkan Pemerintah Kota Madiun diantaranya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, penguatan atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengembangan karir Aparatur Sipil Negara, meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang kualitas Aparatur Sipil Negara, dan meningkatkan bantuan beasiswa S1, S2, S3 bagi ASN (Non Guru). Selain itu, Pemerintah Kota Madiun mengembangkan layanan ketersediaan informasi publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akurat, terbuka, benar, dan tidak menyesatkan, layanan informasi publik yang berkualitas bagi setiap warga masyarakat Kota Madiun sesuai ketentuan Undang-Undang serta meningkatkan Meningkatkan peran serta masyarakat melalui *Open Government Partnership (OGP)* dan Program Walikota Bersama Rakyat (WBR) di Kelurahan guna menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, peningkatan kerjasama antara dua kota di negara yang berbeda *sister city* guna memperluas jejaring kerja sama antar daerah. Program ini selaras dengan program prioritas provinsi Jawa Timur yang keenam serta prioritas pembangunan presiden yang kedua dan ketiga.

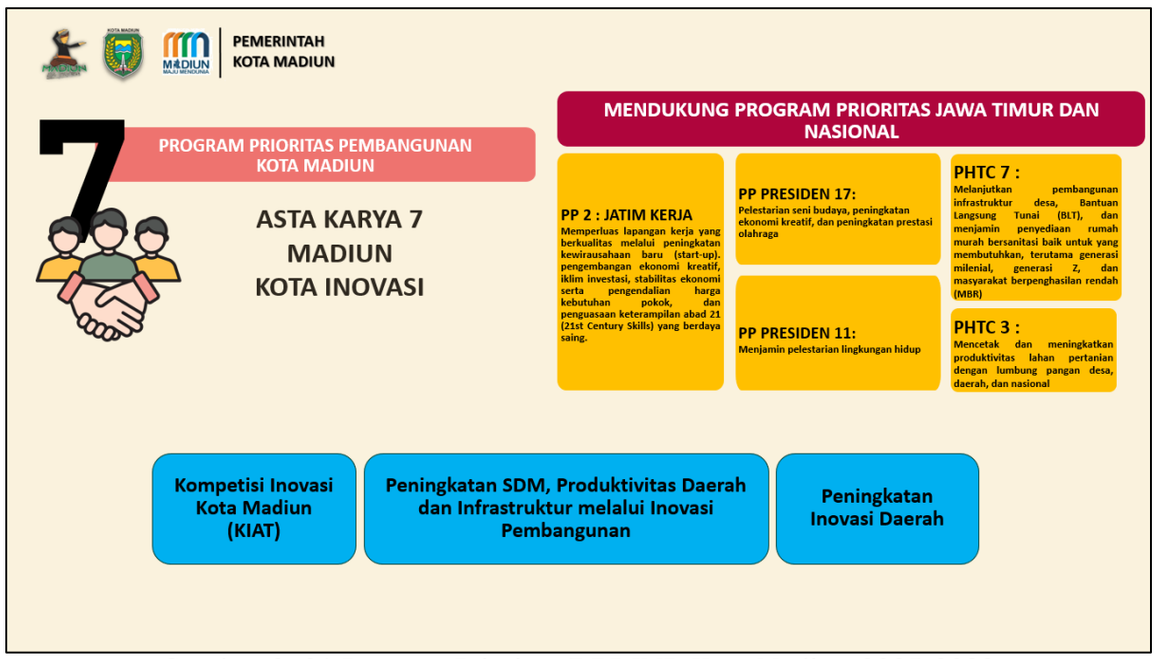
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 20 Program Prioritas 6 RPJMD Kota Madiun 2025-2029

Program prioritas yang keenam yaitu Madiun Kota Anti Korupsi. Prioritas ini berorientasi pada peningkatan integritas dalam tata kelola pemerintahan dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan birokrasi. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK), meningkatkan kerja sama Pemerintah Kota Madiun dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan pendidikan anti korupsi pada Aparatur Sipil Negara Kota Madiun, meningkatkan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan jalannya roda pemerintahan sehingga terbangunnya budaya yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan meningkatkan pelayanan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Program ini selaras dengan program prioritas provinsi Jawa Timur yang keenam serta prioritas pembangunan presiden yang keempat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 21 Program Prioritas 7 RPJMD Kota Madiun 2025-2029

Program prioritas yang ketujuh yaitu Madiun Kota Inovasi. Pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan berbasis inovasi. Dalam hal ini, berbagai langkah strategis dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarkat dalam pembangunan berkelanjutan melalui inovasi, diantaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing serta produktivitas daerah dan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan melalui inovasi, Kompetisi Inovasi Kota Madiun (KIAT) dan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan peningkatan Inovasi Daerah. Program-program ini akan mampu meningkatkan daya saing daerah. Program prioritas tersebut selaras dengan program prioritas provinsi Jawa Timur yang kedua serta prioritas pembangunan presiden yang kesebelas dan ketujuh belas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 22 Program Prioritas 8 RPJMD Kota Madiun 2025-2029

Program prioritas yang kedelapan yaitu Madiun Kota Berbudaya. Prioritas ini berfokus pada pelestarian seni dan budaya daerah, memperkuat lingkungan sosial dan memperkuat toleransi terhadap keberagaman masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program menyapa masyarakat dengan seni budaya masyarakat Kota Madiun, penguatan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju, memberikan penguatan kepada keluarga melalui pendidikan anti narkoba dan sejenisnya (NAPZA) untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap di Kota Madiun dan meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman masyarakat. Selain itu, penguatan citra Kota Madiun sebagai Kota Pendekar mewujudkan hubungan antar budaya baik di dalam negeri maupun luar negeri sebagai upaya mempromosikan Kota Madiun sebagai Kota Pendekar, mewujudkan wisata budaya pencak silat guna mendukung wisata Madiun Mendunia dan pelestarian cagar budaya Kota Madiun untuk peningkatan daya tarik wisata dalam negeri dan luar negeri. Program ini selaras dengan program prioritas provinsi Jawa Timur yang kesatu dan kedelapan serta prioritas pembangunan presiden yang kesepuluh dan ketujuh belas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 5 Program Prioritas RPJMD Kota Madiun 2025-2029

NO	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	Program Nomenklatur	Program Unggulan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MISI 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing global	TUJUAN 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	S1: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat berstandar global	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Memberikan bantuan Laptop bagi siswa SD dan SMP Negeri di Kota madiun	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pendidikan
							Memberikan bantuan Seragam Sekolah bagi siswa SD dan SMP Negeri di Kota madiun	
							Meningkatkan Pembelajaran dengan Penggunaan Papan Tulis Digital untuk SD dan SMP Negeri	
							Peningkatan Sarana dan Prasaran berupa laboratorium terpadu di tiap kecamatan	
							Meningkatkan program *outdoor learning centre* bagi siswa SD dan SMP Negeri	
							Penyediaan ruang baca yang memadai di sekolah dan ruang publik untuk meningkatkan kompetensi unggul	
				Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Perpusatakaan
				Meningkatnya pelestarin koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		
				Meningkatnya Mutu dan Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik Yang Bersertifikasi	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Mendukung Program Pemerintah Pusat yaitu Sekolah Rakyat	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pendidikan
							Meningkatkan Bantuan Beasiswa S1, S2, S3 bagi ASN (Khusus Guru) dan Non ASN	
				Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum		
							Bantuan Beasiswa S1, S2, dan S3 dalam/ Luar Negeri bagi lulusan Sekolah Lanjutan Atas	
							Meningkatkan kemampuan siswa SD SMP melalui kerja sama dengan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Di Jaringan Intra Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatkan Program satu RT satu free wifi	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatya kualitas transportasi darat	Persentase sarana, prasarana, dan perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Menambah jumlah armada bus sekolah untuk SD dan SMP	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Perhubungan
				Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung	Memberikan bantuan Makan Siang bagi siswa SD dan SMP Negeri di Kota Madiun	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			S2 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat berstandar international	Meningkatnya mutu tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Kesehatan
				Meningkatnya Kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		
				meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
				Meningkatnya kepesertaan KB MKJP	Persentase peserta Aktif KB MKJP	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate / ASFR* 15-19)	Program Pengendalian Penduduk		
				Meningkatnya keluarga yang menerapkan 8 fungsi keluarga	Persentase keluarga yang menerapkan 8 fungsi keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Mewujudkan ketahanan keluarga	
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan mencapai target	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mendukung program pemerintah pusat di bidang kesehatan/pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Kesehatan
				Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit		Mendukung Pemberian Bantuan makanan bergizi bagi masyarakat	
				Menurunnya angka kematian ibu	Angka kematian ibu			
				Menurunnya angka kematian balita	Angka kematian balita			
				Meningkatnya Keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis	Angka keberhasilan pengobatan TB			
				Terkendalinya Hipertensi	Persentase Hipertensi dalam pengendalian			
				Meningkatnya Cakupan Imuniasi Bayi Lengkap	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tercapainya Universal Helth Coverage (UHC) di Kota Mdiun	Cakupan Kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)			
				Meningkatnya Cakupan Penerimaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Cakupan Penerimaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis			
				Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Sosial
			S3 : Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran APBD Yang Di ARG	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Mewujudkan ketahanan keluarga	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Terpenuhinya Data Terpilah Gender Dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		
				Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase Lembaga Yang Aktif Dalam Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		
				Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Program Perlindungan Perempuan		
				Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Program Perlindungan Khusus Anak		
			S4 : Menurunnya Pengangguran	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetansi Yang Bekerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Tenaga Kerja
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja di dalam negeri	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan lapangan kerja baik sektor formal maupun non formal dengan melibatkan BUMN/BUMD/sektor swasta untuk menyediakan lapangan kerja	
				Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			S5 : Peningkatan Daya Beli Mayarakat	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Mendukung Pemberian Bantuan makanan bergizi bagi masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase RT Yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Mewujudkan ketahanan keluarga	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan	TUJUAN 2: Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	S6: Meningkatnya Daya Saing ekonomi sektor strategis	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pariwisata
				Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata		
				Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
				Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Presentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Peningkatan produktivitas daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional serta internasional	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Perdagangan
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
				Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		
				Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
				Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatkan dan mengoptimalkan bantuan modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Madiun melalui pembentukan unit usaha di setiap kelurahan salah satunya dengan Mendukung Program Pemerintah Pusat Pembentukan Koperasi Merah Putih guna memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat Kota Madiun maupun luar Kota Madiun	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		
				Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Usaha mikro terfasilitasi beromset naik	Program Pengembangan UMKM	Peningkatan produktivitas daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional serta internasional Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan	
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Meningkatkan pemasaran produk industri unggulan melalui kerja sama dengan minimarket sebagai penopang pendapatan masyarakat Kota Madiun	
				Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Peningkatan produktivitas daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional serta internasional	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Perindustrian
				Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri Yang Diterbitkan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		
				Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tesedianya Informasi Industri Secara Lengkap Akurat Dan Terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatkan fasilitas pengembangan usaha yang berpotensi bernilai ekspor melalui pelatihan dan pengembangan teknik pengemasan produk sehingga dapat diekspor hingga ke luar negeri	
				Meningkatnya Ketersediaan data bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Peningkatan dan mengembangkan pemasaran kemasan air mineral produk Perusahaan Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Daerah)
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan bantuan dana *corporate social responsibility (CSR)* dari berbagai perusahaan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan)
			S7 : Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Perdagangan
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Stabilitas Produktivitas Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan ketahanan pangan melalui bantuan subsidi pupuk bagi petani yang berhak menerima	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pertanian
				Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Angka Kecukupan Energi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pangan
				Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Dan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan		
				Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah total Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
				Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah total Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		
				Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		
				Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Peningkatan ketahanan pangan melalui bantuan subsidi pupuk bagi petani yang berhak menerima	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pertanian
				Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Memiliki Izin Usaha Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian		
				Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Jumlah Sdm Pertanian Terlatih	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan produktivitas daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional serta internasional	
				Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Presentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan Yang Memiliki Sertifikat Pra Nkv Atau Nkv (Nomor Kontrol Veteriner)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
					Jenis Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS)			
			S8 : Peningkatan Kualitas Investasi	Meningkatnya kemudaan berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan produktivitas daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional serta internasional	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Penanaman Modal
				Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal		
				Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal		
				Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
				Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
			S9 : Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatkan asuransi bagi tenaga kerja sektor informal bagi Masyarakat Kota Madiun	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Sosial
				Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Tenaga Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	MISI 3: Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan	TUJUAN 2: Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	S10 : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Prasarana Yang Berfungsi Dengan Baik	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Mewujudkan *Peceland* sebagai prasarana dan sarana pertanian maju, mandiri, dan modern bekerja sama dengan investor dalam negeri maupun luar negeri	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pertanian
				Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		
							Mewujudkan pola ruang kawasan tepi sungai sebagai bagian wisata Kota Madiun	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
				Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Ring Road Timur	
				Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pertanahan
				Meningkatya kualitas transportasi darat	Persentase sarana, prasarana, dan perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Perhubungan
				Meningkatnya sinergitas dan kolaborasi lembaga kemasyarakatan untuk menciptakan kelurahan yang sejahtera, mandiri dan berdaya	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatkan bantuan perbaikan prasarana dan sarana lingkungan masyarakat kepada setiap Rukun Tetangga melalui ketua Rukun Tetangga (RT)	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
				Meningkatnya kulitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha Yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	Mengurangi kawasan kumuh perkotaan	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak Dan Aman)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
				Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman Yang Sudah Dilengkapi Psu (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan sosial
			S11 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Madiun yang nyaman, tentram, dan berkelanjutan	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Lingkungan Hidup
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Tutupan Lahan	Program Pengeolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		
				Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		
				Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh, Dan Puu Lh	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
				Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		
				Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa /Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		
				Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan		
				Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pertanahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Mengurangi kawasan kumuh perkotaan	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pada saat prabencana, saat bencana, dan pasca bencana	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
4	MISI 4: Meningkatkan harmoni Sosial, Keamanan, dan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	TUJUAN 2: Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	S13 : Terwujudnya kondusivitas dan stabilitas daerah	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Pelayanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	Program Penanganan Bencana	Meningkatkan harmoni sosial sehingga tercipta solidaritas dan persatuan yang kuat	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Sosial
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Memberdayakan masyarakat dalam keamanan lingkungan melalui SISKAMLING terpadu	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Meningkatnya pengidentifikasian kelemahan dan kendala yang timbul dalam penanganan trantibum	Persentase Pengkoordinasian Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Membangun kepercayaan yang tinggi di antara individu dan kelompok sehingga tercipta lingkungan yang aman, stabil, dan transparan	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
				Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Capaian Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bantuan Insentif Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Madiun	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah (Keuangan)
5	MISI 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis keterbukaan informasi publik	TUJUAN 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	S14 ; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Tunjangan Guru Yang Dialokasikan Melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah (Keuangan)
				Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA			
				Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu			
				Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarsan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penguatan atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah (Perencanaan)
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Semua Perangkat Daerah yang mengampu Bidang Urusan dengan Program Rutin
							Tersedianya informasi publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akurat, terbuka, benar, dan tidak menyesatkan	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan Meningkatkan peran serta masyarakat melalui *Open Government Partnership (OGP*)	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan)
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infratruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase OPD Yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Tersedianya layanan informasi publik yang berkualitas bagi setiap warga masyarakat Kota Madiun sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
				Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral yang berkualitas dan dapat diakses lintas sektor	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		
				Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
				Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	Program Pengelolaan Arsip		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Kearsipan
				Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai Dengan SKP Bernilai Baik	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatkan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah (Kepegawaian)
				Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan perencanaan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan Dan Pelatihan Yang Dilaksanakan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang kualitas Aparatur Sipil Negara di Kota Madiun	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah (Pendidikan dan Pelatihan)
				Meningkatnya Ketersediaan data bidang Pemerintahan dan Kesehateraan Rakyat	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Kerjasama Internasional Program Walikota Bersama Rakyat (WBR) di Kelurahan guna menampung aspirasi masyarakat.	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Pendukung Pemerintahan (Sekretariat Daerah)
6	MISI 6: meningkatkan integritas Pemerintahan melalui Perilaku Anti Korupsi dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Profesional	TUJUAN 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	S15 : Pemerintahan Bersih Korupsi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase OPD Yang Maturitas Penyelenggaraan SPIP Nya Level 3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatkan zona integritas wilayah bebas korupsi (ZI-WBK)	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)
				Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatkan kerja sama Pemerintah Kota Madiun dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberikan pendidikan anti korupsi pada Aparatur Sipil Negara Kota Madiun Meningkatkan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan jalannya roda pemerintahan sehingga terbangunnya budaya yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.	
				Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Pendukung Pemerintahan (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			S16 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Daerah	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Raperda Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Pendukung Pemerintahan (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
					Ketepatan Penetapan APBD tahun N			
				Meningkatnya Ketersediaan data bidang Pemerintahan dan Kesehateraan Rakyat	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Pendukung Pemerintahan (Sekretariat Daerah)
			S17 : Meningkatnya pelayanan publik yang prima dan profesional berbasis digital	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan pelayanan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak			
				Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Program Pencatatan Sipil		
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
				Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Presentase Informasi Daerah Yang Wajib Diamankan Dengan Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Di Jaringan Intra Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	MISI 7: Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi dalam pembangunan berkelanjutan	TUJUAN 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	S18 : Peningkatan Inovasi Daerah	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing serta Produktivitas daerah dan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan melalui inovasi	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan
				Meningkatnya Pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Kompetisi Inovasi Kota Madiun (KIAT) Peningkatan Inovasi Daerah	
8	MISI 8: Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat yang berkualitas	TUJUAN 2: Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	S19 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Bermasyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Menyapa masyarakat dengan seni budaya masyarakat Kota Madiun	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Kebudayaan
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase peningkatan partisipasi kelompok masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Mewujudkan hubungan antar budaya baik di dalam negeri maupun luar negeri sebagai upaya mempromosikan Kota Madiun sebagai Kota Pendekar	
							Mewujudkan wisata budaya pencak silat guna mendukung wisata Madiun Mendunia	
				Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian cagar budaya Kota Madiun untuk peningkatan daya tarik wisata dalam negeri dan luar negeri	
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penguatan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Jumlah Atlet yang masuk pelatnas	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		
				Meningkatnya pelaksanaan pendelegasian kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ke wilayah administrasi Kecamatan	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan perangkat daerah lain	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaaan		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
				Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
				Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		
							Memberikan penguatan kepada keluarga melalui pendidikan anti narkoba dan sejenisnya (NAPZA) untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap di Kota Madiun	
				Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan, diperlukan perencanaan yang terarah dan sistematis. Program perangkat daerah disusun dengan memastikan keterpaduan antara strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam proses perencanaan, keterkaitan antara program pembangunan daerah dan perangkat daerah menjadi faktor utama yang diperhatikan. Oleh karena itu, penyusunan program perangkat daerah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek berikut:

1. Implementasi Visi dan Misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Madiun;
2. Penyediaan layanan dasar bagi masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Berorientasi pada permasalahan yang ada serta isu-isu strategis daerah;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peluang usaha, serta perbaikan akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, dan kelestarian lingkungan;
5. Memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah; dan
6. Mencari alternatif pendanaan lain diluar APBD/APBN untuk melaksanakan program dan kegiatan, seperti melalui skema pembiayaan KPBU dan/atau pembiayaan lainnya.

Perencanaan program prioritas dirancang sebagai upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bertujuan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2029. Dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan, Pemerintah Kota Madiun menetapkan berbagai program yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah guna mencapai tujuan pembangunan. Program-program ini dilengkapi dengan alokasi pendanaan indikatif serta target kinerja yang terukur, yang akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Visi dan Misi pembangunan Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, diwujudkan melalui berbagai program pembangunan. Program-program tersebut harus mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak, sehingga perlu dituangkan dalam kebijakan umum dan program prioritas, disertai dengan kebutuhan pendanaan yang menjadi program unggulan Pemerintah Kota Madiun. Dengan demikian, RPJMD hanya memuat kebijakan umum dan program unggulan yang bersifat prioritas, sementara kebijakan umum serta program terkait penyelenggaraan maupun operasional pemerintahan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program pembangunan agar program prioritas yang disusun benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat, serta mendukung pencapaian keadilan yang berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4. 1 Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Madiun Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/ Program	Indikator		Baseline Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
	Uraian	Satuan		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bidang Pendidikan					233.774.750.000		237.364.716.573		240.299.642.504		243.358.857.761		246.611.153.944	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pendidikan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,25	85,27	178.638.985.798	85,28	178.638.985.798	85,28	178.638.985.798	85,29	178.638.985.798	85,3	178.638.985.798	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	%	100	100	46.322.949.919	100	54.958.881.429	100	56.647.842.423	100	59.207.057.680	100	62.759.353.863	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM														
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	8.126.895.283	100	8.226.895.283	100	8.226.895.283	100	8.226.895.283	100	8.226.895.283	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														
Meningkatnya Mutu dan Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikasi	%	62	74	685.919.000	75	785.919.000	76	785.919.000	78	785.919.000	80	785.919.000	
Bidang Kesehatan					274.696.925.372		288.410.828.734		288.386.128.861		292.144.365.214		299.913.746.449	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (dinkes)														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Kesehatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88,57	88,60	196.790.906.372	88,61	211.026.845.739	88,62	210.029.870.005	88,64	212.774.656.199	88,65	219.466.623.848	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	100	83,33	73.891.531.640	83,33	73.086.707.138	91,66	74.004.990.721	91,66	74.962.162.116	91,66	75.979.744.931	
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	90,32	91,40		91,40		92,47		92,47		93,55		
Menurunnya angka kematian ibu	Angka kematian ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	0/100.000	0/100.000		0/100.000		0/100.000		0/100.000		0/100.000		
Menurunnya angka kematian balita	Angka kematian balita	Per 1000 kelahiran hidup	5,2	4,8		4,6		4,4		4,2		4,0		
Meningkatnya Keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	96,32	91.1		91,25		91,4		91,6		91,7		
Terkendalinya Hipertensi	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	34	42		46		50		54		58		
Meningkatnya Cakupan Imuniasi Bayi Lengkap	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	99,62	96,2		96,9		97,6		98,3		99		
Tercapainya Universal Helth Coverage (UHC) di Kota Mdiun	Cakupan Kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	88,4	88,96		89,24		89,52		89,80		90,08		
Meningkatnya Cakupan Penerimaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Cakupan Penerimaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	0	46		55		61		70		70		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
Meningkatnya mutu tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	90	92,16	475.785.000	93,24	618.022.077	94,32	625.787.094	95,40	633.880.947	96,48	642.485.639	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
Meningkatnya Kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	91	92,5	421.572.000	93	474.113.415	93,5	480.070.320	94,0	486.279.490	94,5	492.880.549	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	%	2,18	20	3.117.130.360	30	3.205.140.365	40	3.245.410.721	50	3.287.386.462	60	3.332.011.482	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					104.340.658.809		109.533.184.868		109.533.184.868		110.949.873.530		113.868.906.858	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	85,63	85,5	17.389.600.952	85,55	18.832.912.249	85,6	18.832.912.249	85,65	19.487.415.323	85,7	19.955.235.031	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%	17,17	16,74	7.511.689.900	16,5	7.989.378.290	16,29	7.989.378.290	16,07	8.026.485.410	15,84	8.210.392.603	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/ Kota	%	100	100	677.088.000	100	717.713.280	100	717.713.280	100	753.598.944	100	791.278.891	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	%	100	100	1.134.194.000	100	1.247.613.400	100	1.247.613.400	100	1.292.286.743	100	1.356.901.080	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE														
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	81,03	82,01	18.132.540.000	82,26	18.873.013.640	82,51	18.873.013.640	82,77	18.873.013.640	83,07	19.356.274.123	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG														
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	%	100	100	21.803.252.600	100	22.307.944.036	100	22.307.944.036	100	22.067.602.053	100	22.327.374.916	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA														
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	81,03	100	3.085.893.500	100	3.240.188.175	100	3.240.188.175	100	3.337.393.820	100	3.404.141.697	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	%	96,01	95,9	32.126.038.400	95,98	33.628.468.875	96,05	33.628.468.875	96,08	34.316.067.171	96,1	35.552.346.522	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	100	100	919.769.400	100	979.301.660	100	979.301.660	100	1.007.826.595	100	1.037.368.973	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah	%	100	100	1.560.592.057	100	1.716.651.263	100	1.716.651.263	100	1.788.183.831	100	1.877.593.023	
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					36.781.163.566		38.650.690.960		38.650.690.960		39.150.758.359		39.995.732.915	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,14	81,15	16.882.592.341	81,16	17.332.592.342	81,16	17.332.592.342	81,17	17.632.592.342	81,17	17.302.592.342	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	persentase Pengembangan Perumahan	%	100	100	811.466.000	100	831.466.000,00	100	831.466.000	100	831.466.000	100	1.051.466.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
Meningkatnya kulitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	9,75	9,75	6.443.250.000	9,75	6.743.250.000,00	9,75	6.743.250.000	9,75	6.943.250.000	9,75	7.343.250.000	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	12.643.855.225	100	13.743.382.618,00	100	13.743.382.618	100	13.743.450.017	100	14.298.424.573	
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					25.781.529.000		27.064.550.046		27.404.597.271		28.196.726.769	469	28.135.863.410	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,75	83,5	15.862.772.556	83,75	15.356.843.983,00	84	15.398.230.489,00	84,25	15.313.871.887,00	84,5	15.625.423.400	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	99	99	4.606.147.874	99	4.924.906.260	99	5.163.780.660	99	7.040.268.760	99	5.539.284.361	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuas Korban Kebakaran	%	100	100	779.759.570	100	2.024.373.000	100	2.024.373.000	100	1.024.373.000	100	2.024.373.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,87	86,1	3.812.353.140	86,15	3.908.404.803	86,2	3.943.175.622	86,25	3.942.975.622	86,3	3.996.689.849	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	720.495.860	100	850.022.000	100	875.037.500	100	875.237.500	100	950.092.800	
Bidang Sosial					26.030.507.027		27.481.132.991		27.834.233.952		28.002.288.163		28.593.571.940	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,25	86	8.583.024.857	86	8.342.614.503	86	8.455.253.304	86	8.372.662.179	86	8.697.481.254	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	66	68	2.466.455.470	69	2.795.453.362	70	2.830.576.287	71	2.867.186.610	72	2.906.107.577	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100	100	3.643.905.800	100	4.101.999.991	100	4.153.538.765	100	4.207.260.121	100	4.264.372.076	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	11.170.095.000	100	11.669.277.336	100	11.815.893.680	100	11.968.718.987	100	12.131.189.792	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100	100	60.590.000	100	408.770.961	100	413.906.884	100	419.260.304	100	424.951.603	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN														
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	100	106.435.900	100	163.016.838	100	165.065.032	100	167.199.962	100	169.469.638	

Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bidang Ketenagakerjaan					13.211.987.321		13.831.562.924		14.037.118.658		14.223.257.744		14.451.041.389	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,35	83,35	7.793.769.274	83,4	8.341.949.784	83,45	8.508.505.518	83,5	8.694.644.604	83,56	8.922.428.249	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan berbasis kompetansi yang bekerja	%	30	30	2.032.140.000	45	2.042.940.000	50	2.042.940.000	55	2.042.940.000	60	2.042.940.000	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Ketenagakerjaan
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
Meningkatnya penempatan tenaga kerja di Dalam Negeri	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	%	44,55	15	197.249.099	16	213.249.099	17	230.249.099	18	230.249.099	19	230.249.099	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	Pekerja		20.000	3.188.828.948	20.000	3.233.424.041	20.000	3.255.424.041	21.000	3.255.424.041	21.000	3.255.424.041	
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1.881.693.043		2.126.484.693		2.145.382.832		2.165.081.276		2.186.022.979	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran APBD yang di ARG	%	100	100	801.556.880	100	944.781.868	100	956.652.394	100	969.025.618	100	982.179.772	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	100	447.330.356	100	447.330.356	100	447.330.356	100	447.330.356	100	447.330.356	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA														
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	%	30	50	168.257.480	50	194.186.457	50	196.626.275	50	199.169.414	50	201.873.063	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	Dokumen	1	1	25.247.240	1	66.233.672	1	67.065.852	1	67.933.273	1	68.855.441	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	42,2	100	264.260.320	100	298.911.573	100	302.667.188	100	306.581.848	100	310.743.580	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,04	0,044	175.040.767	0,044	175.040.767	0,044	175.040.767	0,044	175.040.767	0,044	175.040.767	
Bidang Pangan					8.782.856.277		9.222.499.091		9.406.939.073		9.593.583.854		9.885.475.211	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,77	83,77	8.509.687.152	83,77	8.935.671.510	84	9.114.374.940	85	9.295.168.439	86,5	9.581.091.487	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pangan
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Angka Kecukupan Energi	Kkal/ kapita	2028	2000	165.492.505	2000	173.767.130	2000	177.242.473	2020	180.787.322	2030	184.403.069	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	%	22	11	25.788.500	11	27.077.925	11	27.619.484	11	28.171.873	11	28.735.311	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN														
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	92,32	90	81.888.120	90	85.982.526	90	87.702.177	92	89.456.220	92,5	91.245.344	
Bidang Pertanahan					785.854.434		785.854.434		785.854.434		795.854.434		1.001.854.434	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pertanahan
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	100	100	145.854.610	100	145.854.610	100	145.854.610	100	145.854.610	100	251.854.610	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH														
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	%	100	100	639.999.824	100	639.999.824	100	639.999.824	100	649.999.824	100	749.999.824	
Bidang Lingkungan Hidup					27.003.030.783		28.346.840.019		28.649.004.563		29.019.547.244		29.468.911.086	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	81	16.464.886.817	81,01	17.292.326.999	81,02	17.476.655.414	81,03	17.702.696.313	81,04	17.976.820.219	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan yang Ditindaklanjuti	%		100	182.200.600	100	191.128.429	100	193.165.772	100	195.664.155	100	198.693.988	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	skor	21,14	50	1.063.554.948	50,01	1.115.669.140	50,02	1.127.561.670	50,03	1.142.145.414	50,04	1.159.831.384	
	Indeks Kualitas Udara	skor	92,12	86,15		86,16		86,17		86,18		86,19		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Peresentase tutupan lahan	%	3,61	3,61	24.999.300	3,61	26.224.266	3,61	26.503.805	3,61	26.846.601	3,61	27.262.318	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	%		78	40.000.435	78	41.960.456	78	42.407.736	78	42.956.232	78	43.621.404	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	%		88,2	298.001.052	88,2	312.603.104	88,2	315.935.312	88,2	320.021.580	88,2	324.977.072	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	100	100	632.631.970	100	663.630.937	100	670.704.943	100	679.379.758	100	689.899.864	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa /Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100	100	289.997.861	100	304.207.756	100	307.450.474	100	311.427.000	100	316.249.406	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Skor		63,5	8.006.757.800	63,5	8.399.088.932	63,5	8.488.619.436	63,5	8.598.410.190	63,5	8.731.555.432	
Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil					8.424.587.000		8.843.837.636		8.843.837.636		8.958.222.738		9.193.908.907	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,61	86,25	7.964.001.602	87	8.342.837.636	87,75	8.299.837.636	88,5	8.352.222.738	89,25	8.549.908.907	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	27,85	30	174.718.320	31	195.000.000	32	215.000.000	33	235.000.000	34	250.000.000	
	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	%	96,4	96,45		96,5		96,55		96,6		96,65		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	137.901.498	100	146.000.000	100	154.000.000	100	162.000.000	100	170.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	100	109.965.580	100	120.000.000	100	133.000.000	100	165.000.000	100	178.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	100	100	38.000.000	100	40.000.000	100	42.000.000	100	44.000.000	100	46.000.000	
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					3.997.475.700		4.152.834.392		4.177.534.265		4.203.280.137		4.230.650.948	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 tahun	6,50	6,85	517.001.000	6,75	517.001.000	6,65	517.001.000	6,55	517.001.000	6,45	517.001.000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
Meningkatnya kepesertaan KB MKJP	Persentase peserta Aktif KB MKJP	%	43,35	48,2	1.669.956.600	49,8	1.669.956.600	51,0	1.669.956.600	52,5	1.669.956.600	54,0	1.669.956.600	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
Meningkatnya keluarga yang menerapkan 8 fungsi keluarga	Persentase keluarga yang menerapkan 8 fungsi keluarga	%	60	64	1.810.518.100	66	1.965.876.792	68	1.990.576.665	70	2.016.322.537	72	2.043.693.348	
Bidang Perhubungan					24.055.654.000		25.252.786.658		25.252.786.658		25.579.403.077		26.252.383.836	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Perhubungan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,82	83,83	12.049.782.148	83,84	12.049.782.148	84,1	12.049.782.148	85	12.049.782.148	85,6	12.049.782.148	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
Meningkatya kualitas transportasi darat	Persentase sarana, prasarana, dan perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	12.005.871.852	100	13.203.004.510	100	13.203.004.510	100	13.529.620.929	100	14.202.601.688	
Bidang Komunikasi dan Informatika					25.691.434.000		26.955.647.471		27.298.661.097		27.656.200.789		28.036.306.431	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,53	84	8.252.817.094	84,2	8.752.000.000	84,5	8.792.000.000	84,7	8.787.000.000	85	8.867.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	%	85	87	3.153.270.906	88	3.240.257.471	90	3.333.271.097	91	3.445.810.789	93	3.445.916.431	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	14.285.346.000	100	14.963.390.000	100	15.173.390.000	100	15.423.390.000	100	15.723.390.000	
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					987.053.586		1.118.053.586		1.118.053.586		1.128.175.184		1.128.175.184	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Miro
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitas Pelatihan	%	100	46	175.183.000	46	300.183.000	46	300.183.000	46	300.183.000	46	300.183.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	2,5	2,5	279.985.420	3	285.985.420	3	285.985.420	3	285.985.420	3	285.985.420	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	%	30	10	303.436.907	10	303.436.907	10	303.436.907	10	313.558.505	10	313.558.505	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Usaha mikro terfasilitasi beromset naik	%	39	7,33	228.448.259	7,33	228.448.259	7,33	228.448.259	7,33	228.448.259	7,33	228.448.259	
Bidang Penanaman Modal					6.966.009.000		7.312.673.317		7.404.551.966		7.500.321.525		7.602.135.534	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,07	85,1	5.990.971.433	85,15	5.789.832.449	85,2	5.941.783.734	85,25	5.968.781.668	85,3	6.079.603.347	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya kemudaan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	%	0	90	51.482.275	91	138.195.000	92	50.995.000	93	91.614.900	94	53.055.200	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	%	44	44	161.918.292	46	310.188.000	48	316.392.000	50	322.720.000	52	329.175.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	99,7	98	396.664.700	98,25	610.383.010	98,5	618.082.047	98,75	626.045.856	99	634.544.190	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	0	100	214.146.000	100	266.574.858	100	269.924.185	100	273.415.351	100	277.126.860	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL														
Meningkaynya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	%	100	100	150.826.300	100	197.500.000	100	207.375.000	100	217.743.750	100	228.630.937	
Bidang Kepemudaan dan Olahraga					13.301.168.748		13.836.828.958		13.790.085.948		13.968.445.214		14.384.540.993	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,86	82,87	8.135.223.685	82,87	8.155.198.132	82,88	8.037.069.387	82,88	8.141.019.848	82,89	8.478.010.547	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														
Meningkatnya daya sing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	%	3,95	3,95	119.990.500	3,95	121.873.006	3,95	123.404.256	3,95	125.000.351	3,95	126.697.183	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN														
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Jumlah Atlet yang masuk pelatnas	Orang	3	3	5.045.954.563	3	5.559.757.820	3	5.629.612.305	3	5.702.425.015	3	5.779.833.263	
Bidang Statistik					125.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral yang berkualitas dan dapat diakses lintas sektor	%	100	100	125.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Statistik
Bidang Persandian					190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI														
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	%	100	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Persandian
Bidang Kebudayaan					2.350.064.100		2.386.808.686		2.416.797.276		2.448.055.833		2.481.287.259	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN														
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase peningkatan partisipasi kelompok masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	-	3	2.079.984.200	3	2.112.465.440	4	2.139.007.098	4	2.166.672.751	5	2.196.084.509	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL														
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	100	100	170.108.000	100	172.782.408	100	174.953.298	100	177.216.123	100	179.621.764	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	100	100	99.971.900	100	101.560.838	100	102.836.880	100	104.166.959	100	105.580.986	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bidang Perpustakaan					6.657.944.162		7.010.886.998		7.097.429.629		7.142.933.637		7.226.591.566	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		82	5.848.405.484	82	5.943.348.320	82	6.006.890.951	82	6.247.394.959	82	6.280.052.888	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Perpustakaan
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	35	35,89	764.590.938	35,91	1.022.590.938	35,94	1.043.590.938	35,97	846.590.938	36,1	895.590.938	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO														
Meningkatnya pelestarin koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	132	100	44.947.740	100	44.947.740	100	46.947.740	100	48.947.740	100	50.947.740	
Bidang Kearsipan					434.223.837		434.223.637		441.223.637		493.223.637		513.223.637	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP														
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Skor	91	91	340.280.730	91	340.280.530	91	343.280.530	91	366.280.530	91	382.280.530	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Kearsipan
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Skor	8,8	8,8	93.943.107	8,8	93.943.107	8,8	97.943.107	8,8	126.943.107	8,8	130.943.107	
Bidang Kelautan dan Perikanan					664.161.742		697.369.829		711.317.226		725.543.570		740.054.442	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														Perangkat Daerah Pengampu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Ton	-	290,5	408.068.639	290,5	428.472.071	290,5	437.041.512	291,5	445.782.343	292,5	454.697.989	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah total produksi perikanan tangkap	ton	96,2	96,5	34.526.432	96,5	36.252.754	97,5	36.977.809	98,5	37.717.365	99,5	38.471.712	Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	kg/ kapita/ tahun	20,46	20,47	221.566.671	20,47	232.645.005	20,47	237.297.905	21,2	242.043.863	21,5	246.884.740	
Bidang Pariwisata					1.073.585.890		1.333.493.810		1.350.248.230		1.367.712.173		1.386.278.346	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	11,86	11,86	297.996.000	11,9	302.651.299	11,92	306.453.901	11,92	310.417.538	11,93	314.631.338	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pariwisata
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	4 media	25	464.999.890	25	472.257.899	25	478.191.491	25	484.376.360	25	490.951.585	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Orang	423	423	310.590.000	430	558.584.612	430	565.602.838	440	572.918.275	450	580.695.423	
Bidang Pertanian					6.137.702.888		6.440.427.591		6.447.595.946		6.246.724.820		6.382.366.920	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Stabilitas Produktivitas Pertanian	Ton/ha	70	6,5	2.895.078.888	6,5	3.039.832.832	6,65	3.100.629.489	6,75	3.051.497.816	7,25	3.112.527.772	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase prasarana yang berfungsi dengan baik	%	100	100	2.106.064.000	100	2.207.206.758	100	2.129.710.697	100	1.953.626.129	100	2.003.406.255	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Presentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	15	10	271.853.000	10	285.445.650	10	291.154.563	10	296.977.654	10	302.917.207	
	Jenis Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS)	Jenis	13	13		13		13		13		13		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	123	30	161.210.000	30	169.270.500	76	172.655.910	76	176.109.028	76	179.631.209	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN														
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian	%	15	15	18.410.000	15	19.330.500	15	19.717.110	15	20.111.452	16	20.513.681	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	%	137	20	685.087.000	25	719.341.350	25	733.728.177	35	748.402.741	50	763.370.795	
Bidang Perdagangan					16.948.000.000		17.791.419.360		18.014.956.155		18.247.959.369		18.495.668.471	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,34	84,36	14.240.062.920	84,37	15.070.935.968	84,38	15.160.935.968	84,39	15.393.939.182	84,4	15.086.227.068	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Perdagangan
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN														
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Presentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	100	100	70.939.140	100	80.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	100	100	1.858.554.780	100	1.795.145.240	100	1.810.255.187	100	1.810.255.187	100	2.365.676.403	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING														
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	40	40,2	262.815.600	40,5	271.765.000	41	271.765.000	41,2	271.765.000	41,5	271.765.000	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN														
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	-	100	253.642.460	100	273.573.152	100	322.000.000	100	322.000.000	100	322.000.000	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	100	100	261.985.100	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	
Bidang Perindustrian					1.385.680.000		1.410.680.000		1.410.680.000		1.428.680.000		1.428.680.000	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan sektor Industri pengolahan	%	-	20	1.330.120.000	13	1.340.120.000	13	1.340.120.000	13	1.358.120.000	12	1.358.120.000	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI														
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase izin usaha Industri yang diterbitkan	%		100	45.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tesedianya Informasi Industri secara lengkap Akurat dan Terkini	%	-	55	10.560.000	60	20.560.000	65	20.560.000	70	20.560.000	75	20.560.000	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah					95.169.801.814		99.905.939.015		97.645.403.792		98.908.337.365		103.860.579.588	
Bagian Pemerintahan					2.963.087.000		2.995.514.777		2.821.025.644		2.878.659.202		2.933.036.839	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Pendukug Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Daerah)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,52	84	885.500.000	84,5	885.500.000,00	84,65	684.500.000,00	84,75	714.500.000,00	84,8	739.500.000	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
Meningkatnya Ketersediaan data bidang Pemerintahan dan Kesehateraan Rakyat	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	2.077.587.000	100	2.110.014.777,00	100	2.136.525.644	100	2.164.159.202	100	2.193.536.839	
Bagian Organisasi					2.308.250.682		2.344.634.533		2.374.093.233		2.404.799.461		2.437.443.698	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Pendukug Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Daerah)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		85,5	2.308.250.682	86	2.344.634.533,00	86,5	2.374.093.233	87	2.404.799.461	88,1	2.437.443.698	
Bagian Hukum					2.744.366.212		3.260.027.990		3.282.358.712		3.305.635.102		3.330.380.572	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Pendukug Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Daerah)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		85,25	1.482.713.317	85,5	1.482.713.317,00	85,75	1.482.713.317	86	1.482.713.317	86,25	1.482.713.317	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
Meningkatnya Ketersediaan data bidang Pemerintahan dan Kesehateraan Rakyat	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	1.261.652.895	100	1.777.314.673,00	100	1.799.645.395	100	1.822.921.785	100	1.847.667.255	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan					2.115.568.000		2.148.588.599		2.175.584.119		2.203.722.855		2.233.637.554	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Pendukug Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Daerah)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,69	85	1.659.468.000	85,25	1.685.369.615,00	85,5	1.706.545.111	85,75	1.728.617.354	86	1.752.082.677	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
Meningkatnya Ketersediaan data bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	456.100.000	100	463.218.984,00	100	469.039.008	100	475.105.501	100	481.554.877	
Bagaian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat					3.995.415.000		4.317.421.693		4.358.362.445		4.401.036.970		4.446.404.878	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Pendukug Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Daerah)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		83,8	1.058.924.232	84	1.058.924.232,00	84,5	1.058.924.232	85	1.058.924.232	85,5	1.058.924.232	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
Meningkatnya Ketersediaan data bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	894.490.768	100	950.823.234,00	100	962.769.666	100	975.222.009	100	988.460.277	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
Meningkatnya Ketersediaan data bidang Pemerintahan dan Kesehateraan Rakyat	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	2.042.000.000	100	2.307.674.227,00	100	2.336.668.547	100	2.366.890.729	100	2.399.020.369	
Bagian Umum					35.619.031.920		37.155.133.198		37.209.896.639		37.702.891.305		38.907.527.133	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Pendukug

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,42	84,45	35.619.031.920	84,5	37.155.133.198,29	84,6	37.209.896.639	84,8	37.702.891.305	85	38.907.527.133	Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Daerah)
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah														
Sekretariat DPRD					45.424.083.000		47.684.618.225		45.424.083.000		46.011.592.470		49.572.148.914	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	87,25	82,5	31.948.100.576	82,75	33.288.635.801	83	31.948.100.576	83,25	32.535.610.046	83,5	34.876.166.490	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Pendukug Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan APBD tahun N	%	100	100	13.475.982.424	100	14.395.982.424	100	13.475.982.424	100	13.475.982.424	100	14.695.982.424	
	Persentase Penetapan Raperda Tahun N	%	40	33,33		33,33		33,33		33,33		40		
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan														
Perencanaan					10.443.900.088		10.798.050.951		10.798.050.951		10.937.711.606		11.225.477.096	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82	83	7.420.149.188	85	7.671.765.176	87	7.671.765.176	89	7.770.990.837	91	7.975.441.555	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan)
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarsan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	1.498.692.000	100	1.549.512.389	100	1.549.512.389	100	1.569.553.591	100	1.610.847.727	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100	100	1.525.058.900	100	1.576.773.386	100	1.576.773.386	100	1.597.167.178	100	1.639.187.814	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA														
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infratruktur dan kewilayahan														
Keuangan					69.877.421.062		73.233.079.896		68.971.170.614		69.863.235.202		76.131.911.654	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,63	84,7	44.709.639.222	84,72	47.378.244.641	84,74	43.116.335.359	84,76	43.821.013.634	84,78	49.703.587.685	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Keuangan)
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	%	40,09	40,09	9.259.083.320	38,32	9.259.316.000	36,55	9.259.316.000	34,77	9.259.316.000	33	9.259.316.000	
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA	%	9,48	4,5		4,3		4,24		4,19		4,14		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset tetap	%	3,04	3,2	2.107.493.000	3,2	2.107.495.000	3,2	2.107.495.000	3,2	2.107.495.000	3,2	2.107.495.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Keuangan)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,35	81,4	11.677.543.652	81,45	12.266.211.887	81,5	12.266.211.887	81,55	12.391.211.887	81,6	12.486.211.887	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Capaian Pajak Daerah	%	100	100	2.123.661.868	100	2.221.812.368	100	2.221.812.368	100	2.284.198.681	100	2.575.301.082	
Kepegawaian					9.111.590.630		9.552.532.800		9.703.772.336		9.827.592.071		9.955.884.700	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kepegawaian)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,42	85,44	7.264.682.230	85,6	7.520.406.000	85,65	7.643.042.000	85,7	7.722.192.000	85,75	7.800.850.500	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik	%	100	100	1.846.908.400	100	2.032.126.800	100	2.060.730.336	100	2.105.400.071	100	2.155.034.200	
Pendidikan dan Pelatihan					2.423.964.370		2.557.090.551		2.558.000.000		2.575.000.000		2.633.081.604	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pendidikan dan Pelatihan)
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan perencanaan, pengembangan dan evaluasi	Persentase realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	%	100	100	2.423.964.370	100	2.557.090.551	100	2.558.000.000	100	2.575.000.000	100	2.633.081.604	
Penelitian dan Pengembangan					1.228.682.800		1.270.855.890		1.270.855.890		1.287.292.983		1.321.160.990	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penelitian dan Pengembangan)
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan	%	100	100	1.140.282.800	100	1.179.421.664	100	1.179.421.664	100	1.194.676.158	100	1.226.107.465	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH														
Meningkatnya Pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	%		100	88.400.000	100	91.434.226	100	91434225,91	100	92.616.825	100	95.053.525	
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					11.632.068.000		12.210.939.333		12.364.361.282		12.524.280.402		12.694.292.740	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,5	82,5	9.557.068.000	82,75	10.199.939.333	83	10.057.361.282	83,25	10.001.280.402	83,5	10.106.292.740	Pengawasan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	94	94,5	1.075.000.000	94,5	861.000.000	94,5	987.000.000	94,5	1.118.000.000	94,5	1.098.000.000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase OPD yang Maturitas Penyelenggaraan SPIP nya Level 3	%		100	1.000.000.000	100	1.150.000.000	100	1.320.000.000	100	1.405.000.000	100	1.490.000.000	
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level/ skor		3 level/ 3,16 skor		3 level/ 3,17 skor		3 level/ 3,18 skor		3 level/ 3,21 skor		3 level/ 3,22 skor		
Unsur Kewilayahan					78.085.365.440		81.971.293.509		83.001.205.733		85.574.733.060		85.216.015.556	
Manguharjo					26.419.812.000		27.734.597.280		28.083.063.182		28.946.286.047		28.832.433.551	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,66	83,4	16.527.919.781	83,45	16.934.500.061	83,48	17.282.965.963	83,5	18.146.188.828	83,53	18.032.336.332	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	Skor	92,71	92,71	4.519.073.219	92,72	4.544.013.219	92,74	4.544.013.219	92,75	4.544.013.219	92,76	4.544.013.219	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya sinergitas dan kolaborasi lembaga kemasyarakatan untuk menciptakan kelurahan yang sejahtera, mandiri dan berdaya	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Manguharjo	%	100	100	4.911.450.000	100	5.667.850.000	100	5.667.850.000	100	5.667.850.000	100	5.667.850.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya pengidentifikasian kelemahan dan kendala yang timbul dalam penanganan trantibum	Persentase pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Manguharjo	%	100	100	348.921.000	100	443.296.000	100	443.296.000	100	443.296.000	100	443.296.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya pelaksanaan pendelegasian kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ke wilayah administrasi Kecamatan	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Manguharjo dan tidak dilaksanakan perangkat daerah lain	%	100	100	112.448.000	100	144.938.000	100	144.938.000	100	144.938.000	100	144.938.000	
Kartoharjo					25.234.616.639		26.490.420.522		26.823.254.210		27.670.182.861		27.539.007.751	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,84	82,86	15.761.817.228	82,87	15.892.621.111	82,88	15.892.621.111	82,89	15.893.549.762	82,9	15.893.549.762	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	Skor	92,62	92,64	3.021.455.186	92,64	3.021.455.186	92,64	3.021.455.186	92,65	3.327.455.186	92,65	3.327.455.186	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya sinergitas dan kolaborasi lembaga kemasyarakatan untuk menciptakan kelurahan yang sejahtera, mandiri dan berdaya	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Kartoharjo	%	100	100	5.822.386.705	100	6.947.386.705	100	7.280.220.393	100	7.820.220.393	100	7.689.045.282	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya pengidentifikasian kelemahan dan kendala yang timbul dalam penanganan trantibum	Persentase pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kartoharjo	%	100	100	470.400.420	100	470.400.420	100	470.400.420	100	470.400.420	100	470.400.420	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya pelaksanaan pendelegasian kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ke wilayah administrasi Kecamatan	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Kartoharjo dan tidak dilaksanakan perangkat daerah lain	%	100	100	158.557.100	100	158.557.100	100	158.557.100	100	158.557.100	100	158.557.100	
Taman					26.430.936.801		27.746.275.708		28.094.888.341		28.958.264.151		28.844.574.254	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,82	83,84	15.842.178.167	83,85	16.630.566.163,40	83,86	16.839.517.646,92	83,87	17.357.007.947	83,88	17.288.864.482	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Skor	89,72	89,73	3.316.190.294	89,74	3.481.220.922,64	89,75	3.524.960.039	89,76	3.633.284.557	89,77	3.619.020.313	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya sinergitas dan kolaborasi lembaga kemasyarakatan untuk menciptakan kelurahan yang sejahtera, mandiri dan berdaya	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Taman	%	100	100	6.806.796.340	100	7.145.537.419,20	100	7.235.316.121	100	7.457.662.508	100	7.428.383.789	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya pengidentifikasian kelemahan dan kendala yang timbul dalam penanganan trantibum	Persentase pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Taman	%	100	100	344.964.000	100	362.131.177,01	100	366.681.103	100	377.949.473	100	376.465.647	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya pelaksanaan pendelegasian kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ke wilayah administrasi Kecamatan	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Taman dan Tidak dilaksanakan perangkat daerah lain	%	100	100	120.808.000	100	126.820.025,37	100	128.413.431	100	132.359.666	100	131.840.023	
Unsur Pemerintahan Umum					17.988.099.540	558	18.883.279.584	558	35.020.534.843	558	33.967.837.476	558	19.630.748.496	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,37	82,2	5.667.816.562	82,6	5.646.489.751,00	82,85	5.646.489.751	83,1	5.646.489.751	83,35	5.646.489.751	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN														
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	2.006.239.912	100	1.918.417.565,00	100	979.173.595	100	979.173.595	100	979.173.595	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100	100	1.149.323.386	100	1.149.398.000,00	100	18.220.810.813	100	17.168.113.446	100	2.831.024.466	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	75	75	378.085.428	75	348.400.000,00	75	348.400.000	75	348.400.000	75	348.400.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	100	100	6.771.969.912	100	7.666.883.496,28	100	7.671.969.912	100	7.671.969.912	100	7.671.969.912	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	2.014.664.340	100	2.153.690.772	100	2.153.690.772	100	2.153.690.772	100	2.153.690.772	
TOTAL ANGGARAN					1.168.421.594.029		1.218.524.378.792		1.234.586.892.670		1.250.506.096.214		1.266.608.685.513	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk menilai dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan disebut sebagai Indikator Kinerja Daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dianggap sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena mencerminkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Sementara itu, IKU merupakan instrumen kuantitatif yang digunakan untuk mengukur hasil pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Keberhasilan tersebut merupakan hasil akumulasi dari pencapaian berbagai target indikator dalam program yang telah dirancang dan diimplementasikan.

Penetapan IKU bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pembangunan daerah, terutama dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang mencakup aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini tercermin dari akumulasi pencapaian indikator hasil (outcome) program pembangunan daerah setiap tahunnya, atau indikator capaian yang bersifat mandiri, yang memastikan bahwa kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Indikator kinerja daerah kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan pencapaian Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Pencapaian IKU Wali Kota dan Wakil Wali Kota bergantung pada dukungan pencapaian IKU dan IKK perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU berfungsi sebagai ukuran kinerja dampak (impact) untuk menilai pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang terdapat dalam RPJMD. Penetapan IKU Kota Madiun untuk periode 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kota Madiun

No	Indikator	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	84,51	84,51 – 84,78	84,60 – 85,96	85,00 – 86,32	85,00 – 86,32	85,48 – 86,73	85,48 – 86,73	
2	Literasi Numerasi SD dan SMP	Nilai	87,78	88,15	88,58	89,24	89,84	90,18	90,49	
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,11	12,15	12,36	12,49	12,67	12,86	13,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,54	14,57	14,60	14,67	14,75	14,89	15,00	
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,67	75,74	76,00	76,27	76,54	76,79	77,03	
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	95,26	95,50	95,82	96,15	96,35	96,60	96,79	
7	Produktifitas Tenaga Kerja	Rupiah (juta)	112,88	114,73	116,61	118,52	120,47	122,44	124,45	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,30	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	3,94 – 3,28	
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,60	70,70	70,90	71,10	71,60	72,13	72,65	
10	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	17.518	17.720	18.130	18.450	18.770	19.320	19.450	
11	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	
12	Indeks Gini	Skor	0,435	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	
13	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	4,26	4,26	4,30	4,36	4,45	4,51	4,60	
14	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (ADHK)	%	5,4	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,95 – 7,00	
15	Rasio PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	%	23,59	23,59	23,61	23,83	24,15	24,42	24,81	
16	Rasio PDRB Sektor Jasa (ADHK)	%	21,16	21,20	21,30	21,41	21,53	21,75	21,84	
17	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	14,46	14,46	14,51	14,62	14,70	14,75	14,81	
18	Tingkat Inflasi	%	1,31	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	
19	*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*	Skor	3,75	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	
20	Angka Kemiskinan	%	4,38	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	3,90-3,00	
21	Indeks Infrastruktur	Skor	98,62	98,70	98,80	99,00	99,15	99,20	99,20	
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	62,21	66,23	66,31	66,39	66,47	66,55	66,63	
23	Indeks Risiko Bencana *(H&V 2021)*	Skor	76,88	75,60	73,75	72,00	70,32	68,73	67,20	
24	Indeks Rasa Aman	Skor	84,16	84,52	84,93	85,13	85,46	85,84	86,64	
25	Indeks Ketenteraman	Skor	84,23	84,72	85,34	85,81	86,24	86,67	87,12	
26	Indeks Kerukunan	Skor	78,04	78,20	84,80	85,20	85,80	86,20	86,80	
27	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	91,95	91,95	92,50	93,30	94,16	94,70	95,05	
28	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
29	Nilai SAKIP Kota Madiun	Skor	81,03	80,05 – 82,01	80,05 – 82,01	80,05 – 82,01	80,05 – 82,01	80,05 – 82,01	82,01 – 83,42	
30	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	77,07	80,15	80,42	80,93	81,35	81,71	82,44	
31	Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP)	Nilai	96	96,05	96,44	96,92	97,21	97,40	97,54	
32	Persentase Unit Kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah	%	20	20	40	40	60	60	80	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)									
33	Indeks Kualitas Kebijakan	Skor	68,67	68,67	70,39	71,14	72,26	73,27	74,50	
34	Indeks Reformasi Hukum	Skor	91,02	91,02	91,15	91,53	92,07	92,44	93,14	
35	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun	Skor	88,74	88,74	89,25	89,91	90,35	91,27	91,89	
36	Indeks Masyarakat Digital	skor	49,86	49,86	49,92	50,72	50,92	51,35	51,74	
37	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	84,95	84,95	84,95	85.00	85.10	85.15	85.20	
38	Indeks Inovasi Daerah	Skor	67,09	67,09	68,43	69,72	71,01	71,53	72,11	

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Kinerja Pemerintah Kota Madiun pada periode 2025-2029, selain dilihat dari IKU, juga dapat diukur melalui target indikator kinerja daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kinerja tersebut dapat dianalisis melalui empat aspek utama, yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat mencakup kinerja utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan lain sebagainya. Sedangkan Aspek Pelayanan Umum terbagi menjadi empat fokus, yaitu Urusan Wajib Layanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Aspek Daya Saing Daerah mencakup empat fokus utama, yaitu Kemampuan Ekonomi Daerah, Iklim Berinvestasi, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia. Rincian mengenai indikator kinerja daerah dan target capaian setiap tahun pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Kota Madiun

NO		Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	BASELINE	Target Tahun						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
	1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	92,29	92,29	92,40	92,55	93,00	93,50	94,00	
	2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	5,34	5,00 - 3,74	5,00 - 3,74	5,00 - 3,74	5,00 - 3,74	5,00 - 3,74	5,00 - 3,74	
	3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ Kapita	1.195,00*	1.231,00	1.262,00	1.299,00	1.336,00	1,368,20	1.402,50	
	4	Penduduk Berakses Air Minum	%	100	100	100	100	100	100	100	
	5	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	99	99,1	99,15	99,2	99,23	99,3	99,3	
	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	62,21	66,23	66,31	66,39	66,47	66,55	66,63	Indikator Sasaran Kota
	7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	32,29*	35	38	40	44	46	48,75	
	8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	99,81	100	100	100	100	100	100	
	9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	26,97*	33	37,1	39,5	41,8	44,4	47,25	
	10	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	99,069	99,300	99,340	99,378	99,415	99,440	99,475	
	11	Penurunan Emisi GRK Komulatif	Ton CO_2 eq	14.380,56	14.623,3	14.915,77	15.214,08	15.518,37	15.828,73	16.145,31	
	12	Indeks Risiko Bencana (H&V 2021)	Skor	76,88	75,60	73,75	72,00	70,32	68,73	67,20	
	13	Indeks Ketahanan Daerah	Skor	0,51	0,58	0,60	0,62	0,65	0,68	0,71	
	14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-0,40	0,57	0,59	0,62	0,64	0,67	0,69	
	15	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km^2	5.585	5.667	5.699	5.733	5.769	5.806	5.844	
B		ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	Indikator Tujuan Kota
	2	Angka Kemiskinan	%	4,38	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	3,90-3,00	Indikator Sasaran Kota
	3	PDRB Per Kapita ADHK	Rp Juta	61,66	61,60 – 70,57	61,60 – 70,57	61,60 – 70,57	61,60 – 70,57	61,60 – 70,57	70,57 – 74,12	
	4	PDRB Per Kapita ADHB	Rp Juta	92,46	92,46 – 101, 17	92,46 – 101, 17	92,46 – 101, 17	92,46 – 101, 17	92,46 – 101, 17	101,17 – 106,53	
	5	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	17.518	17.720	18.130	18.450	18.770	19.320	19.450	Indikator Sasaran Kota
	6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,30	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	3,94 – 3,28	Indikator Sasaran Kota
	7	Indeks Gini	Skor	0,435	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	Indikator Sasaran Kota
	8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	84,51	84,51 – 84,78	84,60 – 85,96	85,00 – 86,32	85,00 – 86,32	85,48 – 86,73	85,48 – 86,73	Indikator Tujuan Kota
	9	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,67	75,74	76,00	76,27	76,54	76,79	77,03	Indikator Sasaran Kota
	10	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	skor	0	0	0	0	0	0	0	
	11	Prevelensi Stunting	%	11,8	11	10	9,2	8,4	7,6	7,0	
	12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (enrollment TB)	%	97,6	95	95	95	95	95	95	
	13	Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (treatment success rate)	%	96,32	91	91,10	91,25	91,40	91,60	91,70	
	14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	88,4	88,68	88,96	89,24	89,52	89,80	90,08	
	15	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,11	12,15	12,36	12,49	12,67	12,86	13,00	Indikator Sasaran Kota
	16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,54	14,57	14,60	14,67	14,75	14,89	15,00	Indikator Sasaran Kota
	17	Literasi Numerasi SD dan SMP	Nilai	87,78	88,15	88,58	89,24	89,84	90,18	90,49	Indikator Sasaran Kota
	18	Rata-rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	91,01	91,45	91,85	92,15	92,45	92,75	93,00	
	19	Rata-rata Kemampuan Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	92,00	92,15	92,35	92,55	92,75	92,90	93,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	79,20	79,75	80,35	81,90	83,15	83,60	84,15	
	21	Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	88,89	89,25	89,75	90,35	91,00	91,45	91,80	
	22	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	14,91	14,91	14,95	15,05	15,12	15,20	15,30	
	23	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	76,49*	77,48	77,90	78,22	78,82	79,48	82,00	
	24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	46,60	65,00 – 72,25	65,00 – 72,25	65,00 – 72,25	65,00 – 72,25	65,00 – 72,25	72,00-87,49	
	25	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	8,15*	8,15	8,60	9,34	9,72	10,46	11,04	
	26	Indeks Kerukunan	Skor	78,04	78,20	84,80	85,20	85,80	86,20	86,80	Indikator Sasaran Kota
	27	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Skor	70,55	70,55	70,80	71,15	71,35	71,70	72,00	
	28	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Skor	0,093	0,078	0,073	0,071	0,069	0,067	0,065	
	29	Indeks Kualitas Lahan	Skor	24,18	37,67	37,67	37,67	37,67	37,67	37,67	
	30	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	95,26	95,50	95,82	96,15	96,35	96,60	96,79	Indikator Sasaran Kota
C		ASPEK DAYA SAING DAERAH									
	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	84,51	84,51 – 84,78	84,60 – 85,96	85,00 – 86,32	85,00 – 86,32	85,48 – 86,73	85,48 – 86,73	Indikator Tujuan Kota
	2	Angka Ketergantungan	%	42,01	42,01	41,90	41,52	41,18	40,92	40,65	
	3	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	14,46	14,46	14,51	14,62	14,70	14,75	14,81	Indikator Sasaran Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (ADHK)	%	5,4	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,95 – 7,00	Indikator Sasaran Kota
	5	Rasio Kewirausahaan	%	14,14	14,24	14,93	15,87	16,52	14,93-18,07	14,93-18,07	
	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,60	70,70	70,90	71,10	71,60	72,13	72,65	Indikator Sasaran Kota
	7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	orang	3.862*	4.268	4.621	5.012	5.322	5.690	5.920	
	8	Indeks Inovasi Daerah	Skor	67,09	67,09	68,43	69,72	71,01	71,53	72,11	Indikator Sasaran Kota
	9	Rasio PDRB Sektor Jasa (ADHK)	%	21,16	21,20	21,30	21,41	21,53	21,75	21,84	Indikstor Sasaran Kota
	10	Rasio PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	%	23,59	23,59	23,61	23,83	24,15	24,42	24,81	Indikstor Sasaran Kota
	11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	62,81	63,30	63,85	64,37	64,88	65,40	65,92	
	12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	20,26	21,05	21,47	21,60	21,69	21,71	21,72	
	13	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	-0,410	-0,410	-0,400	-0,395	-0,390	-0,380	-0,370	
	14	Indeks Infrastruktur	Skor	98,62	98,70	98,80	99,00	99,15	99,20	99,20	Indikator Sasaran Kota
	15	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Skor	92,34	92,49	92,64	92,74	92,85	92,95	93,06	
	16	Rasio Rumah Layak Huni	%	99,9	99,56	99,60	99,63	99,66	99,69	99,72	
	17	Proporsi kontribusi PDRB kota terhadap provinsi	%	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,65	
	18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,96*	0,94 - 0,96	0,94 - 0,96	0,94 - 0,96	0,94 - 0,96	0,94 - 0,96	0,94 - 0,96	
	19	Tingkat Inflasi	%	1,31	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	Indikator Sasaran Kota
	20	*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*	Skor	3,75	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	Indikator Sasaran Kota
	21	Indeks Akses Keuangan Daerah	Skor	7,37	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	
	22	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	4,26	4,26	4,30	4,36	4,45	4,51	4,60	Indikator Tujuan Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ASPEK PELAYANAN UMUM									
	1	Indeks Reformasi Hukum	Skor	91,02	91,02	91,15	91,53	92,07	92,44	93,14	Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	91,95	91,95	92,50	93,30	94,16	94,70	95,05	Indikator Tujuan Kota
	3	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
	4	Indeks Rasa Aman	Skor	84,16	84,52	84,93	85,13	85,46	85,84	86,64	Indikator Sasaran Kota
	5	Indeks Ketenteraman	Skor	84,23	84,72	85,34	85,81	86,24	86,67	87,12	Indikator Sasaran Kota
		INDIKATOR KINERJA KUNCI									
A		Pelayanan Pendidikan									
	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,11	12,15	12,36	12,49	12,67	12,86	13,00	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Literasi Numerasi SD dan SMP	Nilai	87,78	88,15	88,58	89,24	89,84	90,18	90,49	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,54	14,57	14,60	14,67	14,75	14,89	15,00	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	4	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,85	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	Indikator Sasaran PD
	1	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	Orang	21451	28432	21451	21451	21451	21451	21451	spm
	2	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	305	273	305	305	305	305	305	spm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	4752	5395	4752	4752	4752	4752	4752	spm
	4	Rata-Rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	91,01	91,45	91,85	92,15	92,45	92,75	93,00	spm
	5	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	79,20	79,75	80,35	81,90	83,15	83,60	84,15	spm
	6	Iklim Keamanan SD	Nilai	75,59	78,51	78,51	78,51	78,51	78,51	78,51	spm
	7	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	76,93	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	spm
	8	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	58,25	61,36	61,36	61,36	61,36	61,36	61,36	spm
	9	Rata-Rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Nilai	92,00	92,15	92,35	92,55	92,75	92,90	93,00	spm
	10	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	88,89	89,25	89,75	90,35	91,00	91,45	91,80	spm
	11	Iklim Keamanan SMP	Nilai	75,89	76,29	76,29	76,29	76,29	76,29	76,29	spm
	12	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	77,14	75,9	75,90	75,90	75,90	75,90	75,90	spm
	13	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	61,96	67,17	67,17	67,17	67,17	67,17	67,17	spm
	14	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal AKREDITAS B	Nilai		94,6	91,61	92,26	92,90	93,55	94,19	spm
	15	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/ D IV	Nilai	93,87	94,81	93,87	93,87	93,87	93,87	93,87	spm
B		Pelayanan Kesehatan									
	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,67	75,74	76,00	76,27	76,54	76,79	77,03	Indikator Sasaran Kota dan indikator tujuan PD
	2	Prevelensi Stunting	%	11,8	11	10	9,2	8,4	7,6	7,0	Indiktor Sasaran
	3	Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	%	97,84	91,00	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	Indiktor Sasaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan	Skor	87,05	87,3	87,55	87,8	88,05	88,3	88,55	Indiktor Sasaran
	5	Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	50	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	Indiktor Sasaran
	6	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1000 penduduk	2,09	2,65	3,36	4,26	5,4	6,85	8,68	Indiktor Sasaran
	7	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Indiktor Sasaran
	8	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	94	95,0	95,5	96,0	96,2	96,4	96,6	Indiktor Sasaran
	9	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,58	4,51	4,53	4,55	4,56	4,58	4,60	Indikator Sasaran
	1	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.847	1.907	1.945	1.984	2.024	2.065	2.106	Spm
	2	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.847	1.907	1.945	1.984	2.024	2.065	2.106	Spm
	3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.690	1.887	1.925	1.964	2.003	2.043	2.084	Spm
	4	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	10.611	8.278	8.444	8.613	8.785	8.961	9.140	Spm
	5	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	31.650	31.683	31.395	31.426	31.458	31.489	31.521	Spm
	6	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	129.392	129.400	129.500	129.600	129.700	129.800	129.900	Spm
	7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	34.940	35.045	35.150	35.256	35.362	35.468	35.575	Spm
	8	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	12.730	18.910	9.752	8.752	7.752	6.752	5.752	Spm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	10.755	6.906	6.955	7.002	7.048	7.082	7.116	Spm
	10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	orang	403	404	405	406	408	409	410	Spm
	11	Jumlah warga negara terduga tuberculusis yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	6.597	6.585	5.649	4.866	4.308	3.884	3.558	Spm
	12	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodefiviency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	6.240	6.436	6.241	6.080	5.965	5.878	5.811	Spm
C		Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	1	Indeks Infrastruktur	Skor	98,62	98,70	98,80	99,00	99,15	99,20	99,20	Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Skor	92,34	92,49	92,64	92,74	92,85	92,95	93,06	Indikator Tujuan PD
	3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Skor	4,2	4,2	4,25	4,30	4,35	4,40	4,45	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase aksesibilitas kota dalam kondisi mantap	%	96,01	95,80	95,90	95,98	96,05	96,08	96,10	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	%	81,03	81,67	82,01	82,26	82,51	82,77	83,07	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase kawasan rawan banjir/ genangan	%	17,17	16,97	16,74	16,50	16,29	16,07	15,84	Indikator Sasaran PD
	9	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani Air Minum	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	30	30	50	60	75	100	Indikator Sasaran PD
	1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	orang	201.733	202.701	203.637	204.614	205.596	206.582	207.573	SPM
	2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	orang	99,87	99,74	99,77	99,80	99,82	99,85	99,87	SPM
D		Pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	1	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	99,5	99,56	99,60	99,63	99,66	99,69	99,72	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,31	4,31	4,31	4,32	4,32	4,33	4,33	Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Perumahan dan Permukiman	Skor	99,90	99,77	99,79	99,81	99,83	99,85	99,86	Indikator Sasaran PD
	4	Indeks Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman	Skor	98	98	98,32	98,33	98,34	98,34	98,35	Indikator Sasaran PD
	5	Rasio Rumah Layak Huni	%	99,9	99,56	99,60	99,63	99,66	99,69	99,72	Indikator Sasaran PD
	1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	orang	0	0	0	0	0	0	0	Spm
	2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	orang	0	0	0	0	0	0	0	spm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E		Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
a		Satuan Polisi Pamong Praja									
	1	Indeks Rasa Aman	Skor	84,16	84,52	84,93	85,13	85,46	85,84	86,64	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Ketenteraman	Skor	84,23	84,72	85,34	85,81	86,24	86,67	87,12	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	92,12	92,12	92,21	92,45	92,53	92,71	93	Indikator Sasaran PD
	4	Indeks Pemadam Kebakaran	%	86,33	86,45	86,61	86,75	86,91	87,12	87,52	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	skor	4,60	4,65	4,70	4,75	4,80	4,85	4,85	Indikator Sasaran PD
	1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	orang	2.189	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Spm
	2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	orang	40	40	40	40	40	40	40	Spm
b		Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
	1	Indeks Risiko Bencana (H&V 2021)	Skor	76,88	75,60	73,75	72,00	70,32	68,73	67,20	Indikator Sasaran Kota dan Tujuan PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,77	4,80	4,85	4,90	4,95	5,00	5,05	Indikator Tujuan PD
	3	Indeks Ketahanan Daerah	Skor	0,51	0,58	0,60	0,62	0,65	0,68	0,71	Indikator Sasaran PD
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Skor	92,31	92.32	92.35	92.37	92.40	92.42	92.45	Indikator sasaran PD
	1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Orang	400	450	450	450	450	450	450	Spm
	2	Jumlah Warga Negara yang memperolah Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	261	410	460	460	530	530	600	Spm
	3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	12	826	826	826	826	826	826	Spm
F		Pelayanan Sosial									
	1	Angka Kemiskinan	%	4,38	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	3,90-3,00	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,92	4,93	4,94	4,95	4,96	4,97	4,98	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase PMKS yang mandiri	%	5	5	5	5,1	5,2	5,3	5,4	Indikator Sasaran PD
	1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	198	110	115	120	125	130	135	Spm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	470	15	16	17	18	19	20	Spm
	3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	253	25	27	29	31	33	35	Spm
	4	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Orang	96	96	97	98	99	100	100	Spm
	5	Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Orang	49	40	40	40	40	40	40	Spm
G		Pelayanan Ketenagakerjaan									
	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,60	70,70	70,90	71,10	71,60	72,13	72,65	Indikator Sasaran Kota
	2	Produktifitas Tenaga Kerja	Rupiah (juta)	112,88	114,73	116,61	118,52	120,47	122,44	124,45	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	skor	4,30	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	3,94 – 3,28	Indikator Sasaran Kota
	4	Persentase penyerapan Tenaga Kerja	%	91,90	80 - 92	80 - 92	80 - 92	80 - 92	80 - 92	80 - 92	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase tenaga kerja yang terlindungi	%	84,45	80 – 85	80 – 85	80 – 85	80 – 85	80 – 85	85-90	Indikator Sasaran PD
	6	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,75	4,75	4,76	4,77	4,78	4,79	4,8	Indikator Sasaran PD
H		Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	95,26	95,50	95,82	96,15	96,35	96,60	96,79	Indikator Sasaran Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Skor	0,093	0,078	0,073	0,071	0,069	0,067	0,065	Indikator Tujuan PD
	3	Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan	%	25,01	25,02	25,03	25,04	25,05	25,06	25,07	Indikator Sasaran PD
	5	persentase keluarga yang berkualitas	%	86,67	85	85	85	85	85	85	Indikator Sasaran PD
I		Pelayanan Pangan									
	1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	92,29	92,29	92,40	92,55	93,00	93,50	94,00	Indikator Tujuan PD
	2	Skor Pola Pangan Harapan	skor	95	95	95	95	95	95,5	95,8	Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,68	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,85	Indikator Sasaran PD
J		Pelayanan Pertanahan									
K		Pelayanan Lingkungan Hidup									
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	62,21	66,23	66,31	66,39	66,47	66,55	66,63	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Persentase Kualitas Air di Kota Madiun dalam kondisi Sedang	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Kualitas Udara di Kota Madiun dalam kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Skor	24,18	37,67	37,67	37,67	37,67	37,67	37,67	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,43	4,43	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	Indikator Sasaran PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	Persentase Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	%	99,06	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	99,7	Indikator Sasaran PD
L		Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai	92,83	92,83	93,50	94,00	94,50	95,00	96,00	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	5,00 Pelayanan Prima	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase data kependudukan yang akurat	%	99,62	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
M		Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	1	Angka Kelahiran Total (Total *Fertility Rate (TFR)*)	Nilai	1,84	1,85	1,86	1,87	1,88	1,89	1,9	Indikator Tujuan PD
	2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ *modern contraceptive (mCPR)*	%	70,46	70,5	70,55	70,56	70,57	70,58	70,59	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	5,58	4,8	4,2	3,6	3,0	2,8	2,5	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	32	33	34	35	36	37	38	Indikator Sasaran PD
N		Pelayanan Perhubungan									
	1	Rasio Konektivitas		1	1	1	1	1	1	1	Indikator Tujuan PD
	2	Konektivitas Transportasi Darat		1	1	1	1	1	1	1	Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Fatalitas	%	5,80	5,76	5,74	5,72	5,70	5,68	5,66	Indikator Sasaran PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,78	4,79	4,8	4,81	4,82	4,86	4,93	Indikator Sasaran PD
O		Pelayanan Komunikasi dan Informatika									
	1	Indeks Masyarakat Digital	skor	49,86	49,86	49,92	50,72	50,92	51,35	51,74	Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	2,29	2,29	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	Indikator Tujuan PD
	3	Nilai Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Nilai	1,5	1,5	2	2,1	2,2	2,3	2,4	Indikator Sasaran PD
	4	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	97,42	96	96,5	97	97,45	97,75	98	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,65	4,67	4,7	4,74	4,78	4,8	4,84	Indikator Sasaran PD
P		Pelayanan Koperasi Usaha Kecil Menengah									
	1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	28,99	28,99-30,82	28,99-30,82	28,99-30,82	28,99-30,82	28,99-30,82	30,45-32,50	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	5	5	5	5	5	5	5	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase usaha mikro yang beromset naik	%	2,17	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Indikator Sasaran PD
Q		Pelayanan Penanaman Modal									
	1	*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*	Skor	3,75	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	Indikator Sasaran Kota
	2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Milyar	498 M	198-270	200-280	202-290	204-290	206-300	208-300	Indikator Tujuan PD
	3	Nilai Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,92	4,51 – 4,93	4,51 – 4,93	4,51 – 4,93	4,51 – 4,93	4,51 – 4,93	4,51 – 4,93	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase peningkatan jumlah investor	%	42,86	42	44	46	48	50	52	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks kepuasan masyarakat Perangkat Daerah	Skor	92,66	90,00 – 93,00	90,00 – 93,00	90,00 – 93,00	90,00 – 93,00	90,00 – 93,00	90,00 – 93,00	Indikator Sasaran PD
R		Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	55,50	55,50	55,60	55,70	55,80	55,90	56,00	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Partisipasi Olahraga	%	25,40	25,45	25,50	25,55	25,60	25,65	25,70	Indikator Tujuan PD
	3	Presentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	4	Jumlah Prestasi Olahraga	medali	127	127	127	127	127	127	127	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	3,19	3,58	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	Indikator Sasaran PD
S		Pelayanan Statistik									
	1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar kualitas yang dapat diakses oleh publik	%	73	74	75	80	85	90	95	Indikator Sasaran PD
T		Pelayanan Persandian									
	1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	625	625	626	627	628	629	630	Indikator Sasaran PD
U		Pelayanan Kebudayaan									
	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Skor	0	0	59,38	59,38	59,39	59,39	59,40	Indikator Tujuan PD
	2	Jumlah Obyek Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Seni, Budaya dan Sejarah Kota Madiun	Obyek	32	32	32	32	32	32	32	Indikator Sasaran PD
V		Pelayanan Perpustakaan									
	1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Skor	3,41	3,10	3,45	3,47	3,49	3,51	3,53	Indikator Tujuan PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Skor	18,67	18,50	18,70	18,74	18,78	18,82	18,82	Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,68	4,68	4,80	4,81	4,82	4,83	4,84	Indikator Sasaran PD
W		Pelayanan Kearsipan									
	1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkungan Pemerintah Daerah	Skor	92,44	92,44	92,46	92,48	92,50	92,52	92,54 Indeks	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	%	18	71,42	89,28	92,85	96,42	100	100	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Unit Kearsipan pada SDN dan SMPN di Kota Madiun	%	0	0	7,40	25,92	44,44	62,96	85,18	Indikator Sasaran PD
X		Pelayanan Kelautan dan Perikanan									
	1	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	skor	1,35	1,36	1,36	1,36	1,37	1,38	1,39	Indikator Sasaran PD
Y		Pelayanan Pariwisata									
	1	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (ADHK)	%	5,4	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	5,95 – 7,00	Indikator Sasaran Kota dan Tujuan PD
	2	Prosentase pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	%	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	Indikator Sasaran PD
	3	Prosentase peningkatan penyerapan Tenaga Kerja Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2	2	2	2	2	2	2	Indikator Sasaran PD
Z		Pelayanan Pertanian dan Peternakan									
	1	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	skor	1,26	1,26	1,26	1,27	1,27	1,27	1,30	Indikator Sasaran PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	rasio	1,2	1,17	1,21	1,21	1,21	1,22	1,24	Indikator Sasaran PD
AA		Pelayanan Perdagangan									
	1	Rasio PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	%	23,59	23,59	23,61	23,83	24,15	24,42	24,81	Indikator Sasaran Kota
	2	Rasio PDRB Sektor Jasa (ADHK)	%	21,16	21,20	21,30	21,41	21,53	21,75	21,84	Indikator Sasaran Kota
	3	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	%	26,37	26,37 – 27,00	26,37 – 27,00	26,37 – 27,00	26,37 – 27,00	26,37 – 27,00	26,37 – 27,00	Indikator Tujuan PD
	4	Persentase Pengelolaan Usaha Perdagangan	%	93,3	94	94,05	94,1	94,2	94,3	94,4	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase pasar rakyat yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	%	100	95	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	Indikator Sasaran PD
	7	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,5	4,5	4,53	4,55	4,58	4,61	4,64	Indikator Sasaran PD
BB		Pelayanan Perindustrian									
	1	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	14,46	14,46	14,51	14,62	14,70	14,75	14,81	Indikator Sasaran Kota
	2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	%	13,63	13,64	13,70	13,80	13,90	13,95	14,00	Indikator Tujuan PD
	3	Persentase IKM yang bertambah kapasitas produksinya	%	-	9	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19	Indikator Sasaran PD
CC		Pelayanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
a		Sekretariat Daerah									
	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	91,95	91,95	92,50	93,30	94,16	94,70	95,05	Indikator Tujuan Kota
	2	Nilai SAKIP Kota Madiun	Nilai	81,03	80,05 – 82,01	80,05 – 82,01	80,05 – 82,01	80,05 – 82,01	80,05 – 82,01	82,01 – 83,42	Indikator Sasaran Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota madiun	Skor	88,74	88,74	89,25	89,91	90,35	91,27	91,89	Indikator Sasaran Kota
	4	Indeks Kualitas Kebijakan	Skor	68,67	68,67	70,39	71,14	72,26	73,27	74,50	Indikator Sasaran Kota dan PD
	5	Indeks Reformasi Hukum	Skor	91,02	91,02	91,15	91,53	92,07	92,44	93,14	Indikator Sasaran Kota dan PD
	6	Tingkat Inflasi	%	1,31	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	Indikator Sasaran Kota
	7	Persentase ketercapaian realisasi rencana aksi reformasi birokrasi terhadap target	%	93	93	93,5	93,75	94	95	95,85	Indikator Tujuan PD
	8	Nilai Budaya Kerja	Nilai			80	82	84	86	88	Indikator Sasaran PD
	9	Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,6	4,61	4,65	4,67	4,68	4,69	4,7	Indikator Sasaran PD
	10	Tingkat Kematangan Organisasi	%	46,12	46,2	48	48,5	49	49,5	50	Indikator Sasaran PD
	11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Skor	78,01	70,01	70,01-78,01	72,01-80,45	72,01-80,45	74,01-80,45	80,45	Indikator Sasaran PD
	12	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP	Nilai	24.37	24,4	24,5	24,7	25	25,2	25,5	Indikator Sasaran PD
	13	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Nilai	12.45	12,45	12,5	12,55	12,6	12,65	12,85	Indikator Sasaran PD
	14	Persentase capaian kinerja indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	79,68	79,68	79,80	79,85	79,9	80	82,5	Indikator Sasaran PD
	15	Persentase Ketercapaian Kinerja Peta Jalan Inflasi	%	0	0	81	81,5	82	82,5	83	Indikator Sasaran PD
b		Sekretariat DPRD									
	1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	90,93	86,00	86,00	87,00	87,00	88,00	88,00	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	90,93	86,00	86,00	87,00	87,00	88,00	88,00	Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,86	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	Indikator Sasaran PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DD		Pelayanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
a		Perencanaan									
	1	Nilai Sakip Pada Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	26	26	26,2	26,4	26,6	26,8	27	Indikator Tujuan dan Sasaran PD
	2	Nilai Pelayanan Publik Perangkat Daerah	skor	3,6	3,63	3,65	3,67	3,69	3,72	3,76	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Tingkat keselarasan dokumen perencanaan penganggaran dengan dokumen perencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	89	89	89,2	89,4	89,6	89,8	90	Indikator Sasaran PD
	5	NIlai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	83	83	85	87	89	91	Indikator Sasaran PD
b		Keuangan									
	1	Badan Keuangan dan Aset Daerah									
	a	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	b	Persentase LKPD yang memenuhi asersi audit	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	c	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,78	4,8	4,81	4,82	4,83	4,84	4,85	Indikator Sasaran PD
	2	Badan Pendapatan Daerah									
	a	Capaian Target Pajak Daerah	Rp.	109.603.926.000	138.994.500.000	142.546.702.125	145.900.640.000	147.300.500.000	150.900.455.000	154.974.767.285	Indikator Tujuan PD
	b	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli daerah dari sektor pajak	%	2	2	2	2	2	2	2	Indikator Sasaran PD
	c	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	%	4,5	4,5	4,51	4,53	4,55	4,56	4,58	Indikator Sasaran PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c		Kepegawaian									
	1	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	84,95	84,95	84,95	85.00	85.10	85.15	85.20	Indikator Sasaran Kota dan Tujuan PD
	2	Indeks Profesionalitas ASN Berdimensi Kompetensi	Skor	29	29	29,12	29,15	29.18	29.20	29.25	Indikator Tujuan PD
	3	Indeks Sistem Merit	Skor	285	285	300	305	310	315	320	Indikator Sasaran PD
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Skor	87,22	86,00	87,30	87.40	87.50	87,55	87.60	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,49	4,69	4,69	4.70	4,71	4,72	4,73	Indikator Sasaran PD
d		Pendidikan dan Pelatihan									
	1	Persentase Peningkatan Kualitas ASN	%	30	30	60	65	70	75	80	Indikator Sasaran PD
e		Penelitian dan Pengembangan									
	1	Indeks Inovasi Daerah	Skor	67,09	67,09	68,43	69,72	71,01	71,53	72,11	Indikator Tujuan Kota dan Indikator Sasaran Kota dan PD
EE		Pelayanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
	1	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	77,07	80,15	80,42	80,93	81,35	81,71	82,44	Indikator Sasaran Kota
	2	Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP)	Nilai	96	96,05	96,44	96,92	97,21	97,40	97,54	Indikator Sasaran Kota
	3	Persentase Unit Kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	%	20	20	40	40	60	60	80	Indikator Sasaran Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level/ skor	3 level/ 3,290 skor	3 level/ 3,290 skor	3 level/ 3,292 skor	3 level/ 3,295 skor	3 level/ 3,297 skor	3 level/ 3,299 skor	3 level/ 3,300 skor	Indikator Tujuan PD
	5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,33	4,40	4,48	4,51	4,55	4,58	4,60	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase terpenuhinya kebijakan dan prosedur pengawasan sesuai proses bisnis	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi	%	94	94,55	94,75	95	95,2	95,85	96	Indikator Sasaran PD
	8	Indeks Budaya Risiko	level	2	2	2	2	2	2	3	Indikator Sasaran PD
FF		Pelayanan Unsur Kewilayahan									
	1	Kecamatan Taman									
	a	Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	Nilai	4,83	4,84	4,85	4,86	4,87	4,88	4,89	Indikator Tujuan PD
	b	Persentase Jumlah kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	2	Kecamatan Manguharjo									
	a	Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo	Nilai	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,96	4,96	Indikator Tujuan PD
	b	Persentase Jumlah kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	3	Kecamatan Kartoharjo									
	a	Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo	Nilai	4,89	4,9	4,91	4,92	4,93	4,94	4,94	Indikator Tujuan PD
	b	Persentase Jumlah kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GG		Pelayanan Unsur Pemerintahan Umum									
	1	Indeks Kerukunan	Skor	78,04	78,20	84,80	85,20	85,80	86,20	86,80	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Persentase fasilitasi pencegahan konflik ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Pembinaan terhadap Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase orkemas baru yang berbadan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase pencegahan konflik keagamaan, kehidupan sosial dan budaya	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase penanganan konflik sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	8	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	3,43	3,65	3,85	4,10	4,30	4,35	4,4	Indikator Sasaran PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB V
PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Madiun untuk periode 2025-2029 merupakan Tahap I dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045. Kedudukan RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 khususnya pada periode pertama yaitu 2025-2029. RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah, hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selama lima tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program unggulan kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah disertai dengan target kinerja dan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Selanjutnya RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai insterumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama lima tahun kedepan. Setelah berakhirnya RPJMD Kota Madiun pada tahun 2029, maka akan disusun RPJMD Kota Madiun Tahun 2030-2034 yang akan digunakan sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya dimana merupakan tahapan kedua dari implementasi RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045. Pada masa transisi menuju periode pembangunan selanjutnya, RKPD Tahun 2030 akan disusun dan masih mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 karena dalam dokumen RPJMD tersebut untuk target kinerja beserta pagu indikatif telah di lengkapi proyeksi sampai dengan tahun 2030, hal ini bertujuan agar dokumen ini dapat menjadi acuan dalam masa transisi perencanaan pembangunan tahun 2030.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Madiun dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan tahunan Kota Madiun selama lima tahun, mulai tahun 2025 hingga 2029. Hal ini juga mencakup penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk lima tahun mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut, dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029 perlu memuat kebijakan-kebijakan terkait kaidah pelaksanaan yang harus diikuti, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Madiun bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, dunia usaha, akademisi, dan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029 dengan penuh tanggung jawab;
2. RPJMD merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Madiun diwajibkan untuk menjabarkan dan menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD ke dalam dokumen Renstra PD dan Renja PD;
4. Setiap Perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, dan Program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang nantinya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen RPJMD Kota Madiun tahun 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.3 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka pengendalian terhadap capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, maka perlu dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD secara konsisten, transparan, partisipasi dan penuh tanggungjawab dengan memenuhi kaidah-kaidah evaluasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Madiun melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD dengan cara melakukan identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas; dan
2. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD dan apabila adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka akan dilakukan Tindakan perbaikan/penyempurnaan.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara